



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



Audited

**TAHUN
2023**

- * LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
 - * LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
 - * NERACA
 - * LAPORAN OPERASIONAL (LO)
 - * LAPORAN ARUS KAS (LAK)
 - * LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
 - * CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
-



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (c) Neraca, (d) Laporan Operasional (LO), (e) Laporan Arus Kas (LAK), (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Boroko, April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

SIRAJUDIN LASENA

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sesuai tahapan sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi selama satu tahun anggaran pada entitas pelaporan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang dapat digunakan oleh pemakai (*wide range users*) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh suatu pemerintah daerah. LKPD juga merupakan bentuk konkrit atas suatu proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan untuk selanjutnya akan digunakan sebagai dokumen pokok dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023.

LKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Mekanisme penyusunan laporan menggunakan metode konsolidasi laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 yang meliputi seluruh Laporan Keuangan SKPD, termasuk Laporan Keuangan Unit Kerja yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 ini telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah berbasis akrual, dengan unsur laporan keuangan yaitu : **Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).**

Pemerintah daerah telah berupaya menyajikan laporan keuangan ini dengan memperhatikan kesesuaian dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Prinsip penyajian secara penuh (*Full Disclosure*) merupakan suatu kekuatan bagi laporan keuangan agar tidak hanya disusun dan disajikan untuk sekedar memenuhi kewajiban semata, namun harus menyajikan informasi yang memadai guna pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan.

Harapan kami Laporan Keuangan ini dapat memberi manfaat bagi setiap pengguna dalam pengambilan keputusan dan dalam rangka melakukan evaluasi kinerja keuangan sehingga akan lebih meningkatkan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beroko, April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


SIRAJUDIN LASENA

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)	3
Neraca	4
Laporan Operasional (LO)	6
Laporan Arus Kas (LAK).....	8
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	10
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	11
I PENDAHULUAN	11
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	17
II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	
 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	19
A. Kondisi Ekonomi Makro.....	19
B. Kebijakan Fiskal	37
C. Pencapaian Target Kinerja APBD	44
III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	49
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah.....	49
B. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah	52
C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah.....	59
D. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target Yang telah ditetapkan.....	59
IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN	62
V PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN	130
A. Penjelasan Akun-akun Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	130
B. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	158
C. Penjelasan Akun-akun Neraca.....	160

	D.	Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO).....	212
	E.	Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)	232
	F.	Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	235
VI		INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA	234
	A.	Informasi Tambahan	234
	B.	Domisili dan Bentuk Hukum	238
	C.	Organisasi Perangkat Daerah..	240
	D.	Urusan Pemerintahan	243
	E.	Ketentuan Perundang-undangan yang melandasi kegiatan Operasional	244
	F.	Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023	245
	G.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah.....	253
	H.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ..	256
VII		PENUTUP	
		LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	
	Lampiran I	Hasil Evaluasi Belanja Wajib Infrastruktur	
	Lampiran II	Penjabaran Program Prioritas Nasional Dalam APBD Tahun 2023.....	
	Lampiran III	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Stunting Tahun 2023	
	Lampiran IV	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Per SKPD.....	
	Lampiran V	Daftar Penerima Hibah Berupa Uang Dan Barang.....	
	Lampiran VI	Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang / Barang.....	
	Lampiran VII	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Dana Desa)	
	Lampiran VII.1	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Per Sumber Dana Tahun 2023	
	Lampiran VII.2	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	
	Lampiran VII.3	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Dana Desa)	

Lampiran VIII	Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023.....
Lampiran IX	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Dana Bos Tahun 2023
Lampiran IX.1	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Dana BOP PAUD Tahun 2023
Lampiran IX.2	Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023
Lampiran IX.3	Rekapitulasi Belanja Hibah BOSP Tahun 2023.....
Lampiran X	Daftar Potensi Tagihan Retribusi.....
Lampiran XI	Rincian Piutang Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Lampiran XI.1	Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang
Lampiran XII	Daftar Persediaan
Lampiran XIII.1	Daftar Aset Tetap - Tanah
Lampiran XIII.2	Daftar Aset Tetap - Peralatan Dan Mesin
Lampiran XIII.3	Daftar Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Lampiran XIII.4	Daftar Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran XIII.5	Daftar Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Lampiran XIII.6	Daftar Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan.....
Lampiran XIII.7a	Daftar Aset Tak Berwujud dan Amortisasi
Lampiran XIII.7b	Daftar Aset Tak Berwujud.....
Lampiran XIII.8	Daftar Aset Rusak Berat/Hilang.....
Lampiran XIII.9	Daftar Barang Ekstrakomptabel
Lampiran XIV	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XV	Penjualan Dan Penghapusan Aset Kendaraan Bermotor Tahun 2023.....
Lampiran XV.1	Penjualan Dan Penghapusan Aset Selain Kendaraan Bermotor (SCRAP) Tahun 2023.....

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2023	35
Gambar 2.2	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2023	35
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 - 2023	36
Gambar 2.4	PDRB Perkapita Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 - 2023	37
Gambar 3.1	Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023	51
Gambar 3.2	Perbandingan Komposisi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023	52
Gambar 3.3	Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	53
Gambar 3.4	Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Daerah TA 2023	57
Gambar 3.5	Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	58
Gambar 3.6	Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Operasi Daerah TA 2023	59
Gambar 5.1	Perbandingan Realisasi Pendapatan - LRA 2023	131
Gambar 6.1	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2023	238



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

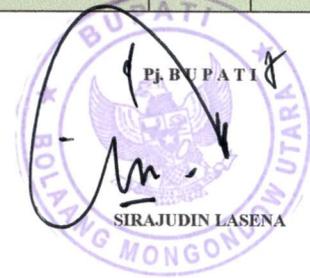
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
PENDAPATAN - LRA	V.A.1	627.006.370.615,00	622.648.112.139,84	99,30	676.157.375.981,09
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	V.A.1.1	13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	117,84	21.962.093.623,09
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	V.A.1.1.1	5.422.500.000,00	5.947.174.351,83	109,68	5.864.133.632,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	V.A.1.1.2	1.279.250.000,00	1.386.108.412,00	108,35	1.488.351.309,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	V.A.1.1.3	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	100,00	717.084.719,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	V.A.1.1.4	6.157.869.587,00	8.009.969.314,01	130,08	13.892.523.962,34
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	V.A.1.2	602.193.892.514,00	592.765.296.792,00	98,43	654.195.282.358,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	V.A.1.2.1	498.445.588.965,00	488.240.522.436,00	97,95	556.416.366.492,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	V.A.1.2.1.1	3.328.878.000,00	4.168.517.110,00	125,22	8.917.271.096,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	V.A.1.2.1.2	10.174.967.965,00	10.295.913.092,00	101,19	22.011.740.070,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	V.A.1.2.1.3	364.237.001.000,00	365.750.838.000,00	100,42	348.218.889.034,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	V.A.1.2.1.4	120.704.742.000,00	108.025.254.234,00	89,50	177.268.466.292,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA	V.A.1.2.2	84.816.754.000,00	84.816.754.000,00	100,00	77.755.122.000,00
Dana Insentif Daerah - LRA	V.A.1.2.2.1	5.890.177.000,00	5.890.177.000,00	100,00	3.281.264.000,00
Dana Desa - LRA	V.A.1.2.2.2	78.926.577.000,00	78.926.577.000,00	100,00	74.473.858.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	V.A.1.2.3	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00	104,10	20.023.793.866,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	V.A.1.2.3	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00	104,10	20.023.793.866,00
Bantuan Keuangan - LRA	V.A.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	V.A.1.3	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123,75	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	V.A.1.3	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123,75	0,00
BELANJA	V.A.2	558.803.136.156,10	518.761.078.147,00	92,83	540.065.347.680,65
BELANJA OPERASI	V.A.2.1	443.367.154.230,10	412.089.997.916,00	92,95	385.607.365.398,20
Belanja Pegawai	V.A.2.1.1	236.412.477.623,00	220.054.148.469,00	93,08	213.501.889.839,00
Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.1.2	189.518.505.326,10	175.366.868.266,00	92,53	161.691.063.199,20
Belanja Subsidi	V.A.2.1.3	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah	V.A.2.1.4	13.626.671.281,00	12.991.445.181,00	95,34	6.091.660.528,00
Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.1.5	3.739.500.000,00	3.607.536.000,00	96,47	4.322.751.832,00
BELANJA MODAL	V.A.2.2	114.491.312.160,00	106.508.493.131,00	93,03	153.663.525.497,45
Belanja Modal Tanah	V.A.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.2.2	17.995.897.581,00	14.970.075.158,00	83,19	42.133.717.363,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.2.3	44.140.202.973,00	40.198.872.110,00	91,07	46.686.878.023,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.2.4	48.936.550.096,00	48.314.091.184,00	98,73	60.424.763.037,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.2.5	3.418.661.510,00	3.025.454.679,00	88,50	4.119.256.074,00
Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.2.6	0,00	0,00	0,00	298.911.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	V.A.2.3	944.669.766,00	162.587.100,00	17,21	794.456.785,00
Belanja Tak Terduga	V.A.2.3	944.669.766,00	162.587.100,00	17,21	794.456.785,00
TRANSFER	V.A.3	117.364.030.791,00	116.906.482.370,00	99,61	111.687.325.795,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	V.A.3	928.537.091,00	470.988.670,00	50,72	722.022.195,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	V.A.3	507.412.091,00	379.942.659,00	74,88	722.022.195,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	V.A.3	421.125.000,00	91.046.011,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	V.A.3	116.435.493.700,00	116.435.493.700,00	100,00	110.965.303.600,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.3	116.435.493.700,00	116.435.493.700,00	100,00	110.965.303.600,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(49.160.796.332,10)	(13.019.448.377,16)	26,48	24.404.702.505,44

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
PEMBIAYAAN	V.A.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	V.A.4	49.160.796.332,10	47.998.387.005,10	97,64	24.756.093.826,66
Penggunaan SiLPA	V.A.4	49.160.796.332,10	49.160.796.332,10	100,00	24.738.612.917,66
Koreksi SiLPA	V.A.4	0,00	(1.162.409.327,00)	0,00	17.480.909,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	V.A.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Pemerintah Daerah	V.A.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		49.160.796.332,10	47.998.387.005,10	97,64	24.756.093.826,66
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	34.978.938.627,94	0,00	49.160.796.332,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B.1	49.160.796.332,10	24.738.612.917,66
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		47.998.387.005,10	24.756.093.826,66
Sub Total		1.162.409.327,00	(17.480.909,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	V.B.2	34.978.938.627,94	49.160.796.332,10
Sub Total		36.141.347.954,94	49.143.315.423,10
Koreksi SiLPA		(1.162.409.327,00)	17.480.909,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		34.978.938.627,94	49.160.796.332,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pj. BUPATI
SIRAJUDIN LASENA



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

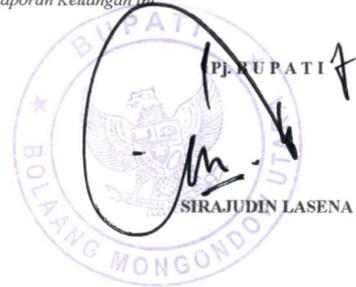
(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
ASET	V.C.1		
ASET LANCAR	V.C.1.1		
Kas di Kas Daerah	V.C.1.1.1	32.780.463.006,98	49.076.114.765,66
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.1.2	57.616.418,52	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.1.3	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	V.C.1.1.4	149.195.308,44	50.348.235,44
Kas Dana BOSP	V.C.1.1.5	107.620.127,00	34.333.331,00
Kas Dana BOK Puskesmas	V.C.1.1.6	1.884.043.767,00	0,00
Kas Lainnya	V.C.1.1.7	1.028.609.006,00	0,00
Setara Kas		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	V.C.1.1.8	1.189.266.999,00	1.613.551.407,00
Piutang Retribusi Daerah	V.C.1.1.9	42.180.000,00	46.546.000,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.C.1.1.11	261.975.843,63	495.838.181,91
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.C.1.1.12	9.421.120.444,36	9.390.994.514,00
Penyisihan Piutang	V.C.1.1.13	(349.449.905,40)	(785.006.898,70)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	V.C.1.1.14	0,00	93.899.650,00
Beban Dibayar Dimuka	V.C.1.1.15	218.136.824,65	181.117.610,96
Piutang Lainnya	V.C.1.1.16	10.000.000,00	0,00
Persediaan	V.C.1.1.17	8.623.367.944,68	11.149.848.925,96
Jumlah Aset Lancar		55.424.145.784,86	71.347.585.723,23
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.C.1.2		
Investasi Permanen	V.C.1.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.1.2	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
Jumlah Investasi Permanen		6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		6.023.400.000,00	6.023.400.000,00
ASET TETAP	V.C.1.3		
Tanah	V.C.1.3.1	58.590.349.096,00	58.214.598.662,00
Peralatan dan Mesin	V.C.1.3.2	354.068.538.091,71	359.300.911.087,55
Gedung dan Bangunan	V.C.1.3.3	656.079.266.930,05	584.961.231.011,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.C.1.3.4	1.150.645.490.895,52	1.082.618.843.069,52
Aset Tetap Lainnya	V.C.1.3.5	47.509.914.976,09	46.602.234.612,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	V.C.1.3.6	6.224.901.577,00	63.619.444.625,02
Akumulasi Penyusutan	V.C.1.3.7	(1.011.625.955.014,47)	(907.969.043.651,95)
Jumlah Aset Tetap		1.261.492.506.551,90	1.287.348.219.415,41
ASET LAINNYA	V.C.1.4		
Tuntutan Ganti Rugi		2.825.298.780,43	2.731.399.130,79
Aset Tak Berwujud		2.248.083.854,83	1.396.891.344,00
Aset Lain-Lain		5.917.537.898,74	6.808.881.985,95
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)		2.893.739.000,00	2.466.639.752,00
Jumlah Aset Lainnya		13.884.659.534,00	13.403.812.212,74
JUMLAH ASET		1.336.824.711.870,76	1.378.123.017.351,38
KEWAJIBAN	V.C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	V.C.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.C.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.2.1.2	12.465.605,48	2.079.500,00
Utang Belanja	V.C.2.1.3	2.676.514.745,45	3.457.780,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.C.2.1.4	0,00	9.013.830.521,60
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.688.980.350,93	9.019.367.801,60

18

Uraian	Ref	2023	2022
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.688.980.350,93	9.019.367.801,60
EKUITAS	V.C.3		
Ekuitas		1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
JUMLAH EKUITAS		1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.336.824.711.870,76	1.378.123.017.351,38

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Audited

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022	kenaikan/ (Penurunan)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	V.D				
PENDAPATAN - LO	V.D.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	V.D.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	V.D.1.1.1	6.088.644.821,83	5.780.488.329,75	308.156.492,08	5,33
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	V.D.1.1.2	1.373.342.412,00	1.499.377.309,00	(126.034.897,00)	(8,41)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	V.D.1.1.3	1.062.169.111,00	0,00	1.062.169.111,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	V.D.1.1.4	6.579.900.339,22	12.620.551.744,25	(6.040.651.405,03)	(47,86)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		15.104.056.684,05	19.900.417.383,00	(4.796.360.698,95)	(24,10)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	V.D.1.2				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO	V.D.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.2.1.1	3.856.808.600,00	9.836.159.605,00	(5.979.351.005,00)	(60,79)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.2.1.2	11.034.720.850,00	23.559.491.313,00	(12.524.770.463,00)	(53,16)
Dana Alokasi Umum	V.D.1.2.1.3	365.750.838.000,00	348.218.889.034,00	17.531.948.966,00	5,035
Dana Alokasi Khusus	V.D.1.2.1.4	108.025.254.234,00	177.268.466.292,00	(69.243.212.058,00)	(39,06)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		488.667.621.684,00	558.883.006.244,00	(70.215.384.560,00)	(12,56)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO	V.D.1.2.2				
Dana Insentif Daerah - LO		5.890.177.000,00	3.281.264.000,00	2.608.913.000,00	79,51
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO		5.890.177.000,00	3.281.264.000,00	2.608.913.000,00	79,51
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LO	V.D.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		19.074.358.389,36	18.163.677.275,00	910.681.114,36	5,01
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO		19.074.358.389,36	18.163.677.275,00	910.681.114,36	5,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	V.D.1.3				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	V.D.1.3.1	2.961.666.667,00	1.303.436.414,00	1.658.230.253,00	127,22
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya LO	V.D.1.3.2	641.346.321,00	984.945.965,00	(343.599.644,00)	100,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	V.D.1.3.2	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	V.D.1.3.3	1.028.584.006,00	0,00	1.028.584.006,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO		13.195.011.659,00	0,00	13.195.011.659,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO		17.851.608.653,00	2.288.382.379,00	15.563.226.274,00	680,10
JUMLAH PENDAPATAN		546.587.822.410,41	602.516.747.281,00	(55.928.924.870,59)	(9,28)
BEBAN	V.D.2				
Beban Pegawai - LO	V.D.2.1	220.050.690.689,00	213.505.347.619,00	6.545.343.070,00	3,07
Beban Persediaan	V.D.2.2	33.339.128.581,48	30.370.353.674,76	2.968.774.906,72	9,78
Beban Jasa	V.D.2.3	85.935.375.326,31	80.358.609.120,95	5.576.766.205,36	6,94
Beban Pemeliharaan	V.D.2.4	8.866.471.453,00	7.648.288.889,00	1.218.182.564,00	15,93
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.5	49.232.239.666,00	44.531.411.589,00	4.700.828.077,00	10,56
Beban Subsidi	V.D.2.6	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
Beban Hibah	V.D.2.7	13.286.162.856,00	6.193.705.528,00	7.092.457.328,00	114,51
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.8	3.936.544.495,00	4.321.011.904,00	(384.467.409,00)	(8,90)

AA

Uraian	Ref	2023	2022	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Penyusutan	V.D.2.9	127.279.820.457,24	111.898.778.303,50	15.381.042.153,74	13,75
Beban Amortisasi	V.D.2.10	549.591.529,17	534.724.333,33	14.867.195,84	2,78
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.11	130.305.227,30	74.948.998,30	55.356.229,00	73,86
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	V.D.2.12.1	379.942.659,00	722.022.195,00	(342.079.536,00)	(47,38)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	V.D.2.12.2	91.046.011,00	0,00	91.046.011,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.D.2.12.3	37.508.916.700,00	36.491.445.600,00	1.017.471.100,00	2,79
Beban Ekstrakomptabel	V.D.2.13	598.281.854,00	1.052.786.496,00	(454.504.642,00)	(43,17)
Jumlah Beban		581.254.517.504,50	537.703.434.250,84	43.551.083.253,66	8,10
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	V.D.3	(34.666.695.094,09)	64.813.313.030,16	(99.480.008.124,25)	(153,49)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	V.D.4				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	V.D.4	722.920.072,00	78.161.300,00	644.758.772,00	824,91
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	V.D.4	107.342,60	0,00	107.342,60	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		723.027.414,60	78.161.300,00	644.866.114,60	825,05
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(33.943.667.679,49)	64.891.474.330,16	(98.835.142.009,65)	(152,31)
POS LUAR BIASA	V.D.5				
Beban Luar Biasa		(162.587.100,00)	(794.456.785,00)	631.869.685,00	(79,53)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(162.587.100,00)	(794.456.785,00)	(746.216.785,00)	93,93
SURPLUS/DEFISIT-LO	V.D.6	(34.106.254.779,49)	64.007.017.545,16	(98.203.272.324,65)	(153,21)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

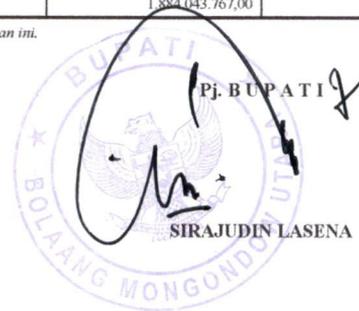
(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.E.1		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Pajak Daerah		5.947.174.351,83	5.864.133.632,75
Penerimaan Retribusi Daerah		1.386.108.412,00	1.488.351.309,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1.062.169.111,00	717.084.719,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		7.287.049.242,01	13.814.362.662,34
Penerimaan Dana Perimbangan		488.240.522.436,00	556.416.366.492,00
Penerimaan DID		5.890.177.000,00	3.281.264.000,00
Penerimaan Dana Desa		78.926.577.000,00	74.473.858.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		19.708.020.356,00	20.023.793.866,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai Ketentuan Perundang undangan		13.477.394.159,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		621.925.192.067,84	676.079.214.681,09
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Pembayaran Pegawai		220.054.148.469,00	213.501.889.839,00
Pembayaran Barang		175.366.868.266,00	161.691.063.199,20
Pembayaran Subsidi		70.000.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		12.991.445.181,00	6.091.660.528,00
Pembayaran Bantuan Sosial		3.607.536.000,00	4.322.751.832,00
Pembayaran Tak Terduga		162.587.100,00	794.456.785,00
Transfer Bagi Hasil		470.988.670,00	722.022.195,00
Transfer Bantuan Keuangan		116.435.493.700,00	110.965.303.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas		529.159.067.386,00	498.089.147.978,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		92.766.124.681,84	177.990.066.702,89
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.E.2		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Peralatan Kantor Yang Tidak Terpakai		722.920.072,00	78.161.300,00
Jumlah Masuk Kas		722.920.072,00	78.161.300,00
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Perolehan Peralatan dan Mesin		14.970.075.158,00	42.133.717.363,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		40.198.872.110,00	46.686.878.023,45
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		48.314.091.184,00	60.424.763.037,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.025.454.679,00	4.418.167.074,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		106.508.493.131,00	153.663.525.497,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(105.785.573.059,00)	(153.585.364.197,45)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	V.E.3		
<i>Arus Keluar Kas</i>			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	0,00
Arus Kas dari aktivitas Transitoris	V.E.4		
<i>Arus Masuk Kas</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.085.535.883,00	38.276.108.431,00
Saldo Sisa UP			
Saldo Sisa Kas Bendahara Penerimaan			
Sisa Kas di Bendahara BOS 20XX			
Saldo Kas Dana Kapitasi / Non Kapitasi			
Jumlah Arus Masuk Kas		34.085.535.883,00	38.276.108.431,00

KA

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.085.535.883,00	38.278.495.954,00
Saldo Sisa UP			
Saldo Sisa Kas Bendahara Penerimaan			
Saldo Kas di Bendahara BOS			
Saldo Kas Dana Kapitasi / Non Kapitasi			
Koreksi SILPA			
Jumlah Arus Keluar Kas		34.085.535.883,00	38.278.495.954,00
Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris		0,00	(2.387.523,00)
<i>Kenaikan (Penurunan Kas)</i>	V.E.5	(13.019.448.377,16)	24.402.314.982,44
Saldo Awal Kas		49.160.796.332,10	24.741.000.440,66
Koreksi SILPA		(1.162.409.327,00)	17.480.909,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		1.028.609.006,00	0,00
Saldo Akhir Kas	V.E.6	36.007.547.633,94	49.160.796.332,10
Saldo Akhir Kas Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		32.780.463.006,98	49.076.114.765,66
Kas di Bendahara Penerimaan		57.616.418,52	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		149.195.308,44	50.348.235,44
Kas Lainnya		1.028.609.006,00	0,00
Kas Dana BOSP		107.620.127,00	34.333.331,00
Kas Dana BOK Puskesmas		1.884.043.767,00	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
EKUITAS AWAL	V.F.	1.369.103.649.549,78	1.316.410.947.123,22
SURPLUS/DEFISIT-LO	V.F.	(34.106.254.779,49)	64.097.017.545,16
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KOREKSI KESALAHAN MENDASAR :	V.F.		
Koreksi Ekuitas		(861.663.250,46)	(11.404.315.118,60)
EKUITAS AKHIR	V.F.	1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pt. BUPATI

SIRAJUDIN LASENA



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengelolaan keuangan daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi;
2. Laporan Keuangan Perangkat Daerah disusun dan disajikan oleh kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan Operasional;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan pokok tersebut diatas, laporan keuangan ini juga dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja pemerintah daerah yang menyajikan pencapaian kinerja pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.



A. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 214, salah satunya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna untuk membantu dalam upaya pengambilan kebijakan dan keputusan entitas. Pentingnya mengungkapkan semua informasi bertujuan agar menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian akan memperjelas bahwa laporan keuangan yang disajikan bukan hanya untuk memenuhi tuntutan atas peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus memenuhi pengungkapan yang akan memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk membaca dan memahami setiap informasi.

Salah satu tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dalam konsep pedoman kebijakan *governance* dinyatakan bahwa transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dan penyediaan informasi menjadi unsur yang penting dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah memaksimalkan pengungkapan berbagai informasi dalam laporan keuangan secara penuh sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;



5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:



1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang- Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran III dan IV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 128);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 135);



19. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 21).

C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari PPKD atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Perangkat Daerah. LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Perangkat Daerah dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



5. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Pada Neraca Perangkat Daerah disajikan mengenai Aset Lancar, Aset tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama satu tahun anggaran.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

- A. Kondisi Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Fiskal
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah
- B. Ikhtisar Pencapaian Target Belanja Daerah
- C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah
- D. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

- A. Entitas Laporan
- B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- D. Komponen Laporan Keuangan



- E. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- C. Penjelasan Akun-Akun Neraca
- D. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
- E. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
- F. Pendapatan Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB VI INFORMASI-INFORMASI PENTING LAINNYA

- A. Informasi Tambahan
- B. Domisili Dan Bentuk Hukum
- C. Organisasi Perangkat Daerah
- D. Urusan Pemerintahan
- E. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional
- F. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023
- G. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah
- H. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

BAB VII PENUTUP

Lampiran – lampiran



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN FISKAL,
DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
DAN TARGET KINERJA APBD

A. Kondisi Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah kabupaten dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat tertuang pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan RPJMD dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan ekonomi yang dibangun pada Tahun 2023.

1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.



- b) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (1) meningkatnya pemerataan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia Jawa-luar, Jawa; (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (3) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada 2020-2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan.
- c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) bertalenta.
- d) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
Revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
- e) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan



infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta pelaksanaan transformasi digital.

- LKPD
2023
- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah “Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik” dengan 5 (lima) Misi yakni : Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara; Penguatan ekonomi yang bertumbuh pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa; Pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas; Pembangunan daerah yang berkelanjutan; dan Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah.

Adapun kebijakan pembangunan per tahun adalah sebagai berikut :

- a) Tahun 2022 : Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur;
- b) Tahun 2023 : Meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;



- c) Tahun 2024 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan pemilihan umum;
- d) Tahun 2025 : Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia; dan
- e) Tahun 2026 : Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.

3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 menetapkan Visi “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing” dengan 4 (empat) Misi yakni : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya; Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good and Clean Government*); Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Adapun arah kebijakan yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan dan menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, SDM pendidik, dan pendidikan masyarakat:
Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan melalui pendidikan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sendiri sampai pada tahun terakhir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal, namun pada area pendidikan wajib 12 tahun telah menunjukkan progress yang relatif signifikan.
- b) Meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas: Pada urusan kesehatan beberapa permasalahan yang masih perlu diperhatikan seperti halnya pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu dijangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya daerah perdesaan. Tambahan fasilitas Kesehatan, peningkatan kualitas layanan dan standarisasi infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit serta akses masyarakat terhadap lingkungan sehat masih penting untuk menjadi perhatian.
- c) Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian stimulus dan keterampilan.
- d) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- e) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- f) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;
- g) Menggerakkan sarana dan sumberdaya yang ada dengan seoptimal mungkin serta mengefektifkan promosi dengan menjalin kerjasama nyata dengan pelaku wisata;
- h) Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar; dan
- i) Fasilitasi kerjasama investasi dan optimalisasi sarana penunjang investasi.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yaitu:

- Tingkat Kemiskinan sebesar 7,90%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,48%;
- Gini Ratio sebesar 0,380;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,97;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,52%;
- Tingkat Inflasi sebesar 3,4 % (sesuai angka inflasi Kota Kotamobagu); dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 2,982 triliun.

Adapun perkembangan makro ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2023 serta perbandingan dengan perkembangan makro ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional dapat dilihat pada uraian berikut:

a) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Persentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Kab/Kota (%)	8,03	7,31	7,90	Naik 0,59%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	6,53	6,01	6,55	Turun 0,54%
3	Provinsi (%)	7,77	7,28	7,38	Naik 0,1%
4	Nasional (%)	7,89	9,54	9,36	Turun 0,18%
5	Peringkat Provinsi	10	9	9	-
6	Peringkat Nasional	174	160	193*	Turun 33 Poin

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 sebesar 7,90% mengalami kenaikan 0,59% dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 7,31%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 masih di atas angka provinsi, namun berada dibawah angka nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 7,38% sedangkan pada tingkat nasional



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

sebesar 9,36%. Walaupun demikian dalam peringkat provinsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada peringkat 9 dari 15 kabupaten/kota, sedangkan pada tingkat nasional berada di peringkat 193 atau mengalami kenaikan 33 poin dari tahun sebelumnya. Dengan persentase penduduk miskin yang masih tergolong tinggi tersebut maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,18	0,90	0,81	Turun 0,09%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,24	1,15	1,09	Turun 0,06%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional (per Maret 2023)	1,71	1,59	1,53	Turun 0,06%
4	Peringkat Provinsi	7	6	4	Naik 2 poin
5	Peringkat Nasional	186	136	124	Naik 12 poin

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Seiring dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023, tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 0,81 dari angka 0,90 pada tahun 2022. Tingkat kedalaman kemiskinan tahun 2023 tersebut berada diatas tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Demikian juga penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara turun 0,9%, lebih tinggi penurunannya dibanding tingkat provinsi dan nasional masing-masing 0,06% dan 0,06%. Pada tingkat nasional peringkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara turun ke peringkat 124 pada tahun 2023 dari peringkat 136 tahun 2022. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut diatas menggambarkan bahwa perbedaan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat pada garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Tingkat Keparahannya Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,26	0,17	0,14	Naik 0,03 Poin
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara	0,28	0,26	0,26	-
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	0,38	Naik 0,01 Poin
4.	Peringkat Provinsi	7	8	4	Turun 4 Poin
5	Peringkat Nasional	192	115	98	Naik 17 Poin

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Tingkat keparahan kemiskinan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,14 dari angka 0,17 pada tahun 2022. Tingkat keparahan kemiskinan tahun 2023



tersebut berada dibawah tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk termiskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat dengan angka rata-rata pengeluaran kelompok penduduk miskin. LKPD

1) **Tingkat Pengangguran Terbuka** 2023

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan aktif dari total angkatan kerja. Dalam hal ini, "angkatan kerja" mencakup orang-orang yang bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 adalah sebesar 4,48%. Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (%)	5,23	5,1	4,48	Turun 0,62 Poin
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Utara (%)	7,06	6,61	6,1	Turun 0,51 Poin
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54 Poin
4	Peringkat Provinsi	8	10	11	Turun 1 Poin
5	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow utara 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,48%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,1% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang sebesar 6,1% dan sebesar 5,32%. Namun demikian dari sisi penurunan persentase kemiskinan tahun 2023 TPT Kabupaten Bolaang Mongondow Utara relatif lebih lambat yakni 0,62 poin dibandingkan persentase penurunan pengangguran tingkat provinsi dan nasional yakni 0,51 poin dan 0,54 poin.

Berikut ini disajikan angka pengangguran berdasar penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin seperti pada tabel 2.5.



Tabel 2.5
Angka Pengangguran Berdasar Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi	2021	2022	2023	Persentase
1	Tingkat Pendidikan				
	≤SD	562	325	345	18,62%
	SMP	144	182	318	17,16%
	SMA	1050	1032	919	49,60%
	Perguruan Tinggi	249	452	271	14,62%
	Jumlah	2005	1991	1853	
2	Jenis Kelamin				
	Laki-laki	1201	1184	932	50,30%
	Perempuan	804	807	921	49,70%
	Jumlah	2005	1991	1853	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 didominasi oleh tingkat Pendidikan SMA 49,60%, kemudian dilanjut dengan tingkat pendidikan SD kebawah sebesar 18,62 %, tingkat SMP sebesar 17,16% dan angka perguruan tinggi menempati posisi dengan persentase terendah yaitu 14,62%,. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menganggur lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu laki-laki sebesar 50,30 % dan perempuan sebesar 49,70%.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- (a) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendorong pelaksanaan program padat karya pada melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun ADD; dan
- (b) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga telah melaksanakan upaya dalam rangka menurunkan angka pengangguran berupa membuka seluas-luasnya peluang investasi dengan memberikan berbagai kemudahan berupa insentif non fiskal bagi investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:

- (a) Masih terbatasnya lapangan kerja untuk dapat menampung pencari kerja;
- (b) Adanya pandemi yang berlangsung sejak tahun 2020 mengakibatkan kehilangan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat yang bekerja diluar daerah dan pada sektor yang terdampak;
- (c) Masih kurangnya tingkat keterampilan tenaga kerja;



- (d) Masih kurangnya minat Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
(e) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki Balai Latihan Kerja.

LKPD
2023

b) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi utara realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dijelaskan tabel 2.6.

Tabel 2.6
***Gini Ratio* Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Tingkat Kab Bolaang Mongondow Utara	0,33	0,35	0,38	Naik 0,03 Poin
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Utara	0,36	0,37	0,37	-
3	Tingkat Nasional	0,48	0,38	0,38	-
3	Peringkat Provinsi	2	7	15	Turun 8 poin
4	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a	-

Sumber Dokumen:Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Mengacu pada Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,38 angka ini turun 0,03 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2022 yang sebesar 0,35. Angka tersebut sama dengan *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional pada tahun 2023 yang masing masing 0,37 dan 0,38. *Gini Ratio* yang meningkat menunjukkan distribusi pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum merata.

c) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60);
- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

LKPD
2023

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 adalah sebesar 70,39 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun
1	Kabupaten/Kota	69,72	70,39	70,97	Naik 0,58 Poin
2	Provinsi	74,03	74,52	75,04	Naik 0,52 Poin
3	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62 Poin
4	Peringkat Provinsi	11	11	11	Tetap
5	Peringkat Nasional	327	327	331	Turun 4 Peringkat

Sumber Dokumen : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 adalah sebesar 70,97 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 70,39 poin mengalami kenaikan sebesar 0,58 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta standar hidup berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada saat ini berada pada urutan 11 tingkat Provinsi Sulawesi Utara, dan pada urutan 331 tingkat Nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sesuai tabel 2.8.

Tabel.2.8
IPM Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2021 – 2023

No.	Wilayah Administratif	2021	2022	2023
1	Bolaang Mongondow	68,16	68,95	70,48
2	Minahasa	75,73	76,18	78,48
3	Kepulauan Sangihe	71,07	71,63	73,94
4	Kepulauan Talaud	69,83	70,43	72,22
5	Minahasa Selatan	72,32	72,89	75,25
6	Minahasa Utara	74,11	74,69	76,50
7	Bolaang Mongondow Utara	69,72	70,39	70,97
8	Kepulauan Sitaro	68,05	68,94	70,81
9	Minahasa Tenggara	71,06	71,48	72,97
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,42	65,90	69,17
11	Bolaang Mogondow Timur	66,55	67,21	70,09
12	Manado	79,20	79,66	81,40
13	Bitung	74,20	74,70	76,33



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

No.	Wilayah Administratif	2021	2022	2023
14	Tomohon	76,86	77,44	79.29
15	Kotamobagu	73,47	73,96	76.01
	Sulawesi Utara	73,30	73,81	75.04

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Tabel 2.8 menunjukkan *trend* capaian IPM Provinsi/Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam periode Tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan. Kota Manado menduduki peringkat tertinggi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menduduki peringkat ke 11, naik 2 poin dari tahun 2022 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menduduki peringkat terendah.

Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Indikator	2021	2022	2023
1	Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	72,85	73,15	73,41
2	Pendidikan :			
	a) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,41	8,57	8,58
	b) Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,17	12,34	12,38
3	Pengeluaran Per kapita Per tahun (d disesuaikan)	9,143	9,285	9,652
	Indeks Pembangunan Manusia	69,72	70,39	70,97

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 2.9, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat dari 73,15 tahun pada tahun 2022 menjadi 73,41 pada tahun 2023 dan naik pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,57 tahun pada tahun 2022 menjadi 8,58 tahun pada tahun 2023, berada pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,34 tahun pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,38 tahun pada tahun 2023, berada pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, dan pengeluaran per kapita riil meningkat dari Rp9.285 juta pada tahun 2022 menjadi Rp9.652 juta pada tahun 2023, berada pada peringkat 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Berdasarkan tiga indikator pembentuk IPM, indikator Usia Harapan Hidup yang masih dapat di lihat naik 2 poin dan berada di peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup selama beberapa tahun terakhir terus dilaksanakan dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Disamping itu untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dokter, pemerintah daerah menggunakan jasa dokter spesialis dengan status kontrak kerja walaupun dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Kebijakan terkait dengan penyiapan tenaga dokter untuk kebutuhan kedepan, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



memberikan bantuan studi kepada putra putri daerah yang melanjutkan pada Fakultas Kedokteran;

- 3) Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan proporsi yang memadai sesuai dengan *mandatory spending* urusan Pendidikan;
- 4) Indikator Pengeluaran Per Kapita Per Tahun disesuaikan dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Meningkatnya kembali pengeluaran per kapita pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini tengah menuju kearah yang lebih baik.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam meningkatkan IPM sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pendidikan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong sangat rendah dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang hanya 8,58 tahun pada tahun 2023 atau setara dengan kelas dua SMP. Sampai dengan tahun 2023 jumlah SLTA masih terbatas yakni Sekolah Menengah Atas Negeri terdapat 4 (empat) unit, Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 4 (empat) unit dan Madrasah Aliyah terdapat 4 (empat) unit;
- 2) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki perguruan tinggi sehingga sangat mempengaruhi minat dan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan studi keluar daerah utamanya bagi masyarakat kurang mampu;
- 3) Aspek kesehatan masyarakat masih terkendala dengan minimnya sarana prasarana kesehatan dan keterbatasan tenaga dokter utamanya dokter spesialis. Upaya pemerintah dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2023 belum ditunjang oleh sarana dan tenaga dokter spesialis yang memadai; dan
- 4) Aspek pengeluaran per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masih tergolong rendah yakni pada peringkat ke 11 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain belum produktifnya sektor-sektor yang dapat memberi nilai tambah sektor pertanian mayoritas mata pencaharian masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan pariwisata masih sulit berkembang karena masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.

d) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada



periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 5,52%.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Kabupaten Bolmut			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp miliar)	1.749,60	1.846,11	1.846,11	96.767,70	11.710.397,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,46	5,52	5,52	5,42	5,31
3	Peringkat Provinsi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mengalami perubahan yaitu 5,52%, atau sama dengan tahun 2022.

Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 (empat) kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% dalam satu tahun. (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% dalam satu tahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. (iv) **Hiperinflasi** (*Hyperinflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% dalam satu tahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara hanya diukur di dua kota yakni Kota Manado dan Kota Kotamobagu. Tingkat Inflasi Kota Manado Tahun 2023 adalah sebesar 2,87% dengan kategori ringan sebagaimana sedangkan tingkat inflasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

Kota Kotamobagu 3,4% juga masih dalam kategori ringan sebagaimana dalam tabel 2.11.

Tabel 2.11
Tingkat Inflasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,51 (Kota Kotamobagu)	6,03 (Kota Kotamobagu)	3,4	n.a
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,65 (Kota Manado)	4,00 (Kota Manado)	2,87	n.a
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	n.a
4	Peringkat Provinsi	n.a	1	n.a. (tidak tersedia)	n.a
5	Peringkat Nasional	n.a	2	13	n.a

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 (diolah)

Mengacu pada tingkat inflasi di Kota Kotamobagu Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,4%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,03% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara dengan indikator Kota Manado lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61% tahun 2023.

Selain itu, potensi kenaikan harga komoditas emas perhiasan akibat peningkatan harga emas dunia, serta peningkatan harga rokok yang masih terjadi secara gradual juga menjadi faktor pendorong inflasi.

Upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan tingkat inflasi daerah adalah :

1) Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di Level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya untuk menjembatani tugas dan peran TPI di Level Pusat dan TPID di Daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektifitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.

2) Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa dalam cakupan :

- Penganggaran bantuan sosial penanganan dampak inflasi pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2023, stabilitas harga kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir dan minyak goreng melalui operasi pasar.
- Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pokok;
- Mendorong pembangunan dan pengembangan komoditas bahan pokok;



- (d) Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat;
- (e) Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga Bahan Bakar Minyak, tarif tenaga listrik, harga LPG, Upah minimum, bea balik nama kendaraan bermotor, dan tarif angkutan;
- (f) Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- (g) Melakukan koordinasi yang intensif antara Perangkat Daerah (PD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan Perangkat Daerah di Wilayah lainnya, Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI), Kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pangan pokok.

3) Operasi Pasar

Tim Teknis Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Operasi Pasar dengan tujuan:

- (a) Untuk mengontrol harga bahan pokok di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengadakan Operasi Pasar pada pasar-pasar tradisional yang ada untuk mengetahui harga yang beredar di pasaran, Apakah masih dalam taraf Normal dan apakah ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- (b) Memantau ke pasar-pasar ketersediaan bahan pokok seperti beras, telur, minyak, mentega dan lain-lain guna mengetahui ketersediaan bahan pokok dan untuk mencegah terjadinya penimbunan bahan-bahan pokok sehingga menyebabkan kelangkaan dan berakibat menimbulkan kenaikan harga-harga.

Kendala-kendala yang ditemukan pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian inflasi adalah:

- (a) Letak geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berada di wilayah perbatasan provinsi sangat strategis untuk kelancaran lalu lintas barang dan jasa. Kendala yang dihadapi terkait pengendalian inflasi adalah belum terbangunnya koordinasi antara TPID dengan daerah berbatasan sehingga pengendalian inflasi yang dilakukan oleh masing-masing daerah hanya pada skala lokal; dan
- (b) Pemantauan inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih terbatas pada pemantauan perkembangan harga-harga, belum sampai pada perhitungan inflasi yang dilakukan secara berkala masih sulit memprediksi waktu-waktu potensi untuk terjadinya inflasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

e) **Struktur Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Berikut ini besaran PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.218.340,00	1.335.040,00	1.335.040,00
2	Pertambangan dan Penggalian	320.690,00	346.420,00	346.420,00
3	Industri Pengolahan	89.690,00	99.020,00	99.020,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.190,00	1.290,00	1.290,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.000,00	7.310,00	7.310,00
6	Konstruksi	401.310,00	441.170,00	441.170,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	317.370,00	354.240,00	354.240,00
8	Transportasi dan Pergudangan	34.950,00	39.410,00	39.410,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.200,00	7.780,00	7.780,00
10	Informasi dan Komunikasi	15.050,00	15.850,00	15.850,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.530,00	26.070,00	26.070,00
12	<i>Real Estate</i>	82.400,00	88.650,00	88.650,00
13	Jasa Perusahaan	350	380,00	380,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	88.460,00	93.420,00	93.420,00
15	Jasa Pendidikan	65.530,00	6.931,00	6.931,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	31.190,00	3.351,00	3.351,00
17	Jasa lainnya	21.620,00	23.370,00	23.370,00
	Produk Domestik Regional Bruto (juta)	2.727.870,00	2.889.702,00	2.889.702,00
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas (juta)	2.727.870,00	2.889.702,00	2.889.702,00
	<i>PDRB Provinsi (miliar)</i>	142.615,02	157.028,36	157.028,36
	<i>PDRB Nasional (triliun)</i>	16.976.690,80	19.588.445,60	19.588.445,60
	Peringkat Provinsi	12	12	12
	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a

** Angka Sangat Sementara / *Very Preliminary Figures*

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023; BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “primadona” perekonomian wilayah. Pemusatan pengembangan lapangan usaha akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu



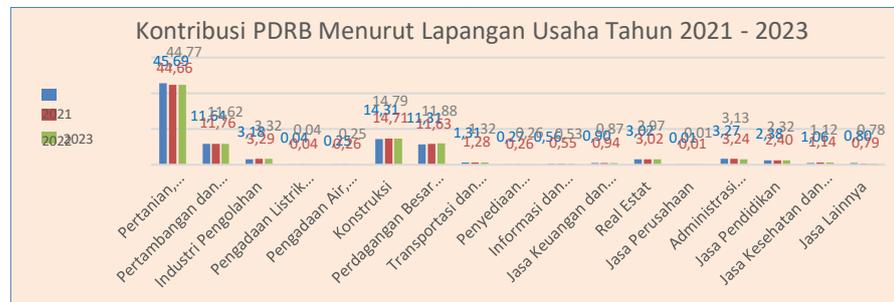
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha yang berpotensi menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru pertumbuhan perekonomian.

Kecenderungan seperti tersebut diatas mulai terlihat pada struktur PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2021 lapangan usaha yang mendominasi pembentukan PDRB adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 45,61%. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah lapangan usaha konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Seiring berjalannya waktu, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mulai menurun, sampai akhirnya berada pada posisi 44,77% pada tahun 2023. Penurunan ini diimbangi dengan peningkatan beberapa lapangan usaha lain, antara lain konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Perubahan pola distribusi ini antara lain disebabkan karena peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur jalan, pasar, terminal yang mendorong beberapa lapangan usaha yang terkait terlebih khusus lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar 2.1 sedangkan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.1

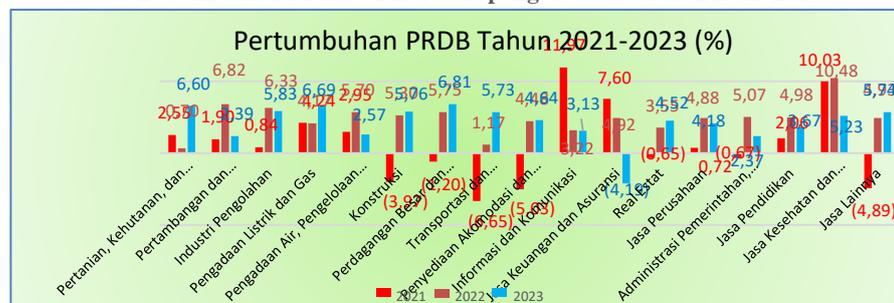
Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Gambar 2.2

Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)



Sektor pertanian yang merupakan lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terbesar dengan porsi yang hampir separuh dari PDRB Bolaang Mongondow Utara terhadap, juga mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2023 mencapai 6,60%, setelah sempat tumbuh melambat pada angka 0,70% tahun 2021. Kategori yang terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan top kontributor pembentukan nilai tambah dalam perekonomian Bolaang Mongondow Utara. Sub kategori perikanan dan tanaman perkebunan merupakan penyumbang nilai tambah kategori pertanian, kehutanan & perikanan. Sedangkan penyumbang terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah lapangan usaha jasa perusahaan dengan kontribusi 0,01%.

Walaupun nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergolong rendah namun jumlah ini terus tumbuh positif melewati tahun kedua masa pasca turbulensi inflasi global dengan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 5,52%. Angka ini masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional tahun 2023 yang masing-masing sebesar 5,42% dan 5,31%. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya kesejahteraan. Namun tanpa pertumbuhan pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih sulit. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran antara dan merupakan syarat perlu bagi tercapainya kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan sulit diukur menggunakan satu indikator tunggal karena kompleksitas dan aspek masalah yang multidimensi. Namun demikian banyak kajian dan literatur yang menempuh jalur alternatif, salah satunya menggunakan pendekatan variabel PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara selama periode waktu 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil walaupun sempat mengalami perlambatan pada angka 2,16% pada tahun 2020. Walaupun begitu, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali mengalami

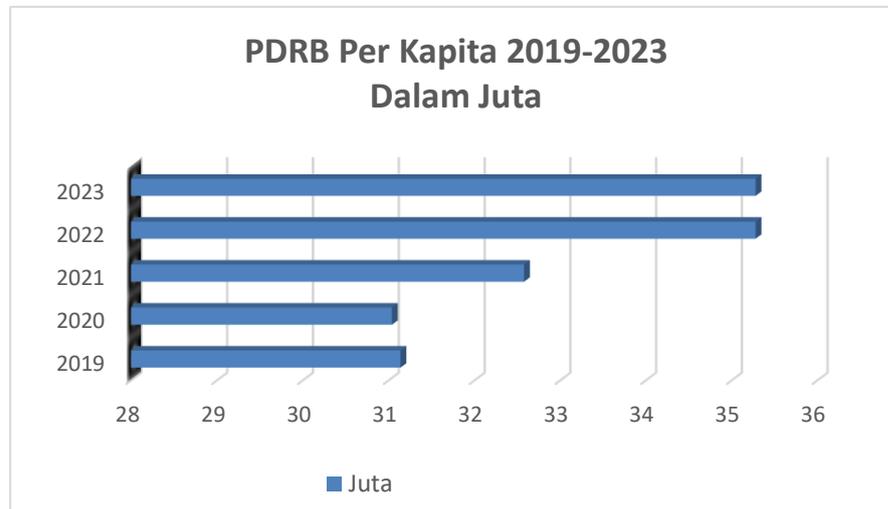


peningkatan pada tahun 2022 sebesar 3,59%. Meskipun angka ini dirasa tinggi namun jika diukur dalam US\$, PDRB per kapita Bolaang Mongondow Utara masih termasuk dalam kategori kabupaten berpendapatan menengah bawah (*lower middle income*).

LKPD

Gambar 2.4 2023

PDRB Per kapita Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023



Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB	31,14	31,14	32,58	32,58	35,28

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam rangka mengatur pengeluaran dan pendapatan dalam anggaran belanja daerah dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi lebih baik. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus melalui pengaturan tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar dengan instrumen pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut dengan istilah politik fiskal atau *fiscal policy*, yaitu suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja daerah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian. Oleh karena anggaran belanja daerah terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran pemerintah yang dapat berupa *government expenditure*, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak dan memperbesar atau memperkecil pengeluaran pemerintah. Instrumen yang penting dalam mempengaruhi kebijakan fiskal daerah adalah optimalisasi pendapatan asli daerah pajak dan melakukan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian dan



keputusan-keputusan investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Hal ini disebabkan karena APBD secara umum menjabarkan rencana kerja dan kebijakan yang akan diambil pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui intervensi kebijakan dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran faktor produksi serta stabilisasi ekonomi makro. Dengan demikian strategi dan pengelolaan APBD menjadi isu yang sangat sentral dan penting dalam perekonomian suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebutuhan pembiayaan anggaran yang semakin besar setiap tahunnya.

Prospek Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pada kisaran 5,3 – 5,9 persen. Oleh karena itu, beberapa asumsi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan anggaran di tingkat nasional maupun provinsi relevan di pertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Faktor-faktor yang di pertimbangkan sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan *gini ratio*.

Perkembangan yang semakin baik mendorong optimisme prospek perbaikan ekonomi di tahun 2023. Perbaikan tersebut ditandai oleh meredanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok sejak triwulan ketiga Tahun 2023. Optimisme perbaikan itu mendorong peningkatan produksi ekonomi sektor riil.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengatur pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Serta mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Baik Undang-Undang pokok dan UU mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, pada dasarnya dihubungkan dalam suatu prinsip dasar yang sering disebut sebagai *money follows function*. Dengan prinsip ini, fungsi yang telah diserahkan ke daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diikuti dengan pendanaan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi dimaksud. Namun, perlu dipahami bahwa ketersediaan pendanaan selalu mempunyai *constraint* (kendala), karena pada dasarnya anggaran selalu terbatas. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur adanya sinergi pendanaan antar-sumber pendapatan dan/atau Pembiayaan Utang Daerah, baik dari PAD, TKD, Pembiayaan Utang Daerah, kerja sama antar-Daerah, dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam rangka penguatan sumber pendanaan program/kegiatan agar memberikan manfaat yang lebih signifikan. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah. Sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan oleh daerah, yaitu melalui pemanfaatan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

sumber di daerah itu sendiri maupun melalui transfer ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Meskipun kewenangan pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah masih sangat terbatas, tetapi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Perbandingan PAD Tahun 2022-2023

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	67.885.000,00	75.000.000,00	38.100.000,00
2	Pajak Restoran	750.000.000,00	759.629.200,00	750.000.000,00	838.871.370,20
3	Pajak Hiburan	2.000.000,00	2.625.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Pajak Reklame	165.000.000,00	201.109.531,00	175.000.000,00	207.926.197,00
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.202.290.365,00	2.423.824.905,00	2.300.000.000,00	2.777.565.014,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	919.793.472,75	750.000.000,00	571.222.097,13
7	PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.200.000.000,00	1.286.902.338,00	1.200.000.000,00	1.298.241.768,00
8	BPHTB	118.675.000,00	202.364.186,00	170.000.000,00	212.747.905,50
9	Retribusi Jasa Umum	5.621.250.000,00	1.401.360.175,00	1.119.250.000,00	1.317.139.510,00
10	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	32.793.000,00	50.000.000,00	20.039.000,00
11	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00	54.198.134,00	110.000.000,00	41.497.402,00
12	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	717.084.719,00	717.084.719,00	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00
13	Hasil Penjualan Aset Daerah	0,00	78.161.300,00	673.955.042,00	722.920.072,00
14	Hasil Pemanfaatan BMD yg tidak dipisahkan	0,00	0,00	20.726.000,00	20.726.000,00
15	Penerimaan Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.728.720.089,00	650.000.000,00	1.005.338.985,52
16	Penerimaan Bunga Deposito	250.000.000,00	84.931.506,00	1.391.330.889,00	1.098.082.185,00
17	TGR	1.300.000.000,00	2.012.912.308,77	3.042.182.963,00	4.141.333.588,40
18	Pendapatan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	85.412.533,00	129.016.805,00	0,00	0,00
19	Denda Keterlambatan	319.603.155,00	311.154.362,25	234.885.102,00	806.074.705,09
20	Denda Pajak	0,00	1.368.465,00	2.324.479,00	3.228.958,00
21	Pendapatan dari Pengembalian	83.135.047,00	117.204.683,00	142.465.112,00	147.651.199,00
22	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan Dana Kapitasi	8.840.063.500,00	9.429.054.443,32	0,00	0,00
24	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
25	Remunerasi	0,00	0,00	0,00	60.863.621,00
Jumlah		23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	13.921.788.698,00	16.397.988.688,84

Sumber LRA Tahun 2023



Berdasarkan tabel 2.13 terlihat bahwa baik anggaran maupun realisasi dari total PAD tahun 2023 menurun jika dibandingkan dengan total PAD tahun anggaran 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 pendapatan Dana Kapitasi dianggarkan di rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. LKPD 2023

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak. Mengingat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri masih sangat terbatas, maka pemerintah melakukan transfer ke daerah untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan fungsi-fungsi yang telah diserahkan ke daerah. Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, dan Dana Desa.

Kebijakan fiskal yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi kondisi Tahun 2023 berupa kebijakan peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber dan penggunaan pembiayaan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a) Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Pendapatan Transfer:
 - 1) Transfer pemerintah pusat:
 - (a) Dana perimbangan
 - (1) Dana Transfer Umum meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum
 - (2) Dana transfer khusus, meliputi DAK fisik dan DAK non fisik.
 - b) Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c) Dana Desa.
 - 2) Transfer antar daerah yaitu pendapatan bagi hasil.
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsi penerimaan daerah terhadap total pendapatan Tahun 2023 adalah sesuai sebagaimana tabel 2.14.



Tabel 2.14
Proporsi Penerimaan Daerah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
	Total Pendapatan	627.006.370.615,00	621.368.080.539,84	99,10
1	Pendapatan Asli Daerah	13.921.788.698,00	16.397.988.688,84	117,78
2	Pendapatan Transfer	602.193.892.514,00	591.492.697.692,00	98,22
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123,75

Sumber: LRA Tahun 2023

Dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dari pemerintah provinsi. Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan ini berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak, retribusi daerah dan bagi hasil pajak pusat namun tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pemungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kegiatan yang dilakukan dalam Intensifikasi diantaranya melakukan *update* data perpajakan dengan melakukan validasi data objek pajak dan subjek pajak dan retribusi daerah dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah;
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- Meningkatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah;
- Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
- Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah potensial.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi,



program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Struktur belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a) Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Subsidi;
 - 4) Belanja Hibah; dan
 - 5) Belanja Bantuan Sosial.
- b) Belanja modal
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan;
 - 4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - 5) belanja Aset Tetap Lainnya.
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil; dan
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Adapun arah kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
- e) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
- f) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- g) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Efisiensi dan Efektivitas Belanja
Ketersediaan dana yang telah dianggarkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara umum dan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- b) Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata dan budaya, infrastruktur, serta pertanian dan perikanan.
- c) Tolak ukur dan target kinerja
Belanja daerah yang direncanakan pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan pemerintah



daerah. Target kinerja yang telah ditetapkan harus terus dilaksanakan dan dievaluasi setiap pencapaiannya;

d) **Optimalisasi belanja langsung**

Belanja langsung merupakan pengejawantahan dari visi dan misi daerah, belanja langsung diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata dan merupakan usulan masyarakat. Perimbangan alokasi belanja langsung setiap tahun anggaran agar lebih memperhatikan kesesuaian strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

e) **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah, baik pada aspek penerimaan maupun aspek pengeluarannya agar dapat dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Media publikasi yang dapat dengan mudah diakses masyarakat harus benar-benar disiapkan sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu tingkat akuntabilitasnya dapat diandalkan untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sebagai pengelola administrasi keuangan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh

Pembiayaan defisit anggaran dapat bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan dan penjualan aset daerah. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo dan membiayai pelaksanaan pekerjaan lanjutan. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau disebut dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Adapun strategi dan langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan untuk pencapaian target pada APBD 2023 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya:
 - a) Melakukan *update* data perpajakan;
 - b) Melakukan validasi data obyek dan subjek pajak dan retribusi daerah; dan
 - c) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
4. Mengingatkan kepatuhan dan kepatutan atas pelaporan kinerja keuangan untuk menghindari adanya penundaan ataupun sanksi administrasi lainnya dari pemerintah;
5. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi; dan
6. Mengoptimalkan penerapan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah potensial.

Secara umum capaian target dan realisasi APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN - LRA	627.006.370.615,00	621.375.513.039,84
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13.921.788.698,00	16.405.421.188,84
Pendapatan Transfer	602.193.892.514,00	591.492.697.692,00
Lain-Lain Perndapatan Daerah yang Sah Lainnya	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00
BELANJA	558.803.136.156,10	518.656.223.047,00
Belanja Operasi	443.367.154.230,10	412.089.997.916,00
Belanja Modal	114.491.312.160,00	106.508.493.131,00
Belanja Tak Terduga	944.669.766,00	57.732.000,00
TRANSFER	117.364.030.791,00	116.906.482.370,00
SURPLUS / (DEFISIT)	68.203.234.458,90	102.719.289.992,84
Penerimaan Pembiayaan	49.160.796.332,10	49.166.131.005,10

Sumber : LRA Tahun 2023 (Diolah)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Dari tabel 2.15 dapat dijelaskan bahwa belanja yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp558.803.136.156,10 dan realisasi sebesar Rp518.656.223.047,00 tidak termasuk belanja transfer. Belanja transfer yang dianggarkan tahun 2023 sebesar Rp117.364.030.791,00 dan terealisasi sebesar Rp116.906.482.370,00 merupakan belanja transfer yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan) dengan total realisasi sebesar **Rp116.906.482.370,00** atau **99,61%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp117.364.030.791,00**.

Sesuai ketentuan Undang-undang, dalam pencapaian target kinerja APBD telah dialokasikan anggaran untuk *mandatory spending* Fungsi Pendidikan, *mandatory spending* Fungsi Kesehatan, *mandatory spending* Infrastruktur, Penjabaran Program Prioritas Nasional dalam APBD 2023 dan Program Penanganan *Stunting*.

1. *Mandatory Spending* untuk Fungsi Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp 148.141.700.291,00** atau **21,91%** dari total anggaran belanja daerah dan realisasinya sebesar **Rp130.585.596.448,00** atau **19,31%** terhadap total anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan		APBD TA 2023	Perubahan APBD 2023	Realisasi 2023
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a	Belanja pada Dinas Pendidikan :	130.475.522.679,00	140.436.505.655,00	123.208.092.663,00
		1) Belanja Operasi	108.373.814.547,00	119.203.426.065,00	104.234.286.066,00
		a. Belanja Pegawai	86.868.518.708,00	96.908.696.390,00	84.420.830.931,00
		b. Belanja Barang Jasa	18.702.169.439,00	16.660.280.441,00	14.696.562.459,00
		c. Belanja Hibah	2.803.126.400,00	5.634.449.234,00	5.116.892.676,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal	22.101.708.132,00	21.233.079.590,00	18.973.806.597,00
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan :	594.668.991,00	711.808.643,00	656.370.676,00
		1) Belanja Operasi:	594.668.991,00	711.808.643,00	656.370.676,00
		a. belanja pegawai	0,00	0,00	0,00
		b. belanja barang jasa	594.668.991,00	711.808.643,00	656.370.676,00
		c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00
		d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal;	0,00	0,00	0,00
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan	2.228.746.892,00	2.228.746.892,00	2.219.517.876,00
		1) Belanja Operasi	2.228.746.892,00	2.305.867.976,00	2.209.591.876,00
		a. belanja pegawai	1.436.428.460,00	1.453.549.999,00	1.368.040.199,00
		b. belanja barang jasa	792.318.432,00	852.317.977,00	841.551.677,00
		c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00
		d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	9.926.000,00
	d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.698.361.232	4.050.018.017,00	3.906.615.233,00
		1) Belanja Operasi	3.680.661.232,00	4.024.789.617,00	3.882.432.233,00
		a. belanja pegawai	1.625.891.644,00	1.507.604.359,00	1.482.335.697,00
		b. belanja barang jasa	2.054.769.588,00	2.467.185.739,00	2.400.096.536,00
		c. belanja hibah	0,00	49.999.519,00	0,00
		d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal	17.700.000,00	25.228.400	24.183.000,00
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang	290.000.000,00	627.500.000,00	595.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

No.	Komponen Perhitungan		APBD TA 2023	Perubahan APBD 2023	Realisasi 2023
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		menunjang kebutuhan Masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain :			
	1)	Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial pada Sekretariat Daerah	190.000.000,00	227.500.000,00	195.000.000,00
	2)	Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		137.287.299.794,00	148.141.700.291,00	130.585.596.448,00
3	Total Belanja Daerah		628.996.263.922,00	676.167.166.947,00	676.167.166.947,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%		21,83	21,91	20,55

2. *Mandatory Spending* untuk Fungsi Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp 139.494.604.119,00,00** atau **27,54%** dari total anggaran belanja daerah dan realisasinya mencapai **Rp127.772.059.697,00** atau **25,23%**. Alokasi anggaran fungsi Kesehatan dapat dilihat pada table 2.17.

Tabel 2.17
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan		APBD TA 2023	Perubahan APBD 2023	Realisasi 2023
			Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	a	Urusan Bidang Kesehatan :	109.087.788.835,00	130.439.197.637,00	119.417.816.987,00
		1) Belanja Operasi	97.396.965.936,00	102.311.096.469,00	94.498.314.019,00
		a. Belanja Pegawai	43.544.311.764,00	43.469.025.767,00	42.987.524.240,00
		b. Belanja Barang Jasa	53.852.654.172,00	58.842.070.702,00	51.510.789.779,00
		c. Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
		d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
		2) Belanja Modal	11.690.822.899,00	28.128.101.168,00	24.919.502.968,00
	b	Belanja pada sub kegiatan diluar urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	8.687.927.617,00	9.055.406.482,00	8.354.242.710,00
		1) Belanja Operasi pada Dinas PPKB, PP dan PA	7.642.935.209,00	8.210.736.906,00	7.575.560.074,00
		a. Belanja Pegawai	2.496.185.704,00	2.486.070.778,00	2.360.018.808,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	5.164.749.505,00	5.724.666.128,00	5.215.541.266,00
		2) Belanja Modal pada Dinas PPKB,PP dan PA	1.044.992.408,00,00	844.669.576,00	778.682.636,00
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)		117.775.716.452,00	139.494.604.119,00	127.772.059.697,00
3	Total Belanja Daerah		628.996.263.922,00	676.167.166.947,00	676.167.166.947,00
4	Gaji ASN		174.593.223.782,00	169.687.235.646,00	169.687.235.646,00
5	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN (3-4)		454.403.040.140,00	506.479.931.301,00	506.479.931.301,00
	Rasio Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN (2:5) x 100%		25,92	27,54	25,23



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

3. *Mandatory Spending* untuk Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp257.826.631.490,00** dengan total realisasi **Rp245.242.299.250,00** atau **95,11%**. Rincian *mandatory spending* infrastruktur dapat dilihat pada Lampiran I.
4. Penjabaran Program Prioritas Nasional dalam APBD Tahun 2023.
Terdapat tujuh program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Program prioritas nasional telah dimasukkan ke dalam beberapa rencana aksi yang termuat dalam APBD 2023. Anggaran dan realisasi untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Nasional disajikan dalam Tabel 2.18. Sedangkan rincian penjabaran program prioritas nasional dalam APBD 2023 dapat dilihat pada **Lampiran II**.

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Program Prioritas Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2.006.553.826,00	1.893.965.205,00	91,70
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	0,00	0,00	0,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10.290.650.292,00	9.237.242.084,00	89,76
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	559.908.890,00	537.688.465,00	96,03
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8.817.537.351,00	8.596.177.765,00	97,49
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	511.882.620,00	451.514.400,00	88,21
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11.621.021.351,00	10.816.426.236,00	93,08

5. Rekapitulasi Program Penanganan *Stunting* Tahun 2023

Pada tahun 2023 program penanganan *stunting* pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan sebesar **Rp34.650.837.995,00** dan realisasi sebesar **Rp31.800.328.376,00** atau **91,77%**. Untuk rekapitulasi anggaran dan realisasi program penanganan *stunting* dapat dilihat pada **Lampiran III**.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

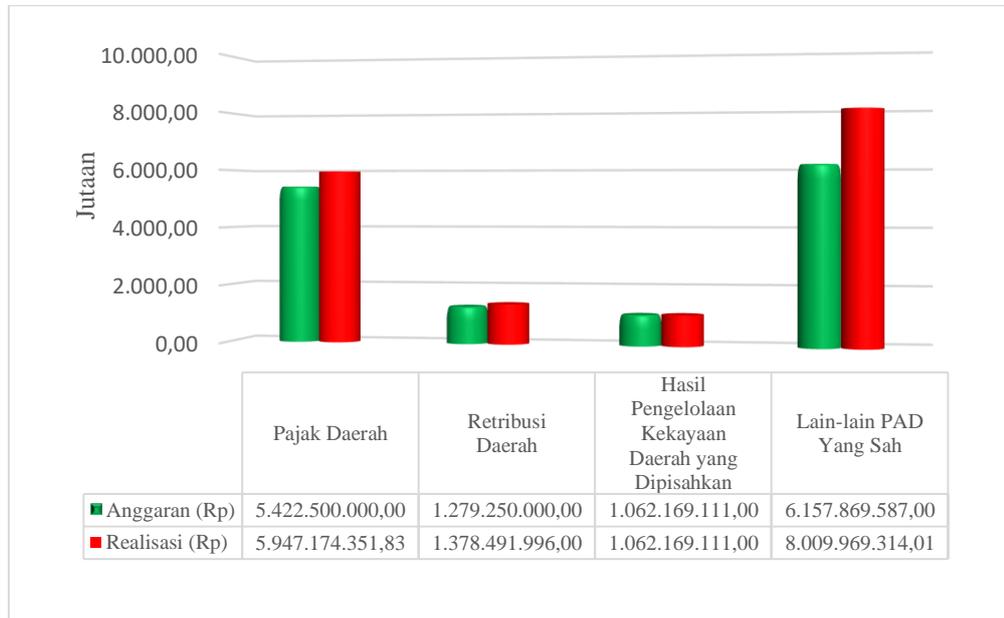
APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara dalam konteks pemerintah daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD 2023 bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Capaian target PAD pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	75.000.000,00	38.100.000,00	50,80
2	Pajak Restoran	750.000.000,00	838.871.370,20	111,85
3	Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4	Pajak Reklame	175.000.000,00	207.926.197,00	118,81
5	Pajak Penerangan Jalan	2.300.000.000,00	2.777.565.014,00	120,76
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	750.000.000,00	571.222.097,13	76,16
7	Pajak Bumi dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.298.241.768,00	108,19
8	BPHTB	170.000.000,00	212.747.905,50	125,15
9	Retribusi Jasa Umum	1.119.250.000,00	1.324.572.010,00	118,34
10	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	20.039.000,00	40,08
11	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	41.497.402,00	37,72
12	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	100,00
13	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	673.955.042,00	722.920.072,00	100,00
14	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.726.000,00	20.726.000,00	100,00
15	Penerimaan Jasa Giro	650.000.000,00	1.005.338.985,52	154,67
16	Penerimaan Bunga Deposito	1.391.330.889,00	1.098.082.185,00	78,92
17	Tuntutan ganti Rugi (TGR)	3.042.182.963,00	3.836.934.530,17	126,12
18	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	234.885.102,00	1.110.473.763,32	472,77
19	Pendapatan Denda Pajak	2.324.479,00	3.228.958,00	138,91
20	Pendapatan dari Pengembalian	142.465.112,00	147.651.199,00	103,64
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perauran Daerah	0,00	3.750.000,00	0,00
22	Remunirasi	0,00	60.863.621,00	0,00
Jumlah		13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	117,84

Sumber: LRA 2023

Gambar 3.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2022



Sumber : LRA 2023

Berdasarkan capaian target kinerja Pendapatan Daerah dari rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digambarkan bahwa secara keseluruhan capaian PAD adalah sebesar 117,84 % atau sebesar Rp16.405.421.188,84 dari total PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.921.788.698,00.

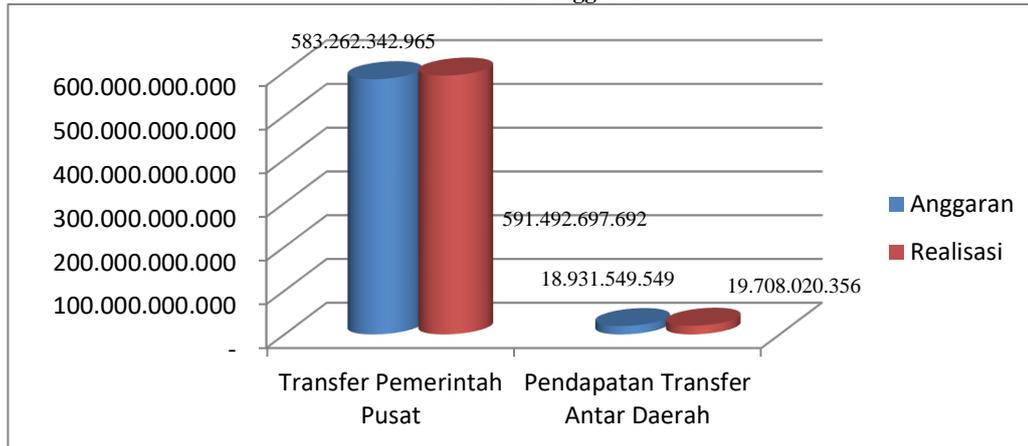
Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. Selanjutnya capaian target kinerja Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat	583.262.342.965,00	571.784.677.336,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00
Jumlah		602.193.892.514,00	591.492.697.692,00

Sumber : LRA 2023

Gambar 3.2
Perbandingan Komposisi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023



Sumber: LRA 2023

Berdasarkan gambar 3.2 Capaian target kinerja Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dari total yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp602.193.892.514,00 dapat direalisasikan melalui transfer ke rekening RKUD sebesar Rp591.492.697.692,00 atau 98,2 %.

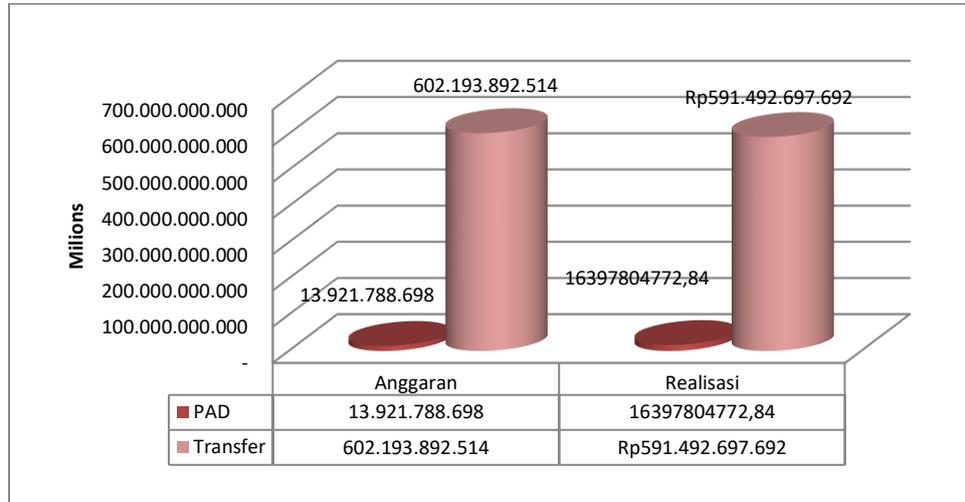
Dengan demikian dapat ditemukan akumulasi pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2023 seperti yang terdapat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per Jenis Pendapatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	627.006.370.615,00	621.375.513.039,84	99,10
PAD	13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	117,79
Pendapatan Pajak Daerah	5.422.500.000,00	5.947.174.351,83	109,68
Hasil Retribusi Daerah	1.279.250.000,00	1.386.108.412,00	107,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	100,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	6.157.869.587,00	8.009.969.314,00	130,08
PENDAPATAN TRANSFER	602.193.892.514,00	591.492.697.692,00	98,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.262.342.965,00	571.784.677.336,00	98,03
Pendapatan Transfer antar Daerah	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00	104,10
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123,75

Sumber: LRA 2023

Gambar 3.3
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023



Sumber : LRA 2023

B. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Terdapat perbedaan pada struktur Belanja Daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan hanya pada klasifikasi belanja daerah. Perbandingan antara struktur belanja daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 3.4



Tabel 3.4
Perbedaan Struktur Belanja Daerah

Perbedaan Struktur Belanja Daerah Dalam APBD	
PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005
<p>Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:</p> <p>a. Belanja Operasi, dirinci atas jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; 3) Belanja Bunga; 4) Belanja Subsidi; 5) Belanja Hibah; dan 6) Belanja Bantuan Sosial. <p>b. Belanja Modal</p> <p>c. Belanja Tidak Terduga</p> <p>d. Belanja Transfer, dirinci atas jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Bagi Hasil; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan 	<p>Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal; d. Bunga; e. Subsidi; f. Hibah; g. Bantuan Sosial; h. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan; dan i. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) sampai dengan (5) klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 bahwa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam



rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Klasifikasi Belanja Operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kompensasi dimaksud diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, Pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila dapat terealisasi dengan baik.

Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD dapat dilakukan secara tepat waktu guna mempercepat realisasi Belanja Daerah. Keterlambatan realisasi Belanja Daerah dapat berdampak pada penumpukan dana daerah yang belum terpakai. Pemerintah daerah secara terus menerus menciptakan Belanja Daerah yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan. Pada dasarnya pengertian efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.



Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya (input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi.

Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*measurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidangnya.

Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

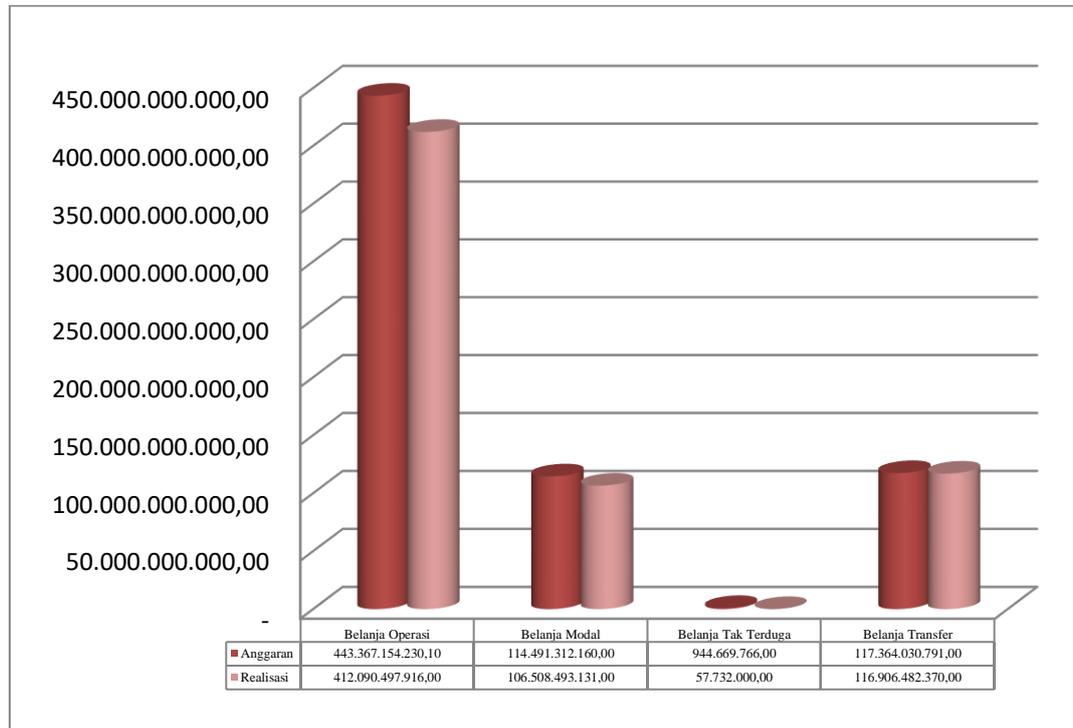
Capaian kinerja Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 93,99 % dari total yang dianggarkan sebesar Rp676.167.166.947,10 atau direalisasikan sebesar Rp635.562.705.417,00. Persentase dari setiap jenis Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	443.367.154.230,10	412.089.997.916,00	92,95
2	Belanja Modal	114.491.312.160,00	106.508.493.131,00	93,03
3	Belanja Tak Terduga	944.669.766,00	57.732.000,00	6,11
4	Belanja Transfer	117.364.030.791,00	116.906.482.370,00	99,61
Jumlah		676.167.166.947,10	635.562.705.417,00	93,99

Sumber : LRA 2023 (Diolah)

Gambar 3.4
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja
Belanja Daerah TA 2023



Sumber : LRA 2023 (Diolah)

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana Kerja SKPD. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi diarahkan padapencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatankualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakanakan meningkat.

2. Belanja Modal

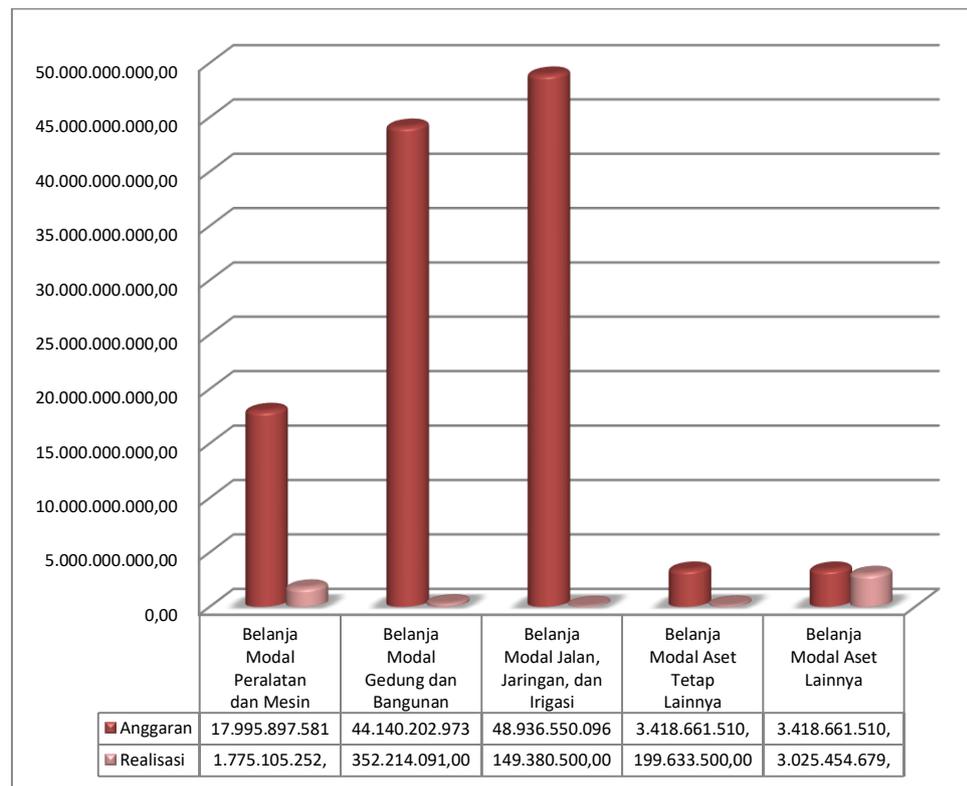
Belanja Modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Belanja Modal pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp114.491.312.160,00 realisasi sebesar Rp106.508.493.131,00 atau 93,03% dengan rincian sesuai pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.995.897.581,00	14.970.075.158,00	83,19
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.140.202.973,00	40.198.872.110,00	91,07
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.936.550.096,00	48.314.091.184,00	98,73
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.418.661.510,00	3.025.454.679,00	88,50
5	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		114.491.312.160,00	106.508.493.131,00	93,03

Sumber : LRA 2023 (Diolah)

Gambar 3.5
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2023



Sumber : LRA 2023 (Diolah)

Berdasarkan tabel 3.6 diperoleh bahwa total Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.491.312.160,00 dan realisasinya mencapai Rp106.508.493.131,00 atau sebesar 93,03 persen dari total anggaran.

Selanjutnya pada tabel 3.6 juga dapat dijelaskan bahwa anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 di dominasi oleh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp48.936.550.096,00 atau sebesar 98,73% dari total Belanja Modal, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah Rp44.140.202.973,00 atau sebesar 91,07%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

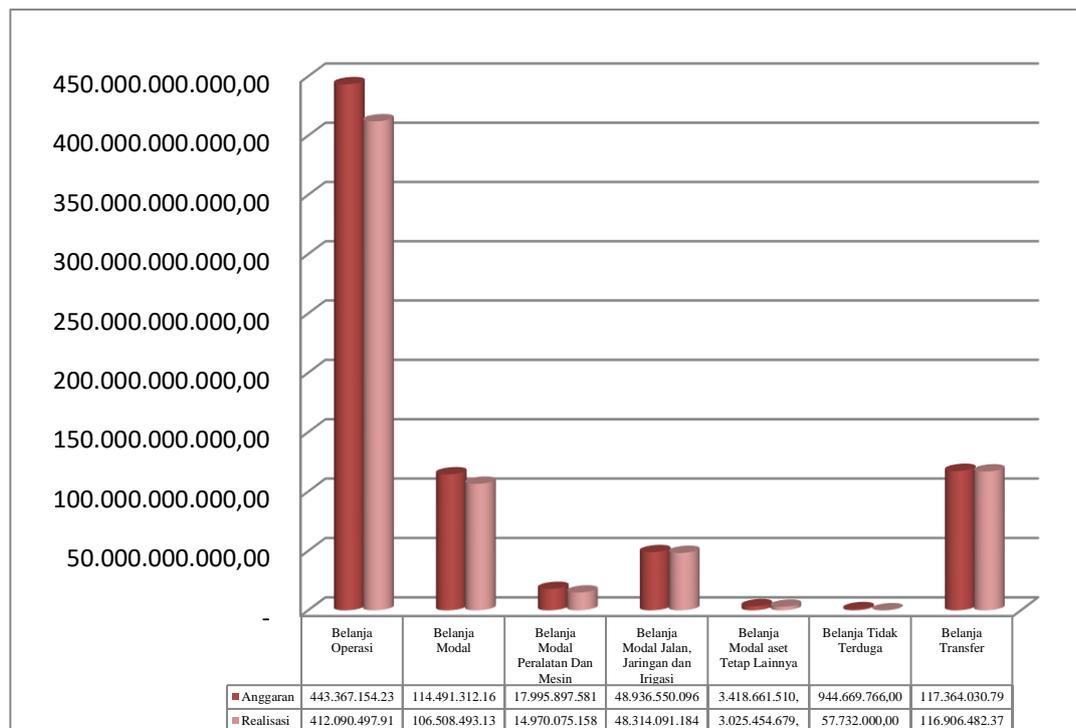
Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp162.587.100,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp944.669.766,00,00** atau sebesar **6,11%** merupakan realisasi Belanja Tidak Terduga bagi korban bencana alam kebakaran, Pengembalian Dana BOP PAUD Tahun 2022, bantuan sosial pemberian uang bagi korban bencana non alam.

4. Belanja Transfer

Merupakan transfer yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada entitas lain (diluar entitas pelaporan) dengan total realisasi sebesar **Rp116.906.482.370,00** atau **99,61%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp117.364.030.791,00**. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp470.988.670,00** dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp116.435.493.700,00**.

Dengan demikian dapat dikumulatifkan Belanja Operasi baik anggaran dan realisasinya pada Tahun Anggaran 2023 seperti pada gambar 3.6.

Gambar 3.6
Perbandingan Komposisi Capaian Kinerja Belanja Operasi Daerah
Tahun Anggaran 2023



Sumber: LRA 2023

Dapat dilihat pada gambar 3.6 bahwa capaian kinerja Belanja Daerah baik anggaran maupun realisasinya selama Tahun Anggaran 2023 secara total dari jumlah anggaran



Belanja Daerah sebesar Rp676.167.166.947,10,00 direalisasikan sebesar Rp635.563.205.417,00 atau mencapai 93,99%

C. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Terkait dengan kinerja pembiayaan daerah dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp49.160.796.332,00 merupakan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit anggaran pada struktur APBD Tahun Anggaran 2023, Realisasi penerimaan pembiayaan 2023 sebesar Rp49.166131.005,10

D. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan *local taxing power* melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (*compliance*) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang lebih luas. Sejak diberlakukannya UU 1/2022 pada tanggal 5 Januari 2022 dengan ketentuan peralihan masing-masing pajak daerah yang beragam, perkembangan nominal PDRD menunjukkan peningkatan. Meskipun secara nominal PDRD mengalami peningkatan dan merupakan komponen terbesar dari PAD, perkembangan PDRD sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dirasakan belum optimal dalam meningkatkan *tax effort* atau rasio perolehan pajak terhadap potensi/kapasitas pajaknya dan juga peranannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional Perkembangan rasio PDRD terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan penurunan dari 1,42% di tahun 2019 menjadi 1,2% pada tahun 2020 yang diakibatkan karena pandemi covid-19. Meskipun begitu, rasio tersebut masih relatif rendah, sejalan dengan tingkat elastisitas PDRD yang merupakan cerminan bagaimana perubahan pada pajak merespon perubahan pada tingkat pendapatan (PDRB) dimana tingkat elastisitas PDRD terhadap PDRB yang kurang dari satu (inelastis). Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PDRD.

Di sisi lain, perkembangan PDRD sebagai bagian sumber pendapatan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun total pendapatan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan lagi. Rasio PDRD terhadap Total Pendapatan Daerah sebagai cerminan kemandirian daerah meningkat dari 14,23% pada tahun 2010 menjadi 16,51% pada tahun 2022, tetapi peningkatan tersebut belum merata di seluruh wilayah di Indonesia terutama Indonesia bagian timur yang mempunyai rasio di bawah 5%. Rasio PDRD terhadap PAD sebagai komponen utama PAD menunjukkan hal yang sama, PDRD yang seharusnya menjadi komponen utama PAD menunjukkan rasio yang menurun dari 78,64% pada tahun 2010 menjadi 72,94% pada tahun 2016, penurunan rasio terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan optimalisasi PDRD sebagai sumber pendapatan daerah.



Secara umum hambatan dan kendala yang masih terus menerus membelenggu aspek pencapaian target yang telah ditetapkan baik pada pengelolaan pendapatan maupun Belanja Daerah senantiasa terfokus pada persoalan klasik yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia, disamping permasalahan klasik yang sifatnya internal tersebut juga terdapat permasalahan yang bersifat eksternal yang sangat mempengaruhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya PDRD adalah :

1. Kendala internal, yang meliputi:
 - a) Sumber daya manusia yang terbatas;
 - b) Kurangnya sarana prasarana pemungutan pajak; dan
 - c) Sistem informasi dan teknologi yang belum merata.
2. Kendala eksternal yang meliputi :
 - a) Aturan hukum pemungutan PDRD yang belum jelas;
 - b) Kurangnya sinergi eksekutif dan legislatif daerah; dan
 - c) Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
3. Terdapat beberapa isu teknis lain pemungutan PDRD seperti :
 - a) Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak yang belum dapat diterapkan optimal di semua daerah; dan
 - b) Pembatasan pemungutan PDRD oleh aturan hukum lain (seperti Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pajak reklame rokok dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai *reservoir* migas).

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan PDRD serta mengatasi permasalahan dalam pemungutan PDRD, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer knowledge*;
2. Peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan PDRD melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala;
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penerbitan peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah tentang PDRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah;
4. Peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai perhitungan target PDRD, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut;
5. Penyempurnaan aturan hukum pemungutan PDRD dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparatur pemungut PDRD; serta
6. Harmonisasi aturan pemungutan PDRD dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah daerah, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan PDRD yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan PDRD yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan PDRD sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



Pusat dan Daerah seakan menjadi nafas baru dalam mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Beberapa desain strategi pencapaian tujuan yang menjadi dasar dalam pembentukannya adalah :

1. Memperkuat sistem perpajakan daerah :
 - a) Mendorong kemudahan berusaha di daerah;
 - b) Mengurangi retribusi pelayanan wajib;
 - c) Opsen perpajakan daerah antara pemerintah provinsi dan kab/kota; dan
 - d) Perluasan basis pajak baru.
2. Meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal;
3. Meningkatkan kualitas Belanja Daerah; dan
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Sangat besar harapan dengan terbitnya peraturan daerah tentang PDRD yang mengacu pada Undang Undang HKPD maka sebagian hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah akan teratasi. Sebagai bukti (1) Berdasarkan data APBD 2020 pengaturan PDRD dalam UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan PDRD kabupaten kota sampai dengan 48,98%. (2) Adapun penurunan untuk pemerintah Provinsi dikarenakan adanya skema opsen namun demikian melalui penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi Kab kota dalam melakukan pengawasan dan *law enforcement* terhadap pengguna kendaraan bermotor (3) Pemda Provinsi menerima tambahan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin MBLB.

Selanjutnya permasalahan pada aspek pengelolaan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester II atau di triwulan III dan triwulan IV;
2. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
3. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasikan kegiatan;
4. Belum maksimalnya koordinasi internal di perangkat daerah diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di perangkat daerah; dan
5. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN

Seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang menggantikan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut akan dijadikan rujukan atas pengakuan dan pengukuran serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang secara efektif dimulai pada laporan tahun anggaran 2020.

Substansi perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terkait dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Berikut beberapa kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Entitas Laporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan entitas pelaporan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan entitas akuntansi. Entitas akuntansi terdiri dari 59 (Lima Puluh Sembilan) entitas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah.

B. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Tahun 2015 berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

D. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

E. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam SAP

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA diakui pada saat :

- a) Kas atas pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan – LO terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO;
- b) Pendapatan Transfer – LO;
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
- d) Pendapatan Non Operasional – LO; dan
- e) Pos Luar Biasa – LO.

Pengakuan Pendapatan – LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa: Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan. Sedangkan dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pendapatan - LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan - LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (satu bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima;
- b) Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka Pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- 1) Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak



- LO. PPK-SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak – LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit;
- 2) Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”;
- 3) Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan Pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- 1) Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek
Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
 - 2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
- c) Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, merupakan unsur/komponen Laporan Operasional (LO). Beban terdiri dari :

a) Beban Operasi

Merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan



Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

b) **Beban Transfer**

Merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

c) **Beban Non Operasional**

Merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.



d) **Beban Luar Biasa**

Merupakan beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

2) Saat terjadinya konsumsi aset;

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah



pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Beban dengan mekanisme LS akan diakui pada saat tagihan diterima dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Sedangkan Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



Beban Lain-Lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban non operasional maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban luar biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang Rupiah. Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang Rupiah.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja terdiri dari :

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.



- 1) **Belanja Pegawai;**
Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - 2) **Belanja Barang dan Jasa;**
Merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
 - 3) **Belanja Bunga;**
Merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
 - 4) **Belanja Subsidi;**
Merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 5) **Belanja Hibah;**
Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - 6) **Belanja Bantuan Sosial;**
Merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- b) Belanja Modal**
Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- c) Belanja Tidak Terduga**
Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.



d) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja dapat diklasifikasi menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi organisasi yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran. Sedangkan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran atau oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Belanja Operasi;
- b) Belanja Modal; dan
- c) Belanja Tidak Terduga

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan Transfer diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan



transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran transfer masuk dan pendapatan transfer untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD. Pengukuran transfer keluar dan beban transfer untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar, dan untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :



- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan SKPD/UPTD sebagai bagian dari BUD.

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan menurut:

- a) Uang Tunai Terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing;
- b) Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
- c) Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan, Surat Utang Negara/Obligasi (Kurang dari 3 bulan), SBN/SBI (Kurang dari 3 bulan).

Kas dan Setara Kas diakui pada saat:

- a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Belanja disajikan dalam Neraca, dan dalam Laporan Arus Kas dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian dan pengungkapan Kas dan Setara Kas dijelaskan, diperinci dan diberikan analisis dalam CaLK, dan penjelasan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah. Pengungkapan informasi penting lainnya yang disyaratkan oleh PSAP yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Kas dan Setara Kas disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila kas dan setara kas dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek & Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka pendek;
- b) Investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.



- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 2) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
 - (a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - (b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - (c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.1

Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0.5%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %



Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- (f) Perubahan pos investasi.

9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar).

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang



menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;



- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: Penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*).

Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) **Kualitas lancar, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) **Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:**
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau



4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) bulan/tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 3 (tiga) bulan/tahun sampai dengan 6 (enam) bulan/tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 6 (enam) bulan/tahun sampai dengan 12 bulan/tahun;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;



- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 bulan/tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang

Penentuan jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

a) Pungutan dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi; dan
- 3) Piutang lain-lain PAD yang Sah;

b) Piutang dari Perikatan antara lain:

- 1) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 2) Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD dan Lembaga Lainnya; dan
- 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:

- a) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
- b) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya; dan
- c) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

a) Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;

- 1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) Upaya penagihan.

b) Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Kualitas lancar;
- 2) Kualitas kurang lancar;
- 3) Kualitas diragukan; dan
- 4) Kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

c) Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (a) Pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 (satu) Tahun; dan/atau



- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*)
- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:



- Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - Wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:**
- (a) Kualitas Lancar
- (1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
- (b) Kualitas Kurang Lancar
- (1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (c) Kualitas Diragukan
- (1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (d) Kualitas Macet
- (1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi**
- (a) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (b) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.



- (c) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (d) Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Tata cara penagihan piutang diatur tersendiri dengan kebijakan pengelolaan piutang.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang



meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu, Penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang dan penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
- b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
- d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- g) Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian dan/atau.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukukan ini



masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- a) Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berhutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
- b) Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- c) Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- f) Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi Penghapus tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapus bukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapus bukuan.
 - 1) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapus bukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write*



off). Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapus bukuan tersebut.

Penghapus tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus tagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a) Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berhutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b) Penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- e) Penghapus tagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- f) Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- g) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapus bukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitor menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.



Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa;

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- d) Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar.



Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.



Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

Aset tetap tidak diterapkan untuk:

- a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
- b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.



Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e) Aset Tetap Lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta dimiliki dan/atau dikuasai dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai



dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan/atau tidak untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pekerjaan yang telah selesai 100% dan diserahkan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) / *Provisional Hand Over* (PHO) walaupun sampai dengan tanggal laporan keuangan belum dilakukan pembayaran diakui sebagai aset tetap.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas **perolehan/pengadaan baru** aset tetap berupa :

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke atas
- b) Konstruksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke atas.

Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam hal kapitalisasi adalah masa manfaat dari Barang/Aset tersebut. Contohnya jika harga perolehan peralatan dan mesin tersebut lebih besar dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun masa manfaatnya dibawah 12 (dua belas) bulan tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap/barang milik daerah.

Alat peraga, alat laboratorium yang dipergunakan sebagai alat-alat peraga pelatihan/pendidikan/pameran yang bahannya terbuat dari kertas/cairan/plastik/kaca dan bahan yang mudah aus/rusak/robek/pecah dan masa manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan tidak dapat dicatat dalam aset tetap. Contohnya alat peraga matematika, IPA.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen biaya perolehan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, dan penimbunan.
Peralatan dan Mesin	Ppembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- Biaya perencanaan;
- Biaya pengawasan;
- Biaya lelang;
- Biaya persiapan tempat;
- Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat



(*handling cost*);

- f. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- g. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- h. Biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, biaya penimbunan tanah yang tidak untuk pendirian bangunan di atasnya seperti (penimbunan tanah lapang), dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya perencanaan/pengawasan, biaya penimbunan tanah untuk pendirian bangunan, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.



Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Bolaang Mongondow Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah di turun-



nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, dan terhadap aset tetap yang belum memiliki nilai yang wajar akibat penyerahan hibah dari instansi lainnya.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.



Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal pelaporan belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



Kontrak Konstruksi

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
- c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- a) Asuransi;
- b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.



Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurukan dan pematangan.

Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.



Pengakuan Kapitalisasi Aset Tetap

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) Bertambah volume, dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Pengukuran Kapitalisasi Aset Tetap

Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap setelah perolehan atau pemeliharaan aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

- a) Pengeluaran untuk per unit peralatan dan mesin berupa peralatan dan mesin kantor, peralatan rumah tangga, barang elektronik dan alat olahraga yang nilainya lebih besar dari Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya berubah bentuk (seperti penambahan ruangan) dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya pemeliharaan sedang sampai berat dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d) Pengeluaran untuk jalan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan jalan.
- e) Untuk pengeluaran normalisasi sungai akan dilakukan kapitalisasi jika dalam kontrak pekerjaan tersebut terkandung pekerjaan konstruksi.
- f) Untuk pengeluaran yang sifatnya perbaikan konstruksi irigasi atau merubah (panjang/lebar) konstruksi irigasi.

Untuk aset tanah, aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi.

Tidak dilakukan kapitalisasi apabila :

- a) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sifatnya untuk pemeliharaan berkala/rutin pengecatan;
- b) Pengeluaran untuk konstruksi jalan dan jembatan yang sifatnya pemeliharaan rutin (tutup lubang atau membersihkan badan jalan atau pengecatan jembatan); dan
- c) Pengeluaran untuk irigasi yang sifatnya pemeliharaan rutin.

Untuk dapat dikapitalisasi tidak hanya dilihat dari jenis belanja yang digunakan melainkan dari jenis pekerjaan dan nilai yang dibelanjakan, dengan kata lain suatu belanja pemeliharaan dapat dikapitalisasi jika :



- a) Pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja; dan
- b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap:

- a) Pengadaan tanah;
- b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
- c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
- d) Pembangunan gedung dan bangunan;
- e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
- f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai; dan
- g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a) Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan; dan
- b) Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Batasan pengeluaran perbaikan (*overhaul/renovasi*) dapat dikapitalisasi dan menambah masa manfaat apabila jumlah pengeluaran melebihi 10% dari nilai buku.

Pengeluaran biaya perawatan sehari-hari dengan maksud untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk didalamnya pengeluaran untuk pembelian/pergantian suku cadang merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya melebihi batas nilai kapitalisasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap yang dikapitalisasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal aset tetap dimaksud.

Penambahan masa manfaat dapat dilihat pada tabel 4.3.



Tabel 4.3

Penambahan Masa Manfaat

Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Peralatan dan Mesin			
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1.3.2.06.01	Alat Studio	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	Overhaul	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan	Overhaul	> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	Alat Laboratorium			
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia	Overhaul	> 10% s.d 25%	3



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Nuklir			
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1 . 3 . 2 . 08 . 03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 08 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
1 . 3 . 2 . 08 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
1 . 3 . 2 . 08 . 06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
1 . 3 . 2 . 08 . 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 08 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	> 10% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 . 3 . 2 . 08 . 09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.	Overhaul	> 10% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	Alat Persenjataan			
1 . 3 . 2 . 09 . 01	Senjata Api	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 09 . 02	Persenjataan Non Senjata Api	Overhaul	> 50% s.d 100%	1
1 . 3 . 2 . 09 . 03	Senjata Sinar	Overhaul	> 75% s.d 100%	2
1 . 3 . 2 . 09 . 04	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
	Rambu - Rambu			
1 . 3 . 2 . 18 . 01	Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 18 . 02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
1 . 3 . 2 . 18 . 03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 10% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
	Gedung dan Bangunan			
	Bangunan Gedung			



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Monumen			
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Bangunan Menara			
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 50%	10
			> 50% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1.3.3.04.01	Tugu Tanda Batas	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
	Jalan dan Jembatan			
1.3.4.01.01	Jalan	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
1.3.4.01.02	Jembatan	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Bangunan Air			
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>10% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa Polder	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	3
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>10% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	3
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
	Instalasi			
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	Renovasi	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
1.3.4.03.10	Instalasi Lainnya	Renovasi	> 10% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
	Jaringan			
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	Overhaul	> 10% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	Overhaul	> 10% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	Overhaul	> 10% s.d 30%	2



Kode Rekening	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
- Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
- Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
- Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Penyajian dan Pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut yang memenuhi kriteria harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi), (PSAP 07 paragraf 49).

Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD.

Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Definisi Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. (PSAP 07 Paragraf 4)

Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel 4.4.



Tabel 4.4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.01	Alat Besar	
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.01.02	Alat Besar Apung	10
1.3.2.01.03	Alat Besar Bantu	10
1.3.2.02	Alat Angkutan	
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.02.03	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.02.04	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5
1.3.2.04	Alat Pertanian	
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tanggga	
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1.3.2.06.01	Alat Studio	5
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.08	Alat Laboratorium	
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.08.06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	10



Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	15
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1.3.2.09	Alat Persenjataan	
1.3.2.09.01	Senjata Api	10
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4
1.3.2.10	Komputer	
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.3.2.12	Alat Pengeboran	
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1.3.2.13.01	Sumur	4
1.3.2.13.02	Produksi	4
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pertanian	4
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	4
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	4
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Perlindungan	5
1.3.2.15.03	Alat SAR	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16	Alat Peraga	
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18	Rambu – Rambu	
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu lintas Darat	7
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu lintas Udara	5
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu lintas Laut	15
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	



Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02	Bangunan Gudang Tempat Tinggal	50
1.3.3.02	Monumen	
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.03	Bangunan Menara	
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	40
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	
1.3.4.01.01	Jalan	10
1.3.4.01.02	Jembatan	50
1.3.4.02	Bangunan Air	
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.03	Instalasi	
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Baku	30
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	40
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.04	Jaringan	
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30



Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada Tahun 2015 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014. Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2014 disajikan sebagai akumulasi penyusutan.

Untuk perhitungan penyusutan Aset Tetap yang diperoleh pada Tahun 2015 dan seterusnya dihitung secara bulanan.

Perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan, sedangkan penyajian Laporan Penyusutan dilakukan semesteran.

Perhitungan penyusutan terhadap Aset Tetap yang direnovasi/dikapitalisasi dilakukan secara bulanan

Penambahan masa manfaat Aset Tetap yang direnovasi dan dikapitalisasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal Aset Tetap dimaksud. Penambahan masa manfaat dilakukan dengan secara tahunan sesuai tabel penambahan masa manfaat.

Aset Tetap berikut tidak disusutkan yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Apabila aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan maka akan dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyajian dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan disebut pengeluaran modal (*Capital Expenditure*). Pengeluaran ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset yang bersangkutan. Pengeluaran Modal ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai Buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang disusutkan selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.



Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.



Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- a) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- b) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- c) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal Pelaporan, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Pelaporan.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut (tidak termasuk kekurangan pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD). Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.



Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (a) Pengurangan pinjaman;
 - (b) Modifikasi persyaratan utang;
 - (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
 - 3) Biaya pinjaman:
 - (a) Perlakuan biaya pinjaman
 - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

13. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.



Pengakuan

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. Sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non lancar. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e) Sumber Dana Cadangan; dan
- f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan - LO. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

14. Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi Pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

15. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b) Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;



Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain – LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- b) Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan Lain-lain – LRA;
- c) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- d) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,



apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan Lain-lain - LO.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-lain - LO dan menambah saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.



Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LO:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- b) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait; dan
- b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.



Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode **1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023**, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan pemerintah daerah terhadap anggaran yang dikelola. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan:

- informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain disajikan secara konsolidasian, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara ringkas dalam bentuk rekapitulasi Anggaran dan Belanja per Perangkat Daerah, yang dapat dilihat pada Lampiran IV.

1. Pendapatan - LRA	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp622.648.112.139,84	Rp676.157.375.981,09

Pendapatan-LRA merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau yang diberi kewenangan atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pada Tahun 2023, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan sebesar **Rp627.006.370.615,00** sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp622.648.112.139,84** atau **99,30%** dari anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah rincian pendapatan untuk masing-masing kelompok pendapatan.

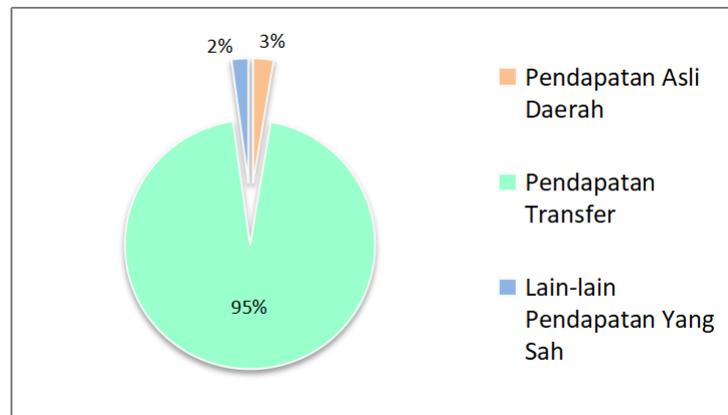
Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan –LRA Tahun 2023

TA	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
2023	Pendapatan Asli Daerah	13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	117,84
	Pendapatan Transfer	602.193.892.514,00	592.765.296.792,00	98,43
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123,75
	Jumlah	627.006.370.615,00	622.648.112.139,84	99,30
2022	Pendapatan Asli Daerah	23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53
	Pendapatan Transfer	652.560.396.662,00	654.195.282.358,00	100,25
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	676.554.910.981,00	676.157.375.981,09	99,94

Secara umum Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama pada jenis Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan yang signifikan pada Pendapatan Transfer didasarkan pada alokasi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Sementara itu, penurunan signifikan pada jenis Pendapatan PAD disebabkan adanya perubahan regulasi yang mengharuskan pengakuan Lain-lain PAD yang Sah diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Berdasarkan Tabel 5.1, proporsi komposisi Pendapatan Daerah dapat ditampilkan pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA 2023



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi terbesar Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan Transfer yakni sebesar **Rp592.765.296.792,00** atau 95,20% dari total realisasi pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat.

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp16.405.421.188,84	Rp21.962.093.623,09



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA pada Tahun 2023 mencapai **Rp16.405.421.188,84** atau **117,84%** dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar **Rp13.921.788.698,00**. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	5.422.500.000,00	5.947.174.351,83	109,68	5.864.133.632,75
2	Retribusi Daerah	1.279.250.000,00	1.386.108.412,00	108,35	1.488.351.309,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	100,00	717.084.719,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	6.157.869.587,00	8.009.969.314,01	130,08	13.892.523.962,34
Jumlah		13.921.788.698,00	16.405.421.188,84	117,84	21.962.093.623,09

Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 menurun apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, terutama pada sektor Lain-lain PAD yang sah, hal ini disebabkan oleh pemindahan penerimaan JKN ke Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sementara target penerimaan Lain-lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp6.157.869.587,00 realisasinya sebesar Rp8.009.969.314,01 atau sebesar 130,08%. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari tumbuhnya kegiatan masyarakat pada sektor-sektor yang menjadi objek pajak, walaupun dilihat lebih dalam rinciannya masih ada beberapa jenis pajak yang belum maksimal penerimaannya.

Target yang ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya menggunakan data potensi. Jika dijabarkan potensi ini adalah sesuatu yang sudah ada namun belum ada dalam genggaman. Potensi pajak/retribusi daerah merupakan kemampuan pemungutan pajak dan retribusi dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak/retribusi tersebut tidak ada gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Sementara itu target pendapatan merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah dan kepatuhan wajib pajak.

Potensi penerimaan PAD yang dikelola oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karenanya penentuan target pendapatan pajak dan retribusi daerah lebih didasarkan pada kaidah inkremental atau dinaikkan sekian persen dari penerimaan tahun lalu. Idealnya penentuan potensi dapat menggunakan pendekatan lain misalnya pendekatan makro yang menggunakan teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun sebelumnya, maupun dengan pendekatan mikro dengan menggunakan hasil survei dan observasi lapangan sehingga dapat menggambarkan potensi riil. Sementara itu metode pendekatan inkremental cenderung praktis dan pragmatis sehingga dalam menentukan dan merencanakan



penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan melalui perhitungan realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Pembentukan informasi terkait basis pajak daerah ini terbilang agak sulit karena untuk melakukan pendataan secara masal butuh waktu yang lama dan sumber daya manusia yang cukup serta kapasitas dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu pemerintah daerah melalui bidang pendapatan mengerjakan proses pendataan ini secara bertahap untuk setiap jenis pajak. Intensifikasi dan pemutakhiran data diutamakan pada data yang sudah ada sebelumnya terhadap objek pajak yang sudah ada ini pun terus ditingkatkan guna mengidentifikasi perkembangan objek pajak dan sekaligus mengawasi kepatuhan wajib pajak, sementara itu kegiatan ekstensifikasi dilakukan untuk memperluas *tax base* terhadap objek pajak yang selama ini belum tersentuh dan belum dipungut. Contohnya pada Tahun 2023 ini bidang pendapatan terus melakukan pendataan usaha sarang burung walet buatan untuk keperluan pemetaan potensi pajak sarang burung walet demikian pula dengan usaha yang menggunakan air tanah telah dilakukan pemetaan potensi pemungutan pajak air tanah serta pendataan objek PBB-P2.

1.1.1. Pendapatan Pajak 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Daerah – LRA Rp5.947.174.351,83 Rp5.864.133.632,75

Secara umum realisasi pencapaian penerimaan dari Pajak Daerah - LRA di Tahun 2023 sebesar **Rp5.947.174.351,83** atau **109,68%** dari target penerimaan yang dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp5.422.500.000,00**. Untuk anggaran dan realisasi, serta kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan realisasi pajak daerah per masing-masing objek pajak tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Hotel	75.000.000,00	38.100.000,00	50,80	67.885.000,00
Pajak Restoran	750.000.000,00	838.871.370,20	111,85	759.629.200,00
Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.625.000,00
Pajak Reklame	175.000.000,00	207.926.197,00	118,81	201.109.531,00
Pajak Penerangan Jalan	2.300.000.000,00	2.777.565.014,00	120,76	2.423.824.905,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	571.222.097,13	76,16	919.793.472,75
Pajak Bumi dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.298.241.768,00	108,19	1.286.902.338,00
BPHTB	170.000.000,00	212.747.905,50	125,15	202.364.186,00
Jumlah	5.422.500.000,00	5.947.174.351,83	109,68	5.864.133.632,75

- a. Pajak hotel, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan kost-kostan. Realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar **Rp38.100.000,00** atau **50,80%** dari rencana penerimaan yang dianggarkan dalam perubahan APBD 2023 sebesar **Rp75.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi yang dicapai pada Tahun Anggaran 2022 maka capaian realisasi Tahun 2023 ini mengalami penurunan sebesar Rp29.785.000,00. Kondisi ini disebabkan turunnya tingkat keterisian/hunian kamar hotel (*room occupancy*). Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah omset bulanan hotel dijadikan sebagai dasar pengenaan 10,00% pajak hotel.



Pemungutan pajak hotel menggunakan mekanisme *self assessment system*, dimana wajib pajak yang memungut, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dapat digambarkan bahwa objek pajak hotel di Bolaang Mongondow Utara terdiri dari hotel, penginapan dan kost yang jumlah kamarnya lebih dari sepuluh yang pengelolaan usahanya dikelola langsung oleh pemilik usaha selaku wajib pajak. Dari total keseluruhan wajib pajak baru pengelola hotel yang sudah melaksanakan pencatatan pendapatan walaupun masih sangat sederhana. Dari hasil pencatatan inilah bidang pendapatan dapat memperhitungkan besaran pajak yang harus disetorkan oleh pengelola hotel.

- b. Pajak Restoran, merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan sejenisnya. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat atau ditempat lain termasuk catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran dengan tarif 10,00% (sepuluh persen). Realisasi penerimaan pajak restoran Tahun 2023 sebesar **Rp838.871.370,20** atau **111,85%** dari anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp750.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2022 pajak restoran mengalami kenaikan sebesar Rp79.242.170,20.

Dalam penetapan target pajak restoran yang dituangkan dalam APBD pemerintah daerah menggunakan formula dasar yakni menghitung basis pajak restoran dengan tarif pajak restoran. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak langsung kepada konsumen dan pemotongan nilai SP2D pada saat pencairan belanja makanan dan minuman yang dibiayai dengan APBD. Terkait realisasi pendapatan pajak restoran Tahun 2023 yang naik jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 terjadi karena pada Tahun 2023 terdapat alokasi belanja penyediaan makanan dan minuman yang cukup besar pada penyelenggaraan kegiatan di Perangkat Daerah, sehingga pajak restoran yang dipungut pada saat itu cukup besar dan berimplikasi pada realisasi. Pada prinsipnya pemerintah daerah terus mengupayakan edukasi tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya terhadap Objek Pajak Restoran, diantaranya sosialisasi dan edukasi secara *door to door* kepada para wajib pajak yang dilaksanakan pada saat menyampaikan formulir SPTPD.

Kondisi objek pajak restoran di Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh usaha rumahan yang kegiatan usaha rumah makan tersebut dikelola sendiri oleh pemilik secara konvensional tanpa menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan. Padahal mengenai fungsi dan keuntungan pencatatan dan pembukuan ini sudah pernah disosialisasikan kepada wajib pajak. Dengan tidak adanya pembukuan maka bidang pendapatan menemui kendala dalam melaksanakan ketentuan pajak restoran terutama dalam rangka menguji kebenaran data pajak yang telah disetorkan. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak langsung kepada konsumen dan pemotongan nilai SP2D pada saat pencairan belanja makanan dan minuman yang dibiayai dengan APBD.



- c. Pajak Hiburan, merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar **Rp2.500.000,00** atau sebesar **100%** dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar **Rp2.625.000,00** terjadi penurunan sebesar Rp125.000,00 yang disebabkan pada Tahun 2023 tidak terdapat *event* hiburan yang dapat dikenakan pajak hiburan seperti wahana hiburan permainan anak. Sebenarnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak memiliki potensi tetap atas pajak hiburan. Penetapan target pajak hiburan yang dicantumkan dalam APBD adalah realisasi pajak hiburan yang disetor oleh wajib pajak sebelum pelaksanaan perubahan APBD.
- d. Pajak reklame, merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Anggaran pajak reklame dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp175.000.000,00** sedangkan realisasi penerimaan Pajak Reklame yakni sebesar **Rp207.926.197,00** atau **118,81%** melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp6.816.666,00. Dalam menetapkan target pendapatan pajak reklame yang dicantumkan dalam APBD menggunakan pendekatan proyeksi *trend* atas realisasi. Data yang digunakan adalah deret angka realisasi tahun sebelumnya yang kemudian digunakan untuk peramalan realisasi di tahun-tahun yang akan datang. Selain itu pemerintah daerah juga memperhatikan basis data yang sudah ada.

Untuk pajak reklame sendiri terbagi dalam dua data yakni data tetap dan data tidak tetap. Data tetap adalah data atas objek pajak reklame dari papan nama pengenal usaha yang dipungut setiap tahun. Sementara itu data yang tidak tetap diisi oleh objek pajak reklame yang waktu tayangnya terbatas dan bersifat insidental. Pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem *official assessment* dengan memperhatikan parameter-parameter yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang pajak reklame.

- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ), merupakan pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pada Tahun 2023 pajak penerangan jalan ditetapkan dalam perubahan APBD yaitu sebesar **Rp2.300.000.000,00** sedangkan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar **Rp2.777.565.014,00** atau **120,76%**. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, penerimaan atas pajak ini mengalami kenaikan sebesar Rp353.740.109,00. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh pihak ketiga dalam hal ini PT. PLN (Persero) atas tagihan pemakaian rekening listrik oleh pelanggan PLN. Berdasarkan ketentuan bahwa PPJ yang dipungut adalah sebesar 10% dari total tagihan listrik pada setiap pelanggan. PPJ tersebut kemudian disetorkan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk wilayah kerja mencakup Kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Kaidipang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kecamatan Bolangitang Timur, Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Sangkub. Penganggaran target penerimaan PPJ dalam APBD menggunakan pendekatan proyeksi *trend* dengan menggunakan angka realisasi tiga tahun terakhir untuk meramalkan penerimaan tiga tahun ke depan.



- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan asbes pada Tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp750.000.000,00** yang terealisasi sebesar **Rp571.222.097,13** atau sebesar **76,16%**, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp919.793.472,75** maka terjadi penurunan realisasi sebesar **Rp348.571.375,62**.
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi PBB-P2 Tahun 2023 sebesar **Rp1.298.241.768,00** atau sebesar **108,19%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp1.200.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp1.286.902.338,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp11.339.430,00**. Angka target penerimaan pendapatan PBB-P2 yang dicantumkan dalam APBD pada Tahun 2023 adalah 89,20% dari data potensi hasil pemutakhiran data selama Tahun 2022 dan 2023.

NJOP yang dijadikan dasar penentuan PBB-P2 terutang di Bolaang Mongondow Utara masih rendah bahkan terlampaui rendah jika dibandingkan dengan nilai pasar penjualan tanah yang ada saat ini. Oleh karena itu pemerintah daerah telah merencanakan untuk melakukan pembaruan terhadap NJOP yang ada saat ini, yang rencananya akan dilaksanakan secara bertahap mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

Data yang sudah ada pun masih belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebab masih banyak terdapat objek pajak yang belum dimutakhirkan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi sumber daya manusia yang terbatas untuk melaksanakan pendataan. Pemerintah daerah sudah pernah berinisiasi untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran dengan menggunakan aplikasi terintegrasi yang bersifat *online system* bekerja sama dengan pemerintah desa namun hasilnya belum maksimal. Permasalahan SDM menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Oleh Tim Koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah), pernah didorong untuk menggunakan nilai yang ada pada peta zona nilai tanah yang merupakan produk Kantor Pertanahan sebagai NJOP namun setelah diuji secara internal nilai pada peta ZNT pertanahan terlampaui tinggi, sehingga jika dijadikan dasar akan meningkatkan jumlah PBB-P2 terutang pada setiap objek PBB-P2 yang nantinya berimplikasi pada timbulnya potensi PBB-P2 tidak terbayar oleh masyarakat.

- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Realisasi BPHTB Tahun 2023 sebesar **Rp212.747.905,50** atau **125,15%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp170.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp202.364.186,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp10.383.719,50**. Kenaikan realisasi penerimaan BPHTB tidak terlepas dari pelaksanaan pemungutan menggunakan aplikasi e-SPTPD BPHTB yang terintegrasi mulai dari PPAT, Kantor Pertanahan, Bidang Pendapatan BPKD dan pihak perbankan secara *online*. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses pemungutan BPHTB walaupun seringkali menemui kendala pada gangguan jaringan internet. Hal lain



yang menyebabkan meningkatnya realisasi BPHTB adalah pemberlakuan pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang hanya satu kali pada setiap wajib pajak yang mendaftarkan perolehan dan/atau pengalihan objek BPHTB lebih dari satu kali dalam tahun yang sama. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Sementara itu penganggaran target penerimaan BPHTB di dalam APBD masih menggunakan kaidah inkremental yang hanya mengacu pada realisasi tahun-tahun sebelumnya sebab BPHTB bukanlah objek regular yang dapat terutang setiap tahun melainkan sifatnya insidental tergantung dari transaksi jual beli oleh masyarakat yang terjadi di daerah pemungutan.

1.1.2. Pendapatan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Retribusi Daerah - LRA **Rp1.386.108.412,00** **Rp1.488.351.309,00**

Perubahan regulasi nasional mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan semua regulasi dan ketentuan pajak dan retribusi dengan regulasi yang baru. Awalnya retribusi daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012, Perda Nomor 4 Tahun 2012 dan Perda Nomor 5 Tahun 2012, masing masing tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Pemberian Izin Tertentu. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap layanan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dan diundangkan sebagai tanda era baru dalam pemungutan retribusi daerah seiring dengan dicabutnya perda-perda retribusi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Secara umum realisasi capaian retribusi daerah Tahun 2023 sebesar **Rp1.386.108.412,00** dari anggaran sebesar **Rp1.279.250.000,00** atau sebesar **108,35%**. Adapun realisasi dan anggaran per objek pendapatan retribusi daerah sesuai tabel 5.4.

Tabel 5.4
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Retribusi Jasa Umum	1.119.250.000,00	1.324.572.010,00	118,34	1.401.360.175,00
Retribusi pelayanan kesehatan-puskesmas	199.250.000,00	341.263.148,00	171,27	117.167.700,00
Retribusi pelayanan kesehatan-RSUD	600.000.000,00	714.173.800,00	119,03	994.744.975,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	50.960.062,00	101,92	24.748.000,00
Retribusi pelayanan parkir tepi jalan	20.000.000,00	20.470.000,00	102,35	18.194.500,00
Retribusi pelayanan Pasar-pelataran	250.000.000,00	197.705.000,00	79,08	212.435.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	5.210.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	28.860.000,00
Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	20.039.000,00	40,08	32.793.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.000.000,00	20.039.000,00	40,08	32.793.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	41.497.402,00	37,72	54.198.134,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	110.000.000,00	41.497.402,00	37,72	54.198.134,00
Jumlah	1.279.250.000,00	1.386.108.412,00	108,35	1.488.351.309,00

Dari tabel diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Retribusi Jasa Umum, merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada perubahan APBD 2023 mencapai **Rp1.324.572.010,00** atau **118,34%** dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp1.119.250.000,00**.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.401.360.175,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp76.788.165,00 realisasi retribusi jasa umum khususnya pada objek retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun pada beberapa objek terjadi kenaikan seperti retribusi persampahan dan parkir ditepi jalan, ini terjadi sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan layanan yang dipungut retribusi serta beberapa upaya inovasi dalam pemungutan retribusi itu sendiri. Seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggunakan kanal bayar QRIS hasil kerjasama dengan salah satu Bank Himbara dalam meningkatkan penggunaan kanal dan literasi non tunai.

Rincian realisasi retribusi jasa umum per rincian obyek pendapatan sesuai tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Uraian	Tahun 2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	199.250.000,00	341.263.148,00	171,27
Retribusi Pelayanan Kesehatan-RSUD	600.000.000,00	714.173.800,00	119,03
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	50.960.062,00	101,92
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan	20.000.000,00	20.470.000,00	102,35
Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	250.000.000,00	197.705.000,00	79,08
Jumlah	1.119.250.000,00	1.324.572.010,00	118,34

- b. Retribusi Jasa Usaha, merupakan kegiatan usaha pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan dan mengelola alam yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi Jasa Usaha yang dipungut merupakan Retribusi Pariwisata. Secara umum realisasi retribusi jasa usaha pada perubahan APBD 2023 mencapai **Rp20.039.000,00** atau **40,08%** dari anggaran sebesar **Rp50.000.000,00**.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan tertentu yang dipungut merupakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya merupakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Secara umum realisasi retribusi perizinan tertentu pada perubahan APBD 2023 mencapai **Rp41.497.402,00** atau **37,72%** dari anggaran sebesar **Rp110.000.000,00**.



1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp1.062.169.111,00 **Rp717.084.719,00**

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dikelola secara korporasi. Menempatkan kekayaan daerah untuk dikelola secara korporasi menghasilkan manfaat bagi peningkatan perekonomian daerah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari dividen Bank SulutGo atas penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD yang dianggarkan pada perubahan APBD 2023 sebesar **Rp1.062.169.111,00** dan capaian realisasinya sebesar **Rp1.062.169.111,00** atau **100,00%**.

Untuk dividen atas penyertaan modal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sesuai hasil RUPS tahun buku 2023 tanggal 5 Februari 2024, besaran dividen yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp960.030.536,00.

1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LRA **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp8.009.969.314,01 **Rp13.892.523.962,34**

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari penerimaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian dan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah lainnya, dapat dilihat sesuai tabel 5.6.

Tabel 5.6
Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	673.955.042,00	722.920.072,00	107,27	78.161.300,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.726.000,00	20.726.000,00	100,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	650.000.000,00	1.005.338.985,52	154,67	1.728.720.089,00
Pendapatan Bunga	1.391.330.889,00	1.098.082.185,00	78,92	84.931.506,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.042.182.963,00	3.836.934.530,17	126,12	2.012.912.308,77
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	129.016.805,00
Pendapatan Denda atas Ketrlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	234.885.102,00	1.110.473.763,32	472,77	311.154.362,25
Pendapatan denda pajak Reklame	2.324.479,00	3.228.958,00	138,91	1.368.465,00
Pendapatan dari Pengembalian	142.465.112,00	147.651.199,00	103,64	117.204.683,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	9.429.054.443,32
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3.750.000,00	100,00	0,00
Remunerasi	0,00	60.863.621,00	100,00	0,00
Jumlah	6.157.869.587,00	8.009.969.314,01	130,08	13.892.523.962,34

Secara umum realisasi pencapaian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 mencapai **Rp8.009.969.314,01** atau **130,08%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp6.157.869.587,00**. Pada Tahun 2023, Pendapatan JKN dicatat pada



Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berikut penjelasan rekening lain-lain PAD Yang Sah – LRA.

a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan, realisasi Hasil Penjualan BMD. Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp722.920.072,00** merupakan penjualan langsung dari aset rusak berat yang telah dihapus sesuai:

1. SK Penghapusan Nomor 144 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 Milik Pemerintah Daerah Bagi Pejabat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 sebesar **Rp35.017.000,00**.
2. SK Penghapusan Nomor 203 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 (*scrap*) Tanpa lelang serta barang inventaris selain kendaraan bermotor milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar **Rp3.075.000,00**.
3. SK Penghapusan Nomor 204 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris selain kendaraan bermotor milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar **Rp9.610.000,00**.
4. SK Penghapusan Nomor 324 tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar **Rp626.255.942,00**.
5. SK Penghapusan Nomor 425 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas Roda 2 milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar **Rp30.129.930,00**.
6. SK Penghapusan Nomor 464 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahap I Tahun 2023 sebesar **Rp7.440.000,00**.
7. SK Penghapusan Nomor 465 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahap II Tahun 2023 sebesar **Rp2.810.000,00**.
8. SK Penghapusan Nomor 466 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahap III Tahun 2023 sebesar **Rp8.588.000,00**.

Terdapat selisih sebesar **Rp5.800,00** merupakan selisih biaya administrasi bank dari panitia lelang ke RKUD.



- b. Penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp20.726.000,00** merupakan pendapatan sewa tanah ATM BSG dan pengelolaan Aset (buah kelapa) pada Bagian Umum SETDA.
- c. Penerimaan Jasa Giro, realisasi Jasa Giro Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah **Rp1.005.338.985,52** atau **154,67%** dari target yang dianggarkan sebesar **Rp650.000.000,00**. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 secara persentase terjadi penurunan sebesar Rp723.381.103,48 hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat mobilitas dana yang bersumber dari giro.
- d. Penerimaan Bunga Deposito, realisasi Penerimaan Bunga Deposito sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **78,92%** dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023, realisasi penerimaan bunga deposito sebesar **Rp1.098.082.185,00** dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar **Rp1.391.330.889,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terjadi kenaikan yang mencapai **Rp1.013.150.679,00**. Hal ini disebabkan karena adanya *idle money* yang dapat didepositokan untuk memperoleh pendapatan daerah. Sampai tanggal 31 Desember 2023 keseluruhan deposito milik pemerintah daerah telah dicairkan/dipindahbukukan ke Kas Daerah untuk memenuhi kas dalam melayani pengeluaran pemerintah daerah. Realisasi penerimaan bunga deposito berasal dari deposito milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Bank SulutGo Cabang Boroko.
- Penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas untuk menambah sumber penerimaan daerah yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas yang ada di rekening giro RKUD. Besaran dana yang didepositokan disesuaikan dengan kemampuan serta tidak mengganggu ketersediaan kas daerah dan dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu satu atau tiga bulan, dengan ketentuan apabila diperlukan oleh pemerintah daerah sewaktu-waktu dapat dicairkan sesuai MoU yang ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dan pihak bank.
- e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), penerimaan TGR merupakan nilai kerugian yang disetor ke kas daerah. Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) sebesar **Rp3.836.934.530,17** realisasi tersebut melampaui anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp3.042.182.963,00** atau **126,12%**. Dalam hal penyelesaian TGR pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan sidang TP TGR baik kepada pegawai, bendahara maupun pihak ketiga, dapat dilihat sesuai tabel 5.7.

Tabel 5.7
Penerimaan Atas TGR Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembayaran Perjalanan Dinas	41.726.664,00
2	Pembayaran Honorarium	58.103.388,00
3	Pembayaran Barang dan Jasa	1.167.068.709,63
4	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai	18.965.291,00
5	Pembayaran Gaji	22.689.092,00
6	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan	2.135.712.222,64
7	Pengembalian dari Belanja Tugas Belajar	35.800.000,00
8	Pengembalian dari Diklat PIM	1.000.000,00
9	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	58.859.150,00
10	Pengembalian Terhadap Harga Satuan Timpang	297.010.012,90
	Jumlah	3.836.934.530,17



- f. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, pada APBD Perubahan 2023 dianggarkan sebesar **Rp234.885.102,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp1.110.473.763,32** atau sebesar **472,77%** dari Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, RSUD, Perikanan dan Kelautan serta Inspektorat untuk pekerjaan Tahun 2022 dan Tahun 2023. Selain itu terdapat pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Tahun 2023 yang telah di terima pada Tahun 2024 sebesar Rp243.943.418,00.
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah, pada APBD Perubahan 2023 dianggarkan sebesar **Rp2.324.479,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp3.228.958,00** atau sebesar **138,91%** merupakan denda pajak reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron* sebesar Rp2.576.479,00 dan Pendapatan Denda PBB-P2 sebesar Rp652.479,00.
- h. Pendapatan dari Pengembalian pada APBD Perubahan 2023 dianggarkan sebesar **Rp142.465.112,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp147.651.199,00** atau sebesar **103,64%**. Pendapatan ini terdiri dari:
- 1) Pengembalian kelebihan perjalanan dinas biasa sebesar Rp44.519.807,00;
 - 2) Pembayaran PPh 21 sebesar Rp4.861.200,00;
 - 3) Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp96.119.326,00;
 - 4) Pendapatan pengembalian kelebihan belanja barang habis pakai ATK sebesar Rp474.600,00;
 - 5) Pendapatan pengembalian Belanja Barang Pakai Habis-Makan Minum Rapat sebesar Rp1.411.776,00; dan
 - 6) Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp264.490,00.
- i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran peraturan daerah sebesar Rp3.750.000,00, merupakan penerimaan atas denda administrasi PPATS temuan BPK Tahun 2022.
- j. Pendapatan Remunerasi Tahun 2023 sebesar Rp60.863.621,00 merupakan penerimaan Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Pendapatan Remunerasi DBH *Treasury Deposit Facility* (TDF), pada APBD Perubahan 2023 dianggarkan sebesar **Rp0,00** dengan realisasi pendapatan sebesar **Rp60.863.621,00** atau sebesar **100%**. Pendapatan Remunerasi DBH *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan imbalan bunga atas penyimpanan dana milik pemerintah daerah pada fasilitas TDF. Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas TDF pada pasal 6 dinyatakan bahwa Dana TDF sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan TDF pada Bank Indonesia.

1.2. Pendapatan Transfer – 31 Desember 2023 31 Desember 2022
LRA **Rp592.765.296.792,00** **Rp654.195.282.358,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan



Dana Transfer antar Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer-LRA pada Tahun 2023 mencapai **Rp592.765.296.792,00** terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar **Rp488.240.522.436,00**, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar **Rp84.816.754.000,00** dan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar **Rp19.708.020.356,00**. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapat alokasi dana transfer sebesar **Rp583.158.540,000,00**. Terdapat potongan pada penyaluran Dana Transfer untuk Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pemotongan Dana Bagi Hasil mengacu pada Nota Dinas Direktur Dana Transfer Umum Nomor : ND-1284/PK.2/2023 Tanggal: 21 Desember 2023 tentang Rekomendasi Penyaluran Kurang Bayar Dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Pada Tahun 2023. Sedangkan untuk potongan DAU merupakan potongan DAK Pariwisata yang tidak dimanfaatkan dan harus dikembalikan ke kas negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/Km.7/2023 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2022. Untuk potongan DAK Non Fisik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 yang menyatakan sisa DAK Non Fisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun diperhitungkan dengan penyaluran anggaran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya. Jadi potongan untuk DAK Fisik sesuai dengan Laporan sisa DAK Tahun sebelumnya.

Alokasi Dana Transfer Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beserta potongannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5.8
Alokasi Dana Transfer dan Potongan

Jenis Transfer	Nilai		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Potongan (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	2.783.564.000,00	2.745.491.000,00	38.073.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	1.007.239.000,00	1.190.567.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	6.774.673.000,00	6.616.486.000,00	158.187.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	2.132.411.000,00	1.160.929.000,00	971.482.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	33.575.000,00	11.453.450,00	2.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.998.859.000,00	1.998.859.000,00	0,00
Transfer Dana Alokasi Umum	365.850.838.000,00	365.645.982.900,00	104.855.100,00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan	68.096.020.000,00	61.946.075.435,00	0,00
Dana Insentif Daerah	5.890.177.000,00	5.890.177.000,00	0,00
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	19.709.632.000,00	18.370.136.820,00	0,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	477.000.000,00	461.559.049,00	0,00
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	11.477.330.000,00	11.453.707.712,00	0,00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	15.838.410.000,00	11.260.295.940,00	4.441.136.160,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	3.325.000.000,00	3.233.471.000,00	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	276.400.900,00	321.599.100,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00	291.730.578,00	146.469.422,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	745.150.000,00	731.876.800,00	13.273.200,00
Dana Desa	75.982.462.000,00	78.926.577.000,00	0,00
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	0,00	2.527.503.373,00	0,00
Jumlah	583.158.540.000,00	574.739.279.957,00	6.195.076.982,00



1.2.1 Pendapatan Transfer– 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Pemerintah Pusat–Dana Rp488.240.522.436,00 Rp556.416.366.492,00
Perimbangan LRA

Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dianggarkan sebesar **Rp498.445.588.965,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp488.240.522.436,00** atau **97,95%**. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurut rincian obyek pendapatan sesuai tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Pajak - LRA	3.328.878.000,00	4.168.517.110,00	125,22	8.917.271.096,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	10.174.967.965,00	10.295.913.092,00	101,19	22.011.740.070,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	364.237.001.000,00	365.750.838.000,00	100,42	348.218.889.034,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	120.704.742.000,00	108.025.254.234,00	89,50	177.268.466.292,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	498.445.588.965,00	488.240.522.436,00	97,95	556.416.366.492,00

1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - 31 Desember 2023 31 Desember 2022
LRA Rp4.168.517.110,00 Rp8.917.271.096,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar **Rp3.328.878.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp4.168.517.110,00** atau **125,22%**. Pendapatan Bagi Hasil Pajak menurut rincian objek pendapatan sesuai tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Dana Pajak Bumi dan Bangunan	1.007.239.000,00	1.486.921.594,00	147,62	6.081.776.756,00
DBH Dana PPh Pasal 21	2.321.639.000,00	2.441.024.948,00	105,14	2.835.494.340,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	240.570.568,00	100,00	0,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	3.328.878.000,00	4.168.517.110,00	125,22	8.917.271.096,00

1.2.1.2 Bagi Hasil 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Bukan Pajak/ Rp10.295.913.092,00 Rp22.011.740.070,00
SDA – LRA

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA tersebut dianggarkan sebesar **Rp10.174.967.965,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp10.295.913.092,00** atau **101,19%**. Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sesuai tabel 5.11.



Tabel 5.11

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	699.967.924,00	2.373.915.174,00	339,15	17.643.398.536,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	7.238.086.611,00	7.103.809.138,00	98,14	2.407.457.534,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	26.301.219,00	4.183.669,00	15,91	2.573.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.210.612.211,00	814.005.111,00	36,82	1.958.311.000,00
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	10.174.967.965,00	10.295.913.092,00	101,19	22.011.740.070,00

1.2.1.3 Dana Alokasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Umum (DAU) – Rp365.750.838.000,00 Rp348.218.889.034,00
LRA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022, DAU pada Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) yang terdiri dari DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, DAU penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta DAU pendanaan Kelurahan.

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum merupakan alokasi anggaran pendapatan yang terbesar dari keseluruhan jenis pendapatan daerah pada setiap tahun anggaran. Untuk Tahun Anggaran 2023, DAU dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp364.237.001.000,00** dengan capaian realisasi mencapai **Rp365.750.838.000,00** atau sebesar **100,42%**, realisasi DAU Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp17.531.948.966,00** jika dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun 2022 yang mencapai **Rp348.218.889.034,00**.

Rincian realisasi berdasarkan penggunaan DAU diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.12

Rincian DAU per Jenis Peruntukan

Jenis Peruntukan DAU	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
DAU yang tidak diperuntukan penggunaannya	260.037.343.000,00	261.651.180.000,00	100,62
Penggajian Formasi P3K	13.198.800.000,00	13.198.800.000,00	100,00
Pendanaan Kelurahan	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00
Bidang Pendidikan	37.204.077.000,00	37.204.077.000,00	100,00
Bidang Kesehatan	34.600.388.000,00	34.600.388.000,00	100,00
Bidang Pekerjaan Umum	18.996.393.000,00	18.996.393.000,00	100,00
Total DAU	364.237.001.000,00	365.750.838.000,00	100,42

Jika diperhatikan, persentase realisasi pendapatan telah melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan, selain adanya pengakuan potongan DAU bulan Oktober Tahun 2023 atas sisa penggunaan DAK Non Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2020 sebesar **Rp104.855.100,00** sebagai realisasi penerimaan DAU Tahun 2023, terdapat pula penambahan transfer DAU dari pemerintah pusat pada



bulan Desember sebesar **Rp1.613.837.000,00** yang merupakan penggantian alokasi DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah.

1.2.1.4 Dana Alokasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Khusus (DAK) – Rp108.025.254.234,00 Rp177.268.466.292,00
LRA

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggarkan sebesar **Rp120.704.742.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp108.025.254.234,00** atau sebesar **89,50%**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp177.268.466.292,00** mengalami penurunan sebesar **Rp69.243.212.058,00**.

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik dianggarkan sebesar **Rp68.096.020.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp61.946.075.435,00** atau sebesar **90,97%**. DAK Non Fisik dianggarkan sebesar **Rp52.608.722.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp46.079.178.799,00** atau sebesar **87,59%**. Realisasi DAK Fisik Tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 turun sebesar **Rp72.759.365.555,00**. Sedangkan DAK Non Fisik jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 naik sebesar Rp3.516.153.497,00. Hal ini disebabkan pada Tahun 2023 terdapat bidang yang tidak mendapat anggaran, sedangkan pada Tahun 2022 mendapat anggaran seperti bidang Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, dimana pada Tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp96.778.642.000,00 dengan realisasi sebesar Rp95.029.583.039,00. Selain itu sisa DAK Non Fisik Tahun 2022 diperhitungkan dengan penyaluran anggaran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya sehingga Dana DAK Non Fisik Tahun 2023 yang disalurkan ke RKUD dipotong sebesar sisa DAK Non Fisik Tahun 2022. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA Tahun 2023 disajikan sesuai tabel 5.13.

Tabel 5.13
Realisasi Transfer Dana Khusus (DAK) – LRA

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.618.193.000,00	1.522.847.035,00	94,11	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.879.080.000,00	5.774.198.245,00	98,22	8.786.703.324,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.388.451.000,00	3.121.650.840,00	71,13	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	718.344.000,00	697.607.293,00	97,11	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	95.029.583.039,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusasan-Pembangunan Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.894.110.000,00	9.692.230.682,00	81,49	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Pengusasan	1.815.915.000,00	1.146.527.880,00	63,14	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	31.093.149.000,00	30.963.287.850,00	99,58	23.912.592.195,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengusasan	0,00	0,00	0,00	4.345.212.432,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusasan	2.414.251.000,00	2.220.602.600,00	91,98	2.631.350.000,00



Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	7.273.635.000,00	5.933.315.810,00	81,57	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.000.892.000,00	873.807.200,00	87,30	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	10.647.330.000,00	10.623.707.712,00	99,78	11.250.927.670,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	830.000.000,00	830.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	19.709.632.000,00	18.370.136.820,00	93,20	17.548.344.720,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	477.000.000,00	461.559.049,00	96,76	566.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.257.800.000,00	2.211.271.000,00	97,94	2.121.413.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.067.200.000,00	1.022.200.000,00	95,78	801.300.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	13.109.566.000,00	9.361.528.865,00	71,41	9.330.252.651,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.728.844.000,00	1.898.767.075,00	69,58	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00	291.730.578,00	66,57	224.407.861,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000,00	276.400.900,00	46,22	601.800.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	745.150.000,00	731.876.800,00	98,22	118.329.400,00
Jumlah	120.704.742.000,00	108.025.254.234,00	89,50	177.268.466.292,00

1.2.2

1.2.2 Pendapatan Transfer 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Pemerintah Pusat – Rp84.816.754.000,00 Rp77.755.122.000,00
Lainnya – LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya terdiri dari Pendapatan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dianggarkan sebesar **Rp84.816.754.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp84.816.754.000,00** atau **100,00%**, yang terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar **Rp5.890.177.000,00** dan Dana Desa sebesar **Rp78.926.577.000,00**.

1.2.2.1 Dana Insentif 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Daerah (DID)-LRA Rp5.890.177.000,00 Rp3.281.264.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan transfer kepada daerah berdasarkan kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penilaian DID untuk tujuan seleksi penerima pada dasarnya merupakan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. DID Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh berdasarkan kinerja tahun sebelumnya untuk kategori kesejahteraan masyarakat serta kinerja percepatan belanja daerah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023.

Pendapatan Transfer DID-LRA pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp5.890.177.000,00** dari dana yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp5.890.177.000,00** atau sebesar 100,00% terdapat kenaikan sebesar **Rp2.608.913.000,00** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp3.281.264.000,00**.

1.2.2.2 Dana Desa – 31 Desember 2023 31 Desember 2022
LRA Rp78.926.577.000,00 Rp74.473.858.000,00

Pendapatan Transfer Dana Desa-LRA pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp78.926.577.000,00** atau sebesar 100,00% dari anggaran yang



ditetapkan. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan alokasi sebesar **Rp4.452.719.000,00**. Kenaikan tersebut karena adanya tambahan Dana Desa atas Desa yang berkinerja baik, dengan besaran alokasi per masing-masing desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

1.2.3 Pendapatan Transfer **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Pemerintah Provinsi – **Rp19.708.020.356,00** **Rp20.023.793.866,00**
LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pendapatan berupa bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Besaran alokasi pendapatan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok Tahun 2023. Kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 yang dianggarkan pada Perubahan APBD sebesar **Rp18.931.549.549,00** dengan realisasi sebesar **Rp19.708.020.356,00** atau sebesar **104,10%**.

1.2.3.1 Pendapatan Bagi **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Hasil Pajak – **Rp19.708.020.356,00** **Rp20.023.793.866,00**
LRA

Pendapatan Bagi Hasil, yang dianggarkan sebesar **Rp18.931.549.549,00** dengan realisasi sebesar **Rp19.708.020.356,00** atau sebesar **104,10%**. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sesuai pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Kendaraan Bermotor	4.661.139.440,00	3.607.072.725,29	77,39	2.981.365.507,56
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.566.920.308,00	2.224.884.727,93	86,68	3.415.125.402,20
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.872.692.852,00	9.219.931.251,68	117,11	8.821.904.024,24
Pajak Air Permukaan	59.120.910,00	94.789.979,10	160,33	90.550.303,00
Pajak Rokok	3.771.676.039,00	4.561.341.672,00	120,94	4.714.848.629,00
Jumlah	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00	104,10	20.023.793.866,00

Anggaran tersebut berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

1.3. Lain-lain Pendapatan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
yang Sah – LRA **Rp13.477.394.159,00** **Rp0,00**

Pada prinsipnya, akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, digunakan untuk mencatat seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kondisi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, akun Lain-lain Pendapatan Daerah



digunakan untuk mengakui Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pendapatan tersebut merupakan pendapatan dana kapitasi berupa besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, JKN Kapitasi diterima langsung oleh 12 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang di transfer oleh BPJS Tondano Sulawesi Utara, sedangkan JKN Non Kapitasi diterima melalui Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disalurkan pada 12 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel 5.15

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA

No.	Nama OPD	Penerimaan	Keterangan
1	Dinkes	1.165.873.400,00	Non Kapitasi
2	RSUD	8.453.172.600,00	Non Kapitasi
3	PKM Sangkub	348.526.790,00	Kapitasi
4	PKM Bintauna	492.862.394,00	Kapitasi
5	PKM Bohabak	335.576.154,00	Kapitasi
6	PKM Bolangitang	434.008.917,00	Kapitasi
7	PKM Boroko	655.121.113,00	Kapitasi
8	PKM Buko	353.573.353,00	Kapitasi
9	PKM Tuntung	209.974.453,00	Kapitasi
10	PKM Bintauna Pantai	256.589.286,00	Kapitasi
11	PKM Ollot	327.967.561,00	Kapitasi
12	PKM Mokoditek	219.714.560,00	Kapitasi
13	PKM Sangtombolang	99.045.375,00	Kapitasi
14	PKM Biontong	125.388.203,00	Kapitasi
Jumlah		13.477.394.159,00	

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Penyetoran/Pembayaran Dana Kapitasi dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LRA. Pada Tahun 2023 pendapatan tersebut oleh FKTP digunakan langsung dan disahkan oleh BUD melalui mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dan Surat Pengesahan Belanja (SPB). Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat anggaran sebesar **Rp10.890.689.403,00** dan direalisasikan sebesar **Rp13.477.394.159,00** atau **123,75%**. Adapun dana yang dicairkan melalui mekanisme SPB sebesar Rp3.764.449.606,00. Pada Tahun 2022 Pendapatan JKN di catat pada Pendapatan Asli Daerah.

2. Belanja Daerah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp518.761.078.147,00

Rp540.065.347.680,65

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan realisasi pencapaian belanja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp518.761.078.147,00** atau sebesar **92,83%** dari anggaran



Rp558.803.136.158,10. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar **Rp540.065.347.680,65** terdapat penurunan realisasi sebesar **Rp21.304.269.533,65**. Selanjutnya jika dilihat dari jenis belanja, terdapat kenaikan pada realisasi belanja operasional secara keseluruhan kecuali Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan. Belanja Operasional mengalami kenaikan dikarenakan terdapat tambahan pegawai yang direkrut pada Tahun 2023 yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 178 orang. Pada Tahun 2023 juga terdapat belanja transfer dari pemerintah daerah untuk desa baik belanja bagi hasil maupun belanja bantuan keuangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Operasi	443.367.154.230,10	412.089.997.916,00	92,95	385.607.365.398,20
	Belanja Pegawai	236.412.477.623,00	220.054.148.469,00	93,08	213.501.889.839,00
	Belanja Barang dan Jasa	189.518.505.326,10	175.366.868.266,00	92,53	161.691.063.199,20
	Belanja Subsidi	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Hibah	13.626.671.281,00	12.991.445.181,00	95,34	6.091.660.528,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.739.500.000,00	3.607.536.000,00	96,47	4.322.751.832,00
2	Belanja Modal	114.491.312.160,00	106.508.493.131,00	93,03	153.663.525.497,45
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.995.897.581,00	14.970.075.158,00	83,19	42.133.717.363,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.140.202.973,00	40.198.872.110,00	91,07	46.686.878.023,45
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.936.550.096,00	48.314.091.184,00	98,73	60.424.763.037,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.418.661.510,00	3.025.454.679,00	88,50	4.418.167.074,00
3	Belanja Tidak Terduga	944.669.766,00	162.587.100,00	17,21	794.456.785,00
	Belanja Tidak Terduga	944.669.766,00	162.587.100,00	17,21	794.456.785,00
	Jumlah	558.803.136.156,10	518.761.078.147,00	92,83	540.065.347.680,65

2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp412.089.997.916,00

Rp385.607.365.398,20

Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional Pemerintah Daerah. Secara umum pencapaian realisasi belanja operasi Tahun 2023 sebesar **Rp412.089.997.916,00** atau **92,95%** dari anggaran yang ditetapkan yakni sebesar **Rp443.367.154.230,10**. Terdapat kenaikan sebesar **Rp26.482.632.517,80** jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar **Rp385.607.365.398,20**. Belanja Operasi diklasifikasikan dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp220.054.148.469,00

Rp213.501.889.839,00

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN). Realisasi Belanja Pegawai pada LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp220.054.148.469,00** atau **93,08%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp236.412.477.623,00**. Adapun rincian belanja pegawai adalah sesuai pada tabel 5.17.



Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Gaji dan Tunjangan	169.592.815.646,00	155.217.463.568,00	91,52	150.163.756.662,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	38.528.219.685,00	38.467.064.130,00	99,84	55.251.894.417,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.186.632.000,00	18.409.020.259,00	91,19	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.667.033.421,00	7.538.298.641,00	98,32	7.615.706.332,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	126.896.871,00	126.896.871,00	100,00	160.762.628,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	310.880.000,00	295.405.000,00	95,02	309.769.800,00
Jumlah	236.412.477.623,00	220.054.148.469,00	93,08	213.501.889.839,00

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menganggarkan belanja untuk Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas/Kontrak pada Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga pada evaluasi APBD direkomendasikan agar belanja honor pegawai tidak tetap/tenaga harian lepas/kontrak tersebut dianggarkan pada rekening kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan dibayarkan pada Belanja Langsung – Belanja Barang dan Jasa yakni Belanja Jasa Administrasi, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa Keamanan, Belanja Jasa Sopir, dan Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/Kontrak, hal ini juga berkesesuaian dengan Bagan Akun Standar.

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp175.366.868.266,00 **Rp161.691.063.199,20**

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai **92,53%** atau sebesar **Rp175.366.868.266,00** dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD yakni sebesar **Rp189.518.505.326,10**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar **Rp13.675.805.066,80**. Rincian Anggaran dan Realisasi belanja barang dan jasa sesuai tabel 5.18 berikut.



Tabel 5.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Barang	37.560.959.305,10	32.747.021.110,00	87,18	28.831.453.257,00
Belanja Bahan Pakai Habis	37.546.858.305,10	32.733.055.090,00	87,18	28.792.694.277,00
Belanja Bahan Tak Habis Pakai	14.101.000,00	13.966.020,00	99,04	38.758.980,00
Belanja Jasa	79.968.519.789,00	74.723.508.093,00	93,44	70.890.974.331,20
Belanja Jasa Kantor	61.860.756.100,00	57.591.002.696,00	93,10	55.892.051.761,20
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.901.872.800,00	10.785.434.800,00	98,93	9.688.347.200,00
Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.374.512.000,00	1.319.902.730,00	96,03	782.623.343,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	824.890.000,00	715.302.000,00	86,71	663.587.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	2.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.455.889,00	0,00	0,00	19.300.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.015.233.000,00	3.359.579.907,00	83,67	2.847.326.903,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	144.000.000,00	138.650.000,00	96,28	115.350.000,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	424.800.000,00	403.635.960,00	95,02	0,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	0,00	0,00	0,00	479.888.124,00
Belanja Pemeliharaan	9.527.736.349,00	9.019.640.021,00	94,67	7.648.288.889,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.336.796.576,00	5.900.521.579,00	93,12	5.109.914.342,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.273.870.260,00	1.212.826.532,00	95,21	552.870.997,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.887.069.513,00	1.876.291.940,00	99,43	1.985.503.550,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	29.999.970,00	100,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	52.721.028.883,00	49.231.389.666,00	93,38	44.531.411.589,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	633.050.000,00	632.350.000,00	99,89	301.150.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	633.050.000,00	632.350.000,00	99,89	208.250.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	92.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	9.107.211.000,00	9.012.959.376,00	98,97	9.487.785.133,00
Jumlah	189.518.505.326,10	175.366.868.266,00	92,53	161.691.063.199,20

2.1.3 Belanja Subsidi

31 Desember 2023

Rp70.000.000,00

31 Desember 2022

Rp0,00

Belanja Subsidi merupakan pemberian uang kepada organisasi kemasyarakatan yakni Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH). Belanja Subsidi Tahun 2023 diberikan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 158 tanggal 6 Juni Tahun 2023 tentang Pemberian Subsidi Kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada Perubahan APBD 2023 Belanja Subsidi dianggarkan sebesar **Rp70.000.000,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp70.000.000,00** atau **100%**.

2.1.4 Belanja Hibah

31 Desember 2023

Rp12.991.445.181,00

31 Desember 2022

Rp6.091.660.528,00

Belanja Hibah merupakan pemberian uang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Belanja Hibah Tahun 2023 diberikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara. Pada perubahan APBD 2023 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp13.626.671.281,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp12.991.445.181,00** atau **95,34%** terdiri dari hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar **Rp5.000.000.000,00**, kepada organisasi kemasyarakatan sebesar **Rp7.364.222.653,00** dan hibah bantuan keuangan



kepada Partai Politik sebesar **Rp627.222.528,00**. Rincian realisasi Belanja Hibah dapat dilihat pada **Lampiran V**.

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	<u>31 Desember 2023</u> Rp3.607.536.000,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp4.322.751.832,00
-------------------------------------	---	---

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 merupakan belanja yang dialokasikan untuk belanja bantuan sosial kepada individu berupa Biaya Akhir Studi kepada 78 penerima yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam empat tahap, tahap pertama SK Nomor 209 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Akhir Studi Tahap I Tahun 2023 sebanyak 27 Mahasiswa, tahap kedua SK Nomor 296 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Akhir Studi Tahap II Tahun 2023 sebanyak sembilan Mahasiswa, tahap ketiga SK Nomor 354 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Akhir Studi Tahap III Tahun 2023 sebanyak 18 Mahasiswa, tahap keempat SK Nomor 435 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Akhir Studi Tahap IV Tahun 2023 sebanyak 24 Mahasiswa.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.607.536.000,00** atau mencapai **96,47%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp3.739.500.000,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi bantuan sosial Tahun 2022 sebesar **Rp4.322.751.832,00** terjadi penurunan sebesar **Rp715.215.832,00**. Adapun rincian realisasi Bantuan Sosial dapat dilihat pada **Lampiran VI**.

2.2 Belanja Modal	<u>31 Desember 2023</u> Rp106.508.493.131,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp153.663.525.497,45
--------------------------	---	---

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal diklasifikasikan menjadi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp114.491.312.160,00** dan terealisasi sebesar **Rp106.508.493.131,00** atau **93,03%**. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2022, mengalami penurunan sebesar **Rp47.155.032.366,45** dari Belanja Modal yang terealisasi sebesar **Rp153.663.525.497,45**.

Penurunan Belanja Modal Tahun 2023 disebabkan karena pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023, khususnya pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, sehingga mempengaruhi penganggaran Belanja Modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2022. Adapun rincian klasifikasi Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 5.19.



Tabel 5.19
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.995.897.581,00	14.970.075.158,00	83,19	42.133.717.363,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.140.202.973,00	40.198.872.110,00	91,07	46.686.878.023,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.936.550.096,00	48.314.091.184,00	98,73	60.424.763.037,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.418.661.510,00	3.025.454.679,00	88,50	4.119.256.074,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	298.911.000,00
Jumlah	114.491.312.160,00	106.508.493.131,00	93,03	153.364.614.497,45

2.2.1 Belanja Modal Tanah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
P **Rp0,00** **Rp0,00**
a

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Tanah.

2.2.2 Belanja Modal **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Peralatan dan Mesin **Rp14.970.075.158,00** **Rp42.133.717.363,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan peralatan dan mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada perubahan APBD 2023, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar **Rp17.995.897.581,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp14.970.075.158,00** atau **83,19%**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp27.163.642.205,00, dari Belanja Modal yang terealisasi sebesar **Rp42.133.717.363,00**. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan anggaran belanja Tahun 2023 sebesar **Rp24.827.299.433,00**. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.20.

Tabel 5.20
Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Alat Besar	177.000.000,00	176.823.000,00	99,90	998.731.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.608.473.040,00	255.990.100,00	15,92	1.655.092.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	517.658.000,00	214.524.150,00	41,44	6.430.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.700.424.705,00	5.488.451.895,00	96,28	4.390.447.477,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	518.900.000,00	507.656.500,00	97,83	218.922.424,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.840.372.476,00	2.651.135.648,00	93,34	20.685.491.678,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.738.555.600,00	999.976.000,00	57,52	1.389.488.000,00
Belanja Modal Komputer	4.509.795.400,00	4.296.693.015,00	95,27	3.129.395.784,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	361.118.360,00	355.265.100,00	98,38	9.659.719.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.600.000,00	23.559.750,00	99,83	0,00
Jumlah	17.995.897.581,00	14.970.075.158,00	83,19	42.133.717.363,00

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
B **Rp40.198.872.110,00** **Rp46.686.878.023,45**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran



untuk perolehan gedung dan bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai **91,07%** dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022, terjadi penurunan sebesar **Rp6.488.005.913,45** dari realisasi anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada APBD 2023 sebesar **Rp44.140.202.973,00** dan terealisasi sebesar **Rp40.198.872.110,00**. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sesuai tabel 5.21.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Bangunan Gedung	44.140.202.973,00	40.198.872.110,00	91,07	46.353.935.459,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan Tugu Titik Kontrol	0,00	0,00	0,00	332.942.564,00
Jumlah	44.140.202.973,00	40.198.872.110,00	91,07	46.686.878.023,45

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp48.314.091.184,00 Rp60.424.763.037,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan jalan, jembatan, jaringan air dan instalasi yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai **98,73%** dari anggaran yang ditetapkan.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan pada APBD 2023 sebesar **Rp48.936.550.096,00** dan realisasinya sebesar **Rp48.314.091.184,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022, terjadi penurunan sebesar **Rp12.110.671.853,00**. Hal ini dikarenakan pada beberapa objek belanja terdapat penurunan anggaran seperti Belanja Modal Jembatan dan Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah. Anggaran dan Realisasi dapat dilihat rinciannya sesuai tabel 5.22.

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan dan jembatan	43.384.443.703,00	43.064.084.590,00	99,26	44.470.319.805,00
Belanja Modal Jalan	43.272.195.868,00	43.046.836.755,00	99,48	42.187.191.040,00
Belanja Modal Jembatan	112.247.835,00	17.247.835,00	15,37	2.283.128.765,00
Belanja Modal Bangunan Air	3.828.379.119,00	3.546.334.845,00	92,63	2.656.299.789,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.537.265.260,00	2.283.562.495,00	90,00	833.552.139,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	980.764.301,00	960.259.870,00	97,91	885.293.631,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	310.349.558,00	302.512.480,00	97,47	937.454.019,00
Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.914.000,00	99,91	3.369.945.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	3.369.945.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengolahan Sampah	100.000.000,00	99.914.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	1.623.727.274,00	1.603.757.749,00	98,77	9.928.198.443,00
Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	1.492.747.274,00	1.475.983.223,00	98,88	5.831.860.663,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	130.980.000,00	127.774.526,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	4.096.337.780,00
Jumlah	48.936.550.096,00	48.314.091.184,00	98,73	60.424.763.037,00



2.2.5 Belanja Modal Aset	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Tetap Lainnya	Rp3.025.454.679,00	Rp4.119.256.074,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap Lainnya berupa buku dan kepustakaan, terbitan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, alat olahraga lainnya, pengadaan tanaman, pengadaan Aset Tetap Renovasi serta pengadaan Aset Tidak Berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai **88,50%** dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan pada APBD 2023 sebesar **Rp3.418.661.510,00** dengan capaian realisasi sebesar **Rp3.025.454.679,00**. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terjadi penurunan yakni sebesar **Rp1.093.801.395,00**.

2.2.6 Belanja Modal Aset	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Lainnya	Rp0,00	Rp298.911.000,00

Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun 2023.

2.3 Belanja Tidak Terduga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp162.587.100,00	Rp794.456.785,00

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar **Rp162.587.100,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp944.669.766,00** atau **17,21%**. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran sebesar Rp44.500.000,00. Selain itu, Belanja Tidak Terduga juga digunakan untuk pengembalian Dana BOP PAUD Tahun 2022 sebesar Rp6.232.000,00, belanja untuk bantuan bencana non alam sebesar Rp7.000.000,00 dan potongan langsung atas pengembalian sisa DAK Non Fisik Tahun 2020 sebesar Rp104.855.100,00.

3. Belanja Transfer	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp116.906.482.370,00	Rp111.687.325.795,00

Belanja Transfer merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa dengan total realisasi sebesar **Rp116.906.482.370,00** atau **99,61%** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp117.364.030.791,00**. Realisasi tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar **Rp470.988.670,00** dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar **Rp116.435.493.700,00** dengan rincian Transfer Bantuan Keuangan kepada 106 Pemerintah Desa di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar **Rp116.435.493.700,00** yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan ke pemerintah desa sebesar **Rp37.508.916.700,00** berupa Alokasi Dana Desa



(ADD) dan Belanja Bantuan Keuangan ke desa berupa Dana Desa sebesar **Rp78.926.577.000,00**. Rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada tabel 5.23.

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023		%	Realisasi 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	928.537.091,00	470.988.670,00	50,72	722.022.195,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	507.412.091,00	379.942.659,00	74,88	722.022.195,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	421.125.000,00	91.046.011,00	21,62	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	116.435.493.700,00	116.435.493.700,00	100,00	110.965.303.600,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	37.508.916.700,00	37.508.916.700,00	100,00	36.491.445.600,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	78.926.577.000,00	78.926.577.000,00	100,00	74.473.858.000,00
Jumlah	117.364.030.791,00	116.906.482.370,00	99,61	111.687.325.795,00

Pendapatan Dana Desa dimanfaatkan untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Rincian penyaluran Alokasi Dana Desa, Rekapitulasi Penerimaan Anggaran Desa per Sumber Dana serta Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran VII, VII.1, VII.2, VII.3 dan VIII**.

4. Pembiayaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp47.998.387.005,10 **Rp24.756.093.826,66**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan pemerintah daerah yang dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar **Rp49.160.796.332,10** dengan realisasi sebesar **Rp47.998.387.005,10** atau sebesar **97,64%**.

Penerimaan Pembiayaan merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp47.998.387.005,10** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.24
Rincian Pembiayaan Tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	29.917.306.951,00
Penghematan Belanja	10.144.977.293,06
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	2.953.694.429,00
Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	4.510.145.807,00
Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.681.137.057,06
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	9.013.830.521,60
Sisa Belanja Lainnya	84.681.566,44
Sisa Dana BOSP	34.333.331,00
Sisa Dana Kapitasi	50.348.235,44
Koreksi SiLPA	(1.162.409.327,00)
Jumlah	47.998.387.005,10



B. Penjelasan Pos Laporan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)	Rp34.978.938.627,94	Rp49.160.796.332,10

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang berkenaan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2023 Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar **Rp49.160.796.332,10**, saldo tersebut digunakan sebagai salah satu dasar perubahan APBD Tahun 2023 dan ditetapkan sebagai pagu anggaran penerimaan pembiayaan SiLPA. Dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar **Rp24.738.612.917,66** terdapat peningkatan sebesar **Rp24.422.183.414,44** atau **98.72%**.

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp47.998.387.005,10**, sehingga terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih awal tahun dengan penggunaan SAL Tahun 2023 sebesar **Rp1.162.409.327,00**. Selisih tersebut merupakan koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang merupakan koreksi Kas di Bendahara BOSP atas kesalahan pelaporan sisa Dana BOSP Tahun 2022 yang disetorkan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.020.673,00 dan sisa kas BOP PAUD Swasta yang dialihkan menjadi negeri pada Tahun 2023 sebesar Rp4.314.000,00, serta potongan penyaluran Dana Bagi Hasil Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah atas lebih bayar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023. Adapun rincian penerimaan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel 5.25.

Tabel 5.25

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Nilai (Rp)
Pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer	29.917.306.951,00
Penghematan Belanja	10.144.977.293,06
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	9.013.830.521,60
Sisa Belanja Lainnya	84.681.566,44
Koreksi SiLPA	(1.162.409.327,00)
Jumlah	47.998.387.005,10

2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp34.978.938.627,94**.



Perhitungan SILPA dapat dilihat pada tabel 5.26 dan Rincian SILPA dapat dilihat pada tabel 5.27.

Tabel 5.26
Perhitungan SILPA Tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan LRA	622.648.112.139,84
Belanja dan Transfer	635.667.560.517,00
Surplus	(13.019.448.377,16)
Pembiayaan Netto	47.998.387.005,10
SILPA Tahun Berjalan	34.978.938.627,94

Tabel 5.27
Rincian SILPA Tahun 2023

Rincian SILPA	APBD TA 2023
I. SILPA earmarked	34.966.821.719,41
1 Sisa Dana JKN	149.195.308,44
2 Dana BOSP yang harus dikembalikan ke RKUN	300.000,00
3 Kewajiban kepada Pihak Ketiga/Lainnya sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	399.164.106,45
4 Sisa Belanja atas penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah s.d Tahun 2023	3.162.831.617,00
5 Sisa Belanja DAK Fisik s.d Tahun 2023	10.059.528.054,52
6 Sisa Belanja DAK Non Fisik s.d Tahun 2023	5.196.417.264,00
7 Sisa Belanja DAU yang ditentukan penggunaannya	15.999.385.369,00
a) DAU SG Bidang Pendidikan	2.892.710.444,00
b) DAU SG Bidang PU	358.605.683,00
c) DAU SG Bidang Kesehatan	2.316.166.036,00
d) DAU SG Bidang PPK	10.431.903.206,00
II. SILPA dari Penghematan Belanja	12.116.908,53
Total SILPA Tahun 2023	34.978.938.627,94

Adapun kesesuaian SILPA dengan posisi kas dapat dilihat pada tabel 5.28.

Tabel 5.28
Rincian Posisi Kas atas SILPA Tahun 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah Tahun Berjalan	32.780.463.006,98
Kas di Bendahara Penerimaan	57.616.418,52
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	149.195.308,44
Kas Dana BOSP	107.620.127,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.884.043.767,00
Jumlah	34.978.938.627,94

Untuk SILPA yang ada pada Kas di Kas Daerah termasuk pengembalian belanja BOP PAUD sebesar Rp300.000,00 dari BOP PAUD Gloria Apeng Sembeka yang telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 29 September 2023 karena lembaga tidak bersedia menerima dana BOP PAUD. Selain itu, terdapat Dana BOP PAUD Bunong sebesar Rp4.200.000,00 yang masih tercatat di Kas BOP PAUD dan telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 15 Januari 2024. Pengembalian ini selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang tercantum dalam KMK Nomor 31/KM7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.



C. Penjelasan Akun- Akun Neraca

Dalam penjelasan akun-akun neraca ini akan diuraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

1. Aset	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.336.824.711.870,76	Rp1.378.123.017.351,38

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan dan diharapkan dapat diperoleh kembali pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.336.824.711.870,76** sebagaimana rincian pada Tabel 5.29 berikut.

Tabel 5.29
Rincian Aset per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Aset Lancar	55.424.145.784,86	71.347.585.723,23	(15.923.439.938,37)
Investasi Jangka Panjang	6.023.400.000,00	6.023.400.000,00	0,00
Aset Tetap	1.261.492.506.551,90	1.287.348.219.415,41	(25.855.712.863,51)
Aset Lainnya	13.884.659.534,00	13.403.812.212,74	480.847.321,26
Jumlah	1.336.824.711.870,76	1.378.123.017.351,38	(41.298.305.480,62)

Berdasarkan rincian pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat penurunan terhadap aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 sebesar **Rp41.298.305.480,62**.

1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp55.424.145.784,86	Rp71.347.585.723,23

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, dan/atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar **Rp55.424.145.784,86** sebagaimana diuraikan pada tabel 5.30.



Tabel 5.30
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	32.780.463.006,98	49.076.114.765,66	(16.295.651.758,68)
Kas di Bendahara Penerimaan	57.616.418,52	0,00	57.616.418,52
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	149.195.308,44	50.348.235,44	98.847.073,00
Kas Dana BOSP	107.620.127,00	34.333.331,00	73.286.796,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.884.043.767,00	0,00	1.884.043.767,00
Kas Lainnya	1.028.609.006,00	0,00	1.028.609.006,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	1.189.266.999,00	1.613.551.407,00	(424.284.408,00)
Piutang Retribusi Daerah	42.180.000,00	46.546.000,00	(4.366.000,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	261.975.843,63	495.838.181,91	(233.862.338,28)
Piutang Transfer Antar Daerah	9.421.120.444,36	9.390.994.514,00	30.125.930,36
Penyisihan Piutang	(349.449.905,40)	(785.006.898,70)	435.556.993,30
Beban Dibayar Dimuka	218.136.824,65	181.117.610,96	37.019.213,69
Bagian Lancar Tuntutan ganti rugi	0,00	93.899.650,00	(93.899.650,00)
Piutang Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Persediaan	8.623.367.944,68	11.149.848.925,96	(2.526.480.981,28)
Jumlah	55.424.145.784,86	71.347.585.723,23	(15.923.439.938,37)

Berdasarkan rincian pada Tabel 5.30, terlihat bahwa terdapat penurunan Aset Lancar milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar **Rp15.923.439.938,37**.

1.1.1 Kas di Kas Daerah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp32.780.463.006,98 **Rp49.076.114.765,66**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp32.780.463.006,98** merupakan saldo di Rekening Kas Umum Daerah yang dikuasai Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Dan Bagian Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023. Dari saldo tersebut terdapat dana BOP PAUD sebesar Rp300.000,00 yang sudah disetor ke kas daerah untuk dikembalikan ke kas negara karena lembaga tidak bersedia menerima.

Selama Tahun 2023 untuk mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas, pemanfaatan *idle money* serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membuka rekening deposito pada Bank SulutGo Cabang Boroko yang kemudian rekening ditutup per 18 Desember 2023. Pemerintah daerah juga selalu memantau perkembangan tingkat suku bunga sesuai dengan *rate* Bank Indonesia sebagai bentuk memaksimalkan pengelolaan deposito. Berikut merupakan rincian Kas di Kas Daerah dan deposito yang pernah dibuka selama Tahun 2023 sesuai tabel 5.31.

Tabel 5.31
Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023

No.	Nomor Rekening	Bank	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	020.01.12.000001-5	Bank SulutGo Cabang Boroko	32.780.463.006,98	49.076.114.765,66
2	020.03.01.000464-5	Deposito Bank SulutGo Cabang Boroko	0,00	0,00
3	020.03.01.000465-6	Deposito Bank SulutGo Cabang Boroko	0,00	0,00
4	020.03.01.000466-0	Deposito Bank SulutGo Cabang Boroko	0,00	0,00
Jumlah			32.780.463.006,98	49.076.114.765,66



1.1.2 Kas di Bendahara **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Penerimaan **Rp57.616.418,52** **Rp0,00**

Terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun 2023 sebesar **Rp57.616.418,52**. Kas tersebut telah disetorkan ke RKUD pada Tahun 2024, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.32.

Tabel 5.32

Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	OPD	Nilai (Rp)	Tanggal setor ke RKUD
1	BPKPD -SKPKD	0,52	2/Jan/24
2	DLHK	183.916,00	22/Feb/24
3	RSUD	50.000.000,00	26/Jan/24
		6.788.000,00	4/Jan/24
4	Puskesmas Mokoditek	2,00	28/Feb/24
5	Puskesmas Bohabak	5.000,00	19/Jan/24
6	Puskesmas Bolangitang	590.500,00	20/Mar/24
7	Puskesmas Tuntung	5.000,00	26/Feb/24
8	Puskesmas Ollot	19.000,00	20/Mar/24
9	Puskesmas Sangtombolang	25.000,00	19/Jan/24
Jumlah		57.616.418,52	

1.1.3 Kas di Bendahara **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Pengeluaran **Rp0,00** **Rp0,00**

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember Tahun 2023.

1.1.4 Kas Dana Kapitasi **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
pada FKTP **Rp149.195.308,44** **Rp50.348.235,44**

Saldo Kas Dana Kapitasi FKTP di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp149.195.308,44 yang terdapat pada Puskesmas (PKM) se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel 5.33.

Tabel 5.33

Rekening Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2023

No	OPD	Saldo (Rp)
Sisa Dana Kapitasi		
1	PKM Sangkub	4.620,00
2	PKM Bintauna	2.838.675,91
3	PKM Bohabak	44.709.354,70
4	PKM Bolangitang	13.106,00
5	PKM Boroko	16.220.485,00
6	PKM Buko	17.183.254,52
7	PKM Tuntung	1.543.852,31
8	PKM Bintauna Pantai	44.613.556,00
9	PKM Ollot	4.209.096,00
10	PKM Mokoditek	17.012.482,00
11	PKM Sangtombolang	831.024,00
12	PKM Biontong	15.802,00
Jumlah		149.195.308,44



Penetapan Perubahan Tata Nama/Nomenklatur Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Nomenklatur perubahan nama satuan pendidikan lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

Dana BOS untuk Sekolah Swasta dialokasikan untuk SD Advent Bohabak sebesar **Rp50.490.000,00** dan SD Kristen XII Sumba sebesar **Rp33.660.000,00** serta SD Islam terpadu Waladun Sholeh sebesar **Rp82.170.000,00**. Selain Dana BOS, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga menerima Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yang menerima Dana BOP PAUD sebanyak 171 Sekolah PAUD sebesar Rp2.211.271.000,00 yang terdiri dari 27 Sekolah PAUD Negeri dan 144 Sekolah PAUD Swasta. Sedangkan untuk BOP Kesetaraan sebesar Rp1.022.200.000,00 terdiri dari empat lembaga negeri dan satu lembaga swasta. Rincian anggaran, realisasi dan sisa kas dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada masing-masing satuan pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran IX, IX.1, IX.2 dan IX.3**

1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.884.043.767,00	Rp0,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas di Bendahara BOK Per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.884.043.767,00**. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada tabel 5.36.

Tabel 5.36

Rekening Kas Dana BOK per 31 Desember 2023

No	Nama Puskesmas	Saldo (Rp)
1	PKM Sangkub	190.392.938,00
2	PKM Bintauna	260.957.813,00
3	PKM Bohabak	180.114.434,00
4	PKM Bolangitang	175.719.023,00
5	PKM Boroko	245.350.651,00
6	PKM Buko	221.729.326,00
7	PKM Tuntung	146.443.005,00
8	PKM Bintauna Pantai	56.415.991,00
9	PKM Ollot	73.967.799,00
10	PKM Mokoditek	173.883.785,00
11	PKM Sangtombolang	79.949.120,00
12	PKM Biontong	79.119.882,00
Jumlah		1.884.043.767,00

Selain sisa kas tersebut terdapat kas tunai di Bendahara Pengeluaran BOK sebesar Rp2.956,770.00 yang merupakan pengembalian Belanja Jasa Kalibrasi yang melebihi pagu anggaran pada Puskesmas Ollot, namun sudah disetorkan kembali ke rekening VA Kalibrasi BOK PKM Ollot pada tanggal 12 Januari 2024.

Tata cara penggunaan Dana DAK Nonfisik Kesehatan Tahun 2023 telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.



1.1.7 Kas Lainnya	<u>31 Desember 2023</u> Rp1.028.609.006,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
--------------------------	---	---

Kas Lainnya merupakan saldo kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan, berupa pendapatan seperti bunga deposito, jasa giro, pungutan pajak dan pengembalian belanja yang belum disetor ke RKUD, belanja yang sudah dicalirkan namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga dan kas dari hibah langsung. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.028.609.006,00** terdiri dari dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari Bank SulutGo Cabang Boroko sebesar **Rp1.028.584.006,00** yang diserahkan kepada panitia pengelola CSR dan belum direalisasikan sampai 31 Desember 2023 serta sisa dana *sponsorship* sebesar **Rp25.000,00** pada Dinas Pariwisata yang sudah disetorkan ke RKUD pada tanggal 19 April 2024.

1.1.8 Piutang Pajak Daerah	<u>31 Desember 2023</u> Rp1.189.266.999,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp1.613.551.407,00
-----------------------------------	---	---

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023. Total Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.189.266.999,00** sedangkan pada Tahun 2022 tercatat sebesar **Rp1.613.551.407,00** sehingga terjadi penurunan sebesar **Rp424.284.408,00**. Adapun rincian piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel 5.37.

Tabel 5.37
Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Pajak Reklame	31.330.923,00	13.927.861,00
2	Pajak Penerangan Jalan	285.041.082,00	215.785.284,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	416.288.000,00	413.077.000,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	456.606.994,00	970.761.262,00
Jumlah		1.189.266.999,00	1.613.551.407,00

a. Piutang Pajak Reklame	<u>31 Desember 2023</u> Rp31.330.923,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp13.927.861,00
---------------------------------	--	--

Terdapat Piutang Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar **Rp31.330.923,00** yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor oleh 16 wajib pajak. Berikut daftar piutang pajak reklame sesuai nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sesuai tabel 5.38.



Tabel 5.38
Piutang Pajak Reklame Tahun 2023

No.	Tanggal SKPD	Nomor SKPD	Nama Usaha	Alamat	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22 September 2022	PRPN #143/IX/2022	Sicepat Expres	Boroko Kec. Kaidipang	1.397.485,00	0,00	0,00	1.397.485,00
2	22 Februari 2022	PRPN #29/II/2022	UD.Veron	Sono Kec. Bolangitang Barat	283.938,00	0,00	0,00	283.938,00
3	22 Maret 2022	PRPN #39/III/2022	CV. Lumandak Sejahtera	Sono Kec. Bolangitang Barat	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4	22 Maret 2022	PRPN #40/III/2022	Hikma.Com	Kel. Bintauna Kec. Bintauna	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
5	04 Juli 2022	PRPN #80/VII/2022	Candra Taylor	Boroko Kec. Kaidipang	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6	04 Juli 2022	PRPN #82/VII/2022	Bhtiar Jaya	Tombolango Kec. Sangkub	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
7	08 Juli 2022	PRPN #87/VII/2022	PT. Gerbang Nusantara Berkarya	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
8	08 Juli 2022	PRPN #88/VII/2022	CV. Berkat Amugerah Bersama	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
9	08 Juli 2022	PRPN #89/VII/2022	PT. Dayana Cipta	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
10	24 Agustus 2022	PRPN# 120/VIII/2022	PT. Bank Rakyat Indonesia	Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	3.988.938,00	0,00	3.988.938,00	0,00
11	07 September 2022	PRPN# 126/IX/2022	PT. Akhtar Mustapa Elektrikal	Boroko Kec. Kaidipang	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
12	22 September 2022	PRPN# 139/IX/2022	RM. Ayam Singapore	Boroko Kec. Kaidipang dan Bintauna Kec. Bintauna	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
13	22 September 2022	PRPN# 140/IX/2022	SPBU Pertamina	Kuala Utara Kec. Kaidipang	3.251.500,00	0,00	0,00	3.251.500,00
14	07 Oktober 2022	PRPN# 155/X/2022	CV. Neraca Karsa Rupa	Sangkub Timur Kec. Sangkub	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15	27 Oktober 2022	PRPN# 161/X/2022	Toko Hidup Baru	Langi Kec. Bolangitang Barat	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
16	21 November 2022	PRPN# 168/XI/2022	PT. Mitra Tri Sakti	Boroko Kec. Kaidipang	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
17	18 Januari 2023	PRPN #009/I/2023	CV. Sumber Pratama Abadi	Boroko Utara	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
18	11 April 2023	PRPN #039/IV/2023	CV. Berkat Jaya Saudara	Boroko Utara	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
19	07 Agustus 2023	PRPN #084/VIII/2023	PT. Setia Budi Dua (Gudang Garam)	Tomohon	0,00	13.048.250,00	0,00	13.048.250,00
20	07 Agustus 2023	PRPN #085/VIII/2023	PT. Restu Sejahtera Abadi (SPBU Batulintik)	Batulintik	0,00	1.858.000,00	0,00	1.858.000,00
21	07 Agustus 2023	PRPN #089/VIII/2023	PT. Bank Prisma Dana	Boroko	0,00	1.928.500,00	0,00	1.928.500,00
22	07 Agustus 2023	PRPN #092/VIII/2023	PT. Bank Rakyat Indonesia	Padang	0,00	1.680.125,00	0,00	1.680.125,00
23	14 Agustus 2023	PRPN #098/VIII/2023	PT. Rafi Mandiri Cemerlang Pres	Boroko Utara	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
24	04 September 2023	PRPN #108/IX/2023	Apotek Sky Medika	Jambusarang	0,00	1.602.125,00	0,00	1.602.125,00
25	29 September 2023	PRPN #118/IX/2023	UD. Sarmas	Bunia	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26	07 November 2023	PRPN #128/XI/2023	CV. @Comp	Boroko	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
Jumlah					13.927.861,00	21.752.000,00	4.348.938,00	31.330.923,00

b. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp285.041.082,00 Rp215.785.284,00

Terdapat Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar **Rp285.041.082,00** yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor oleh PT. PLN (Persero) Cabang Kotamobagu ke Kas Daerah. Terhadap saldo piutang PPJ tersebut, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 15 Januari 2024.

c. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp416.288.000,00 Rp413.077.000,00

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diakui sesuai penetapan pajak Tahun 2023, sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp416.288.000,00**. Berikut daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam sesuai tabel 5.39.



1.1.9 Piutang Retribusi Daerah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp42.180.000,00 **Rp46.546.000,00**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp42.180.000,00** merupakan Piutang Retribusi atas penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2022. Tidak terdapat penambahan penetapan Piutang Retribusi Daerah pada Tahun 2023. Rincian nomor dan tanggal SKRD Piutang retribusi (pengendalian menara telekomunikasi) disajikan pada **Lampiran X**.

1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp261.975.843,63 **Rp495.838.181,91**

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan piutang klaim BPJS RSUD bulan November 2023, dengan bukti verifikasi dari BPJS Tondano Desember 2023 sebesar **Rp13.338.600,00**. Adapun klaim dimaksud sudah diterima pada tanggal 26 Januari 2024. Selain itu, terdapat pula piutang denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar **Rp248.637.243,63** yang terdiri dari RSUD sebesar Rp4.693.825,50 dan pada Dinas PUTR sebesar Rp243.943.418,00 dan sisa piutang Tahun 2022 sebesar Rp0,13.

1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp9.421.120.444,36 **Rp9.390.994.514,00**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang DBH Provinsi. Pada Tahun 2023 Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp9.421.120.444,36. Rincian piutang dapat dilihat pada tabel 5.42.

Tabel 5.42
Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.946.238.297,88
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.392.078.998,50
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.365.607.364,85
4	Pajak Air Permukaan	53.407.886,13
5	Pajak Rokok	663.787.897,00
Jumlah		9.421.120.444,36

1.1.12. Penyisihan Piutang **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
(Rp349.449.905,40) **(Rp785.006.898,70)**

Penyisihan piutang yang diperhitungkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun 2023 adalah sebesar **Rp349.449.905,40**. Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi



Tabel 5.45
Rincian Beban Dibayar Dimuka

NO	OPD	Keperluan Sewa Rumah	Tgl Kontrak	Jangka Waktu	Berakhir	Nilai Kontrak (Rp)	Perhari	Sisa Manfaat/Beban dibayar dimuka (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Tempat tunggu kelahiran di Kab.Gorontalo	1/Dec/23	365 hari	1/Dec/24	18.500.000,00	50.684,93	335 16.979.452,05
2	Dinas Kesehatan	Tempat tunggu kelahiran di Kab.Bone Bolango	1/Dec/23	366 hari	1/Dec/24	18.500.000,00	50.684,93	335 16.979.452,05
3	SETDA Bag. Umum	Rumah dinas sementara Wakapolres	3/Apr/23	365 hari	3/Apr/24	31.537.000,00	86.402,74	93 8.035.454,79
4	SETDA Bag. Umum	Asrama mahasiswa Bolmut di Palu	1/Nov/23	365 hari	1/Nov/24	60.000.000,00	164.383,56	305 50.136.986,30
5	SETDA Bag. Umum	Asrama mahasiswa Bolmut di Yogyakarta	1/Nov/23	365 hari	1/Nov/24	75.000.000,00	205.479,45	305 62.671.232,88
6	SETDA Bag. Umum	Asrama mahasiswa Bolmut di Tondano	1/Nov/23	365 hari	1/Nov/24	63.000.000,00	172.602,74	305 52.643.835,62
7	Dinas PPKBPP-PA	Rumah Aman Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	11/Apr/23	365 hari	11/Apr/24	40.000.000,00	109.589,04	101 11.068.493,15
Jumlah								218.514.906,85

Pengurangan beban dibayar dimuka sebesar Rp181.117.610,96 terdiri dari:

- a) Pengurangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp73.803.347,95 merupakan sewa atas rumah jabatan Kapolres dan Wakapolres yang masa manfaatnya telah selesai pada 5 Januari dan 15 Maret 2023, serta Asrama Mahasiswa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berlokasi di Palu dan Minahasa yang masa manfaatnya telah selesai pada 2 November dan 7 Juli 2023.
- b) Pengurangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp107.314.263,01 terdiri dari biaya sewa rumah tunggu bersalin di Limboto dan Bone Bolango yang masa manfaatnya telah selesai pada 31 Juli 2023 dan 4 Desember 2023 sebesar Rp45.369.863,01, serta dana belanja iuran jaminan kesehatan BPJS yang lebih bayar atas tagihan bulan Desember 2022 sebesar Rp61.944.400,00.

1.1.15 Piutang Lainnya **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp10.000.000,00 **Rp0,00**

Piutang Lainnya merupakan pos untuk mencatat tagihan kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional. Piutang Lainnya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp10.000.000,00** merupakan koreksi atas kelebihan pembayaran pengawasan Ruang Guru SMP 1 Bolangitang, yang telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 14 April 2024 sebesar nilai netto yakni Rp8.667.500,00 sedangkan atas potongan pajak pusat yang telah disetorkan ke RKUN sebesar Rp1.332.500,00 akan direkonsiliasikan dengan KPP Pratama Kotamobagu pada Tahun 2024.

1.1.16 Persediaan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp8.623.367.944,68 **Rp11.149.848.925,96**

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Barang-barang yang dimaksudkan adalah barang yang digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun serta barang yang disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir. Saldo persediaan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp8.623.367.944,68**. Saldo



tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada Perangkat Daerah dengan rincian sesuai tabel 5.46.

Tabel. 5.46
Rincian Mutasi Persediaan Tahun 2023

Jenis Persediaan	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir (Rp)
ATK	31.458.649,00	822.755.568,00	840.118.217,00	14.096.000,00
Kertas & Cover	9.259.620,00	756.988.994,00	765.051.114,00	1.197.500,00
Bahan Cetak	53.133.365,00	1.756.432.433,00	1.767.262.298,00	42.303.500,00
Perabotan Kantor	29.797.228,00	518.563.682,00	547.771.666,00	589.244,00
Benda Pos	0,00	327.749.899,00	327.749.899,00	0,00
Alat Listrik	609.168,00	225.715.221,00	226.324.389,00	0,00
Bahan Komputer	0,00	4.365.705,00	4.365.705,00	0,00
Bahan Kimia	136.916.676,00	320.994.637,00	396.223.679,00	61.687.634,00
Alat Laboratorium	26.995.200,00	12.864.835,00	39.860.035,00	0,00
Pakan Natura	28.218.688,00	61.407.800,00	35.243.126,00	54.383.362,00
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	0,00	53.823.700,00	0,00	53.823.700,00
Bibit Tanaman	0,00	158.703.034,00	158.703.034,00	0,00
Bibit Ternak	0,00	219.295.000,00	219.295.000,00	0,00
Bahan Lainnya	4.195.800,00	387.587.800,00	387.587.800,00	4.195.800,00
Bantuan Sosial Masyarakat	0,00	16.104.050,00	16.104.050,00	0,00
Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	3.209.215.108,00	8.632.799.447,01	10.914.912.556,01	927.101.999,00
Bahan Makanan	0,00	187.034.000,00	0,00	187.034.000,00
Susu	0,00	29.003.540,00	0,00	29.003.540,00
Karcis	36.927.520,00	14.691.880,00	34.716.920,00	16.902.480,00
Alat Pendukung Olahraga	0,00	173.578.500,00	173.578.500,00	0,00
Pakaian Olahraga	0,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
Obat	7.374.135.903,96	11.578.122.796,11	11.721.209.514,39	7.231.049.185,68
Jumlah	10.940.862.925,96	26.296.982.521,12	28.614.477.502,40	8.623.367.944,68

Daftar Persediaan Per Perangkat Daerah juga dapat dilihat pada **Lampiran XII**.

Rincian peruntukan persediaan dari nilai total sebesar **Rp8.623.367.944,68** terdiri dari barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat sebesar **Rp7.310.333.709,68** barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa susu, bahan makanan, pakan natura, bahan kimia serta bahan bangunan dan konstruksi sebesar **Rp385.932.236,00**, dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar **Rp927.101.999,00**. Dari barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak ketiga terdapat aset berupa pembangunan paving jalan masuk perumahan Boroko Timur Tahun 2022 sebesar **Rp52.814.000,00** pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Namun tanah yang digunakan untuk membangun paving jalan tersebut belum dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, sehingga belum dapat diakui sebagai aset tetap jalan dan untuk sementara dicatat sebagai persediaan. Telah terdapat Hibah tanah untuk jalan tersebut dari PT PET (*Developer*) kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan nomor LR/140/POR-47/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, namun sertifikat tanah belum dilakukan balik nama.

Nilai total Persediaan sebesar **Rp8.623.367.944,68** tersebut tidak termasuk persediaan rusak/kedaluwarsa. Selama Tahun 2023 terdapat Persediaan yang telah rusak/kedaluwarsa sebesar Rp960.570.989,35 sebagaimana rincian pada tabel 5.47.



Tabel 5.47
Daftar Barang Kedaluwarsa Tahun 2023

No.	OPD	Jenis Persediaan				Nilai (Rp)
		Natura	Blangko	Obat	Barang Medis Habis Pakai	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.615.375,00	0,00	0,00	0,00	9.615.375,00
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
3	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	0,00		150.920.630,76	69.375.345,40	220.295.976,16
4	RSUD	0,00		313.089.727,32	0,00	313.089.727,32
5	PKM Sangtombolang	0,00		6.429.104,24	0,00	6.429.104,24
6	PKM Sangkub	0,00		157.062.439,13	0,00	157.062.439,13
7	PKM Bintauna	0,00		31.420.993,24	0,00	31.420.993,24
8	PKM Biontong	0,00		975.597,50	0,00	975.597,50
9	PKM Ollot	0,00		15.476.848,67	9.292.189,96	24.769.038,63
10	PKM Bolangitang	0,00		31.335.475,00	0,00	31.335.475,00
11	PKM Tuntung	0,00		28.484.983,63	0,00	28.484.983,63
12	PKM Buko	0,00		60.103.850,90	36.988.428,60	97.092.279,50
	Jumlah	9.615.375,00	40.000.000,00	795.299.650,39	115.655.963,96	960.570.989,35

Terkait Persediaan pada BPBD yang kedaluwarsa telah dilakukan pemusnahan Persediaan Bahan Natura pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp2.142.855,00 dan Rp7.472.520,00 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Barang Persediaan Nomor 360/01/BPBD/V/2023 dan Nomor 360/02/BPBD/V/2023.

1.2. Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp6.023.400.000,00 **Rp6.023.400.000,00**

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar **Rp6.023.400.000,00** dapat dirinci sesuai pada tabel 5.48.

Tabel 5.48
Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2022(Rp)	Mutasi		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
	Investasi Permanen				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.023.400.000,00	0,00	0,00	6.023.400.000,00
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	6.023.400.000,00	0,00	0,00	6.023.400.000,00

Pada Tahun 2023, tidak ada penambahan lembar saham pemerintah daerah.

a. Investasi Non Permanen

Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan negara/daerah dan pihak lain sebesar **Rp0,00**.

b. Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada PT. Bank SulutGo. Per 31 Desember 2023 total investasi sebesar **Rp6.023.400.000,00** dengan kepemilikan saham yakni **0,48%** sesuai Berita Acara RUPS nomor 01 tanggal 5 Februari 2024.

Dengan nomor surat saham kolektif: 127.00.039; 127.00.085; 127.00.111; 127.00.122 terdiri dari 60.234 lembar saham.

Metode pencatatan investasi menggunakan *cost method* yakni investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Bank SulutGo.



Investasi Permanen pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham dan penyertaan modal berupa tanah, yang setelah dilakukan penilaian dikonversi menjadi jumlah saham.

1.3 Aset Tetap 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp1.261.492.506.551,90 **Rp1.287.348.219.415,41**

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.261.492.506.551,90** merupakan saldo Aset Tetap berdasarkan nilai buku. Nilai buku diperhitungkan dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap dengan nilai total tersebut merupakan aset yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan rincian sesuai tabel 5.49.

Tabel 5.49
Rincian Mutasi Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi 2023 (Rp)		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
		Tambah	Kurang			
Tanah	58.214.598.662,00	2.270.929.500,00	1.895.179.066,00	58.590.349.096,00	0,00	58.590.349.096,00
Peralatan dan Mesin	359.300.911.087,55	31.006.147.413,00	36.238.520.408,84	354.068.538.091,71	(253.421.402.812,83)	100.647.135.278,88
Gedung dan Bangunan	584.961.231.011,18	99.890.347.830,62	28.772.311.911,65	656.079.266.930,14	(83.117.879.183,00)	572.961.387.747,14
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.082.618.843.069,52	71.132.995.686,28	3.106.347.860,28	1.150.645.490.895,52	(675.086.673.018,64)	475.558.817.876,88
Aset Tetap Lainnya	46.602.234.612,09	3.711.572.375,41	2.803.892.011,50	47.509.914.976,00	0,00	47.509.914.976,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	63.619.444.625,02	3.797.258.306,00	61.191.801.354,02	6.224.901.577,00	0,00	6.224.901.577,00
Jumlah	2.195.317.263.067,36	211.809.251.111,31	134.008.052.612,29	2.273.118.461.566,37	-1.011.625.955.014,47	1.261.492.506.551,90

1.3.1 Tanah 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp 58.590.349.096,00 **Rp58.214.598.662,00**

Saldo Aset Tetap Tanah pada Tahun 2023 sebesar **Rp58.590.349.096,00** Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar **Rp375.750.434,00** untuk Tahun 2023 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.015.000.000,00 dan pengurangan sebesar **Rp639.249.566,00** dari saldo Aset Tetap Tanah Tahun 2022 sebesar **Rp58.214.598.662,00**. Pada Tahun 2023 tidak terdapat Belanja Modal tanah. Penambahan Tanah dipengaruhi oleh penambahan adanya hibah dan proses penghapusan aset tetap tanah yang tercatat ganda dengan Provinsi Sulawesi Utara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.50.

Tabel 5.50
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	58.214.598.662,00
Belanja Modal Tahun 2023	0,00
Bertambah :	
Hibah tanah ke Pemerintah Bolaang Mongondow Utara atas	1.015.000.000,00
Pengalihan sekolah TK Swasta Ke Negeri SK No.115 tahun 2023	
Jumlah	1.015.000.000,00
Berkurang :	
Penghapusan Aset tetap tanah yang tercatat sebagai Barang Milik Negara di Dinas Perkebunan Provinsi Daerah Sulawesi Utara SK Bupati Nomor 457 tanggal 20 Desember 2023	6.947.616,00
Hibah tanah ke Dirjen Perhubungan Laut sesuai SK 456 TAHUN 2023	632.301.950,00
Jumlah	639.249.566,00
Saldo Per 31 Desember 2023	58.590.349.096,00



Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Koreksi penambahan nilai atas tanah untuk 17 bidang tanah atas pengalihan sekolah TK Swasta ke Negeri sesuai SK Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 115 Tahun 2023 sebesar Rp1.015.000.000,00 dengan rincian:
 - 1) Tanah TK Mardatillah senilai Rp60.000.000,00;
 - 2) Tanah TK Citra Lestari senilai Rp50.000.000,00;
 - 3) Tanah TK Annur senilai Rp75.000.000,00;
 - 4) Tanah TK Dahlia senilai Rp60.000.000,00;
 - 5) Tanah TK Tanjung Buaya senilai Rp50.000.000,00;
 - 6) Tanah TK Berlian senilai Rp50.000.000,00;
 - 7) Tanah TK Az Zikra senilai Rp75.000.000,00;
 - 8) Tanah TK Inagolang senilai Rp75.000.000,00;
 - 9) Tanah TK Mustika Srikandi senilai Rp75.000.000,00;
 - 10) Tanah TK Budi Luhur senilai Rp50.000.000,00;
 - 11) Tanah TK Pugu-Pugu senilai Rp75.000.000,00;
 - 12) Tanah TK Terpadu Permata Bunda senilai Rp50.000.000,00;
 - 13) Tanah TK Terpadu Pertiwi senilai Rp35.000.000,00;
 - 14) Tanah TK Terpadu Delima senilai Rp40.000.000,00;
 - 15) Tanah TK Al Multazam senilai Rp75.000.000,00;
 - 16) Tanah TK Flamboyan senilai Rp75.000.000,00;
 - 17) Tanah TK Anggrek senilai Rp45.000.000,00.

Pengurangan,

- a. Sesuai SK Bupati Nomor 456 tanggal 20 Desember 2023, penghapusan sebesar Rp632.301.950,00 atas tanah pelabuhan Tuntung seluas 9.173 M² kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang.
- b. Sesuai SK Bupati Nomor 457 tanggal 20 Desember 2023, penghapusan sebesar Rp6.947.616,00 atas 14 Bidang Tanah Pemerintah Daerah yang masih tercatat sebagai Barang Milik Negara di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar hibah dari Kabupaten Bolaang Mongondow dengan rincian:
 - 1) Tanah kantor di Desa Boroko senilai Rp110.116,00;
 - 2) Tanah Perumahan UPP Kecamatan Bolangitang Rp400.000,00;
 - 3) Tanah Perumahan di Desa Saleo Rp281.250,00;
 - 4) Tanah Perumahan di Desa Bolangitang Rp281.250,00;
 - 5) Tanah Perumahan di Desa Iyok Rp427.500,00;
 - 6) Tanah Perumahan di Desa Bunia Rp150.000,00;
 - 7) Tanah Perumahan di Desa Sangkub Rp1.250.000,00;
 - 8) Tanah kantor di Desa Tuntung Rp750.000,00;
 - 9) Tanah kantor di Desa Nunuka/Mokoditek Rp427.500,00;



- 10) Tanah kantor di Desa Sonuo Rp427.500,00;
- 11) Tanah kantor di Kelurahan Bintauna Rp250.000,00;
- 12) Tanah kantor dan perumahan di Desa Boroko Rp942.500,00;
- 13) Tanah kantor di Desa Buko Rp625.000,00;
- 14) Tanah kantor di Desa Bohabak Rp625.000,00.

Untuk rincian Aset Tetap Tanah per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.1.**

1.3.2. Peralatan dan Mesin	<u>31 Desember 2023</u> Rp354.068.538.091,71	<u>31 Desember 2022</u> Rp359.300.911.087,55
-----------------------------------	---	---

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar **Rp354.068.538.091,71**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar **Rp5.232.372.995,84** dari saldo Tahun 2022 sebesar **Rp359.300.911.087,55**. Disamping penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023, pergerakan aset dipengaruhi oleh adanya mutasi penambahan dan pengurangan yang diperoleh melalui reklasifikasi Aset Tetap dari gedung dan bangunan, Hibah Aset Tetap dari Kementerian Kesehatan, pihak ketiga dan Pendidikan koreksi dari beban barang jasa dan koreksi dari beban barang Dana BOS, koreksi Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi/ekstrakomptabel serta adanya perubahan kondisi ke rusak berat dan penghapusan barang milik daerah. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sesuai tabel 5.51.

Tabel 5.51
Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal 2022	359.300.911.087,55
Belanja Modal Tahun 2023	14.970.075.158,00
Bertambah:	
Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	730.463.802,00
Reklasifikasi dari JIJ	
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00
Koreksi beban barang dan jasa	70.505.500,00
Koreksi penambahan atas hibah dari kementerian Kesehatan di dinas kesehatan	2.407.000.000,00
Koreksi penambahan atas hibah dari kementerian Kesehatan di puskesmas bohabak	554.666.667,00
Pengakuan hutang kendaraan UTDRS RSUD Bolmut	1.099.000.000,00
Koreksi penambahan atas hibah atas pengalihan TK negeri sesuai SK nomor 115 tahun 2023	406.800.000,00
Koreksi dari rusak berat kendaraan Dinas PPKBPP-PA	174.500.000,00
Jumlah	5.467.935.969,00
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	38.959.000,00
Koreksi atas peralatan dan mesin yang rusak berat	23.479.112.213,64
Koreksi ke barang ekstrakomptabel	731.541.854,00
Koreksi ke beban barang dan jasa	1.420.771.055,20
Jumlah	25.670.384.122,84
Saldo Per 31 Desember 2023	354.068.538.091,71



Untuk rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.2**.

Dari tabel 5.51 dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap peralatan mesin selain dari Belanja Modal sebagai berikut :

Penambahan,

- a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp730.463.802,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) SDN 2 Tombulang Rp34.381.562,00;
 - 2) SDN 1 Dalapuli Rp7.337.471,00;
 - 3) SMPN 2 Pinogaluman Rp30.858.000,00;
 - 4) TK Negeri Multazam Rp5.291.823,00;
 - 5) SDN 1 Bolangitang Rp42.024.619,00;
 - 6) SDN 1 Ollot 2/SDN 14 BOLBAR Rp39.738.000,00;
 - 7) SMPN 1 Bolangitang Barat Rp73.981.500,00;
 - 8) SMPN 2 Bolangitang Barat/SMP 10 Bolaang Mongondow Utara Rp18.913.708,00;
 - 9) SKB Bolangitang Rp24.031.500,00;
 - 10) SDN 1 Bohabak 2 Rp153.328.080,00;
 - 11) SDN 1 Biontong/SDN 1 Bolit Rp32.688.501,00;
 - 12) SMPN 3 Bolangitang Timur Rp208.168.485,00;
 - 13) SDN 1 Kuhanga/SDN 2 Bintauna Rp29.526.000,00;
 - 14) SDN 1 Busisingo Rp21.978.000,00; dan
 - 15) TK Terpadu Budi Luhur Rp8.216.553,00.
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp25.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian:
 - 1) SDN 1 Dengi/SDN 15 Pinogaluman Rp3.000.000,00;
 - 2) SDN 1 Tuntung Timur Rp5.500.000,00;
 - 3) SDN 2 Sonuo/SDN 15 Bolbar Rp5.500.000,00;
 - 4) SDN 1 Bohabak 2 Rp6.500.000,00; dan
 - 5) SMPN 1 Bolangitang Timur/SMPN 5 Bolmut Rp4.500.000,00.
- c. Koreksi Penambahan dari Beban Barang dan Jasa sebesar Rp70.505.500,00 terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp9.500.000,00 pada TK Negeri Altazam dan TK Annur senilai Rp9.500.000,00;
 - 2) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp22.866.000,00 merupakan koreksi dari belanja suku cadang alat laboratorium yaitu alat DICTEST KIT sesuai Dokumen 091/SPP-LS/BL/2.03.1.1/XI/2023 tanggal 24 November 2023;
 - 3) Dinas Perdagangan senilai Rp20.639.500,00 merupakan koreksi dari belanja alat kantor lainnya yaitu pembelian neon box kantor dinas perdagangan sesuai dokumen 118/SPP-LS/BL/3.06.1.1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023; dan
 - 4) Puskesmas Sangkub senilai Rp8.000.000,00 merupakan koreksi dari rekening alat rumah tangga lainnya sesuai Dokumen 037/SPP-LS/BL/1.02.1.3/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 pembelian gordin.



- d. Koreksi pengakuan utang pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.099.000.000,00 sesuai kontrak nomor 001/RSUD-BMU/KONTRAK/E.P/044/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan Berita Acara penerimaan Barang Nomor 900/RSUD/BMU/1357/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
- e. Koreksi Penambahan dari Hibah Kementerian dan pihak ketiga sebesar Rp3.542.966.667,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.356.000.000,00 sesuai dengan rincian Berita Acara Nomor BJ.01.04/PPK4.1/204/2023 tanggal 23 Agustus 2023 senilai Rp1.408.000.000,00 untuk alat USG 2D pada 11 Puskesmas yaitu Puskesmas Sangtombolang, Sangkub, Bintauna Pantai, Bintauna, Biontong, Bohabak, Mokoditek, Ollot, Boroko, Tuntung, dan Buko dan Berita Acara nomor BJ.01.04/PPK4.1/1037/2023 tanggal 20 Desember 2023 senilai Rp948.000.000,00 untuk paket Antropometri sebanyak 120 paket yang terbagi pada Dinas Kesehatan, UPTD TFC, puskesmas Sangtombolang, Sangkub, Bintauna Pantai, Bintauna, Biontong, Bohabak, Mokoditek, Ollot, Bolangitang Boroko, Tuntung, dan Buko;
 - 2) Puskesmas Bohabak sebesar Rp554.666.667,00 sesuai berita acara nomor KN.02.03/I/1163/2022 untuk pengadaan mesin genexpert (TCM);
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp406.800.000,00 atas pengalihan sekolah TK swasta ke Negeri sesuai SK Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 115 Tahun 2023 dengan rincian:
 - a. TK Mardatillah senilai Rp9.000.000,00;
 - b. TK Towokona senilai Rp15.650.000,00;
 - c. TK Citra Lestari senilai Rp7.550.000,00;
 - d. TK Annur senilai Rp23.750.000,00;
 - e. TK Dahlia senilai Rp30.500.000,00;
 - f. TK Tanjung Buaya senilai Rp28.100.000,00;
 - g. TK Berlian senilai Rp22.700.000,00;
 - h. TK Az Zikra senilai Rp15.250.000,00;
 - i. TK Beringin jaya saleo senilai Rp14.550.000,00;
 - j. TK Inagolang senilai Rp15.800.000,00;
 - k. TK Mustika Srikandi senilai Rp15.800.000,00;
 - l. TK Budi Luhur senilai Rp23.950.000,00;
 - m. TK Pugu-Pugu senilai Rp28.500.000,00;
 - n. TK Terpadu Permata Bunda senilai Rp16.150.000;
 - o. TK Terpadu Pertiwi senilai Rp27.750.000,00;
 - p. TK Perintis Wakat senilai Rp16.800.000,00;
 - q. TK Terpadu Delima senilai Rp27.850.000,00;
 - r. TK Al Multazam senilai Rp23.750.000,00;
 - s. TK Flamboyan senilai Rp26.650.000,00;
 - t. TK Anggrek senilai Rp16.750.000,00.
- f. Koreksi dari Aset Lainnya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar



Rp174.500.000,00 yaitu kendaraan dinas Merek Avanza Tahun 2010 DB 4002 H yang telah diperbaiki dan layak jalan

- g. Koreksi pengakuan aset tetap yang bersumber dari hibah Kementerian Kesehatan berupa Pulse Oximeter kepada Dinas Kesehatan sesuai BAST Nomor BJ.01.04/PPK4.1/1034/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp51.000.000,00.

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.730.000,00 dengan rincian:
- 1) SDN 2 Tontulow/SDN 10 Pinogaluman senilai Rp3.000.000,00;
 - 2) SDN 1 Binuanga senilai Rp1.421.000,00; dan
 - 3) TK Satap Boroko senilai Rp309.000,00.
- b. Koreksi ke Barang dan Jasa sebesar Rp1.420.771.055,20 dengan rincian:
- 1) Sekretariat DPRD senilai Rp1.842.600,00;
 - 2) Dinas Kesehatan senilai Rp333.360.000,00;
 - 3) Puskesmas Boroko senilai Rp8.962.743,00 sesuai Surat Keterangan Nomor 900/019/PKM-BO/BMU/I/2024 tanggal 1 Februari 2024;
 - 4) Puskesmas Buko senilai Rp11.708.058,00 sesuai Surat Keterangan Nomor 440/PKM-BK/BMU/060/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
 - 5) Puskesmas Bintauna senilai Rp3.445.027,20 sesuai Surat Keterangan Nomor 440/132/PKM/BTNBMU/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
 - 6) Puskesmas Ollot senilai Rp23.150.507,00 sesuai Surat Keterangan Nomor 440/28.a/PKM-OLLOT/BMU/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
 - 7) Puskesmas Mokoditek senilai Rp9.184.584,00 sesuai Surat Keterangan Nomor 800/46/PKM-MKDTK/BMU/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
 - 8) Puskesmas Bohabak senilai Rp10.000.000,00 sesuai Surat Keterangan Nomor 440/PKM-BHBK/BMU/153/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
 - 9) Puskesmas Tuntung senilai Rp2.177.488,00 sesuai Surat Keterangan Nomor 800/PKM-TTG/BMU/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;
 - 10) RSUD Pratama senilai Rp23.565.966,00;
 - 11) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp983.245.332,00; dan
 - 12) Dinas Pertanian senilai Rp10.128.750,00;
- c. Koreksi ke Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp731.541.854,00 terdiri dari:
- 1) Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA senilai Rp134.532.000,00 untuk pembelian kursi plastik sebanyak 134 buah;
 - 2) Dinas Kesehatan senilai Rp11.655.000,00 untuk pembelian kursi sebanyak 20 buah;
 - 3) Puskesmas Sangkub senilai Rp8.000.000,00 untuk pembelian gorden;
 - 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp442.489.854,00 untuk pembelian alat rumah tangga, alat peraga, alat peralatan komputer dan perlengkapan; dan
 - 5) Dinas Pertanian senilai Rp134.865.000,00 untuk pembelian kursi rapat.
- d. Koreksi pengurangan nilai peralatan mesin yang merupakan rusak berat senilai Rp23.479.112.213,64 terdiri dari:



- 1) Sekretariat DPRD senilai Rp2.324.055.800,00;
- 2) Sekretariat Daerah senilai Rp566.835.500,00;
- 3) Bagian Pemerintahan SETDA senilai Rp66.665.062,00;
- 4) Bagian Hukum SETDA senilai Rp175.730.400,00;
- 5) Bagian Perekonomian dan SDA SETDA senilai Rp56.758.000,00;
- 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA senilai Rp65.571.000,00;
- 7) Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA senilai Rp2.652.756.125,00;
- 8) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA senilai Rp344.616.057,00;
- 9) Bagian Organisasi SETDA senilai Rp87.597.400,00;
- 10) Bagian Barang dan Jasa SETDA senilai Rp53.378.500,00;
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp289.459.044,00;
- 12) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp711.987.740,00;
- 13) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp122.120.500,00;
- 14) Dinas Kesehatan senilai Rp3.665.937.508,00;
- 15) Puskesmas Boroko senilai Rp645.146.000,00;
- 16) Puskesmas Buko senilai Rp372.381.870,00
- 17) Puskesmas Bintauna senilai Rp2.463.473.863,00;
- 18) Puskesmas Sangkub senilai Rp323.733.042,50;
- 19) Puskesmas Bintauna Pantai senilai Rp122.652.250,00;
- 20) Puskesmas Sangtombolang senilai Rp278.056.500,00;
- 21) Puskesmas Ollot senilai Rp231.137.500,00;
- 22) Puskesmas Mokoditek senilai Rp258.561.154,00;
- 23) UPTD TFC senilai Rp44.998.500,00;
- 24) UPTD Instalasi Farmasi Senilai Rp80.914.311,00;
- 25) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp929.066.056,00;
- 26) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp214.363.457,14;
- 27) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp240.405.000,00;
- 28) Dinas Sosial senilai Rp184.496.000,00;
- 29) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp194.620.908,00;
- 30) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp975.267.168,00;
- 31) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp242.883.880,00;
- 32) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp43.495.500,00;
- 33) Dinas Pertanian senilai Rp83.331.200,00;
- 34) Dinas Perikanan senilai Rp707.437.000,00;
- 35) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp70.047.500,00;
- 36) Dinas Perdagangan senilai Rp94.636.500,00;
- 37) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp613.880.705,00;
- 38) Inspektorat Daerah senilai Rp435.818.583,00;



- 39) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp296.190.500,00;
 - 40) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp191.940.200,00;
 - 41) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp155.860.230,00;
 - 42) Dinas Pariwisata senilai Rp163.996.750,00;
 - 43) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rp283.954.500,00;
 - 44) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp58.843.000,00;
 - 45) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp468.113.400,00;
 - 46) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian senilai Rp200.283.150,00;
 - 47) Dinas Perpustakaan senilai Rp71.081.500,00;
 - 48) Kecamatan Kaidipang senilai Rp96.166.420,00;
 - 49) Kecamatan Pinogaluman senilai Rp37.495.500,00;
 - 50) Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp122.645.380,00;
 - 51) Kecamatan Bolangitang Timur senilai Rp37.385.000,00;
 - 52) Kecamatan Bintauna senilai Rp101.020.100,00;
 - 53) Kelurahan Bintauna senilai Rp23.319.000,00; dan
 - 54) Kecamatan Sangkub senilai Rp136.544.500,00.
- e. Koreksi dari personal komputer yang hilang senilai Rp34.229.000,00 terdiri dari:
- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp26.529.000,00 berupa satu unit tabelt yang digunakan oleh Kepala BPBD atas pengadaan Tahun 2023; dan
 - 2) Dinas Pendidikan – SDN 2 Tombulang senilai Rp7.700.000,00 berupa satu unit laptop untuk operasional sekolah atas pengadaan Tahun 2023

1.3.3. Gedung dan Bangunan dan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp656.079.266.930,05 **Rp584.961.231.011,18**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 sebesar **Rp656.079.266.930,05**. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar **Rp71.118.035.918,87** dari total saldo akhir Tahun 2022 yakni sebesar **Rp584.961.231.011,18**. Disamping penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023, kenaikan juga dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap, koreksi dari belanja, hibah akibat peralihan TK Swasta menjadi TK Negeri, pengurangan penghapusan, mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai tabel 5.52.



Tabel 5.52
Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	584.961.231.011,18
Belanja Modal Tahun 2023	40.198.872.110,00
Bertambah :	
Reklas dari ATL	96.217.150,00
Reklas dari KDP	37.505.568.853,24
Hibah dari Pengalihan TK Swasta sesuai SK 115 Tahun 2023	3.405.324.000,00
Koreksi dari belanja Barang dan Jasa	368.173.325,00
Pengakuan retensi	359.050.559,00
Pengakuan Utang	109.809.134,45
Jumlah	41.844.143.021,69
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	318.762.334,00
Reklasifikasi ke Aset Peralatan Mesin	730.463.802,00
Reklasifikasi ke JIJ	160.321.000,00
Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan	3.263.300.106,00
Koreksi Pembayaran hutang tahun sebelumnya	6.025.174.898,82
Koreksi ke sekolah swasta	223.545.488,00
Koreksi ke pemerintah desa	149.907.999,00
Koreksi berkurang pengakuan retensi tahun sebelumnya	43.503.585,00
Koreksi lebih bayar	10.000.000,00
Jumlah	10.924.979.212,82
Saldo Per 31 Desember 2023	656.079.266.930,05

Untuk rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.3**.

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selain dari belanja modal sebagai berikut:

Penambahan,

- Reklasifikasi bertambah dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp96.217.150,00 yang terdiri dari Dinas Pendidikan senilai Rp71.334.835,00 sesuai dengan kontrak nomor 420/512/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023 tanggal 23 November 2023 untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DAU) (DIKBUD dan Dinas Pariwisata senilai Rp24.882.315,00 sesuai nomor kontrak 556/002/SPK/DISPAR/BMU/XI/2023 tanggal 14 November 2023 Belanja Modal Buku Laporan (Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Paving Block).
- Reklasifikasi bertambah dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp37.094.710.853,24 pada Rumah sakit umum Pratama Bintauna sesuai kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/165/V/2022 tanggal 24 mei 2022.
- Koreksi atas Hibah pengalihan TK swasta ke TK Negeri sesuai dengan SK Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 115 Tahun 2023 senilai Rp3.405.324.000,00 dengan rincian:
 - Tk Mardatillah Rp160.000.000,00;
 - Tk Tuwokona Rp150.000.000,00;



- 3) Tk Citra Lestari Rp185.000.000,00;
 - 4) TK An Nur Rp250.000.000,00;
 - 5) TK Dahlia Rp133.245.700,00;
 - 6) Tk Tanjung Buaya Rp250.000.000,00;
 - 7) TK Berlian Rp185.000.000,00;
 - 8) TK Az Zikra Rp150.000.000,00;
 - 9) TK Beringin Jaya Saleo Rp150.000.000,00;
 - 10) TK Inagolang Rp150.000.000,00;
 - 11) TK Mustika Srikandi Rp150.000.000,00;
 - 12) TK Budi Luhur Rp240.000.000,00;
 - 13) TK Pugu-Pugu Rp100.000.000,00;
 - 14) TK Terpadu Permata Bunda Rp225.000.000,00;
 - 15) TK Terpadu Pertiwi Rp200.000.000,00;
 - 16) TK Perintis Wakat Rp150.000.000,00;
 - 17) TK terpadu Delima Rp227.078.300,00;
 - 18) TK Al Multazam Rp150.000.000,00;
 - 19) TK Flamboyan Rp150.000.000,00; dan
 - 20) TK Anggrek Rp50.000.000,00.
- d. Koreksi dari Beban Barang dan Jasa senilai Rp368.173.325,00 terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang senilai Rp69.936.000,00 yaitu pemeliharaan alun-alun lapangan kembar boroko sesuai Kontrak 600/94/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/IX/2023;
 - 2) Dinas Kesehatan senilai Rp94.224.109,00 untuk kegiatan belanja pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan sesuai Kontrak nomor 001/SPK/DINKES-BMU/459/IX/2023;
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp24.026.216,00 untuk kegiatan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD TERPADU AL Multazam (DAK) (DIKBUD) kontrak nomor 420/245/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 senilai Rp7.407.057,00 Pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD Terpadu Budi Luhur kontrak nomor 420/248/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 senilai Rp3.720.519,00, Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Terpadu Budi Luhur kontrak nomor 420/243/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 senilai Rp6.454.725,00, dan Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Terpadu AL Multazam kontrak nomor 420/257/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 senilai Rp6.443.915,00; dan
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Senilai Rp179.987.000,00 sesuai kontrak nomor 01/SPK/BPKD/III/2023 10 maret 2023 untuk pekerjaan Pembayaran Pembuatan Dinding Bangunan Bahan HPL Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Koreksi penambahan terhadap pengakuan retensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp359.050.559,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 1 Biontong dengan Nomor kontrak 420/240.11/KONTRAK /DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Sang Abdi Rp11.986.035,00;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 1 Dalapuli 420/240.12/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Ang Abdi Rp12.125.060,00;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Beserta Perabotnya SDN 1 Dalapuli 420/252/KONTRAK/DIKBUD /BMU/VII/2023 CV Khenfi Rp6.612.500,00;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Beserta Perabotnya SDN 1 Bohabak 2 420/251/KONTRAK /DIKBUD/BMU/VII/2023 Toekang Keloe Rp6.618.347,00;
- 5) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Beserta Perabotnya SDN 2 Tombulang 420/253/SPK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Jidilfa Inti Global Rp6.609.103,00;
- 6) Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Bolangitang 420/240.16/KONTRAK/DIKBUD /BMU/VII/2023 CV Toekang Keloe Rp12.742.185,00;
- 7) Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Busisingo 420/240.5.A/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Faeyza Karya Konstruksi Rp12.183.615,00;
- 8) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 BOHABAK 2 420/240.4/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Padat Aksi Niaga Rp12.466.260,00;
- 9) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Kuhanga 420/240.1/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Padat Aksi Niaga Rp12.455.660,00;
- 10) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Biontong 420/240.7/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Citra Fafa Berlian Rp12.562.230,00;
- 11) Pembangunan Pekerjaan Toilet/Jamban Beserta Sanitasinya SDN 1 DALAPULI 420/259/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Jidilfa Inti Global Rp7.696.213,00;
- 12) Pembangunan Toilet/ Jamban Beserta Sanitasinya SDN 1 Biontong 420/260/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Naghita Konstruksi Rp7.727.500,00;
- 13) Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Toilet/Jamban Beserta Sanitasinya SDN 1 Kuhanga 420/261/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Padat Aksi Niaga Rp7.725.279,00;
- 14) Pembangunan Pagar SDN 1 KAYOUGU 420/446/SPK /DIKBUD/BMU/IX/2023 CV Zovanda Rp9.533.188,00;
- 15) Pembangunan Pagar SDN 2 Tombulang 420/442/SPK/DIKBUD/ BMU/IX/2023 CV Khenfi Rp6.808.565,00;
- 16) Pembangunan Pagar SDN 1 Bolangitang 420/437/SPK/DIKBUD /BMU/IX/2023 CV Zovanda Rp9.532.633,00;



- 17) Pembangunan Pagar SDN 1 Biontong 1 420/432/SPK/DIKBUD /BMU/IX/2023 CV Bongkil Indah Rp9.533.895,00;
- 18) Pembangunan Pagar SDN 1 Biontong 420/431/SPK/DIKBUD /BMU/IX/2023 CV Bongkil Indah Rp6.810.435,00;
- 19) Pembangunan Pagar SDN 1 Binjeita 1 420/463/SPK/DIKBUD /BMU/IX/2023 CV Dua Permata Biru Rp3.961.935,00;
- 20) Pembangunan Pagar SDN 1 Binjeita 2 420/500/KONTRAK/ DIKBUD/BMU/IX/2023 CV Jidilfa Inti Global Rp53.447.027,55,00;
- 21) Pembangunan Pagar SDN 1 Pimpi 420/430/SPK/DIKBUD /BMU/IX/2023 CV Dua Permata Biru Rp3.959.785,00;
- 22) Pembangunan Pagar SDN 1 Busingo Utara 420/426/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023 CV Padat Karya Perkasa Rp9.533.801,00;
- 23) Pembangunan Pagar SDN 1 Sangkub 2 420/425/SPK/DIKBUD /BMU/IX/2023 CV Faeyza Karya Konstruksi Rp9.535.000,00;
- 24) Pemasangan Paving Block Halaman SDN 1 Binjeita 420/342/SPK/DIKBUD/BMU/VIII/2023 CV Dua Permata Biru Rp4.110.111,00;
- 25) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 3 Bolangitang Timur Beserta Perabotnya 420/240.13/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Padat Karya Perkasa Rp14.656.795,00;
- 26) Pembangunan Laboratorium IPA SMPN 3 Bolangitang timur senilai Rp9.938.528,30 sesuai dengan kontrak nomor 420/240.14/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023;
- 27) Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Bolangitang Barat 420/240.16/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII /2023 CV Citra Fafa Berlian Rp30.997.740,00;
- 28) Pembangunan Pekerjaan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Pinogaluman 420/240.19/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Dian Utara Rp12.651.970,00;
- 29) Pembangunan Pagar SPNF/SKB BINTAUNA 420/482/ KONTRAK/DIKBUD/BMU/IX/2023 CV Dalia Persada Rp4.969.264,15;
- 30) Rehabilitasi Gedung Negara Sederhana (Kantor Dinas) Pendidikan dan Kebudayaan 420/145.D/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023 CV Arvil Tunggal 29 Engineering Consultant Rp3.754.465,00;
- 31) Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD TERPADU AL Multazam 420/245/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Toekang Keloe Rp8.235.176,00;
- 32) Pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD Terpadu Budi Luhur 420/248/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Toekang Keloe Rp4.136.479,00;
- 33) Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Terpadu Budi Luhur 420/243/KONTRAK/DIKBUD/ BMU/VII/2023 CV Padat Karya Perkasa Rp6.722.519,00; dan



- 34) Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Terpadu AL Multazam 420/257/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Padat Aksi Niaga Rp6.711.260,00.
- f. Koreksi penambahan terhadap pengakuan utang sebesar Rp109.809.134,45 dengan rincian:
- 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp38.713.454,45 dengan rincian Rehabilitasi Pustu Solo/Sokoputa Kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/407/IX/2023 Rp7.312.734,50, Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan Kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/459/IX/2023 Rp4.959.163,65, Rehabilitasi Puskesmas Bintauna Kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/401/IX/2023 Rp7.312.207,75 Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas Kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/456.A/XII/2023 Rp3.435.000,00, Rehabilitasi Puskesmas Biontong Kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/398/IX/2023 Rp7.314.003,55, Pengawasan Pembangunan Gedung Sementara Obat Expire IFK Rp3.435.000,00, Pembangunan pagar busato Rp4.945.345,00; dan
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pekerjaan Pembangunan Pekerjaan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Dalapuli 420/240.1/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 CV Karya Arikon Rp71.095.680,00;
- g. Koreksi penambahan Gedung Bangunan dari KDP sebesar Rp410.858.000,00 dengan rincian:
- 1) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.965.000,00 Ket: Pembayaran Perencanaan Penimbunan Pasar Rakyat Boroko Pada kegiatan pembangunan pasar pedesaan TA 2016. Lokasi: Desa Kuala No. Dokumen: 500/019/PERINDAGKOP-PM/SPK/V/2016, Tahun pengadaan: 2016;
 - 2) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Bangunan Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebesar Rp131.663.000,00;
 - 3) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya sebesar Rp49.830.000,00; dan
 - 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp209.400.000,00.

Pengurangan,

- a. Koreksi pengurangan Aset Tetap Bangunan Gedung ke Aset Lainnya sebesar Rp318.762.334,00 terdiri dari:
- 1) Rp178.650.000,00 pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pertanian milik Pemerintah Provinsi. Ket. Pembuatan Pagar Pengaman dan Renovasi Gedung Kantor kontrak Nomor 522/SPK/DPPPK/BMU/27/VI/2015 di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang pengadaan tahun 2015;



- 2) Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Cabang Dinas Bolangitang Barat dan Sangkub sebesar Rp140.112.334,00.
- b. Reklasifikasi berkurang ke Peralatan Mesin pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp730.463.802,00 dengan rincian:
 - 1) SDN 2 Tombulang Rp 34.381.562,00;
 - 2) SDN 1 Dalapuli Rp7.337.471,00;
 - 3) SMPN 2 Pinogaluman Rp30.858.000,00;
 - 4) TK Negeri Multazam Rp5.291.823,00;
 - 5) SDN 1 Bolangitang Rp42.024.619,00;
 - 6) SDN 1 Ollot 2/SDN 14 BOLBAR Rp39.738.000,00;
 - 7) SMPN 1 Bolangitang Barat Rp73.981.500,00;
 - 8) SMPN 2 Bolangitang Barat/SMP 10 BOLMUT Rp18.913.708,00;
 - 9) SKB Bolangitang Rp24.031.500,00;
 - 10) SDN 1 Bohabak 2 Rp153.328.080,00;
 - 11) SDN 1 Biontong/SDN 1 Bolit Rp32.688.501,00;
 - 12) SMPN 3 Bolangitang Timur Rp208.168.485,00;
 - 13) SDN 1 Kuhanga/SDN 2 Bintauna Rp29.526.000,00;
 - 14) SDN 1 Busisingo Rp21.978.000,00; dan
 - 15) TK Terpadu Budi Luhur Rp8.216.553,00.
- c. Reklasifikasi berkurang ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp160.321.000,00 dengan rincian:
 - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp129.321.000,00 untuk kegiatan Pembayaran Belanja Instalasi Air Bersih Gedung Kantor sesuai kontrak nomor 175/298/SPK/Skrt-DPRD/BMU/IV/2023 tanggal 11 April 2023; dan
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp31.000.000,00 untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bangunan pengamanan sungai dan sumur resapan dengan nomor kontrak 660/DLH-BMU/SPK/PL/01/XI/2023 Tanggal 23 november 2023 dan kontrak nomor 660/DLH-BMU/SPK/PL/O5/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023.
- d. Reklasifikasi berkurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.263.300.106,00 dengan rincian:
 - 1) Rumah sakit umum Daerah sebesar Rp3.241.892.000,00 realisasi belanja modal pekerjaan pembangunan UTDRS kontrak senilai Rp3.067.220.000,00 001/RSUD-BMU/KONTRAK/046/VII/2023, Belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan Gedung UTDRS senilai Rp99.722.000,00 kontrak 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN/ /PL/018.A/III/2023, Belanja jasa konsultasi pengawasan gedung UTDRS senilai Rp74.950.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN/PL/050/VII/2023; dan
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp21.408.106,00 dengan rincian Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP senilai Rp15.814.678,00 dengan kontrak Nomor 420/089.k/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2023 tanggal 22 Mei 2023,



- Pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Toilet (Jamban) SMP senilai Rp5.593.428,00 dengan kontrak Nomor 420/098.a/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.
- e. Koreksi berkurang karena pembayaran Utang sebelumnya yaitu senilai Rp6.025.174.898,82 dengan rincian:
- 1) Dinas Kesehatan penyelesaian utang rehabilitasi puskesmas mokoditek senilai Rp186.198.590,58 sesuai dokumen 03638/SP2D/2023 tanggal 16 Juni 2023;
 - 2) Rumah sakit Umum Daerah penyelesaian utang pembangunan instalasi Gizi senilai Rp284.322.150,00 nomor dokumen 11052/SP2D/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Pembangunan Gedung Bersalin RSUD Bolmut kontrak senilai Rp1.476.651.908,00 dengan dokumen nomor 11059/SP2D/2023 tanggal 29 Desember 2023; dan
 - 3) RSUD Pratama Bintauna penghapusan pengakuan utang Rp4.078.002.250,24 untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tahun 2022 dengan kontrak 001/SPK/DINKES-BMU/165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022.
- f. Koreksi berkurang ke Sekolah Swasta Sebesar Rp163.645.488,00 dengan rincian:
- 1) Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Toilet (Jamban) TK Beserta Sanitasinya kontrak 420/089.h/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2023 kontraktor CV Arsy Engineering Consultant SP2D Nomor 05093/SP2D/2023 Rp5.593.428,00;
 - 2) Pembayaran Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Toilet Jamban TK dan Pembangunan Ruang Praktek Kontrak 420/263.D/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023 kontraktor CV Arsy Engineering Consultant SP2D nomor 11579/SP2D/2023 Rp9.304.000,00;
 - 3) Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar MI AL Hidayah Duini kontrak 420/160.C/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023 kontraktor CV Mitra Nusa Konsulindo SP2D nomor 05403/SP2D/2023 Rp8.111.409,00;
 - 4) Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar MI Ollot kontrak Nomor 420/160.C/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023 kontraktor CV Mitra Nusa Konsulindo SP2D Nomor 05403/SP2D/2023 Rp8.109.109,00;
 - 5) Jasa Konsultan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar TK AlKhairaat Jambusarang kontrak 420/244/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 kontraktor CV Arsy Engineering Consultant SP2D Nomor 05407/SP2D/2023 Rp10.697.509,00;
 - 6) Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah PAUD Terpadu Qurataayun kontrak 420/258/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 kontraktor CV Padat Aksi Niaga SP2D nomor 09687/SP2D/2023 Rp78.087.961,00;



- 7) Jasa Konsultan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah AIKhairaat Jambusarang kontrak 420/089/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2023 kontraktor CV Arsy Engineering Consultant SP2D nomor 05406/SP2D/2023 Rp7.489.388,00;
 - 8) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah MTs Al-Khairaat Boroko kontrak 420/160.A/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023 kontraktor CV Mitra Nusa Konsulindo SP2D nomor 05404/SP2D/2023 Rp16.360.654,00; dan
 - 9) Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah MTs AIKhairaat Biontong kontrak 420/160.A/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023 kontraktor CV Mitra Nusa Konsulindo SP2D nomor 05404/SP2D/2023 Rp19.892.030,00.
- g. Koreksi Berkurang pembayaran utang retensi senilai Rp43.503.585,00 yaitu pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penyelesaian utang senilai Rp27.477.035,00 dengan rincian:
 - a. Pekerjaan pemasangan Paving Block Halaman SMPN 1 Bolangitang Barat senilai Rp1.732.500,00;
 - b. Pembangunan Ruang UKS senilai Rp12.156.330,00;
 - c. Pembangunan Pagar SDN 1 Ollot 2 senilai Rp1.877.500,00; dan
 - d. Pembangunan Pagar SDN 1 Ollot 2 senilai Rp11.710.705,00.
 - 2) Dinas Perdagangan penyelesaian retensi senilai Rp16.026.550,00 atas pekerjaan pembangunan Pasar Sangkub tahap II Tahun 2017.
- h. Koreksi lebih bayar sebesar Rp10.000.000,00 pada dinas pendidikan dan kebudayaan.
- i. Koreksi pengurangan Gedung Bangunan ke persediaan karena akan diserahkan/Hibahkan kepada masyarakat sebesar Rp209.807.999,00 terdiri dari:
- 1) Hibah ke Sekolah Swasta -TK Ollot sebesar Rp59.900.000,00 Ket. Rehabilitasi Gedung TK Ollot, No. Kontrak:119/SPK/DIKPORA/BMU/XI/2012, Lokasi: Desa Ollot kecamatan Bolangitang Barat. Tahun Pengadaan: 2012
 - 2) Hibah ke pemerintah desa sebesar Rp149.907.999,00 merupakan rehabilitasi tribun olahraga di Kelurahan Bintauna untuk pengadaan tahun 2017.

1.3.4. Jalan Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.150.645.490.895,52	Rp1.082.618.843.069,52

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2023 sebesar **Rp1.150.645.490.895,52** Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar **Rp68.610.424.876,00** dari saldo akhir Tahun 2022 **Rp1.082.618.843.069,52** Disamping penambahan Belanja Modal Tahun 2023 kenaikan dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bukan berasal dari Belanja Modal Tahun 2022.



Gambaran umum Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 adalah sesuai tabel 5.53.

Tabel 5.53
Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.082.618.843.069,52
Belanja Modal Tahun 2023	48.314.091.184,00
Bertambah:	
Koreksi dari barang ekstrakomptabel	44.194.150,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	160.321.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	99.705.750,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.354.853.512,28
Koreksi penambahan pengakuan retensi Tahun 2023	159.830.090,00
J u m l a h	22.818.904.502,28
Berkurang:	
Koreksi ke Persediaan	425.831.500,00
Koreksi ke Aset Lainnya (Kajian)	806.371.200,00
koreksi pengurangan pengakuan hutang tahun sebelumnya	1.874.145.160,28
J u m l a h	3.106.347.860,28
Saldo Per 31 Desember 2023	1.150.645.490.895,52

Untuk rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.4**.

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selain dari Belanja Modal sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Koreksi dari ekstrakomptabel sebesar Rp44.194.150,00 retensi pekerjaan yang seharusnya dikapitalisasi atas pekerjaan pemasangan paving blok.
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp160.321.000,00 dengan rincian:
 - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp129.321.000,00 untuk kegiatan Pembayaran Belanja Instalasi Air Bersih Gedung Kantor sesuai kontrak Nomor 175/298/SPK/Skrt-DPRD/BMU/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp31.000.000,00 untuk kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Bangunan pengaman sungai dan sumur resapan dengan Nomor kontrak 660/DLH-BMU/SPK/PL/O1/XI/2023 Tanggal 23 November 2023 dan kontrak Nomor 660/DLH-BMU/SPK/PL/05/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023
- c. Penambahan Aset Tetap lainnya sebesar Rp99.705.750,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kegiatan Pengawasan Kapasitas Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 2023 sesuai kontrak nomor 600/60/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/VII/ 2023 tanggal 25 September 2023 oleh CV. Kingstom Teknitama Konsultan.
- d. Penambahan dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp22.354.853.512,28 dengan rincian:
 - 1) Rekonstruksi /peningkatan Ollot-Goyo nilai Rp18.086.448.334,00 600/20/DPUTR/BMU/KONTRAK/IX/2022 PT. Lia Membangun Persada;
 - 2) Pembangunan Jalan Polaingo Soligir lanjutan Rp196.192.879,00 kontrak 600/213/DPUTR/BMU/SPK-BM/PL/IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya;



- 3) Peningkatan SPAM Perpipaan Kecamatan Pinogaluman Rp1.348.590.742,40 kontrak nomor 600/49/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas;
 - 4) Peningkatan SPAM Perpipaan Kecamatan Bolangitang Barat Rp1.020.600.000,00 kontrak Nomor 600/53/DPUTR-BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 CV. Amira;
 - 5) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Kaidipang Rp1.036.304.123,28 kontrak Nomor 600/52/DPUTR-BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Perwira;
 - 6) Rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak Rp466.867.433,60 kontrak Nomor 600/54/DPUTR-BMU/SPK-SDA/VII/2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa; dan
 - 7) Koreksi atas reklasifikasi KDP ke Aset Tetap JIJ pada Dinas PUTR sebesar Rp199.850.000,00 yang merupakan Survey Identifikasi Dan Desain (SID) Sungai Pontak dan SID Sungai Saleo untuk pengadaan Tahun 2015.
- e. Penambahan Aset Tetap oleh retensi dan pengakuan utang Rp159.830.090,00 dengan rincian:
- 1) Dinas PUTR terdiri dari Rp150.946.440,00 dengan rincian:
 - a. Perkerasan Jalan Perkebunan Bongkaloa Wakat kontrak Nomor 600/161/ DPUTR-BMU/SPK-BM/XI/2023 kontraktor CV. Amira Rp9.994.300,00;
 - b. Pembangunan Talud Jalan Baturapa Desa Talaga Tomoagu kontrak Nomor 600/191/DPUTR-BMU/SPK-BM/XI/2023 kontraktor CV. Mustika Mandiri Rp7.492.050,00;
 - c. Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Pontak – Soligir kontrak Nomor 600/188/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2023 kontraktor CV. Media Karya Rp6.246.300,00;
 - d. Pembangunan Plat Duiker Ruas Jalan Boroko-Bigo Selatan-Kuala Utara-Jambusarang kontrak Nomor 600/123/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/X/2023 kontraktor CV. Mustika Mandiri Rp7.782.850,00;
 - e. Pembangunan Plat Duiker Dalapuli Barat kontrak Nomor 600/158/DPUTR-BMU/SPK-BM/XI/2023 kontraktor CV. Fazri Mandiri Rp4.135.750,00;
 - f. Pembangunan Jalan Paving Permukiman Buko Selatan kontrak Nomor 600/111/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/X/2023 kontraktor CV. Utara Persada Rp7.497.500,00;
 - g. Pembangunan Saluran Tepi Jalan Ruas Madihutu – Pinagut kontrak Nomor 600/197/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2023 kontraktor CV. Bongkil Indah Rp9.992.050,00;
 - h. Pembangunan Saluran Tepi Jalan Desa Buko kontrak Nomor 600/155/DPUTR-BMU/SPK-BM/XI/2023 kontraktor CV. Fazri Mandiri Rp9.997.500,00;



- i. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Saleo I kontrak Nomor 600/127 /DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/2023 kontraktor CV. Toekang Keloe Rp5.996.251,00;
 - j. Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Wakat kontrak Nomor 600/87/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/2023 kontraktor CV. Rajawali Putra Rp9.991.800,00;
 - k. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Biontong II kontrak Nomor 600/104/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/X/2023 kontraktor CV. Bongkil Indah Rp1.765.724,00; dan
 - l. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bigo (DAK) kontrak Nomor 600/28/DPUTR/BMU/KONTRAK-SDA/V/2023 kontraktor CV. Mustika Mandiri Rp70.054.365,00.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp8.883.650,00 dengan rincian Pengaman Tebing Sungai Desa Bigo Selatan kontrak Nomor 660/DLH-BMU/SPK/PL/03/XII/2023, 19 Desember 2023 kontraktor CV. Metch Construction dengan nilai Rp7.648.400,00 dan Pembangunan sumur resapan Desa Bigo kontrak 660/DLH-BMU/SPK/PL/04/XII/2023, 19 Desember 2023 kontraktor CV. Metch Construction dengan nilai Rp1.235.250,00.

Pengurangan,

- a. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp425.831.500,00 dengan rincian:
 - 1) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Saleo I kontrak Nomor 600/127/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/2023 kontraktor CV. Toekang Keloe Rp119.925.000,00;
 - 2) Pembangunan Tangki Septick Individual Desa Wakat kontrak Nomor 600/87/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/2023 kontraktor CV. Rajawali Putra Rp199.836.000,00;
 - 3) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tuntung Timur kontrak Nomor 600/126/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/XI/2023 kontraktor CV. Toekang Keloe Rp70.756.000,00; dan
 - 4) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Biontong II kontrak Nomor 600/104/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/X/2023 kontraktor CV. Bongkil Indah Rp35.314.500,00.
- b. Koreksi berkurang Masterplan dan DED Drainase ibu kota kabupaten tahap II, Drainase kecamatan Bolangitang Barat, dan Drainase IKK Bolangitang Timur tahun 2009 dan 2011 sebesar Rp806.371.200,00 sebagaimana terinci:
 - 1) Perencanaan (DED) drainase ibu kota kabupaten tahap II (PU) di Kecamatan Kaidipang dengan Nomor Dokumen 1783/SP2D/LSBG/IX/2009 atas pengadaan Tahun 2009 sebesar Rp86.121.200,00;
 - 2) Perencanaan master plan dan DED Drainase kecamatan Bolangitang Barat (PU), di Kecamatan Bolangitang Barat dengan Nomor Dokumen 2857/SP2D/LSBG/XII/2009 atas pengadaan Tahun 2009 sebesar Rp440.000.000,00; dan



- 3) Perencanaan Master Plan dan DED Drainase IKK Bolangitang Timur di Kecamatan Bolangitang Timur dengan Nomor Dokumen 5493/SP2D/LSBG/XII/2011 atas pengadaan Tahun 2011 sebesar Rp280.250.000,00.
- c. Koreksi berkurang Jalan, Irigasi dan Jaringan atas pengakuan Utang retensin senilai Rp1.874.145.160,28 Tahun 2022 dan tahun 2021 sebagaimana rincian berikut:
 - 1) Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ollot – Goyo kontrak Nomor 600/20/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VI/2022 Kontraktor PT. Lia Membangun Persada Rp1.502.244.402,00;
 - 2) Pembangunan Jalan Komus I kontrak Nomor 600250/ DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2022 Kontraktor CV. Bintang Dua Rp7.497.060,00;
 - 3) Pembangunan Jalan Desa Gihang Arah Air Terjun kontrak Nomor 600/179/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/IX/2022 Kontraktor CV. Utara Persada Rp7.495.230,00;
 - 4) Pembangunan Jalan Polaingo Desa Soligir kontrak Nomor 600/231/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/IX/2022 Kontraktor CV. Rifki Karya Rp15.254.782,08;
 - 5) Pembangunan Plat Duiker Jalan Perkebunan Binjeita kontrak Nomor 600/294/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2022 Kontraktor CV. Rifki Karya Rp1.998.700,00;
 - 6) Pembangunan Plat Duiker Jalan Sangkub Timur-Sidodadi kontrak Nomor 600/301/DPUTR-BMU/SPK-BM/PL/XI/2022 Kontraktor CV. Khalif Jaya Konstruksi Rp9.996.600,00;
 - 7) Pembangunan Jembatan Paku Selatan kontrak Nomor 600/141/DPUTR-BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022 Kontraktor CV. Rifki Karya Rp17.247.835,00;
 - 8) Pembangunan Drainase Tombulang Pantai kontrak Nomor 600/304/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/XI/2022 Kontraktor CV. Megaladon Cipta Konstruksi Rp6.995.649,00;
 - 9) Pembangunan Drainase Boroko kontrak Nomor 600/238/ DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/IX/2022 Kontraktor CV. Armac Pio-Piohu Rp7.284.650,00;
 - 10) Pembangunan Plat Duiker Kawasan Polres Bolaang Mongondow Utara kontrak Nomor 600/318/DPUTR-BMU/SPK-CK/PL/XI/2022 Kontraktor CV. Sumber Pratama Abadi Rp6.597.897,00;
 - 11) Pembangunan Drainase Boroko Timur kontrak Nomor 600/130/DPUTR/BMU/SPK-CK/VIII/2022 Kontraktor CV. Anugerah Rafa Mandiri Rp7.497.224,00;
 - 12) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Kaidipang kontrak Nomor 600/52/DPUTR-BMU/SPK-CK/VII/2022 Kontraktor CV. Perwira Rp38.861.404,20;
 - 13) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Bolangitang Barat kontrak Nomor 600/53/DPUTR-BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 Kontraktor CV. Amira Rp73.710.000,00;



- 14) Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Kec. Pinogaluman kontrak Nomor 600/49/DPUTR-BMU/SPK-CK/VII/2022 Kontraktor CV. Berkat Trinitas Rp50.572.153,40;
- 15) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Pontak kontrak Nomor 600/54/DPUTR-BMU/KONTRAK-SDA/V/2022 Kontraktor CV. Rajawali Perkasa Rp92.192.693,60;
- 16) Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Bigo Selatan kontrak Nomor 600/220/DPUTR-BMU/SPK-SDA/IX/2022 Kontraktor CV. Anugrah Rafa Mandiri Rp7.248.880,00; dan
- 17) Koreksi kelebihan pengakuan Utang Tahun 2021 atas pekerjaan jalan masuk RSUD, yang dilakukan adendum kontrak awal sebesar Rp21.450.000,00.

1.3.5 Aset Tetap Lainnya **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp47.509.914.976,09 **Rp46.602.234.612,09**

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga serta aset atas Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOSP. Saldo Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar **Rp47.509.914.976,09** jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar **Rp907.680.364,00** dari saldo akhir Tahun 2022 sebesar **Rp46.602.234.612,09**. Pergerakan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh adanya penambahan, pengurangan Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal.

Gambaran umum Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti pada tabel 5.54.

Tabel 5.54
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	46.602.234.612,09
Belanja Modal Tahun 2023	3.025.454.679,00
Bertambah :	
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin	4.730.000,00
Reklasifikasi dari kontruksi dalam Pengerjaan	276.436.082,50
Reklasifikasi dari Gedung Bangunan	318.762.334,00
Pengakuan Utang	86.189.280,00
Jumlah	686.117.696,50
Berkurang :	
Reklasifikasi ke Peralatan Mesin	25.000.000,00
Reklasifikasi ke Gedung Bangunan	96.217.150,00
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.705.750,00
Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	969.368.250,00
Reklasifikasi ke KDP	383.860.200,00
Koreksi ke Barang dan Jasa	593.858.684,00
Koreksi Pembayaran Utang	189.140.477,50
Koreksi ke Hibah sekolah swasta	22.500.000,00
Koreksi ke Aset Tidak berwujud	424.241.500,00
Jumlah	2.803.892.011,50
Saldo Per 31 Desember 2023	47.509.914.976,09



Untuk rincian Aset Tetap Lainnya per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.5**.

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal sebagai berikut :

Penambahan,

- a. Reklas dari Peralatan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.730.000,00 dengan rincian Rp3.000.000,00 di SDN 2 Tontulow/SDN 10 Pinogaluman dan Rp1.421.000,00 di SDN 1 Binuanga. Dan Rp309.000,00 pengadaan buku pada TK Satap Boroko;
- b. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp276.436.082,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Kontrak Nomor 600/206/DPUTR-BMU/SPK-BM/IX/2022 untuk kegiatan penyusunan leger jalan;
- c. Reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp318.762.334,00 terdiri dari:
 - 1) Rehabilitasi Gedung Pertanian milik Pemerintah Provinsi pada Dinas Pertanian, atas pekerjaan pembuatan pagar pengaman dan renovasi gedung kantor, kontrak Nomor 522/SPK/DPPPK/BMU/27/VI/2015 di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang atas pengadaan Tahun 2015 sebesar Rp178.650.000,00; dan
 - 2) Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Bolangitang Barat dan Sangkub sebesar Rp140.112.334,00.
- d. Koreksi penambahan pengakuan Utang senilai Rp86.189.280,00 pada kegiatan penyusunan dokumen DED Bina Marga dengan kontrak Nomor 600/92 /DPUTR/BMU/KONTRAK-BM/IX/2023 kontraktor CV. Eljireh Abadi Konsultan sebesar Rp215.473.200,00.

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp25.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian:
 1. SDN 1 Dengi/SDN 15 Pinogaluman Rp3.000.000,00;
 2. SDN 1 Tuntung Timur Rp5.500.000,00;
 3. SDN 2 Sonuo/SDN 15 Bolbar Rp5.500.000,00;
 4. SDN 1 Bohabak 2 Rp6.500.000,00; dan
 5. SMPN 1 Bolangitang Timur/SMPN 5 Bolmut Rp4.500.000,00.
- b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp96.217.150,00 yang terdiri dari
 1. Dinas Pendidikan senilai Rp71.334.835,00 sesuai dengan kontrak Nomor 420/512/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023 tanggal 23 November 2023 untuk kegiatan Rehabilitasi Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 2. Dinas Pariwisata senilai Rp24.882.315,00 sesuai kontrak Nomor 556/002/SPK/DISPARI/BMU/XI/2023 tanggal 14 November 2023 Belanja Modal Buku Laporan (Jasa Konsultansi Pekerjaan Pengawasan Paving Block).



- c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp99.705.750,00 dengan rincian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kegiatan Pengawasan Kapasitas Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan 2023 sesuai kontrak Nomor 600/60/DPUTR-BMU/SPK-BM /PL/VII/2023 tanggal 25 september 2023 oleh CV. Kingstom Teknitama Konsultan.
- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp969.368.250,00 pada Dinas Pertanian sebesar Rp175.000.000,00 dan DinasPUTR sebesar Rp794.368.250,00.
- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya ke KDP sebesar Rp383.860.200,00 pada Dinas PUTR atas pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan bidang jalan untuk Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp168.387.000,00 serta pekerjaan Penyusunan Dokumen DED Bidang Bina Marga 2023 sebesar Rp215.473.200,00.
- f. Koreksi berkurang ke Beban Barang dan Jasa senilai Rp593.858.684,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp568.883.684,00; dan
 - 2) Dinas Pariwisata senilai Rp24.975.000,00 untuk pembuatan video kegiatan promosi dan pemasaran wisata sesuai dengan kontrak Nomor 556/04/DISPAR-BMU/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023.
- g. Koreksi berkurang karena penyelesaian utang sebesar Rp189.140.477,50 untuk kegiatan penyusunan leger jalan sesuai kontrak nomor 00/206/DPUTR-BMU/SPK-BM/IX/2022 dengan kontraktor PT. Mitra Tri Sakti.
- h. Koreksi Aset Tetap Lainnya ke Hibah (Sekolah Swasta SD Advent Bohabak) sebesar Rp22.500.000,00.
- i. Koreksi berkurang ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp424,241,500.00 dengan rincian:
 - 1) Dinas Kesehatan senilai Rp74.814.000,00 pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Logistik (SIMLOG) sesuai kontrak Nomor 001/SPK/DINKES-BMU/453/XI/2023 tanggal 15 November 2023 kontraktor CV Karkun Media Tech;
 - 2) Badan Perencanaan, Pelatihan, dan Pengembangan senilai Rp174.769.000,00 yang terdiri dari Belanja Software Aplikasi NTP senilai Rp49.894.000,00 oleh CV Karkun Media Tech kontrak Nomor 050/197/SPK/BAPELITBANG/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan pengadaan *software* Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan oleh PT Integra Inovasi Indonesia senilai Rp124.875.000,00 dengan kontrak Nomor 050/251/BAPELITBANG/SPK/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp99.789.000,00 untuk pengadaan Sistem Informasi Petugas Kebersihan (SIGARIS) oleh CV Karkun Media Tech sesuai dengan kontrak Nomor 660/04/SPK-DLH/III/2023 tanggal 15 Maret 2023; dan
 - 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA senilai Rp74.869.500,00 pengadanan Aplikasi SIABAS dengan kontrak Nomor 002/SPK/KESRA/III/2023 tanggal 17 Maret 2023.



1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp6.224.901.577,00 **Rp63.619.444.625,02**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2023 sebesar **Rp6.224.901.577,00**. Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut merupakan aset yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap KDP Tahun 2022 sebesar **Rp63.619.444.625,02** terdapat penurunan sebesar **Rp57.394.543.048,02**

Gambaran umum Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sesuai tabel 5.55.

Tabel 5.55
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	63.619.444.625,02
Bertambah:	
Belanja Modal Gedung Bangunan	3.263.300.106,00
Pengakuan Hutang gedung dan Bangunan	150.098.000,00
Reklasifikasi dari ATL	383.860.200,00
Jumlah	3.797.258.306,00
Berkurang:	
Belanja Modal Gedung Bangunan	37.373.905.853,24
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	22.354.853.512,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.310.671.488,50
Barang Ekstrakomptabel	113.663.000,00
Aset Tetap ke Persediaan	38.707.500,00
Jumlah	61.191.801.354,02
Saldo per 31 Desember 2023	6.224.901.577,00

Untuk rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.6**. Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terdapat penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Penambahan,

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.263.300.106,00 dengan rincian:
 - 1) Rumah sakit umum Daerah sebesar Rp3.241.892.000,00 realisasi belanja modal dengan rincian:
 - a) Pekerjaan pembangunan UTDRS senilai Rp3.067.220.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/KONTRAK/046/VII/2023;
 - b) Belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan Gedung UTDRS senilai Rp99.722.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN/ /PL/018.A/III/2023; dan
 - c) Belanja jasa konsultansi pengawasan gedung UTDRS senilai Rp74.950.000,00 kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/SPK/KONSULTAN/ PL/050/VII/2023.
 - 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp21.408.106,00 untuk pekerjaan Pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Ruang Tata Usaha SMP senilai Rp15.814.678,00 dengan kontrak Nomor



420/089.k/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Pembayaran Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Toilet (Jamban) SMP senilai Rp5.593.428,00 dengan kontrak Nomor 420/089.a/KONTRAK/DIKBUD/BMU/V/2023 tanggal 22 Mei 2023.

- b. Koreksi bertambah atas pengakuan utang belanja pembangunan gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit senilai Rp150.098.000,00 sesuai kontrak Nomor 001/RSUD-BMU/KONTRAK/046/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 kontraktor CV. Khenfi.
- c. Reklasifikasi dari ATL sebesar Rp383.860.200,00 pada Dinas PUTR dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen DED Bidang Bina Marga 2023 sebesar Rp215.473.200,00; dan
 - 2) Penyusunan Dokumen Lingkungan Bidang Jalan 2023 untuk Pembangunan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2024 dan 2025 sebesar Rp168.387.000,00.

Pengurangan,

- a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.373.905.853,24 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan senilai Rp37.094.710.853,24 kontrak Nomor 001/SPK/DINKES-BMU/165/V/2022 untuk pekerjaan pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Pratama Bintauna.
 - 2) Perencanaan Pembangunan Kawasan Infrastruktur Perkantoran di Desa Boroko nomor dokumen 8580/SP2D/LSBG/XII/2014 pengadaan tahun 2014 sebesar Rp209.400.000,00;
 - 3) Revisi Pekerjaan Perencanaan (DED) Gapura Perbatasan di Desa Boroko, nomor dokumen 7892/SP2D/LSBG/XII/2014 pengadaan tahun 2014 sebesar Rp49.830.000,00; dan
 - 4) Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan atas pekerjaan Perencanaan Penimbunan Pasar Rakyat Boroko yang seharusnya dikapitalisasi ke Gedung sebesar Rp19.965.000,00.
- b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.354.853.512,28 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Jalan Ollot-Goyo senilai Rp18.086.448.334,00, kontrak Nomor 600/20/DPUTR/BMU/KONTRAK/IX/2022 PT. Lia Membangun Persada;
 - 2) Pembangunan Jalan Polaingo Soligir lanjutan senilai Rp196.192.879,00 kontrak Nomor 600/213/DPUTR/BMU/SPK-BM/PL/IX/2022 kontraktor CV. Rifki Karya;
 - 3) Peningkatan SPAM Perpipaan Kecamatan Pinogaluman senilai Rp1.348.590.742,40 kontrak Nomor 600/49/DPUTR/BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Berkat Trinitas;
 - 4) Peningkatan SPAM Perpipaan Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp1.020.600.000,00 kontrak Nomor 600/53/DPUTR-BMU/KONTRAK-CK/VII / 2022 CV. Amira;



- 5) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Kaidiung Rp1.036.304.123,28 kontrak Nomor 600/52/DPUTR-BMU/KONTRAK-CK/VII/2022 kontraktor CV. Perwira;
 - 6) Rehabilitasi jaringan irigasi DI Pontak Rp466.867.433,60 kontrak Nomor 600/54/DPUTR-BMU/SPK-SDA/VII/2022 kontraktor CV. Rajawali Perkasa; dan
 - 7) Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Survey Identifikasi Dan Desain (SID) Sungai Pontak Dan Sid Sungai Saleo, pengadaan Tahun 2015 sebesar Rp199.850.000,00.
- c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp1.310.671.488,50.
 - d. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp113.663.000,00 pekerjaan pembangunan halte pada Dinas Perhubungan.
 - e. Koreksi ke Persediaan atas pekerjaan yang akan diserahkan ke Pemerintah Desa Bolangitang Perencanaan Infrastruktur Bidang Tata Kota Tahun 2016 (Lapangan Sogi) pengadaan Tahun 2015 sebesar Rp38.707.500,00.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
(Rp1.011.625.955.014,47) (Rp907.969.043.651,95)

Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan metode garis lurus, yang dilaporkan per semester dengan perhitungan perbulan. Proses penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan bantuan Aplikasi SIMDA BMD. Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar **Rp1.011.625.955.014,47**. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 5.56.

Tabel 5.56
Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	253.421.402.812,83	240.378.076.548,47
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	83.117.879.183,00	71.886.884.954,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	675.086.673.018,64	595.704.082.149,48
Jumlah	1.011.625.955.014,47	907.969.043.651,95

Pada Tahun 2023, terdapat koreksi berkurang pada akumulasi penyusutan karena adanya barang inventaris dan kendaraan dinas yang dilakukan pengusulan penghapusan dan dalam kondisi rusak berat. Selain itu, terdapat pula Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikapitalisasikan ke aset induknya yang menyebabkan perlu adanya koreksi.

Tabel 5.57
Mutasi Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi Saldo Awal (Rp)	Tambah / Beban Penyusutan (Rp)	Kurang		Per 31 Desember 2023 (Rp)
				Rusak Berat dan/Barang Ekstrakomptabel (Rp)	Dihapus / Dikapitalisasikan (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	240.378.076.548,47	44.281.357,50	35.483.114.598,00	22.395.506.976,14	0,00	253.421.402.812,83
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.886.884.954,00	0,00	11.478.942.738,00	0,00	247.948.509,00	83.117.879.183,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	595.704.082.149,48	0,00	80.506.640.474,24	0,00	1.124.049.605,08	675.086.673.018,64
Jumlah	907.969.043.651,95	44.281.357,50	127.468.697.810,24	22.395.506.976,14	1.371.998.114,08	1.011.625.955.014,47



1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2023
Rp13.884.659.534,00

31 Desember 2022
Rp13.403.812.212,74

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 sebesar **Rp13.884.659.534,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar **Rp13.403.812.212,74**, Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar **Rp480.847.321,26**. Rincian penjelasan terhadap Aset Lainnya sebagai berikut.

a. **Tagihan Jangka Panjang / Tuntutan Ganti Rugi**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Saldo TGR pada 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.825.298.780,43** merupakan Tuntutan Ganti Rugi kepada pegawai bukan bendahara/pejabat lain. Jika dibandingkan dengan Saldo TGR Tahun 2022 sebesar **Rp2.731.399.130,79** terdapat penurunan sebesar **Rp93.899.649,64**.

b. **Aset Tidak Berwujud**

Akun Aset Tidak berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari *Software* dan Kajian yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Saldo Aset Tidak Berwujud netto per 31 Desember 2023 adalah **Rp2.248.083.854,83** yang diperhitungkan dari nilai perolehan sebesar **Rp6.669.507.964,00** dikurangi nilai akumulasi amortisasi sebesar **Rp4.421.424.109,17**. Rincian perhitungan Aset Tidak Berwujud serta Akumulasi Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran XIII.7a**, sedangkan untuk mutasi Aset Tidak Berwujud per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.7b**.

c. **Aset Lain – Lain**

Aset Lain-lain merupakan gabungan dari Aset Tetap Rusak Berat dan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Daerah. Per 31 Desember 2023, saldo Aset Lain-Lain adalah sebesar **Rp5.917.537.898,74**. Nilai tersebut merupakan nilai bersih Aset Rusak Berat yang diperhitungkan dari nilai bruto sebesar **Rp10.355.717.076,00** dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar **Rp4.438.179.177,26**. Adapun rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran XIII.8**. Secara umum, rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel 5.58.

Tabel 5.58
Aset Lain-lain Tahun 2023

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	10.639.331.372,95	24.512.407.619,64	24.864.700.916,59	10.287.038.076,00
Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Daerah	34.450.000,00	34.229.000,00	0,00	68.679.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.864.899.387,00)	0,00	573.279.790,26	(4.438.179.177,26)
Jumlah	6.808.881.985,95	24.546.636.619,64	25.437.980.706,85	5.917.537.898,74



Penambahan,

- a. Koreksi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.700.000,00 serta BPBD sebesar Rp26.529.000,00.
- b. Aset Tetap Rusak Berat/Usang yang akan dihapuskan sebesar Rp24.512.407.619,64 dengan rincian:
 - 1) Sekretariat DPRD senilai Rp2.324.055.800,00;
 - 2) Sekretariat Daerah senilai Rp566.835.500,00;
 - 3) Bagian Pemerintahan SETDA senilai Rp66.665.062,00;
 - 4) Bagian Hukum SETDA senilai Rp175.730.400,00;
 - 5) Bagian Perekonomian dan SDA senilai Rp56.758.000,00;
 - 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA senilai Rp65.571.000,00;
 - 7) Bagian Umum dan Perlengkapan senilai Rp2.652.756.125,00;
 - 8) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA senilai Rp344.616.057,00;
 - 9) Bagian Organisasi SETDA senilai Rp87.597.400,00;
 - 10) Bagian Barang dan Jasa SETDA senilai Rp53.378.500,00;
 - 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp289.459.044,00;
 - 12) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp1.417.488.340,00;
 - 13) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp122.120.500,00;
 - 14) Dinas Kesehatan senilai Rp3.665.937.508,00;
 - 15) Puskesmas Boroko senilai Rp645.146.000,00;
 - 16) Puskesmas Buko senilai Rp372.381.870,00;
 - 17) Puskesmas Bintauna senilai Rp2.463.473.863,00;
 - 18) Puskesmas Sangkub senilai Rp323.733.042,50;
 - 19) Puskesmas Bintauna Pantai senilai Rp122.652.250,00;
 - 20) Puskesmas Sangtombolang senilai Rp278.056.500,00;
 - 21) Puskesmas Ollot senilai Rp231.137.500,00;
 - 22) Puskesmas Mokoditek senilai Rp258.561.154,00;
 - 23) UPTD TFC senilai Rp44.998.500,00;
 - 24) UPTD Instalasi Farmasi Senilai Rp80.914.311,00;
 - 25) Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp929.066.056,00;
 - 26) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp258.507.263,14;
 - 27) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp240.405.000,00;
 - 28) Dinas Sosial senilai Rp184.496.000,00;
 - 29) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp194.620.908,00;
 - 30) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp975.267.168,00;
 - 31) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp242.883.880,00;
 - 32) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp43.495.500,00;
 - 33) Dinas Pertanian senilai Rp83.331.200,00;
 - 34) Dinas Perikanan senilai Rp802.187.000,00;
 - 35) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp70.047.500,00;
 - 36) Dinas Perdagangan senilai Rp124.586.500,00;
 - 37) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah senilai Rp613.880.705,00;



- 38) Inspektorat Daerah senilai Rp435.818.583,00;
- 39) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp296.190.500,00;
- 40) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp191.940.200,00;
- 41) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp155.860.230,00;
- 42) Dinas Pariwisata senilai Rp200.746.750,00;
- 43) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp283.954.500,00;
- 44) Kantor KesbangPol senilai Rp58.843.000,00;
- 45) Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp468.113.400,00;
- 46) Dinas Perhubungan senilai Rp88.241.000,00
- 47) Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian senilai Rp200.283.150,00;
- 48) Dinas Perpustakaan senilai Rp71.081.500,00;
- 49) Kecamatan Kaidipang senilai Rp96.166.420,00;
- 50) Kecamatan Pinogaluman senilai Rp37.495.500,00;
- 51) Kecamatan Bolangitang Barat senilai Rp122.645.380,00;
- 52) Kecamatan Bolangitang Timur senilai Rp72.285.000,00;
- 53) Kecamatan Bintauna senilai Rp100.080.100,00;
- 54) Kelurahan Bintauna senilai Rp23.319.000,00; dan
- 55) Kecamatan Sangkub senilai Rp136.544.500,00;

Pengurangan,

Penghapusan Barang Milik Daerah senilai Rp24.864.700.916,59 dengan rincian:

- 1) Sekretariat DPRD senilai Rp2.221.679.159,71;
- 2) Sekretariat Daerah senilai Rp623.685.500,00;
- 3) Bagian Pemerintahan senilai Rp66.665.062,00;
- 4) Bagian Hukum senilai Rp175.730.400,00;
- 5) Bagian Ekonomi dan SDA senilai Rp56.758.000,00;
- 6) Bagian Bina kesejahteraan Sosial senilai Rp65.571.000,00;
- 7) Bagian Umum dan Perlengkapan senilai Rp2.804.308.123,00;
- 8) Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan senilai Rp396.322.432,00;
- 9) Bagian Organisasi senilai Rp87.597.400,00;
- 10) Bagian Barang dan Jasa senilai Rp53.378.500,00;
- 11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp289.979.044,00;
- 12) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp711.987.740,00;
- 13) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai Rp122.120.500,00;
- 14) Dinas Kesehatan senilai Rp3.915.198.140,00;
- 15) Puskesmas Ollot senilai Rp231.137.500,00;
- 16) Puskesmas Mokoditek senilai Rp258.561.154,00;
- 17) UPTD TFC senilai Rp44.998.500,00;
- 18) UPTD Instalasi Farmasi senilai Rp86.194.311,00;
- 19) RSUD Talaga senilai Rp929.066.056,00;
- 20) Puskesmas Boroko senilai Rp956.697.700,00;



- 21) Puskesmas Buko senilai Rp372.381.870,00;
- 22) Puskesmas Bohabak senilai Rp107.353.000,00;
- 23) Puskesmas Bintauna senilai Rp2.572.240.863,00;
- 24) Puskesmas Sangkub senilai Rp360.504.385,00;
- 25) Puskesmas Bintauna Pantai senilai Rp122.652.250,00;
- 26) Puskesmas Sang senilai Rp363.746.500,00;
- 27) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp323.914.009,88;
- 28) Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp240.405.000,00;
- 29) Dinas Sosial senilai Rp193.483.000,00;
- 30) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp194.620.908,00;
- 31) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp1.165.567.168,00;
- 32) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp242.883.880,00;
- 33) Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil senilai Rp152.793.342,00;
- 34) Dinas Pertanian senilai Rp171.837.200,00;
- 35) Dinas Perikanan senilai Rp335.417.000,00;
- 36) Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp72.543.500,00;
- 37) Dinas Perdagangan senilai Rp94.636.500,00;
- 38) Badan Pengelola Keuangan Daerah senilai Rp652.497.505,00;
- 39) Inspektorat senilai Rp435.818.583,00;
- 40) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp329.042.300,00;
- 41) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp203.440.200,00;
- 42) Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp255.248.530,00;
- 43) Dinas Pariwisata senilai Rp164.744.750,00;
- 44) Kantor Pol PP senilai Rp286.567.500,00;
- 45) Kantor Kesbang Pol senilai Rp58.843.000,00;
- 46) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp468.113.400,00;
- 47) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah senilai Rp71.081.500,00;
- 48) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian senilai Rp200.283.150,00;
- 49) Kantor Camat Kaidipang senilai Rp96.166.420,00;
- 50) Kantor Camat Pinogaluman senilai Rp37.495.500,00;
- 51) Kantor Camat Bolangitang Barat senilai Rp122.645.380,00;
- 52) Kantor Camat Bolangitang Timur senilai Rp49.370.000,00;
- 53) Kantor Camat Bintauna senilai Rp104.774.101,00; dan
- 54) Kantor Camat Sangkub senilai Rp143.952.500,00.

Nilai penghapusan diatas tidak termasuk penghapusan Barang Milik Daerah dari barang ekstrakomptabel senilai Rp692.907.851,00. Selain Aset Tetap dan aset lain-lain, terdapat juga barang-barang yang nilainya tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi yang dicatat sebagai barang



ekstrakomptabel dan tetap digunakan dalam operasional pemerintah daerah. Adapun rekapitulasi barang ekstrakomptabel per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIII.9**.

d. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki Dana Transfer TDF sebesar **Rp2.893.739.000,00** yang merupakan dana bagi hasil non tunai. Jika dibandingkan dengan saldo TDF Tahun 2022 sebesar **Rp2.466.639.752,00** terjadi kenaikan sebesar **Rp427.099.248,00** atau 14,76%. TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Bentuk penyimpanan adalah *overnight* pada rekening lain BI *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) di BI. Penarikan dana TDF Pemda dapat dilakukan setelah *holding period* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

31 Desember 2023
Rp2.688.980.350,93

31 Desember 2022
Rp9.019.367.801,60

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sampai dengan 31 Desember 2023, kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya dalam bentuk kewajiban jangka pendek dan tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.688.980.350,93** dan terjadi penurunan sebesar **Rp6.330.387.450,67** atau sebesar **235,42%** dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 sebesar **Rp9.019.367.801,60**. Berikut daftar Kewajiban per 31 Desember 2023 sesuai tabel 5.59.

Tabel 5.59
Daftar Kewajiban Per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Utang Pajak PFK	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	12.465.605,48	2.079.500,00
Utang Belanja	2.676.514.745,45	3.457.780,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	9.013.830.521,60
Jumlah	2.688.980.350,93	9.019.367.801,60

2.1

2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023
Rp2.688.980.350,93

31 Desember 2022
Rp9.019.367.801,60

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2023, Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersaji sebesar **Rp2.688.980.350,93**. Rincian perhitungan Kewajiban Jangka Pendek per Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran XIV**.



2.1.1 Utang PFK

31 Desember 2023
Rp0,00

31 Desember 2022
Rp0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan PFK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang harus diserahkan kepada pihak lain. Pada Tahun 2023 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah telah melakukan pemungutan PFK tidak hanya terbatas pada SP2D Gaji dan Tunjangan tetapi juga atas SP2D LS untuk pihak ketiga sehingga seluruh PFK mutasi debit dan kredit perhitungan pihak ketiga (PFK) sudah termasuk potongan pada SP2D pihak ketiga. Penyetoran PFK ke Rekening Kas Umum Negara atas potongan PFK Tahun 2023 semuanya telah beridentitas yaitu memiliki nomor register NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), sehingga setiap penyetoran PFK yang dilakukan Bendahara Umum Daerah telah diterima di Rekening Kas Umum Negara.

Tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023. Selain PFK yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, terdapat pula PFK yang dipungut dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Bendahara BOSP, Bendahara FKTP dan Bendahara BOK. Rincian Utang PFK Per 31 Desember 2023 sesuai tabel 5.60.

Tabel 5.60
Rincian Utang PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2022 (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	6.342.290.827,00	6.342.290.827,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	427.780.225,00	427.780.225,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	287.893.480,00	287.893.480,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 4 ayat 2	0,00	1.807.359.591,00	1.807.359.591,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	13.574.535.362,00	13.574.535.362,00	0,00
Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00
Iuran Wajib Pegawai	0,00	10.321.112.801,00	10.321.112.801,00	0,00
Iuran JKK	0,00	242.061.460,00	242.061.460,00	0,00
Iuran JKM	0,00	725.809.222,00	725.809.222,00	0,00
Iuran JKK THL	0,00	95.237.388,00	95.237.388,00	0,00
Iuran JKM THL	0,00	119.416.701,00	119.416.701,00	0,00
Lainnya	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
BPJS (1%dari TTP)	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	33.943.897.057,00	33.943.897.057,00	0,00

Tidak terdapat pungutan PFK yang belum disetorkan oleh Bendahara. PFK yang dipungut telah disetorkan langsung oleh Bendahara. Rincian dapat dilihat pada tabel 5.61.

Tabel 5.61
PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

Uraian	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)	Dipungut (Rp)	Disetor (Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
PPh Psl 21 Honor / dll Pejabat/PNS/Polri/Pensiun	0,00	24.383.700,00	24.383.700,00	0,00
PPh Psl 22 Pemungutan Oleh Bendaharawan APBD	0,00	4.546.828,00	4.546.828,00	0,00
PPh Pasal 23 Jasa	0,00	10.734.260,00	10.734.260,00	0,00
PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	0,00	17.837.838,00	17.837.838,00	0,00
PPN Pemungutan Oleh Bendaharawan APBD	0,00	84.101.200,00	84.101.200,00	0,00
Jumlah	0,00	141.603.826,00	141.603.826,00	0,00



2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp12.465.605,48 **Rp Rp2.079.500,00**

Sampai dengan 31 Desember 2023 pemerintah daerah mempunyai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar **Rp12.465.605,48** yang terdiri dari penerimaan sewa tanah bangunan ATM Bank SulutGo sebesar **Rp9.708.131,51** untuk periode 2 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2025 dan penerimaan sewa tanah bangunan ATM BRI Unit Boroko sebesar **Rp2.757.473,97** untuk periode 1 Mei 2019 sampai dengan 1 Mei 2024.

2.1.3 Utang Belanja **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp2.676.514.745,45 **Rp3.457.780,00**

Sampai dengan 31 Desember 2023 pemerintah daerah mempunyai Utang Belanja sebesar **Rp2.676.514.745,45**. Jika dibandingkan dengan Utang Belanja Tahun 2022 sebesar **Rp3.457.780,00** terdapat kenaikan sebesar **Rp2.673.056.965,45**. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022, Utang Belanja disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya. Sedangkan pada Tahun 2023 di sajikan sebagai Utang Belanja sebagaimana Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2023 tentang Perubahan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perhitungan Utang Belanja Per 31 Desember 2023 seperti pada tabel 5.62.

Tabel 5.62
Perhitungan Saldo Utang Belanja

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	3.457.780,00
Pengurangan:	
Pembayaran Utang BPJS 4% PNSD	3.457.780,00
Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Bolangitang - Dinkes	11.946.150,00
Kelebihan pengakuan Utang Tahun 2021	21.450.000,00
Jumlah	36.853.930,00
Penambahan:	
Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga lainnya Tahun 2023 yang diakui sebagai Persediaan atas retensi pekerjaan GSG Kejaksaan pada Dinas PUTR	9.997.050,00
Belanja Internet Bulan Desember 2023 pada Dinas Kominfo	28.528.184,00
Belanja Listrik Bulan Desember 2023 pada Dinas Kominfo	3.432.371,00
Belanja Pemeliharaan	7.494.740,00
Belanja Hibah Barang	117.272.187,00
Reklasifikasi dari Utang Jangka Pendek Lainnya	2.540.545.663,45
Koreksi pengakuan Utang atas pekerjaan paving jalan masuk perumahan pekerjaan Tahun 2022 CV Farrel pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan	2.640.700,00
Jumlah	2.709.910.895,45
Saldo Utang Belanja Per 31 Des 2023	2.676.514.745,45

Pengurangan,

1. Pembayaran Utang BPJS 4% PNSD sebesar Rp3.457.780,00
2. Koreksi Utang yang telah dibayarkan atas retensi pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Bolangitang kontrak Nomor 001/Dinkes/BMU/Kontrak/62/VIII/2015, sebesar Rp11.946.150,00.
3. Koreksi atas kelebihan pengakuan Utang Tahun 2021 atas pekerjaan jalan masuk RSUD sebesar Rp21.450.000,00.



Penambahan:

Penambahan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp1.967.473.864,45 pada:

1. RSUD sebesar Rp1.249.098.000,00;
2. Dinas PUTR sebesar Rp240.632.521,00;
3. Dinas Kesehatan sebesar Rp38.713.454,45;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp430.146.239,00; dan
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.883.650,00.

Pengurangan,

Pengurangan/pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.981.304.386,05 terdiri dari:

1. Pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap yang telah diakui Tahun 2015 sebesar Rp330.244.600,00;
2. Pembayaran utang retensi Tahun 2017 sebesar Rp16.026.550,00;
3. Pembayaran retensi Tahun 2020 sebesar Rp284.322.150,00;
4. Pembayaran retensi Tahun 2021 sebesar Rp1.662.850.498,58;
5. Pembayaran retensi Tahun 2022 sebesar Rp6.147.314.924,02; dan
6. Reklasifikasi ke Utang Belanja sebesar Rp2.540.545.661.45.

3. Ekuitas

31 Desember 2023 **31 Desember 2022**
Rp1.334.135.731.519,83 **Rp1.369.103.649.549,78**

Perhitungan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.334.135.731.519,83** dapat dilihat pada tabel 5.64.

Tabel 5.64
Ringkasan Perubahan Ekuitas Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	1.369.103.649.549,78	1.316.410.947.123,22
Surplus / Defisit - LO	(34.106.254.779,49)	64.097.017.545,16
Koreksi Ekuitas Lainnya	(861.663.250,46)	(11.404.315.118,60)
Ekuitas Akhir	1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78

Penjelasan terkait akun ekuitas lebih rinci telah disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2023 dimana LO Tahun 2023 disajikan dengan perbandingan LO Tahun 2022. Berikut ini diuraikan mengenai posisi Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan – LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp546.587.822.410,41	Rp602.516.747.281,00

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan - LO diakui pada saat pendapatan diterima atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Menurut jenisnya, Pendapatan - LO diklasifikasikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp546.587.822.410,41** dan **Rp602.516.747.281,00** dengan rincian sesuai tabel 5.65.

Tabel 5.65
Pendapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	15.104.056.684,05	19.900.417.383,00
2	Pendapatan Transfer - LO	513.632.157.073,36	580.327.947.519,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	17.851.608.653,00	2.288.382.379,00
Jumlah		546.587.822.410,41	602.516.747.281,00

Pendapatan - LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar **9,28%** yakni sebesar **Rp55.928.924.870,59** jika dibandingkan dengan Pendapatan - LO Tahun 2022. Pendapatan - LO selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp15.104.056.684,05** dan **Rp19.900.417.383,00**. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sesuai tabel 5.66.

Tabel 5.66
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

NO	URAIAN	SALDO 2023 (Rp)	SALDO 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah - LO	6.088.644.821,83	5.780.488.329,75
2	Retribusi Daerah - LO	1.373.342.412,00	1.499.377.309,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.062.169.111,00	0,00
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	6.579.900.339,22	12.620.551.744,25
Jumlah		15.104.056.684,05	19.900.417.383,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 sebesar Rp6.088.644.821,83 dengan rincian sesuai pada tabel 5.67.



Tabel 5.67
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan %
Pajak Hotel - LO	38.100.000,00	67.885.000,00	(43,88)
Pajak Restoran dan sejenisnya - LO	838.871.370,20	759.629.200,00	10,43
Pajak Hiburan - LO	2.500.000,00	2.625.000,00	(4,76)
Pajak Reklame - LO	225.329.259,00	215.037.392,00	4,79
Pajak Penerangan Jalan - LO	2.846.820.812,00	2.453.623.503,00	16,03
Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	574.433.097,13	768.296.472,75	(25,23)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	1.349.842.378,00	1.311.027.576,00	2,96
BPHTB - Pemindahan Hak - LO	212.747.905,50	202.364.186,00	5,13
J u m l a h	6.088.644.821,83	5.780.488.329,75	5,33

Pendapatan pajak daerah - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 adalah sebesar penetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar **Rp1.373.342.412,00** mengalami penurunan jika dibandingkan dengan retribusi Tahun 2022. Adapun penurunannya mencapai **8,41%**. Rincian Pendapatan Retribusi - LO dapat diuraikan sesuai tabel 5.68.

Tabel 5.68
Rincian Pendapatan Retribusi – LO

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan %
Pelayanan kesehatan - LO	1.052.472.948,00	1.114.876.675,00	(5,60)
Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	41.158.062,00	26.150.000,00	57,39
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	20.470.000,00	18.194.500,00	12,51
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO	197.705.000,00	217.645.000,00	(9,16)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	35.520.000,00	0,00
Pemberian Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	20.039.000,00	32.793.000,00	(38,89)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	41.497.402,00	54.198.134,00	(23,43)
J u m l a h	1.373.342.412,00	1.499.377.309,00	(8,41)

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp1.062.169.111,00** dan **Rp0,00** untuk Tahun 2022. Pendapatan ini merupakan dividen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada PT. Bank SulutGo atas laba tahun buku 2022 yang diterima pada Tahun 2023.

Selain itu sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, PT Bank SulutGo mengalokasikan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dana CSR untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2018 sampai 2022 berjumlah Rp860.600.000,00 yang belum digunakan karena masih sedang disiapkan dasar hukum pengelolaan CSR di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar **Rp6.579.900.339,22** dapat diuraikan sesuai tabel 5.69.



Tabel 5.69
Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan %
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	21.415.368,49	8.318.000,00	157,46
Jasa Giro Kas Daerah - LO	1.005.338.985,52	1.728.720.089,00	(41,84)
Pendapatan Bunga Deposito - LO	1.098.082.185,00	85.529.741,16	1.183,86
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO	3.053.546.525,57	2.399.784.208,77	27,24
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	301.863.479,66	0,00	100,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	0,00	129.016.805,00	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	884.758.252,14	510.673.209,00	73,25
Pendapatan denda pajak reklame - LO	2.576.479,00	1.368.465,00	88,28
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	652.479,00	0,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO	4.861.200,00	0,00	100,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	96.119.326,00	0,00	100,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	44.519.807,00	117.204.683,00	(62,02)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	1.886.376,00	0,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	264.490,00	0,00	100,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	3.750.000,00	0,00	100,00
Remunerasi-LO	60.265.385,84	0,00	100,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	0,00	7.639.936.543,32	-
Jumlah	6.579.900.339,22	12.620.551.744,25	(47,86)

1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp513.632.157.073,36** dan **Rp580.327.947.519,00** merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi. Dengan uraian sebagai berikut:

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO sebesar **Rp488.667.621.684,00**. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.70.

Tabel 5.70
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan %
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	14.891.529.450,00	33.395.650.918,00	(55,41)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	365.750.838.000,00	348.218.889.034,00	5,03
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	61.946.075.435,00	134.705.440.990,00	(54,01)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	46.079.178.799,00	42.563.025.302,00	8,26
Jumlah	488.667.621.684,00	558.883.006.244,00	(12,56)

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO sebesar **Rp3.856.808.600,00** merupakan pendapatan DBH PBB dan DBH PPh. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.71.

Tabel 5.71
Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan %
DBH PBB-LO	1.073.244.600,00	7.000.665.265,00	(84,67)
DBH PPh Pasal 21-LO	2.554.618.000,00	2.835.494.340,00	(9,91)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	228.946.000,00	0,00	100,00
Jumlah	3.856.808.600,00	9.836.159.605,00	(60,79)



1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO sebesar **Rp11.034.720.850,00** merupakan pendapatan DBH Minyak bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, DBH Batubara, DBH Kehutanan dan DBH Perikanan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.72.

Tabel 5.72

Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan %
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	17.643.398.536,00	(100,00)
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	2.834.876.250,00	2.548.107.459,00	11,25
DBH Mineral dan Batubara-Royalty-LO	7.586.137.250,00	1.195.069.888,00	534,79
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	11.455.450,00	2.851.219,00	301,77
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LO	602.251.900,00	2.170.064.211,00	(72,25)
Jumlah Transfer Dana Perimbangan	11.034.720.850,00	23.559.491.313,00	(53,16)

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - LO Tahun 2023 sebesar **Rp365.750.838.000,00**.

1.2.1.4 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO sebesar **Rp108.025.254.234,00** merupakan pendapatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Untuk lebih jelasnya rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.73.

Tabel 5.73

Rincian pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
DAK FISIK	61.946.075.435,00	134.705.440.990,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.522.847.035,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	5.774.198.245,00	8.786.703.324,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	3.121.650.840,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	697.607.293,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	95.029.583.039,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting-LO	5.933.315.810,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	9.692.230.682,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	873.807.200,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	1.146.527.880,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	30.963.287.850,00	23.912.592.195,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	4.345.212.432,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	2.631.350.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.220.602.600,00	0,00
DAK NON FISIK	46.079.178.799,00	42.563.025.302,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	10.623.707.712,00	11.250.927.670,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	830.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD dan Tamsil - LO	18.831.695.869,00	18.114.594.720,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.211.271.000,00	2.121.413.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.022.200.000,00	801.300.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	9.361.528.865,00	9.330.252.651,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.898.767.075,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	291.730.578,00	224.407.861,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	276.400.900,00	601.800.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	731.876.800,00	118.329.400,00
Jumlah	108.025.254.234,00	177.268.466.292,00



1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO sebesar **Rp5.890.177.000,00** merupakan dana insentif untuk kinerja Tahun 2022 yang diterima selama dua tahap pada Tahun 2023.

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LO sebesar **Rp19.074.358.389,36** merupakan pendapatan Bagi Hasil Pajak dari provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Untuk lebih jelas rinciannya sesuai tabel 5.74

Tabel 5.74

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.261.716.936,38
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	2.190.814.759,63
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	8.988.828.376,01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	71.656.645,34
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	4.561.341.672,00
Jumlah	19.074.358.389,36

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar **Rp17.851.608.653,00** dan **Rp2.288.382.379,00**. Untuk lebih jelasnya rinciannya sesuai pada tabel 5.75.

Tabel 5.75

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	4.656.596.994,00	2.288.382.379,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	13.195.011.659,00	0,00
	Jumlah	17.851.608.653,00	2.288.382.379,00

1.3.1 Pendapatan Hibah– LO sebesar Rp4.656.596.994,00 merupakan:

- Hibah dari Pemerintah Pusat yaitu peralatan mesin dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) berupa Alat Kesehatan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.961.666.667,00 terdiri dari Rp2.356.000.000,00; Rp554.666.667,00 merupakan Hibah Alkes dari Kementerian Kesehatan SK NO:KN.02.03/I/1163/2022 (PKM Bohabak); Rp51.000.000,00 merupakan Hibah dari Kementerian sesuai BAST Nomor 160/RN-JKT 1/SPB/XII/2023 tgl 21 Desember 2023).
- Hibah dari Pemerintah Daerah-LO yaitu penerimaan hibah dari pemerintah provinsi (UPTD Farmasi) sebesar Rp641.346.321,00.
- Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO sebesar Rp25.000.000,00
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp1.028.584.008,00.



Terdapat juga Hibah pada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp557.026.532,00 berupa mobil ambulance 2 Unit masing-masing bernilai Rp250.000.000,00, berdasarkan naskah perjanjian hibah Nomor KN.02.07/I/4885/2019 dan peralatan kesehatan 61 unit bernilai Rp57.026.532,00 berdasarkan surat permohonan hibah Dinas kesehatan Nomor 400.7/700/Dinkes/BMU/IV/2024.

Selain itu terdapat Pendapatan Hibah/Sponsor pada Dinas Pariwisata sebesar Rp25.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Festival Bolmut (Bolmutfest), yang diterima dari: Bank SulutGo, BNI, BRI, Bank Prismadana, Telkonsel, Mandala Finance dan Suzuki dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

a. Bank Sulut	Rp. 15.000.000,00
b. Bank BNI	Rp. 1.500.000,00
c. Bank BRI	Rp. 5.000.000,00
d. Bank Prisma Dana	Rp. 1.000.000,00
e. Telkom Sel	Rp. 1.000.000,00
f. Mandala Finace	Rp. 500.000,00
g. Susuki	Rp. 1.000.000,00
	<u>Rp. 25.000.000,00</u>

1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO sebesar **Rp13.195.011.659,00** merupakan pendapatan JKN baik JKN Kapitasi maupun Non Kapitasi dari BPJS Tondano Provinsi Sulawesi Utara kepada RSUD dan Puskesmas se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta pendapatan BOK dari Kementerian Kesehatan RI.

2. Beban	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp581.254.517.504,50	Rp537.703.434.250,84

Jumlah Beban Daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp581.254.517.504,50** mengalami kenaikan sebesar **Rp43.551.083.253,66** atau **8,10%** jika dibandingkan dengan Beban Daerah Tahun 2022 sebesar **Rp537.703.434.250,84**. Rincian Beban dapat diuraikan sesuai pada tabel 5.76.

Tabel 5.76
Rincian Beban – LO

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
Beban Pegawai - LO	220.050.690.689,00	213.505.347.619,00
Beban Persediaan	33.339.128.581,48	30.370.353.674,76
Beban Jasa	85.935.375.326,31	80.358.609.120,95
Beban Pemeliharaan	8.866.471.453,00	7.648.288.889,00
Beban Perjalanan Dinas	49.232.239.666,00	44.531.411.589,00
Beban Subsidi	70.000.000,00	0,00
Beban Hibah	13.286.162.856,00	6.193.705.528,00
Beban Bantuan Sosial	3.936.544.495,00	4.321.011.904,00
Beban Penyusutan	127.279.820.457,24	111.898.778.303,50
Beban Amortisasi	549.591.529,17	534.724.333,33
Beban Penyisihan Piutang	130.305.227,30	74.948.998,30
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	379.942.659,00	722.022.195,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	91.046.011,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	37.508.916.700,00	36.491.445.600,00
Barang Ekstrakomtable	598.281.854,00	1.052.786.496,00
Jumlah	581.254.517.504,50	537.703.434.250,84



2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai - LO Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.77.

Tabel 5.77

Realisasi Beban Pegawai

Norek	URAIAN	SALDO 2023 (Rp)	SALDO 2022 (Rp)
8.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	155.214.005.788,00	150.167.214.442,00
8.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	38.467.064.130,00	55.251.894.417,00
8.1.1.03	Beban Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.409.020.259,00	0,00
8.1.1.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.538.298.641,00	7.615.706.332,00
8.1.1.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	126.896.871,00	160.762.628,00
8.1.1.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan serta KDH/WKDH – LO	295.405.000,00	309.769.800,00
Jumlah		220.050.690.689,00	213.505.347.619,00

2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar **Rp33.339.128.581,48** merupakan beban pakai habis. Beban Barang merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang- barang yang habis pakai dan barang-barang tak habis pakai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada rincian tabel 5.78.

Tabel 5.78

Beban Persediaan Tahun 2023

No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.847.860,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	264.934.254,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	656.343.356,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	158.703.034,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	37.074.000,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	78.720.000,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	5.605.000,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	237.800.141,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	68.628.407,20
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	37.594.035,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	7.044.120,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	10.128.750,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	785.720.798,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	777.346.790,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.343.990.523,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	327.004.800,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.557.600,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	712.998.623,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	298.989.159,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	52.174.500,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	191.487.795,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.925.000,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.311.600,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	1.084.546.505,67
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.840.796.063,61
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.772.636.210,00
27	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	16.104.050,00
28	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.110.000,00
29	Beban Natura dan Pakan-Natura	764.448.681,00
30	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00
31	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	131.794.886,00



No.	URAIAN	Jumlah (Rp)
32	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.899.448.629,00
33	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.711.977.933,00
34	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	11.643.800,00
35	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	573.341.258,00
36	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	190.483.000,00
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	187.500.000,00
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	68.659.000,00
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.000.000,00
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.091.000,00
41	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	71.706.000,00
42	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	14.925.000,00
43	Beban Pakaian KORPRI	10.000.000,00
44	Beban Pakaian Adat Daerah	54.000.000,00
45	Beban Pakaian Batik Tradisional	48.635.000,00
46	Beban Pakaian Olahraga	192.005.700,00
47	Beban Pakaian Paskibraka	77.379.700,00
48	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	13.966.020,00
Jumlah		33.339.128.581,48

2.3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk Tahun 2023 sebesar **Rp85.935.375.326,31** merupakan Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Sewa Rumah/Gedung, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Jasa Konsultansi, Beban Kursus/Pelatihan, Beban Honorarium serta Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut.

Tabel 5.79
Beban Jasa Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.381.262.500,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	790.325.000,00
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.782.284.250,00
4	Beban Honorarium Rohaniwan	13.900.000,00
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	41.000.000,00
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	48.000.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	1.232.500.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	16.422.051.616,00
9	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	7.825.500,00
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.644.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	90.024.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Administrasi	7.154.480.783,00
13	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.495.566.231,00
14	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.531.809.507,00
15	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.049.396.500,00
16	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	4.628.408.110,00
17	Beban Jasa Tenaga Keamanan	818.746.250,00
18	Beban Jasa Tenaga Supir	2.340.152.459,00
19	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	56.250.000,00
20	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	94.000.000,00
21	Beban Jasa Tata Rias	36.500.000,00
22	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	8.500.000,00
23	Beban Jasa Kalibrasi	67.500.999,00
24	Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemetretan	54.975.000,00
25	Beban Tagihan Air	488.500,00
26	Beban Tagihan Listrik	2.914.960.396,00
27	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.056.350.000,00
28	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.171.934.551,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

LKPD
2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
29	Beban Paket/Pengiriman	653.600,00
30	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	192.724.800,00
31	Beban Medical Check Up	161.536.199,00
32	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.528.798.000,00
33	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	61.944.400,00
34	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	103.876.800,00
35	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	152.760.000,00
36	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.000.000,00
37	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	35.300.000,00
38	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.475.000,00
39	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.200.000,00
40	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.232.730,00
41	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.202.095.000,00
42	Beban Sewa Mebel	600.000,00
43	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	374.400.000,00
44	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	111.365.000,00
45	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	130.573.386,31
46	Beban Sewa Audio Visual	5.000.000,00
47	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	403.635.960,00
48	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	400.000.000,00
49	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.394.261.906,00
50	Beban Sosialisasi	143.887.900,00
51	Beban Bimbingan Teknis	623.430.101,00
52	Beban Diklat Kepemimpinan	198.000.000,00
53	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	108.650.000,00
54	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00
55	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	641.050.000,00
56	Beban Barang dan Jasa BOS	10.546.088.392,00
	Jumlah	85.935.375.326,31

2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 sebesar **Rp8.866.471.453,00** merupakan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, serta Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian tabel 5.80.

Tabel 5.80
Beban Pemeliharaan Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	37.625.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.789.122.959,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	322.256.162,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	253.907.420,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	366.957.979,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	36.796.309,00
7	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00
8	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.750.000,00
9	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.572.000,00
10	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	49.533.750,00
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.032.218.325,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.944.899,00
13	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	835.659.850,00
14	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	199.521.000,00
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	199.204.000,00
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	349.810.800,00
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	100.154.000,00
18	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	199.437.030,00
19	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	29.999.970,00
	Jumlah	8.866.471.453,00



2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 sebesar **Rp49.232.239.666,00** merupakan Beban Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

2.6. Beban Subsidi

Jumlah Beban Subsidi untuk Tahun 2023 adalah sebesar **Rp70.000.000,00**. Beban tersebut merupakan pemberian uang kepada organisasi kemasyarakatan yakni Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH). Belanja Subsidi Tahun 2023 diberikan dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara

2.7. Beban Hibah

Jumlah Beban hibah untuk Tahun 2023 sebesar **Rp13.286.162.856,00** sesuai tabel 5.81.

Tabel 5.81
Realisasi Beban Hibah

Norek	URAIAN	SALDO 2023 (Rp)	SALDO 2022 (Rp)
8.1.5	Beban Hibah		
8.1.5.1.1.1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	0,00
8.1.5.5.1.1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.811.734.519,00	0,00
8.1.5.5.1.2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.886.160.321,00	3.756.838.000,00
8.1.5.5.2.1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.772.400.000,00	1.707.600.000,00
8.1.5.5.2.2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	163.645.488,00	
8.1.5.5.6.1	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000,00	0,00
8.1.5.6.2.1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	102.045.000,00
8.1.5.7.1.1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	627.222.528,00	627.222.528,00
	Jumlah	13.286.162.856,00	6.193.705.528,00

2.8. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 sebesar **Rp3.936.544.495,00** yang terbagi atas 2 (dua) kegiatan yakni:

1. Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp345.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan SETDA Bagian Kesejahteraan Rakyat.
2. Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu sebesar Rp329.008.495,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan SETDA Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp3.262.536.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta SETDA Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Untuk lebih jelasnya diuraikan pada **Lampiran VI**.



2.9. Beban Penyusutan

Beban penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperhitungkan dengan metode garis lurus dengan perhitungan per bulan dan dilaporkan per semester. Sampai dengan per 31 Desember 2023 Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar **Rp127.279.820.457,24** dengan rincian sesuai pada tabel 5.82.

Tabel 5.82
Beban Penyusutan

Norek	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
8.1.8.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35.294.237.245,00	36.556.786.445,60
8.1.8.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.478.942.738,00	11.421.861.246,00
8.1.8.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	80.506.640.474,24	63.920.130.611,90
Jumlah		127.279.820.457,24	111.898.778.303,50

2.10. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar **Rp549.591.529,17**. Beban Amortisasi tersebut merupakan perhitungan pengurangan nilai dan masa manfaat Aset Tidak Berwujud untuk Tahun 2023 dengan rincian perhitungan beban dapat dilihat pada **Lampiran XIII.7**.

2.11. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar **Rp130.305.227,30** merupakan beban penyisihan piutang pendapatan MBLB, Piutang Reklame, Piutang Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Piutang Retribusi. Rincian dapat dilihat pada tabel 5.83 berikut.

Tabel 5.83
Beban Penyisihan Piutang Per Jenis Piutang

Rek	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
8.1.7.01.09.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	957.892,30	-
8.1.7.01.14.37	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	22.113.100,00	19.116.700,00
8.1.7.01.15.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bngunan pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	86.144.235,00	34.742.298,30
8.1.7.02.1.13	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.090.000,00	21.090.000,00
Jumlah		130.305.227,30	74.948.998,30

2.12. Beban Transfer

Beban Transfer per 31 Desember 2023 sebesar **Rp37.979.905.370,00** yang terdiri dari Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa dan Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa, dengan rincian sesuai pada tabel 5.84.

Tabel 5.84
Beban Transfer

Norek	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
8.2.1.1.3.1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	379.942.659,00	722.022.195,00
8.2.1.2.1.1	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	91.046.011,00	0,00
8.2.2.5.1.1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	37.508.916.700,00	36.491.445.600,00
Jumlah		37.979.905.370,00	37.213.467.795,00



2.12.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar **Rp379.942.659,00** merupakan beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

2.12.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar **Rp91.046.011,00** merupakan beban transfer bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

2.12.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Ke Desa Tahun 2023 sebesar Rp37.508.916.700,00 merupakan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 106 desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2.1.3 Beban Ekstrakomptabel

Beban Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 sebesar **Rp598.281.854,00** merupakan koreksi dari Aset Tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada PKM Sangkub, Kecamatan Bintauna, SETDA Bagian Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Surplus/Defisit Dari Operasi

Tabel 5.85
Rincian Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan – LO	546.587.822.410,41	602.516.747.281,00
Beban	581.254.517.504,50	537.703.434.250,84
Surplus/Defisit Dari Operasi	(34.666.695.094,09)	64.813.313.030,16

4. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO Tahun 2023 sebesar **Rp723.027.414,60** merupakan surplus dari penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar-LO berupa penjualan BMD yang dihapus Tahun 2023 sebesar **Rp722.920.072,00** sesuai SK penghapusan Aset Tetap Nomor :

- SK penghapusan nomor 144 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 Milik Pemerintah Daerah Bagi Pejabat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp35.017.000,00.
- SK penghapusan nomor 203 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 (Scrap) Tanpa Lelang Serta Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar Rp3.075.000,00
- SK penghapusan nomor 204 tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar Rp9.610.000,00.



- SK penghapusan nomor 324 tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar Rp626.255.942,00.
- SK penghapusan nomor 425 tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas Roda 2 Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebesar Rp30.129.930,00.
- SK penghapusan nomor 464 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahap I Tahun 2023 sebesar Rp7.440.000,00.
- SK penghapusan nomor 465 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahap II Tahun 2023 sebesar Rp2.810.000,00.
- SK penghapusan nomor 466 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Harga Limit, Penjualan, dan Penghapusan Barang Inventaris Selain Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp8.588.000,00.

Terdapat selisih sebesar Rp5.800,00 merupakan selisih biaya administrasi bank dari panitia lelang ke RKUD.

Selain itu terdapat Penyesuaian surplus non operasional atas penyisihan Piutang PBB-P2 tahun 2014-2022 yang dilunasi Tahun 2023 sebesar **Rp107.342,60**. Adapun rincian penghapusan Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran XV**.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2023 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Jumlah sebesar **Rp162.587.100,00** merupakan beban luar biasa yang digunakan untuk pengembalian sisa dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.232.000,00 belanja bantuan sosial uang bagi korban kebakaran rumah tinggal Tahun 2023 sebesar Rp44.500.000,00 belanja bantuan sosial uang bagi korban bencana non alam sebesar Rp7.000.000,00. Pengakuan Beban atas potongan langsung sisa DAK Non Fisik tahun sebelumnya – SKPKD sebesar Rp104.855.100,00.

6. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah surplus sebesar **Rp34.106.254.779,49**.



Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 5.86
Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	6.088.644.821,83	5.947.174.351,83	141.470.470,00

Selisih sebesar **Rp141.470.470,00** merupakan akumulasi selisih piutang pendapatan pajak daerah awal tahun dengan piutang pendapatan pajak daerah akhir Tahun 2023. Selisih tersebut timbul karena piutang pajak daerah awal tahun (piutang Tahun 2022) telah dicatat sebagai pendapatan pajak pada Laporan Operasional Tahun 2022, secara fisik kas belum diterima oleh karena itu belum dicatat sebagai pendapatan pajak - LRA (pendapatan pajak - LO lebih besar dari pendapatan pajak - LRA). Pada pencatatan Tahun 2023 untuk penyetoran piutang pajak hanya dicatat pada pendapatan pajak - LRA sesuai dengan fisik kas yang diterima sedangkan pendapatan pajak - LO untuk penyetoran piutang pajak awal tahun tidak lagi diakui karena telah diakui pada Tahun 2022. Rincian selisih tersebut dapat dijelaskan pada tabel 5.87.

Tabel 5.87
Rincian Selisih PAD – LO dengan PAD- LRA

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pajak Hotel	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00
Pajak Restoran	838.871.370,20	838.871.370,20	0,00
Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Pajak Reklame	225.329.259,00	207.926.197,00	17.403.062,00
Pajak Penerangan Jalan	2.846.820.812,00	2.777.565.014,00	69.255.798,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	574.433.097,13	571.222.097,13	3.211.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	1.349.842.378,00	1.298.241.768,00	51.600.610,00
BPHTB	212.747.905,50	212.747.905,50	0,00
Jumlah	6.088.644.821,83	5.947.174.351,83	141.470.470,00

- Pajak reklame sebesar Rp17.403.062,00 merupakan piutang Tahun 2023.
- Selisih Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp69.255.798,00 merupakan piutang Tahun 2023.
- Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp3.211.000,00 merupakan selisih pendapatan piutang Tahun 2020 sebesar Rp85.949.000,00 yang diterima Tahun 2022 dan piutang Tahun 2021 yang disetorkan Tahun 2022 sebesar Rp287.458.000,00 dan Piutang selisih besaran MBLB Tahun 2022 karena perubahan harga satuan material sebesar Rp221.910.000,00.
- Selisih pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp51.600.610,00 merupakan piutang Tahun 2023 yang hanya dicatat pada LO.

2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Tabel 5.88
Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	1.373.342.412,00	1.386.108.412,00	(12.766.000,00)



Terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar (Rp12.766.000,00). Pendapatan piutang retribusi persampahan Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp9.802.000,00. Pendapatan retribusi kesehatan Tahun 2022 diterima Tahun 2023 sebesar Rp2.964.000,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO

Tabel 5.89

Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	-

Tidak terdapat selisih antara Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO dengan Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA.

4. Lain-lain PAD Yang Sah –LO

Tabel 5.90

Selisih Lain-lain PAD yang Sah

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Lain-lain PAD yang sah	6.579.900.339,22	8.009.969.314,01	(1.430.068.974,79)

Selisih antara Lain-lain PAD Yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD Yang Sah-LRA sebesar **(Rp1.430.068.974,79)** yang terdiri dari:

- Penerimaan dari hasil penjualan peralatan/mesin yang diterima Tahun 2023 sebesar (Rp722.920.072,00);
- Pendapatan hasil pemanfaatan BMD/Sewa BMD (tanah untuk ATM Bank SulutGo dan ATM BRI) sebesar Rp689.368,49;
- Pendapatan piutang TGR Tahun 2023 sebesar (Rp756.358.433,00);
- Denda atas pekerjaan Tahun 2022 dan Tahun 2015 sebesar Rp49.118.396,88; dan
- Penyesuaian atas pendapatan remunerasi TDF DBH - Piutang 2022 (Rp598.235,16).

B. PENDAPATAN TRANSFER

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tabel 5.91

Selisih Pendapatan Transfer

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	494.557.798.684,00	573.057.276.436,00	(78.499.477.752,00)

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA sebesar (Rp78.499.477.752,00) yang terdiri atas Dana Desa sebesar (Rp78.926.577.000,00) karena Dana Desa bukan merupakan operasional pemerintah daerah serta Pendapatan Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp427.099.248,00 merupakan pendapatan DBH Tahun 2022 yang diterima pada Tahun 2023, hanya tercatat pada LRA.



2. Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah

Tabel 5.92
Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.074.358.389,36	19.708.020.356,00	(633.661.966,64)

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Antar Pemerintah - LO dengan Pendapatan Transfer Antar Pemerintah - LRA sebesar (Rp633.661.966,64) merupakan Piutang Dana Transfer Provinsi yang telah diterima pada Tahun 2023. DBH Provinsi Tahun 2023 sesuai SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 sesuai rincian berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023 Sebesar Rp2.291.594.086,79 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 145 Tahun 2024 sebesar Rp1.946.238.297,88.
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023 Sebesar Rp1.426.148.966,80 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 145 Tahun 2024 sebesar Rp1.392.078.998,50.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp5.596.710.240,52 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 145 Tahun 2024 sebesar Rp5.365.607.364,85.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp76.541.219,89 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 145 Tahun 2024 sebesar Rp53.407.886,13.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2022 yang diterima di Tahun 2023 sebesar Rp663.787.897,00 dan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Penetapan Definitif Nomor 145 Tahun 2024 sebesar Rp663.787.897,00.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Tabel 5.93
Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	2.961.666.667,00	0,00	2.961.666.667,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	641.346.321,00	0,00	641.346.321,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.028.584.006,00	0,00	1.028.584.006,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	13.195.011.659,00	13.477.394.159,00	(282.382.500,00)
Jumlah	17.851.608.653,00	13.477.394.159,00	4.374.214.494,00

Selisih antara Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2023 sebesar **Rp4.374.214.494,00** merupakan Pendapatan Hibah – LO sebesar **Rp2.961.666.667,00** merupakan Hibah Alat kesehatan



dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Rp641.346.321,00 merupakan hibah obat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Rp25.000.000,00 merupakan hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri *Sponsorship* Kegiatan Bolmutfest (Dinas Pariwisata) dan Sumbangan Pihak ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp1.028.584.006,00 merupakan pendapatan atas dana tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) Bank SulutGo. Pendapatan piutang dana kapitasi JKN RSUD Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023 sebesar (Rp295.735.600,00) dan piutang JKN Tahun 2023 yang telah diterima pada Januari tahun 2024 sebesar Rp13.353.100,00.

4. BEBAN

a. Beban Pegawai

Tabel 5.94
Selisih Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Pegawai	220.050.690.689,00	220.054.148.469,00	(3.457.780,00)

Selisih antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai - LRA Tahun 2023 sebesar (Rp3.457.780,00) merupakan utang belanja BPJS 4% PNSD atas gaji rapel dan terusan bulan Desember 2022, yang telah disetorkan ke BPJS pada tanggal 7 Februari 2023 yang hanya tercatat pada LRA.

b. Beban Barang dan Jasa

Tabel 5.95
Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Barang dan Jasa	177.971.496.880,79	175.366.868.266,00	2.604.628.614,79

Selisih antara Beban Barang Jasa - LO dengan Belanja Barang Jasa - LRA Tahun 2023 sebesar **Rp2.604.628.614,79**. Adapun rincian selisih Beban Barang Jasa LO dengan belanja Barang Jasa LRA sesuai tabel 5.96.

Tabel 5.96
Rincian selisih Beban Barang Jasa dengan Belanja Barang Jasa

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang	33.339.128.581,48	32.747.021.110,00	592.107.471,48
Beban Bahan Pakai Habis	33.325.162.561,48	32.733.055.090,00	592.107.471,48
Beban Bahan Tak Habis Pakai	13.966.020,00	13.966.020,00	0,00
Beban Jasa	74.748.236.934,31	74.723.508.093,00	24.728.841,31
Beban Jasa Kantor	57.652.750.751,00	57.591.002.696,00	61.748.055,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	10.847.379.200,00	10.785.434.800,00	61.944.400,00
Beban Sewa Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.319.902.730,00	1.319.902.730,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	616.338.386,31	715.302.000,00	(98.963.613,69)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	403.635.960,00	403.635.960,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.359.579.907,00	3.359.579.907,00	0,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	138.650.000,00	138.650.000,00	0,00



Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan	8.866.471.453,00	9.019.640.021,00	(153.168.568,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.900.521.579,00	5.900.521.579,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.052.163.224,00	1.212.826.532,00	(160.663.308,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.883.786.680,00	1.876.291.940,00	7.494.740,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	29.999.970,00	29.999.970,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	49.232.239.666,00	49.231.389.666,00	850.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	641.050.000,00	632.350.000,00	8.700.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	641.050.000,00	632.350.000,00	8.700.000,00
Beban Barang Ekstra Komptable	598.281.854,00	0,00	598.281.854,00
Beban Barang dan Jasa BOS	10.546.088.392,00	9.012.959.376,00	1.533.129.016,00
Jumlah	177.971.496.880,79	175.366.868.266,00	2.604.628.614,79

- a) Beban Pakai Habis - LRA sebesar **Rp592.107.471,48** dikarenakan pada awal tahun dilakukan jurnal balik untuk beban persediaan serta penyesuaian untuk pengakuan sisa persediaan beban bahan pakai habis pada akhir tahun. Untuk lebih jelasnya rinciannya terdapat pada **Lampiran XVI**.
- b) Beban Jasa Kantor terdapat selisih antara Beban Jasa Kantor - LO dengan Belanja Beban Jasa Kantor - LRA sebesar **Rp61.748.055,00** merupakan koreksi jurnal atas penganggaran belanja yang hanya dilakukan pada LO.
- c) Beban Iuran Jaminan Asuransi Selisih antara Beban Iuran Jaminan Asuransi - LO dengan Beban Iuran Jaminan Asuransi - LRA sebesar **Rp61.944.400,00** merupakan iuran BPJS yang salah penyetoran dalam menggunakan *virtual account*.
- d) Beban Sewa Rumah Gedung dan bangunan Selisih antara Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LO dengan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA sebesar **(Rp98.963.613,69)** merupakan Beban Sewa Gedung atas Sewa Dibayar Dimuka Dinas Kesehatan sebesar (Rp45.369.863,01), SETDA Bagian Umum sebesar (Rp73.803.347,95). Beban sewa kantor awal tahun dengan Beban Sewa Dibayar Dimuka akhir Tahun 2023 sebesar Rp218.136.824,65 sesuai rincian pada tabel 5.97.

Tabel 5.97
Penjelasan selisih Beban Sewa dengan Belanja Sewa

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Sewa dibayar dimuka 2022:	
Sekretariat Daerah	73.803.347,95
Dinas Kesehatan	45.369.863,01
Jumlah	119.173.210,96
Beban Sewa dibayar dimuka 31 Desember 2023 :	
Dinas Kesehatan	33.958.904,10
Sekretariat Daerah	173.109.427,40
Dinas PPKBPP-PA	11.068.493,15
Jumlah	218.136.824,65
	(98.963.613,69)

- e) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
Selisih antara Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LRA sebesar (Rp160.663.308,00) merupakan belanja pemeliharaan yang telah disesuaikan ke aset tetap.
- f) Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Selisih antara Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LO dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA sebesar Rp7.494.740,00 merupakan Penyesuaian untuk pencatatan pembayaran uang muka, tagihan termin, dan utang atas pengadaan. (Galian Saluran Pembuang Dengi) - Dinas PUTR



g) Beban Barang Ekstrakomptabel

Selisih antara Beban Barang Ekstrakomptabel - LO dengan Belanja Barang Ekstrakomptabel - LRA sebesar **Rp598.281.854,00** yang hanya dicatat pada beban LO

h) Beban Barang dan Jasa BOS

Selisih antara Beban Barang dan Jasa Bos - LO dengan Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA sebesar **Rp1.533.129.016,00** adalah koreksi penambahan Aset Tetap yang berasal dari Belanja/Beban Barang Dana BOS pada SD dan SMP se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar Rp1.543.299.016,00 dan Belanja BOP sebesar Rp8.830.000,00 serta koreksi pengurangan barang dan jasa BOP ke Peralatan Mesin sebesar (Rp19.000.000,00)

c. **Beban Hibah**

Tabel 5.98
Penjelasan selisih Beban Hibah dengan Belanja Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Hibah	13.286.162.856,00	12.991.445.181,00	294.717.675,00
Jumlah			294.717.675,00

Terdapat selisih antara Beban Hibah - LO dengan Belanja Hibah - LRA Tahun 2023 sebesar **Rp294.717.675,00** merupakan Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Tabel 5.99
Penjelasan selisih Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Bantuan Sosial	3.936.544.495,00	3.607.536.000,00	329.008.495,00
Jumlah			329.008.495,00

Terdapat Selisih antara Beban Sosial - LO dengan Belanja Sosial - LRA Tahun 2023 sebesar Rp329.008.495,00 merupakan koreksi kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa yang seharusnya Belanja Bantuan Sosial atas tiga SP2D pada Dinas Sosial yang hanya disajikan pada Laporan Operasional.

e. **Beban Penyusutan**

Tabel 5.100
Penjelasan selisih Beban Penyusutan

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Penyusutan	127.279.820.457,24	0,00	127.279.820.457,24

Selisih antara Beban penyusutan LO dengan Belanja Penyusutan LRA sebesar **Rp127.279.820.457,24** dimana selisih tersebut merupakan Beban Penyusutan dari Aset Tetap tidak termasuk tanah yang hanya disajikan pada Laporan Operasional yang terdiri dari:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.294.237.245,00
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.478.942.738,00
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp80.506.640.474,24



f. Beban Amortisasi

Tabel 5.101
Penjelasan selisih Beban Amortisasi

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Amortisasi	549.591.529,17	0,00	549.591.529,17

Terdapat selisih sebesar **Rp549.591.529,17** antara Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO dengan Belanja Amortisasi Aset Tidak berwujud - LRA. Selisih tersebut merupakan beban amortisasi dari aset tidak berwujud yang hanya disajikan pada Laporan Operasional Tahun 2023

g. Beban Penyisihan Piutang

Tabel 5.102
Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	130.305.227,30	0,00	130.305.227,30

Terdapat selisih sebesar **Rp130.305.227,30** antara Beban Penyisihan Piutang - LO dengan Belanja Penyisihan Piutang - LRA. Selisih tersebut karena beban penyisihan piutang hanya disajikan pada Laporan Operasional.

h. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Tabel 5.103
Penjelasan selisih Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	470.988.670,00	470.988.670,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa - LO dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa - LRA

i. Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa

Tabel 5.104
Penjelasan selisih Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	37.508.916.700,00	116.435.493.700,00	(78.926.577.000,00)

Terdapat selisih antara Beban Bantuan Keuangan - LO dengan Belanja Beban Bantuan Keuangan - LRA sebesar **(Rp78.926.577.000,00)** Tahun 2023, merupakan transfer bantuan keuangan khusus Daerah ke desa yang hanya ada pada LRA sebab Dana Desa bukan merupakan bagian dari operasional pemerintah daerah.

j. Beban Luar Biasa

Tabel 5.105
Penjelasan selisih Beban Luar Biasa

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	SELISIH (Rp)
Beban Luar Biasa	162.587.100,00	162.587.100,00	0,00



Tidak terdapat selisih Beban Luar Biasa - LO dan Belanja Tidak Terduga - LRA Tahun 2023.

5. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023 Rp92.766.124.681,84 31 Desember 2022 Rp177.990.066.702,89

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar **Rp92.766.124.681,84** merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar **Rp621.925.192.067,84** dan arus kas keluar sebesar **Rp529.159.067.386,00**.

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 lebih kecil **Rp85.223.942.021,05** dibandingkan Tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi.

Tabel 5.106
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	5.947.174.351,83	5.864.133.632,75
Penerimaan Retribusi Daerah	1.386.108.412,00	1.488.351.309,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.062.169.111,00	717.084.719,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	7.287.049.242,01	13.814.362.662,34
Penerimaan Dana Perimbangan	488.240.522.436,00	556.416.366.492,00
Penerimaan DID	5.890.177.000,00	3.281.264.000,00
Penerimaan Dana Desa	78.926.577.000,00	74.473.858.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.708.020.356,00	20.023.793.866,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai Ketentuan Perundang undangan	13.477.394.159,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	621.925.192.067,84	676.079.214.681,09
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	220.054.148.469,00	213.501.889.839,00
Pembayaran Barang	175.366.868.266,00	161.691.063.199,20
Pembayaran Subsidi	70.000.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	12.991.445.181,00	6.091.660.528,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.607.536.000,00	4.322.751.832,00
Pembayaran Tak Terduga	57.732.000,00	794.456.785,00
Transfer Bagi Hasil	470.988.670,00	722.022.195,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	116.435.493.700,00	110.965.303.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas	529.054.212.286,00	498.089.147.978,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	92.870.979.781,84	177.990.066.702,89



Kas masuk dari aktivitas operasi merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan - LRA, demikian pula halnya dengan arus kas keluar dari kegiatan operasional merupakan belanja yang disajikan dalam LRA tahun berjalan yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
(Rp105.785.573.059,00) **(Rp153.585.364.197,45)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar **(Rp105.785.573.059,00)** dimana arus kas masuk sebesar **Rp722.920.072,00** berasal dari lelang Aset Tetap peralatan dan mesin dan arus kas keluar sebesar **Rp106.508.493.131,00** yang dipergunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap .

Tabel 5.107
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
Arus Masuk Kas		
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Peralatan Kantor	722.920.072,00	78.161.300,00
Penerimaan lain-lain PAD Yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas	0,00	0,00
Jumlah Masuk Kas	722.920.072,00	78.161.300,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	14.970.075.158,00	42.133.717.363,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	40.198.872.110,00	46.686.878.023,45
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	48.314.091.184,00	60.424.763.037,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.025.454.679,00	4.119.256.074,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	298.911.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	106.508.493.131,00	153.663.525.497,45
Arus Kas Bersih dari Aktivas Investasi	(105.785.573.059,00)	(153.585.364.197,45)

5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp0,00 **Rp0,00**

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp0,00 **(Rp2.387.523,00)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan yang bukan merupakan hak pemerintah daerah melainkan hak pihak ketiga. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran dan Penerimaan,.

- a) Arus kas masuk dari aktivitas transitoris periode Tahun 2023 adalah sebesar **Rp34.085.535.883,00** yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) selama Tahun 2023.



- b) Arus Kas Keluar sebesar **Rp34.085.535.883,00** merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) selama Tahun 2022 sebesar **Rp34.085.535.883,00** termasuk didalamnya PFK yang disetor oleh BUD.

5.5 Kenaikan/Penurunan Kas Bersih **31 Desember 2023**
(Rp13.019.448.377,16) **31 Desember 2022**
Rp24.402.314.982,44

Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar **(Rp13.019.448.377,16)** menunjukkan adanya surplus/defisit penerimaan kas di Tahun 2023. Perhitungan kenaikan kas bersih seperti pada tabel 5.108.

Tabel 5.108
Perhitungan kenaikan kas bersih

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	92.766.124.681,84	177.990.066.702,89
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(105.785.573.059,00)	(153.585.364.197,45)
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	0,00	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	0,00	(2.387.523,00)
Jumlah	(13.019.448.377,16)	24.402.314.982,44

5.6 6. Saldo Akhir Kas **31 Desember 2023**
Rp36.007.547.633,94 **31 Desember 2022**
Rp49.160.796.332,10

Saldo akhir kas sebesar **Rp36.007.547.633,94** merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023. Rincian saldo akhir kas sesuai tabel 5.109.

Tabel 5.109
Rincian saldo akhir kas

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kenaikan (Penurunan Kas)	(13.019.448.377,16)	24.402.314.982,44
Saldo Awal Kas BUD	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi	0,00	0,00
Kas Dana Non Kapitasi	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	1.028.609.006,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Saldo Awal Kas	49.160.796.332,10	24.741.000.440,66
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	(1.162.409.327,00)	17.480.909,00
Jumlah	36.007.547.633,94	49.160.796.332,10

- a) Koreksi SiLPA sebesar **(Rp1.162.409.327,00)** merupakan koreksi atas kesalahan pelaporan sisa Dana BOS sebesar Rp5.334.673,00 dan koreksi Pendapatan Transfer DBH sebesar (Rp1.167.744.000,00).
- b) Saldo Awal Kas Tahun 2023 merupakan Saldo akhir kas Tahun 2022.

F. Penjelasan Akun – akun Laporan Perubahan Ekuitas **31 Desember 2023**
Rp1.334.135.731.519,83 **31 Desember 2022**
Rp1.369.103.649.549,78

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya baik karena surplus/defisit LO ataupun koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.



Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai tabel 5.110.

Tabel 5.110
Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	1.369.103.649.549,78	1.316.410.947.123,22
Surplus / Defisit – LO	(34.106.254.779,49)	64.097.017.545,16
Koreksi ekuitas lainnya	(861.663.250,46)	(11.404.315.118,60)
Ekuitas Akhir	1.334.135.731.519,83	1.369.103.649.549,78

Penjelasan :

1. Saldo awal ekuitas sebesar **Rp1.369.103.649.549,78** merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2022.
2. Surplus/defisit – LO sebesar (Rp34.106.254.779,49) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.
3. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar (Rp861.663.250,46) merupakan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya maupun dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan rincian sesuai tabel 5.111.

Tabel 5.111
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan	
Koreksi saldo awal kas di bendahara BOS (Dikbud) 2022	1.020.673,00
Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin atas perubahan status satuan pendidikan.	8.400.000,00
Koreksi saldo atas awal Kas Dana Bos pada satuan pendidikan swasta yang dialihkan menjadi satuan pendidikan negeri (Dikbud)	133.948.810,00
Koreksi saldo awal piutang pajak rokok berdasarkan SK Gubernur Nomor 286 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran II, Alokasi Definitif Pajak Bagi Hasil Provinsi.	4.855.464.216,00
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi (BKPSDM)	663.787.897,00
Penyesuaian Utang atas pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor (2015)_(DPRD)	7.174.290,00
Penyesuaian atas tagihan jangka panjang dengan SKTJM (SKPKD)	330.244.600,00
Koreksi barang ekstrakomptabel	756.358.432,64
Koreksi pengurangan Hutang (retensi yang telah dibayarkan)	62.194.150,00
Koreksi berkurangnya Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan	11.946.150,00
Koreksi berkurangnya Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan	247.948.509,00
Koreksi pengakuan beban atas pemotongan DAU dari sisa DAK Non Fisik tahun	1.124.049.605,08
Koreksi pengakuan beban atas pemotongan DAU dari sisa DAK Non Fisik tahun	104.855.100,00
Jumlah Penambahan	8.307.392.432,72
Pengurangan	
Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka_ sewa ATM BRI 1 Mei 2019 sd 1 Mei 2024	11.075.473,97
Jurnal Penyesuaian Persediaan untuk diserahkan Lainnya (Pagar Polres/Rudis Kejaksaan) sesuai BAST tahun 2023_Dinas PUTR	3.159.041.808,00
Penghapusan aset tetap sesuai SK No 466 tahun 2023 (Satpol PP)	1.226.290.534,50
Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset rusak berat atas kesalahan pencatatan	1.823.130.811,21
Koreksi saldo awal Akm. penyusutan (Mutasi)_PKM Ollot	89.667.452,50
Koreksi peralatan mesin yang merupakan barang-barang ekstrakomptable, bersumber dari	134.200.000,00
Jurnal penyesuaian atas aset tetap yang dimutasi (Hibah) Tanah ke DIRJEN Perhubungan	632.301.950,00
Koreksi JIJ ke Aset Lainnya (Masterplan dan DED) PUTR	806.371.200,00
Koreksi bertambahnya Akumulasi Peralatan dan Mesin	14.377.353,00
Koreksi SiLPA atas sisa DAK Non Fisik tahun sebelumnya, serta lebih bayar DBH tahun sebelumnya.	1.272.599.100,00
Jumlah Pengurangan	9.169.055.683,18
Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	(861.663.250,46)



Berdasarkan tabel 5.103, koreksi ekuitas selang Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi bertambah Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.020.673,00;
2. Koreksi atas kurang saji piutang Retribusi persampahan/kebersihan (DLHK) Tahun 2022 sebesar Rp8.400.000,00;
3. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin atas perubahan status satuan pendidikan sebesar Rp133.948.810,00;
4. Koreksi saldo atas awal Kas Dana Bos pada satuan pendidikan swasta yang dialihkan menjadi satuan pendidikan negeri (Dikbud) sebesar Rp4.855.464.216,00;
5. Koreksi saldo awal piutang pajak rokok berdasarkan SK Gubernur Nomor 286 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran II, Alokasi Definitif Pajak Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp663.787.897,00;
6. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Amortisasi (BKPSDM) sebesar Rp7.174.290,00;
7. Penyesuaian Utang atas pekerjaan pembangunan pagar lingkaran dan papan nama kantor (2015)_(DPRD) sebesar Rp330.244.600,00;
8. Penyesuaian atas tagihan jangka panjang dengan SKTJM (SKPKD) sebesar Rp756.358.432,64;
9. Koreksi dari barang ekstrakomptabel (retensi pekerjaan yang seharusnya dikapitalisasi) pembayaran retensi 5% paving blok dan KDP dina Perhubungan sebesar Rp62.194.150,00;
10. Koreksi AT utang yang telah dibayarkan (Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Bolangitang) – Dinkes sebesar Rp11.946.150,00;
11. Koreksi berkurangnya Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp247.948.509,00;
12. Koreksi berkurangnya Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp1.124.049.605,08;
13. Koreksi pengakuan beban atas pemotongan DAU dari sisa DAK Non Fisik tahun sebelumnya sebesar Rp104.855.100,00;
14. Koreksi Pengurang atas Pendapatan diterima dimuka sewa ATM BRI 1 Mei 2019 sd 1 Mei 2024 (BPKPD) sebesar Rp11.075.473,97;
15. Penyesuaian Persediaan untuk diserahkan Lainnya (Pagar Polres/Rudis Kejaksanaan) sesuai BAST Tahun 2023_Dinas PUTR sebesar Rp3.159.041.808,00;
16. Penghapusan aset tetap sesuai SK No 466 Tahun 2023 (Satpol PP) sebesar Rp1.226.290.534,50;
17. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset rusak berat atas kesalahan pencatatan (PUTR) sebesar Rp1.823.130.811,21;
18. Koreksi saldo awal Akm. penyusutan (Mutasi) PKM Ollot sebesar Rp89.667.452,50;
19. Koreksi peralatan mesin yang merupakan barang-barang ekstrakomptabel, bersumber dari hibah/alih status satuan pendidikan swasta (Dikbud) sebesar Rp134.200.000,00;
20. Jurnal penyesuaian atas aset tetap yang dimutasi (Hibah) Tanah ke DIRJEN Perhubungan laut Tahun 2023 sebesar Rp632.301.950,00;
21. Koreksi JIJ ke Aset Lainnya (Masterplan dan DED) PUTR sebesar Rp806.371.200,00;
22. Koreksi bertambahnya Akumulasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.377.353,00;
23. Koreksi SiLPA atas sisa DAK Non Fisik tahun sebelumnya, serta lebih bayar DBH tahun sebelumnya sebesar Rp1.272.599.100,00.



Saldo akhir Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.334.135.731.519,83** sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara per 31 Desember 2023.



BAB VI INFORMASI – INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Tambahan

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 – 2023 dan bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengemban amanah melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tersebut. Sehingga demikian capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2023 ini tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja tahunan namun sekaligus juga menjadi ukuran pencapaian kinerja jangka menengah karena berkenaan dengan tahun terakhir RPJMD 2018 – 2023.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah: “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. Berkelanjutan memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Mandiri, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai kawasan agribisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Berbudaya memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan local yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
4. Berdaya saing memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian visi tersebut terdapat empat misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu:

Misi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata; dan
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

Penjelasan Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berbudaya
 - a) Meningkatkan mutu dan akses pendidikan serta keterampilan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan sarana dan kualitas tenaga pendidik.
 - b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang kesehatan;
 - c) Menciptakan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan dan peningkatan pendidikan formal maupun non formal.
2. Menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean government*)
 - a) Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada segenap tatanan pemerintahan.
 - b) Mengefektifkan proses pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan akuntabel;
 - c) Menjamin penegakkan hukum dan kepastian hukum untuk perlindungan hak-hak dasar masyarakat;
 - d) Memperkuat 4 (empat) Pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI).
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
 - a) Mengelola produk daerah yang berkeunggulan kompetitif (berdaya saing dipasaran regional dan global)
 - b) Meningkatkan peran lembaga-lembaga keuangan, koperasi dan badan usaha milik daerah sebagai penopang akses modal dan sarana produksi.
 - c) Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastuktur wilayah yang handal.
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara merata;
 - b) Pembangunan insfrastruktur secara merata diseluruh wilayah;
 - c) Menjamin pembangunan berdasarkan pada tata ruang wilayah;
 - d) Terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meminimalisir kesenjangan wilayah; dan
 - e) Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi dan konektivitas antar wilayah.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pemerintah telah mengangkat SIRAJUDIN LASENA, SE, M.EC Dev sebagai Penjabat Bupati melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3055 Tahun 2023 Tentang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

Pengangkatan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tersebut :

1. Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah difinitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah; dan
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilarang :
 - a) Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai;
 - b) Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan/atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - c) Membuat kebijakan pemekaran daerah; dan
 - d) Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya.
5. Larangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
6. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dan Pilkada di Kabupaten Bolaang mongondow Utara tahun 2024 serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara; dan
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan setelah berakhirnya RPJMD 2018 – 2023 maka berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah Tahun 2024 – 2026. RPD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai pedoman bagi Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

RPD 2024-2026 merupakan penjabaran dari tahapan terakhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2005-2025. RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2005-2025 yaitu ***“Mewujudkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkeadilan”***.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

unan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2024-2026 adalah :

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
3. Terwujudnya Pemerataan dan Petumbuhan ekonomi yang inklusif; dan
4. Terwujudnya Pembangunan Kawasan Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
5. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah;
6. Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
8. Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT:
 - a). makanan dan/atau minuman;
 - b). Tenaga Listrik;
 - c). jasa perhotelan;
 - d). jasa parkir; dan
 - e). jasa kesenian dan hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yang meliputi :
 - a). pelayanan kesehatan;
 - b). pelayanan kebersihan;
 - c). pelayanan parkir di tepi jalanan umum; dan
 - d). pelayanan pasar.
2. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi :
 - a). penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b). penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c). pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

- d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e). pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi :
- a). persetujuan bangunan gedung; dan
 - b). penggunaan tenaga kerja asing.

Sejak Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan kebijakan pemerintah dengan menerapkan Gerakan Nasional Transaksi non Tunai (GNTT) dengan mengimplementasikan aplikasi Kas Daerah *online* yang diintegrasikan dengan *database* SP2D dari aplikasi SIMDA Keuangan, disamping itu ditingkatkan perangkat daerah telah dijalankan aplikasi Kasda *Online* Versi 2.0 yang mengakses rekening perangkat daerah untuk melakukan pemindahbukuan pembayaran berupa SPPD, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) serta Belanja Barang/Jasa yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pada Tahun Anggaran 2023 seiring dengan semangat perbaikan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk menuju pada manajemen pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dan akan lebih memperhatikan *mandatory spending* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat.

B. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007) yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak antara 6° LU - 11°LS dan 95° LS - 141°BT, luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1.672,61 km² atau 12,30% dari luas Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan daerah otonom yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow, pusat pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, dengan luas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 1.672,61 km² yang tersebar pada Enam kecamatan dengan masing-masing luas kecamatan dapat dilihat pada tabel 6.1 :

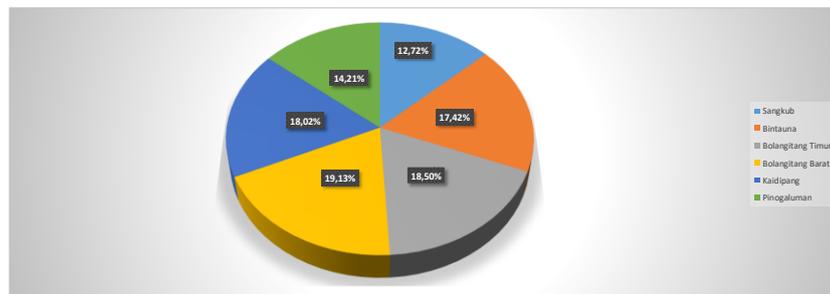
Tabel 6.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sangkub	418,40	25,01
2	Bintauna	348,94	20,86
3	Bolangitang Timur	422,96	25,29
4	Bolangitang Barat	312,56	18,69
5	Kaidipang	95,79	5,73
6	Pinogaluman	73,96	4,42
	Jumlah	1.672,61	100,00

Sumber: Profil Kabupaten 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 adalah 87.301 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Distribusi penduduk antar kecamatan terlihat cukup bervariasi. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Bolangitang Barat yaitu sebanyak 16.700 jiwa atau sebesar 19,13% dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan pada Kecamatan Sangkub merupakan kecamatan terkecil yaitu sebanyak 11.107 jiwa atau 12,72%. Berikut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2023.

Gambar 6.1
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan 2023



Sumber: Data Agregat Kependudukan 2023

Dengan melihat gambar 6.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Bolangitang Timur dengan luas wilayah terbesar memiliki penduduk sebesar 16.149 jiwa atau 18,50% dari jumlah penduduk, selanjutnya Kecamatan Sangkub dengan luas wilayah kedua terbesar memiliki jumlah penduduk yaitu 11.107 jiwa atau 12,72%. Kecamatan Kaidipang yang merupakan pusat pemerintahan dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Kecamatan Pinogaluman, memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.730 jiwa atau 18,02% dari jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya dapat dilihat tabel 6.2 :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

Tabel 6.2
Kepadatan Penduduk Per Km² Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
		(km ²)		(Jiwa/Km ²)
1	Sangkub	418,40	11.107	12,72
2	Bintauna	348,94	15.207	17,42
3	Bolangitang Timur	422,96	16.149	18,50
4	Bolangitang Barat	312,56	16.700	19,13
5	Kaidipang	95,79	15.730	18,02
6	Pinogaluman	73,96	12.408	14,21
Jumlah		1.672,61	87.301	100,00

Sumber: Data Agregat Kependudukan 2023

C. Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe C;
- d. Dinas Daerah yang terdurusan iri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; Ketentuan Perundang-undangan;
 - 2) Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial Daerah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - 7) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga;
 - 9) Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tipe A;
 - 10) Menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 11) Dinas Ketahanan Pangan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

- 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 15) Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - 16) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
 - 17) Dinas Perdagangan tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 18) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, pelaksanaan pelayanan perizinan, dan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 19) Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 20) Dinas Perpustakaan Daerah tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 - 21) Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 22) Dinas Pariwisata tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - 23) Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

Tabel 6.3
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1-01.2-22.1.1
2	Dinas Kesehatan		1-02.1.1.0
a	RSUD (UPTD)		1-02.1.1.1
b	Puskesmas Sangkub (UPTD)		1-02.1.1.2
c	Puskesmas Bintauna (UPTD)		1-02.1.1.3
d	Puskesmas Bohabak (UPTD)		1-02.1.1.4
e	Puskesmas Bolangitang (UPTD)		1-02.1.1.5
f	Puskesmas Boroko (UPTD)		1-02.1.1.6



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
g	Puskesmas Buko (UPTD)		1-02.1.1.7
h	Puskesmas Tuntung (UPTD)		1-02.1.1.8
i	Puskesmas Bintauna Pantai (UPTD)		1-02.1.1.9
j	Puskesmas Ollot (UPTD)		1-02.1.1.10
k	Puskesmas Mokoditek (UPTD)		1-02.1.1.11
l	Puskesmas Sang (UPTD)		1-02.1.1.12
m	Puskesmas Biontong (UPTD)		1-02.1.1.13
n	Therapeuty Feeding Centre (TFC) (UPTD)		1-02.1.1.14
o	Instalasi Farmasi dan Perbekalan (UPTD)		1-02.1.1.15
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1-03.0.1.1
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan		1-04.2-10.1.1
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		1-05.0.1.1
6	Dinas Sosial		1-06.0.1.1
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1-06.0.2.1
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2-07.3-32.1.1
9	Dinas Ketahanan Pangan		2-09.0.1.1
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2-11.3-28.1.1
11	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		2-12.0.1.1
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Denagn Pelayanan Dasar	2-13.0.1.1
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2-14.2-08.1.1
14	Dinas Perhubungan		2-15.0.1.1
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		2-16.2-21.2- 20.1.1
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2-18.0.1.1
17	Dinas Pemuda dan Olahraga		2-19.0.1.1
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2-24.0.1.1
19	Dinas Kelautan dan Perikanan		3-25.0.1.1
20	Dinas Pariwisata		3-26.0.1.1
21	Dinas Pertanian	Pemerintahan Pilihan	3-27.0.1.1
22	Dinas Perdagangan		3-30.3-31 2- 17.1.1
23	Sekretariat Daerah		4-01.0.1.1
a	Bagian Umum	Pendukung Urusan Pemerintahan	4-01.0.1.1.2
b	Bagian Perekonomian dan SDA		4-01.0.1.1.3
c	Bagian Adminstrasi dan Pembangunan		4-01.0.1.1.4
d	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4-01.0.1.1.5
e	Bagian Hukum	Pendukung Urusan Pemerintahan	4-01.0.1.1.6
e	Bagian Pemerintahan		4-01.0.1.1.7



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

No	Perangkat Daerah	Urusan	Kode Satker
f	Bagian Kesejahteraan Rakyat		4-01.0.1.1.8
g	Bagian Organisasi		4-01.0.1.1.9
h	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		4-01.0.1.1.10
24	Sekretariat DPRD		4-02.1.1.1
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	5-01.5-05.1.1
26	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		5-02.0.1.1
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumberdaya Manusia		5-03.5-04.1.1
28	Inspektorat Daerah	Pengawasan	6-01.0.1.1
29	Kantor Camat Sangkub	Unsur Kewilayahan	7-01.0.1.1
30	Kantor Camat Bintauna		7-01.0.1.2
31	Kantor Camat Bolangitang Timur		7-01.0.1.3
32	Kantor Camat Bolangitang Barat		7-01.0.1.4
33	Kantor Camat Kaidipang		7-01.0.1.5
34	Kantor Camat Pinogaluman		7-01.0.1.6
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		Pemerintahan Umum

Sumber: BPKPD (Diolah)

D. Urusan Pemerintahan

Sifat operasi dan kegiatan pokok Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan Umum;
4. Bidang Perumahan;
5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Bidang Sosial;
7. Bidang Tenaga Kerja;
8. Bidang Pangan;
9. Bidang Lingkungan Hidup;
10. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil;
11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Bidang Perhubungan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

14. Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Bidang Penanaman Modal;
16. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
17. Bidang Kearsipan
18. Bidang Kelautan dan Perikanan
19. Bidang Pariwisata
20. Bidang Perdagangan;
21. Bidang Administrasi Pemerintahan;
22. Bidang Pengawasan;
23. Bidang Perencanaan;
24. Bidang Keuangan;
25. Bidang Kepegawaian;
26. Bidang Sekertariat DPRD;
27. Bidang Kewilayahan; dan
28. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

E. Ketentuan Perundang-Undangan yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu landasan yuridis untuk menunjang operasional kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara;
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran dan Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan bupati nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Barang Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023; dan
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparat Sipil Negara, Pejabat Lainnya dan Tenaga Harian Lepas Tahun 2023;

Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan operasional pelaksanaan program dan kegiatan dimasing-masing Perangkat Daerah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur secara teknis pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (Lembaga/Kementrian).

F. Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023

1. Kondisi Awal APBD Tahun 2023

Sebelum melakukan penyesuaian anggaran sesuai instruksi dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran DAK Fisik dan Non Fisik sebagai berikut:

- a) **Total Pendapatan Rp607.592.412.148,00**
 - Pendapatan Asli Daerah **Rp16.885.091.599,00**
 - Pendapatan Transfer **Rp590.707.320.549,00**
- b) **Total Belanja Rp628.996.263.922,00**
 - Belanja Operasi **Rp419.090.026.063,00**
 - Belanja Modal **Rp94.367.981.102,00**
 - Belanja Tidak Terduga **Rp1.420.669.766,00**
 - Belanja Transfer **Rp114.117.586.991,00**

2. Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2023

Tanggal 27 Juni 2023 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2023 terkait penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan, Penanaman Modal, Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta penyesuaian belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sangadi;
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Instruksi dan petunjuk teknis diatas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

- Penyesuaian Belanja Daerah terhadap petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 6.4
Penyesuaian Belanja Perubahan Penjabaran I APBD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi	419.350.026.063,00	420.152.831.497,00	802.805.434,00
2	Belanja Modal	94.367.981.102,00	93.781.175.668,00	(586.805.434,00)
3	Belanja Tidak Terduga	1.160.669.766,00	944.669.766,00	(216.000.000,00)
4	Belanja Transfer	114.117.586.991,00	114.117.586.991,00	0,00
Total Belanja Daerah		628.996.263.922,00	628.996.263.922,00	0,00

- Daftar SKPD yang melakukan penyesuaian belanja dan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Tabel 6.5
OPD yang Menyesuaikan Belanja Perubahan Penjabaran I APBD 2023

No.	Skpd	Nomor Juknis	Nomor Surat Usulan	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik	440/524/Dinkes/BMU/IIV/2023	Penyesuaian rincian belanja juknis DAK Khusus Non Fisik
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permendagri nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023	420/833/DIKBUD/BMU/IV/2023	Penyesuaian kode rekening belanja DAK Non fisik



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

No.	Skpd	Nomor Juknis	Nomor Surat Usulan	Keterangan
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2022	503/40/DPM.PTSP-BMU/III/2023	Penyesuaian rincian belanja juknis DAK Khusus Nonfisik
4.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sangadi	200/41/KBP/BMU/V/2023	Penyesuaian rincian belanja Dana Alokasi Umum (DAU)
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sangadi	900/ /BPKPD/BMU/II/2023	Penyesuaian belanja tidak terduga
6.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Surat Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Nomor B/UK.01/2-300/I/2023 Perihal Pemasangan Tanda Batas tanggal 6 Januari 2023	663/07.a/DPKPP/BMU/I/2023	Penyesuaian belanja Dana Alokasi Umum (DAU)
7.	Bapelitbang	Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran	050/82/BAPELITB ANG/V/2023	Penyesuaian rincian belanja Dana Alokasi Umum (DAU)
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian sangadi	331.1/34.a/SP3/IV/2023	Penyesuaian belanja Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 6.6
Penyesuaian Belanja Operasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Anggaran sebelum Penyesuaian	Anggaran setelah Penyesuaian	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Penyesuaian Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	241.588.773.703,00	241.588.773.703,00	0
2	Belanja Barang dan Jasa	168.340.903.432,00	167.850.886.032,00	(490.017.400,00)
3	Belanja Subsidi	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4	Belanja Hibah	8.890.348.928,00	10.113.171.762,00	1.222.822.834,00
5	Belanja Bantuan Sosial	530.000.000,00	530.000.000,00	0
Total Belanja Operasi		419.350.026.063,00	420.152.831.497,00	802.805.434,00

3. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023 Nomor 21 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023.

Tabel 6.7

Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Induk APBD 2023	Anggaran Perubahan APBD 2023
(a)	(b)	(c)	(d)
Pendapatan Daerah			
1	Pendapatan Asli Daerah	16.885.091.599,00	13.921.788.698,00
2	Pendapatan Transfer	590.707.320.549,00	602.193.892.514,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	00	10.890.689.403,00
Total Pendapatan Daerah		607.592.412.148,00	627.006.370.615,00
Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi	419.090.026.063,00	443.367.154.230,00
2	Belanja Modal	94.367.981.102,00	114.491.312.160,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.420.669.766,00	944.669.766,00
4	Belanja Transfer	114.117.586.991,00	117.364.030.791,00
Total Belanja Daerah		628.996263.922,00	676.167.166.947,00
Pembiayaan Daerah			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.403.851.774,00	49.160.796.332,00

- Penyesuaian belanja OPD atas SILPA APBD 2022 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebesar **Rp.49.160.796.332,00**;
- Penyesuaian Anggaran Insentif Fiskal (DID) Tahun Berjalan untuk penanganan miskin ekstrim, penanganan inflasi daerah dan stunting sebesar **Rp5.890.177.000,00**;
- Penyesuaian Anggaran Belanja KPU dan Bawaslu sebesar **Rp5.000.000.000,00**;
- Penyesuaian Rekening Belanja Pegawai atas TKDD Tahun 2023 untuk belanja DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, belanja PPPK sebesar **Rp13.198.800.000,00**;
- Penyesuaian belanja DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, belanja pendanaan Kelurahan sebesar **Rp200.000.000,00**.

Tabel 6.8



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

Rencana Anggaran Insetif Fiskal (IF) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Pagu
1	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>	
					Teh Celup Dos	4.320.000,00
					Ikan Kaleng	70.560.000,00
					Susu Bubuk	67.500.000,00
					Gula Pasir	28.320.000,00
					Beras	88.500.000,00
					Minyak kelapa 2 Liter	37.329.000,00
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>			
			Bantuan Sosial KUBE	33.040.000,00		
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>	
					Gula Pasir 1 Kg	5.664.000,00
					Susu Entrasol 370 Gr	13.629.000,00
					Biskuit	16.200.000,00
Beras	36.000.000,00					
Susu Bubuk Dancow 400 gr	8.319.000,00					
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Penyediaan Alat Bantu	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>			
			Kursi Roda	6.000.000,00		
			Alat Bantu Dengar	5.000.000,00		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Pagu
			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		kruk	1.156.400,00
					Tongkat	2.500.000,00
Jumlah						424.037.400,00
2	Dinas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Pengadaan Pupuk Non Subsidi</i>	138.825.000,00
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	<i>Pengadaan Bibit Tanaman</i>	
					Bibit Jagung Bisi 2	39.825.000,00
					Benih Cabe Rawit Hibrida 10Gr	354.000,00
					Benih Tomat	590.000,00
				Benih Padi	8.125.000,00	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Ternak Kambing dan sapi	140.638.300,00	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Belanja Racun Rumput	1.288.960,00
					Handsprayer	32.450.000,00
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Pertanian Mesin potong Rumput	98.176.000,00
Jumlah						460.272.260,00
3	Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>	
					Minyak Goreng 1 Liter (Subsidi)	50.120.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Pagu
			di tingkat Pasar Kabupaten Kota		Tepung terigu	7.916.500,00
					Beras	96.000.000,00
					Gula pasir (subsidi)	41.949.000,00
					Belanja Sewa Kenderaan Angkutan Barang sewa kenderaan box/truck	12.000.000,00
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan Kepada Individu	150.000.000,00
		Bantuan Modal Usaha (Uang) yang diserahkan kepada Masyarakat				
Jumlah						357.985.500,00
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	2.679.000.000,00
					Rehab Berat Rumah Tidak Layak Huni	
					Meteran Listrik Daya 900 Watt	
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	285.000.000,00
					Rehab Berat Rumah Korban Terdampak Bencana	
Jumlah						3.042.000.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Pagu
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bahan Sembako	200.836.000,00
					beras	409.222.800,00
					Jumlah	610.058.800,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>	
					Belanja Perlengkapan Siswa SMP	43.173.966,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Belanja Perlengkapan Siswa SD	76.714.396,00
					Jumlah	119.888.362,00
7	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan upaya kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	Bahan Medis Habis Pakai	177.000.000,00
					Obat Obatan Lainnya obat-obatan PMK	414.264.678,00
					Jumlah	591.264.678,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>	
					Mesin Penghancur/Penggiling Es Balok Insentif Daerah	64.000.000,00
					Pengadaan jaring tagaho insentif fiskal	1.000.000,00
					Pengadaan Mesin Katinting 9 PK Insentif Fiskal	44.840.000,00
					Pengadaan Perahu Fiber 7 meter insentif fiskal	120.000.000,00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas	Belanja Benur udang vaname	10.170.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Pagu
				Pembudi Daya Ikan Kecil	Belanja pakan udang paname	40.710.000,00
					Jaring Lempar	1.200.000,00
					Kulbox	2.750.000,00
					Jumlah	284.670.000,00
					Total	5.890.177.000,00

G. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Yang Digunakan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggunakan Sistem Informasi pengelolaan keuangan Daerah SIMDA Next-G (FMIS). Aplikasi SIMDA Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information Sistem* (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sudah terintegrasi mulai dari modul perencanaan anggaran, penatausahaan sampai pada pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran. Melalui sistem Informasi pengelolaan keuangan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan penginputan sesuai tahapan yang terintegrasi dengan penjelasan masing-masing modul aplikasi sebagai berikut :

1. Modul Perencanaan Anggaran

Sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2021 Bolaang Mongondow Utara menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi desktop dimana perencanaan anggaran masih manual dan belum terintegrasi. Seiring *update* aplikasi secara terus menerus oleh pihak pengembang aplikasi BPKP mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIMDA Next-G (FMIS) hasil pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan versi desktop yang sudah terintegrasi mulai dari perencanaan sampai pada pertanggung jawaban anggaran dengan tahapan sebagai berikut :

- RPJMD berisi Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Pemerintah Daerah (Pagu Total merupakan pagu hasil akumulasi dari Renstra-Renja-RKPD);
- Renstra berisi Sasaran-Program-Kegiatan-Sub Kegiatan dan terdapat Pagu Distribusi dari RPJMD;
- RKPD berisi Program-Kegiatan-Sub Kegiatan untuk satu tahun dan terdapat Pagu Distribusi dari Renstra;
- SSH – Standar Satuan Harga (berisi harga satuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah);
- Renja berisi Program-Kegiatan-Sub Kegiatan untuk satu tahun untuk OPD tertentu terdapat Pagu Distribusi dari RKPD;
- RKA (Anggaran satu tahun untuk OPD) - terdapat Pagu Distribusi dari Renja;



- g) DPA yang merupakan dokumen yang berisi rencana belanja sesuai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun.

2. Modul Penatausahaan Anggaran

Sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2021 Bolaang Mongondow Utara sudah menggunakan Aplikasi SIMDA dalam Proses Perencanaan Anggaran, Penatausahaan serta Pelaporan Keuangan tetapi belum terintegrasi antara masing-masing modul tersebut. Secara bertahap juga Aplikasi SIMDA telah melalui berbagai *Update* yang menyesuaikan dengan perubahan regulasi. SIMDA merupakan Aplikasi berbasis DESKTOP berekstensi EXE (*offline*), yang penggunaannya harus di install pada PC atau laptop yang akan digunakan dan penggunaannya hanya dapat digunakan melalui perangkat tersebut. Dari semula SIMDA yang hanya dapat diakses pada masing-masing PC (*export-import* data), beralih ke SIMDA yang terkoneksi secara LAN, sampai akhirnya Pada Tahun 2021 SIMDA sudah dapat diakses secara *Online* menggunakan VPN, proses transformasi ini juga sejalan dengan perbaikan secara *Frontend* dan *backend* yang terus dikembangkan oleh Satgas SIMDA Pusat. Proses yang panjang ini membuat SIMDA menjadi aplikasi Manajemen Keuangan Daerah paling berkualitas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah menggunakan FMIS dalam Perencanaan Anggaran, Penatausahaan Keuangan serta Pelaporan Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengharuskan BPKP sebagai pengembang Aplikasi SIMDA harus menyuntik mati SIMDA dan mengeluarkan Aplikasi berbasis *Website* yang dinamakan FMIS, dimana FMIS merupakan pengembangan lebih lanjut dari aplikasi SIMDA Keuangan. Algoritma yang digunakan FMIS kurang lebih sama dengan algoritma yang digunakan SIMDA Keuangan itu sendiri, sehingga proses bisnis aplikasi FMIS kurang lebih sama dengan Aplikasi SIMDA Keuangan. Jelas bahwa SIMDA merupakan Aplikasi berbasis Desktop sedangkan FMIS aplikasi berbasis *Website* yang dapat diakses secara *online* tanpa perlu VPN dan sudah dapat diakses menggunakan *smartphone*. Dari segi *user interface* FMIS menjadi lebih menarik, sedangkan dari segi *frontend* menu-menu yang ada didalam FMIS kurang lebih sama dengan yang ada di aplikasi SIMDA. Secara bertahap juga TIM Satgas FMIS pusat selalu melakukan *update*, sehingga secara *backend frontend* FMIS perlahan sudah memiliki hampir semua fitur dan menu yang ada di aplikasi simda. Sampai dengan Tahun 2023 ini, proses *update* FMIS masih terus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor utama Bolaang Mongondow Utara tetap menggunakan FMIS sebagai Aplikasi Manajemen Keuangan Daerah adalah karena FMIS adalah pengembangan lebih lanjut dari SIMDA, dimana Pengembang aplikasinya adalah BPKP yang sekaligus juga selalu membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi FMIS. Bimbingan dan asistensi



tersebut merupakan proses *transfer of knowledge* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah.

3. Modul Akuntansi dan Pelaporan

Adanya tuntutan regulasi yakni Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* (CACM), dan *Cash Management System* (CMS), PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar perubahan peraturan Permendagri 64/2013 menjadi Permendagri 90/2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah, dan perubahan peraturan Permendagri 13/2006 menjadi Permendagri 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, membuat Pemkab memilih menggunakan SIMDA-NG karena dianggap telah memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan adanya integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, SMS, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dari segi akuntansi dan pelaporan, SIMDA-NG memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik, karena aplikasi ini sudah stabil, meskipun masih terus mengalami pembaharuan sistem. Penggunaan *tools* dan menu SIMDA-NG yang sama dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dipakai oleh Pemkab Bolaang Mongondow Utara sebelumnya, membuat SIMDA-NG lebih mudah digunakan. Selain itu, tampilan *dashboard* SIMDA-NG yang menyajikan *continuous monitoring* dapat mempermudah dalam memonitor capaian kinerja realisasi anggaran pemerintah daerah.

Lain pihak untuk menjaga resiko yang akan muncul terhadap perpindahan aplikasi sehingga Pemerintah Daerah memutuskan menggunakan SIMDA *NEXT-G* (FMIS) dengan pertimbangan :

1. Simda FMIS merupakan pengembangan Simda Keuangan (versi desktop) ke versi web (*online*) dan merupakan produk yang sama dari BPKP;
2. *User* lebih mudah melakukan koordinasi terkait penggunaan aplikasi karena ada perwakilan pihak pengembang aplikasi BPKP di masing-masing daerah;
3. SDM perangkat daerah sudah terbiasa menggunakan simda keuangan produk BPKP; dan
4. Simda Next-G (FMIS) mudah digunakan dan langsung bisa dioperasikan karena sudah terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran sampai pertanggungjawaban.

H. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE merupakan bentuk inovasi yang dilakukan dalam pemerintahan guna untuk melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna SPBE. Seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang



berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE didalamnya yang artinya bahwa dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi ataupun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, melainkan lebih itu, SPBE juga memiliki berbagai macam domain dalam penerapannya yaitu, domain kegiatan pemerintahan, domain teknologi dan informasi, dan domain layanan. Pada domain kegiatan pemerintahan terdapat beberapa lingkup pada penerapannya meliputi rencana ruang lingkup induk SPBE, proses bisnis, anggaran dan belanja SPBE, dan data informasi yang berbasis elektronik. Domain teknologi dan informasi juga memiliki beberapa lingkup seperti, pusat penyedia data yang terpadu, jaringan antar pemerintah, sistem yang menghubungkan layanan pemerintah, aplikasi layanan dan keamanan informasi data. Dan pada domain layanan meliputi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik serta layanan publik berbasis elektronik. Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti sekarang ini dimana TIK merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat luas, hal ini juga tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dalam pelayanan guna mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah, komunikasi antar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi pemerintah dalam melakukan inovasi untuk membangun aparatur negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE atau *e-Government*. SPBE memberikan peluang bagi pemerintah dalam mendorong dan merealisasikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif serta akuntabel, peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, memberikan kualitas dan kuantitas dalam jangkauan layanan kepada pengguna masyarakat selaku SPBE, dan menurunkan angka kejahatan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme melalui aplikasi sistem pengaduan masyarakat. SPBE sudah mulai diterapkan di Indonesia dimana penerapan SPBE ini bertujuan guna mewujudkan responsif yang cepat dan tanggap oleh pemerintah kepada masyarakat terutama pada bidang administrasi negara. Menurut Presiden Joko Widodo mengharapkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan atau terbuka kepada masyarakat melalui menyediakan sesuatu yang aktual sesuai dengan fakta dan bisa langsung diakses masyarakat melalui media bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi dibutuhkan kesiapan pada aparatur negara dalam pemerintah melakukan perubahan yang mendasar pada sistem dan prosedur pemerintahan, penjurusan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat.

1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melalui proses verifikasi, validasi serta revidi dan pengolahan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Per 31 Desember 2023

Pemkab Bolmut melalui Dinas Kominfo selaku koordinator pelaksanaan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berusaha memenuhi indikator penilaian berupa regulasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK).

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui Keputusan Kemenpan RB RI ini, dengan hasil indeks SPBE 2,19 dengan Predikat Cukup setara dengan Pemprov Sulut yang mendapat predikat Cukup dengan Nilai 2,30.

Proses implementasi SPBE Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan daerah berusaha memberi kemudahan dan pengelolaan keuangan secara elektronik melalui sistem informasi yang terintegrasi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Transaksi APBD Berbasis Non Tunai

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan transaksi non tunai sejak Tahun 2017 terhadap belanja daerah dan pada Tahun 2018 keseluruhan belanja daerah telah dilakukan dengan mekanisme transfer.

Kebijakan ini diterapkan pasca dikeluarkannya edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 april 2017, tentang implementasi transaksi non tunai, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 900/1640/SETDAKAB.BPKD tentang Implementasi Non Tunai. Untuk pelaksanaan Belanja Daerah secara non tunai Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara telah menerapkan *Cash Management System* (CMS) bekerja sama dengan BPKP dan Bank SulutGo dalam hal mengintegrasikan Database SP2D antara aplikasi Kasda *Online* dengan aplikasi Simda Keuangan (FMIS) yang telah di implementasikan pada PPKD (BUD) maupun di setiap Perangkat Daerah untuk transaksi pembayaran non tunai SKPD.

Selanjutnya, pada sisi Pendapatan daerah telah di terapkan transaksi non tunai pada pos penerimaan PBBP2 dan PBHTB yang terintegrasi dengan Pusdatin Badan Pertanahan Republik Indonesia. Implementasi transaksi non tunai ini secara masif telah memberikan dampak yang sangat baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena disamping keandalan akuntabilitas setiap transaksi juga efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas setiap proses bisnis pengeluaran kas daerah dapat diandalkan. Disamping itu dari aspek penerimaan khususnya PBBP2 setiap waktu termonitor melalui aplikasi PBB *online*.



BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 secara keseluruhan.


Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
SIRAJUDIN LASENA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
HASIL EVALUASI BELANJA WAJIB INFRASTRUKTUR
PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran I

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.086.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	166.616.000,00	166.243.500,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	590.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	18.000.000,00	18.000.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	166.380.000,00	165.480.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Jaringan	9.440.000,00	9.440.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	21.712.000,00	20.876.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	362.279.600,00	325.567.525,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	37.500.000,00	34.259.532,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	75.274.560,00	71.334.835,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	506.778.956,00	473.528.683,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	688.977.320,00	535.207.647,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.379.668.806,00	7.166.275.549,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	639.421.568,00	614.204.578,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.000.000.000,00	999.976.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.459.854.000,00	1.448.089.221,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	729.927.000,00	596.544.630,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	616.525.556,00	25.814.678,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	635.553.292,00	304.293.783,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.987.419.794,00	1.886.411.038,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	803.823.298,00	762.634.908,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	26.250.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	703.807.954,00	510.278.224,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	12.000.000,00	0,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	835.612.000,00	654.500.400,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	500.806.000,00	336.371.200,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	651.555.136,00	621.632.521,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	42.000.000,00	40.341.500,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.063.720.750,00	1.020.580.045,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	82.500.000,00	77.175.000,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.500.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.124.600,00	13.952.700,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	26.762.400,00	26.640.000,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	372.380.447,00	362.173.020,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.311.400,00	56.832.000,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	267.258.200,00	191.958.340,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.391.600,00	44.391.600,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.700.000,00	17.700.000,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	59.023.600,00	23.383.100,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.466.200,00	60.994.500,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	264.874.000,00	255.887.000,00
Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	71.142.200,00	66.805.840,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	69.395.800,00	67.186.080,00
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.389.250,00	9.373.500,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.038.816.457,00	13.038.816.457,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Belanja Modal Buku Laporan	223.637.250,00	0,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	323.500.364,00	320.798.219,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.448.818.794,00	5.002.866.058,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.024.504.860,00	1.000.044.373,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	767.516.300,00	746.783.432,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.100.000.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	221.550.500,00	217.184.563,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	194.865.200,00	176.363.750,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	890.607.276,00	873.807.200,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.000.000,00	1.396.643.810,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.950.000,00	98.812.400,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Modal Mebel	19.661.750,00	19.347.300,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Modal Alat Pendingin	4.932.400,00	4.861.800,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Modal Elektronik/Electric	144.856.800,00	143.034.600,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Belanja Modal Software	75.000.000,00	74.814.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.894.000,00	3.894.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Belanja Modal Personal Computer	35.400.000,00	35.085.830,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Belanja Modal Personal Computer	21.830.000,00	21.750.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Belanja Modal Personal Computer	17.700.000,00	17.600.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.130.000,00	4.130.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Modal Alat Pendingin	34.267.200,00	13.608.600,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	20.000.000,00	19.545.879,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	105.000.000,00	82.112.009,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Modal Personal Computer	86.151.800,00	81.813.830,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.985.400,00	2.972.400,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	39.576.800,00	23.950.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.496.000,00	8.424.900,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.699.262,00	40.546.080,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Alat Pendingin	189.637.800,00	120.290.700,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Alat Dapur	20.951.520,00	20.671.086,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.492.938,00	27.250.500,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	35.000.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.230.400,00	-
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Belanja Modal Personal Computer	62.304.000,00	46.728.000,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.416.400,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.124.000,00	2.087.910,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	13.758.800,00	13.741.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	141.600.000,00	139.393.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.431.600,00	18.403.800,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Tanggul Sungai	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	157.268.408,00	157.192.880,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.537.265.260,00	2.433.191.795,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Belanja Modal Personal Computer	43.660.000,00	42.950.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	106.719.200,00	105.860.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	872.767.274,00	872.767.274,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	88.500.000,00	86.413.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	106.908.000,00	105.949.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Belanja Modal Personal Computer	193.520.000,00	193.520.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	61.596.000,00	61.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	420.000.000,00	413.371.749,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	106.200.000,00	106.004.778,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	100.000.000,00	99.914.000,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	199.980.000,00	189.844.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	178.372.301,00	149.961.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Jalan Lainnya	499.905.540,00	492.194.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	349.901.832,00	349.677.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Belanja Modal Taman	199.996.500,00	199.737.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Belanja Modal Personal Computer	358.224.400,00	236.470.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Belanja Modal Buku Laporan	390.716.000,00	297.670.920,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan	Belanja Modal Buku Laporan	565.102.045,00	561.568.295,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Belanja Modal Buku Laporan	149.448.870,00	145.504.350,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.845.285.678,00	1.789.945.343,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Belanja Modal Jalan Kabupaten	40.875.127.660,00	40.720.793.262,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	750.000.000,00	739.672.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	112.247.835,00	17.247.835,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Belanja Modal Buku Laporan	99.949.785,00	99.705.750,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.960.000,00	24.900.000,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.266.000,00	10.000.000,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	52.392.000,00	52.318.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	16.000.000,00	15.940.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	92.040.000,00	91.996.800,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.980.000,00	20.923.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.850.000,00	8.824.000,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	26.973.000,00
Dinas Sosial	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.243.260,00	35.700.000,00
Dinas Sosial	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	15.576.000,00	15.500.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	20.638.200,00	20.325.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	35.400.000,00	35.150.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	49.710.000,00	42.300.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Elektronik/Electric	20.768.000,00	20.700.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Software	100.000.000,00	99.789.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	31.063.500,00	31.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	153.081.150,00	145.319.600,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	24.780.000,00	23.469.750,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.500.000,00	0,00
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	110.330.000,00	110.000.000,00
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.700.000,00	1.700.000,00
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	37.099.200,00	35.359.000,00
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Elektronik/Electric	34.526.800,00	31.100.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	50.362.400,00	49.555.950,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	75.030.000,00	74.979.150,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.634.400,00	3.629.700,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.467.800,00	25.859.100,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	117.729.780,00	104.690.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	24.010.050,00	24.010.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.495.300,00	38.741.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Alat Pembersih	3.439.700,00	3.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Alat Pendingin	19.989.200,00	19.750.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.441.538,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	129.900.000,00	102.663.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Personal Computer	231.280.000,00	218.750.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	44.391.600,00	43.425.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	43.120.000,00	41.200.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.764.200,00	3.450.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	184.108.208,00	176.428.536,00
Dinas Perhubungan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	10.124.400,00	10.100.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persadian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Jaringan	43.660.000,00	43.510.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persadian	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Belanja Modal Komputer Jaringan	78.000.000,00	76.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persadian	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.500.000,00	8.000.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Belanja Modal Personal Computer	79.709.000,00	79.400.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.115.200,00	2.650.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.260.000,00	7.700.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Belanja Modal Elektronik/Electric	8.398.600,00	8.090.000,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	17.700.000,00	17.675.000,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.528.400,00	6.508.000,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Kearsipan, Dan Perpustakaan Daerah	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Belanja Modal Buku Umum	10.000.000,00	9.925.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	77.880.000,00	68.100.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	17.700.000,00	16.927.500,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	10.254.200,00	9.930.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	36.255.500,00	35.900.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	96.760.000,00	96.520.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	43.518.400,00	43.430.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	49.500.000,00	45.054.900,00
Dinas Pariwisata	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00
Dinas Pariwisata	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	70.870.800,00	70.548.800,00
Dinas Pariwisata	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.729.600,00	19.713.600,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	129.692.475,00	129.603.280,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Buku Laporan	25.000.000,00	24.882.315,00
Dinas Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.800.000,00	11.800.000,00
Dinas Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Belanja Modal Software	25.000.000,00	24.975.000,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	12.331.000,00	12.265.500,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.230.400,00	6.182.700,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	35.400.000,00	35.298.000,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	19.175.000,00	19.119.750,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Mebel	135.000.000,00	134.865.000,00
Dinas Pertanian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	59.894.343,00	56.825.200,00
Dinas Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Belanja Modal Buku Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	177.000.000,00	176.823.000,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	76.853.400,00	76.750.000,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Alat Pendingin	121.492.800,00	120.945.600,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	37.382.400,00	37.162.800,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Personal Computer	376.956.000,00	376.140.000,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16.744.200,00	16.575.000,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Elektronik/Electric	92.816.760,00	92.740.500,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.750.000.000,00	2.589.219.354,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	99.641.350,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	59.000.000,00	0,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	133.200.000,00	0,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	466.800.000,00	163.752.750,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Mebel	113.730.000,00	112.354.200,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	10.124.400,00	0,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	712.305.600,00	0,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	35.400.000,00	35.298.000,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.440.000,00	0,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	600.000.000,00	570.920.227,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000,00	79.805.900,00
Dinas Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	600.000.000,00	199.900.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.749.233,00	14.730.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	28.284.600,00	28.260.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	157.600.000,00	142.474.900,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	80.000.000,00	79.864.500,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.059.000,00	16.026.550,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	19.258.800,00	19.191.900,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Mebel	22.899.375,00	22.800.000,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.900.000,00	5.871.900,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	290.920.000,00	270.280.200,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.620.400,00	24.146.000,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Software	75.000.000,00	74.869.500,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	44.722.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.136.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	61.360.000,00	61.272.000,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Mebel	352.721.062,00	217.232.550,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	76.322.400,00	60.495.000,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.071.000,00	0,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	15.340.000,00	15.080.000,00
Sekretariat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	79.060.000,00	74.470.000,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	156.200.000,00	156.065.000,00
Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	74.748.000,00	74.547.600,00
Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Belanja Modal Personal Computer	86.612.000,00	86.580.000,00
Sekretariat DPRD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	40.478.130,00	38.794.500,00
Sekretariat DPRD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	36.255.500,00	36.097.200,00
Sekretariat DPRD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	159.300.000,00	159.174.000,00
Sekretariat DPRD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Elektronik/Electric	52.872.000,00	52.725.000,00
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	539.417.360,00	519.500.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.912.000,00	9.901.200,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.879.400,00	6.848.700,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Mebel	41.748.400,00	41.613.900,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	12.968.200,00	12.859.350,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	83.040.000,00	82.922.550,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	80.570.400,00	65.295.750,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	23.600.000,00	23.559.750,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Belanja Modal Software	50.000.000,00	49.894.000,00
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Belanja Modal Software	125.000.000,00	124.875.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.800.000,00	15.800.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	130.272.000,00	129.450.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.130.000,00	3.845.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	198.641.200,00	198.057.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.500.000,00	7.381.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.441.538,00	2.441.538,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	78.650.000,00	69.200.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Elektronik/Electric	6.879.400,00	6.875.000,00
Inspektorat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Mebel	36.384.562,00	35.000.000,00
Inspektorat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Alat Pendingin	13.758.800,00	12.800.000,00
Inspektorat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	26.550.000,00	25.650.000,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Inspektorat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.842.000,00	21.979.995,00
Kecamatan Sangkub	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.960.000,00	22.600.000,00
Kecamatan Bintauna	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	54.610.400,00	54.580.000,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.133.000,00	5.133.000,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.995.675,00	1.995.675,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Mebel	7.917.800,00	7.891.325,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Alat Pendingin	1.534.000,00	1.525.000,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Personal Computer	17.700.000,00	17.210.000,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.130.000,00	4.130.000,00
Kecamatan Bintauna	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Jalan Lainnya	51.876.990,00	51.875.000,00
Kecamatan Bolangitang Timur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Belanja Modal Mebel	17.810.625,00	17.760.000,00
Kecamatan Bolangitang Timur	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Personal Computer	8.850.000,00	8.850.000,00
Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.260.000,00	7.700.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.327.010,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	55.650.000,00	9.340.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.810.000,00	5.810.000,00
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.250.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	728.020.000,00	654.532.724,00
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.249.600,00	14.249.571,00
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	96.460.000,00	87.378.350,00
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.000.000,00	12.000.000,00
Dinas Kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.040.000,00	94.224.109,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	39.210.000,00	39.171.900,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	40.000.000,00	36.796.309,00
Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	50.000.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	4.170.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.960.000,00	76.902.642,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.550.000,00	18.542.520,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	38.500.000,00	37.625.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	58.560.000,00	58.499.500,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Normalisasi/Restorasi Sungai	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	100.227.746,00	100.154.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	199.323.670,00	189.848.950,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	199.621.963,00	199.521.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	199.768.467,00	199.410.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	349.997.145,00	142.400.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempak Kerja-Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	58.499.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Panataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	838.130.522,00	835.659.850,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.960.000,00	71.642.323,00
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.420.000,00	5.881.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	106.340.000,00	106.322.900,00
Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.676.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.375.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.060.000,00	26.152.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.110.000,00	32.812.400,00
Dinas Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.890.000,00	94.676.104,00
Dinas Sosial	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.620.000,00	2.890.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	27.761.100,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.320.000,00	6.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.414.030,00
Dinas Ketahanan Pangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.050.000,00	3.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.475.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.060.000,00	35.953.100,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	148.440.000,00	148.430.850,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.490.000,00	5.490.000,00
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.960.000,00	76.778.800,00
Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.170.000,00	8.170.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.115.046,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	198.738.000,00	176.428.536,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	72.373.984,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.020.000,00	1.830.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	99.918.000,00	99.372.112,00
Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.480.000,00
Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.990.000,00	69.252.578,00
Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	111.330.000,00	110.265.412,00
Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.100.000,00	37.100.000,00
Dinas Perhubungan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	49.766.576,00	49.533.750,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persadian	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.474.420,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persadian	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.490.000,00	5.490.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	29.846.108,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.300.000,00	20.300.000,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	37.355.024,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.830.000,00	6.830.000,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.936.000,00	22.817.000,00
Dinas Kearsipan, Dan Perpustakaan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.469.115,00
Dinas Kearsipan, Dan Perpustakaan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.831.200,00
Dinas Kearsipan, Dan Perpustakaan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.880.000,00	4.840.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.410.000,00	68.100.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.390.000,00	30.361.000,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.230.000,00	9.380.000,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.339.978,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.710.000,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.360.000,00	5.360.000,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.258.000,00	35.202.500,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	31.708.992,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	30.976.957,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.110.000,00	30.747.500,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.380.000,00	13.160.000,00
Dinas Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.500.000,00	30.396.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.960.000,00	73.796.015,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.060.000,00	36.059.642,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.840.000,00	14.840.000,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.880.000,00	4.880.000,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.154.280.000,00	1.150.022.736,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.550.000,00	15.269.775,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	542.880.000,00	542.728.616
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111.300.000,00	107.913.252,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.843.387,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.000.000,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	14.090.000,00	9.048.333,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.190.000,00	2.100.000,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	508.820.260,00	488.053.892,00
Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	41.480.000,00	41.060.000,00
Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	19.500.000,00	0,00
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	162.380.000,00	162.375.962,00
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	203.580.000,00	202.694.098,00
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.970.000,00	25.926.896,00
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.250.000,00	15.100.000,00
Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.970.000,00	46.759.000,00
Badamm Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	169.650.000,00	169.611.328,00
Badamm Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.970.000,00	23.752.000,00
Badamm Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.740.000,00	20.373.000,00

Organisasi Perangkat Daerah	Kegiatan	Sub Kegiatan	Belanja	Nilai Anggaran Perubahan APBD 2023	Realisasi
Badam Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.750.000,00	3.750.000,00
Badam Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	7.930.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.960.000,00	69.460.386,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	54.189.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.130.000,00	963.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.960.000,00	17.500.000,00
Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.640.000,00	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.480.000,00	38.463.484,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	789.027,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	32.120.000,00	19.500.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.200.000,00	12.155.000,00
Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.860.000,00	67.852.533,00
Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.830.000,00	1.396.396,00
Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.110.000,00	5.110.000,00
Kecamatan Sangkub	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	23.373.790,00
Kecamatan Bintauna	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.620.430,00
Kecamatan Bintauna	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.950.000,00	1.830.000,00
Kecamatan Bintauna	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.988.400,00	17.988.400,00
Kecamatan Bolangitang Timur	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	27.566.000,00
Kecamatan Bolangitang Barat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.812.700,00
Kecamatan Bolangitang Barat	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.683.950,00
Kecamatan Kaidipang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.925.617,00
Kecamatan Kaidipang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.710.000,00	3.700.000,00
Kecamatan Pinogaluman	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.930.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.930.000,00	33.499.218,00
Belanja Hibah				13.626.671.281,00	10.465.169.294,00
Belanja Bantuan Sosial				3.739.500.000,00	3.607.536.000,00
Belanja Bantuan Keuangan				116.435.493.700,00	116.435.493.700,00
			Jumlah	257.826.631.490,00	245.207.667.250,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
PENJABARAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DALAM APBD TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6	7	8
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan (RSUD)	23.883.200,00	23.881.539,00	99,99
		Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	49.710.000,00	49.710.000,00	100,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	50.398.040,00		0,00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	96.392.760,00	95.643.035,00	99,22
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	15.000.000,00	14.150.000,00	94,33
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan	176.721.076,00	170.057.000,00	96,23
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan	272.557.121,00	252.320.388,00	92,58
		Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	49.601.200,00	49.419.950,00	99,63
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	389.815.995,00	329.535.073,00	84,54
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian	190.699.060,00	185.974.170,00	97,52
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	478.993.021,00	456.537.500,00	95,31
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pinogaluman	18.932.353,00	18.886.550,00	99,76
2		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	166.616.000,00	166.243.500,00	99,78
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	240.029.810,00	231.273.723,00	96,35
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan (PKM Bintauna)	9.982.800,00	9.945.000,00	99,62
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	71.639.798,00	65.742.400,00	91,77
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	2.987.337.434,00	2.560.141.111,00	85,70
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	223.182.471,00	112.522.300,00	50,42
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	20.667.096,00	10.178.250,00	49,25

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6	7	8
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	38.666.496,00	36.848.600,00	95,30
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	4.998.059,00	4.280.885,00	85,65
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	84.383.260,00	82.082.600,00	97,27
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	34.934.176,00	30.277.000,00	86,67
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	136.445.559,00	136.145.559,00	99,78
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	49.999.910,00	12.066.800,00	24,13
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.912.140.396,00	1.835.480.851,00	95,99
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.482.800,00	97.840.000,00	98,35
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda Dan Olahraga	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga	99.999.038,00	49.999.519,00	50,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda Dan Olahraga	654.103.164,00	653.934.424,00	99,97
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	26.882.400,00	26.141.000,00	97,24
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah	1.453.549.999,00	1.368.040.199,00	94,12
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata	5.994.400,00	5.990.000,00	99,93
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	206.694.152,00		0,00
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	897.318.194,00	893.142.939,00	99,53
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian	30.500.000,00	30.396.000,00	99,66
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	125.713.442,00	123.444.600,00	98,20
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	84.000.000,00	83.909.000,00	99,89
		program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	17.247.500,00	12.643.050,00	73,30
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	80.738.338,00	73.334.204,00	90,83
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	485.563.600,00	483.591.620,00	99,59
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bolangitang Barat	38.890.000,00	38.656.950,00	99,40
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	201.572.486,00	199.981.746,00	99,21
		Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	114.099.715,00	109.826.578,00	96,25

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6	7	8
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	184.279.200,00	167.931.550,00	91,13
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa Dan Politik	59.957.489,00	59.948.591,00	99,99
4	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	662.503.500,00	662.364.962,00	99,98
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	224.010.000,00	221.431.800,00	98,85
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	420.000.000,00	413.371.749,00	98,42
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persmapahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15.600.000,00	15.300.000,00	98,08
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	349.997.145,00	342.316.060,00	97,81
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	499.905.540,00	492.194.500,00	98,46
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	549.881.832,00	539.620.950,00	98,13
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	199.996.500,00	199.737.000,00	99,87
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.845.285.678,00	1.789.945.343,00	97,00
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	23.300.000,00	22.760.600,00	97,68
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	289.247.200,00	288.900.000,00	99,88
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	2.896.329.285,00	2.790.376.400,00	96,34
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	103.286.630,00	103.090.400,00	99,81
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	219.365.695,00	218.041.176,00	99,40
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	30.682.262,00	30.550.000,00	99,57
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	16.194.400,00	15.530.000,00	95,90
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil menengah	21.127.734,00	15.546.215,00	73,58
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil menengah	129.196.000,00	128.321.050,00	99,32
		Program Satbilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil menengah	259.382.480,00	258.775.160,00	99,77
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil menengah	20.343.488,00	20.200.000,00	99,29
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil menengah	17.913.000,00	17.804.400,00	99,39
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Pinogaluman	13.988.982,00	0,00	0,00

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6	7	8
5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.986.650,00	39.524.500,00	98,84
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	129.697.154,00	126.012.900,00	97,16
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	121.179.527,00	87.727.600,00	72,39
		Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	149.707.536,00	135.613.600,00	90,59
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	10.069.557,00	8.708.400,00	86,48
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	51.338.300,00	45.094.000,00	87,84
		program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.903.896,00	8.833.400,00	89,19
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik					
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Keteryiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	1.853.622.320,00	1.807.471.340,00	97,51
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	5.157.845,00	4.798.390,00	93,03
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dina's Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	265.668.200,00	265.095.820,00	99,78
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dina's Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	477.215.000,00	468.435.020,00	98,16
		Program Penunjang urusan Pemerintah	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	211.786.800,00	208.924.300,00	98,65
		Program Pengelolaan Informasi Dan	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	991.750.722,00	987.202.000,00	99,54
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	52.179.424,00	50.810.200,00	97,38
		Program Penunjang urusan Pemerintah	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	177.574.970,00	177.359.019,00	99,88
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	46.860.000,00	45.841.450,00	97,83
		Program Penunjang urusan Pemerintah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	386.568.800,00	325.689.191,00	84,25
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	39.176.723,00	32.775.200,00	83,66
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	315.384.265,00	0,00	0,00
		Program Pengelolaan Dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	218.098.330,00	130.463.703,00	59,82
		program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	430.237.940,00	427.483.881,00	99,36
		Program Penunjang urusan Pemerintah	Inspektorat Daerah	39.165.946,00	35.952.694,00	91,80
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah	185.651.808,00	183.226.500,00	98,69

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	5	6	7	8
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat Daerah	9.999.730,00	0,00	0,00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.897.222.528,00	5.647.197.528,00	95,76
Jumlah				33.807.554.330,00	31.479.014.155,00	93,11



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN STUNTING TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

Lampiran III

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan APBD 2023	Realisasi	Persentase
1	Program Pengelolaan Pendidikan	496.656.610,00	478.904.198,00	96,43
	Pengeloan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	496.656.610,00	478.904.198,00	96,43
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Paud	256.626.800,00	247.630.475,00	96,49
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	240.029.810,00	231.273.723,00	96,35
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	604.804.055,00	520.482.580,00	86,06
	Pengeloan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	604.804.055,00	520.482.580,00	86,06
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	520.420.795,00	438.399.980,00	84,24
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	Pendataan Data Fakir miskin Cakupan Daersh kabupaten/Kota	84.383.260,00	82.082.600,00	97,27
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	256.143.000,00	240.004.192,00	93,70
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	256.143.000,00	240.004.192,00	93,70
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	49.997.590,00	49.746.000,00	99,50
	Koordinasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	206.145.410,00	190.258.192,00	92,29
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	206.145.410,00	190.258.192,00	92,29
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	17.780.524.321,00	16.241.638.921,00	91,35
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.780.524.321,00	16.241.638.921,00	91,35
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	207.273.900,00	84.808.800,00	40,92
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	193.919.800,00	110.548.200,00	57,01
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	146.428.300,00	43.000.389,00	29,37
	Investigasi Awal Kejadian yang Tidak diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60.586.130,00	54.392.200,00	89,78
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	119.893.630,00	109.320.400,00	91,18
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	397.146.033,00	356.379.480,00	89,74
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	73.749.909,00	62.543.241,00	84,80
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.572.000,00	42.936.400,00	24,74
	Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.407.954.619,00	15.377.709.811,00	93,72
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	270.768.006,00	99.168.168,00	36,62
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.098.564,00	62.313.308,00	34,41
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	91.429.122,00	25.458.448,00	27,85
	Pelaksanaan Sehat dalam	89.669.442,00	36.854.860,00	41,10

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan APBD 2023	Realisasi	Persentase
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	89.669.442,00	36.854.860,00	41,10
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.834.661.034,00	7.336.802.591,00	93,65
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.834.661.034,00	7.336.802.591,00	93,65
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai standar	7.834.661.034,00	7.336.802.591,00	93,65
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	796.338.082,00	726.115.290,00	91,18
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	235.000.000,00	226.000.000,00	96,17
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	235.000.000,00	226.000.000,00	96,17
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.225.000,00	88,93
	Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	7.000.000,00	6.225.000,00	88,93
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	554.338.082,00	493.890.290,00	89,10
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	288.900.000,00	253.393.000,00	87,71
	Pengendalian Program KKBPK (Rembuk Stunting)	185.438.477,00	165.524.290,00	89,26
	Advokasi Program KKBPK kepada Stake Holders dan Mitra Kerja	79.999.605,00	74.973.000,00	93,72
8	Program Pengendalian Penduduk	249.429.965,00	242.866.000,00	97,37
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.429.965,00	242.866.000,00	97,37
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	249.429.965,00	242.866.000,00	97,37
	Penyediaan Data dan informasi	0,00	0,00	0,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian dan pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (PKS)	1.049.040.800,00	994.531.600,00	94,80
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.049.040.800,00	994.531.600,00	94,80
	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	674.100.000,00	627.400.000,00	93,07
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.940.800,00	14.931.600,00	99,94
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.200.000,00	97,83

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan APBD 2023	Realisasi	Persentase
10	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat dan Masyarakat Hukum Adat	537.099.788,00	536.994.200,00	99,98
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	537.099.788,00	536.994.200,00	99,98
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	537.099.788,00	536.994.200,00	99,98
11	Program Administrasi Pemerintahan Desa	45.739.438,00	44.550.000,00	97,40
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	45.739.438,00	44.550.000,00	97,40
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	15.057.176,00	14.000.000,00	92,98
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.682.262,00	30.550.000,00	99,57
12	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan air Minum	2.619.575.371,00	2.527.474.956,00	96,48
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.619.575.371,00	2.527.474.956,00	96,48
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	872.767.274,00	872.767.274,00	100,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	170.592.400,00	103.286.777,00	60,55
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	25.280.000,00	24.550.000,00	97,11
	Pengembangan SDM dan Kelembagaan/Pengelolaan SPAM	824.967.230,00	809.757.350,00	98,16
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	199.768.467,00	199.437.030,00	99,83
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	420.000.000,00	413.371.749,00	98,42
	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan Perdesaan	106.200.000,00	104.304.776,00	98,22
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air Limbah	215.580.000,00	204.969.200,00	95,08
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	215.580.000,00	204.969.200,00	95,08
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	199.980.000,00	189.844.200,00	94,93
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	15.600.000,00	15.125.000,00	96,96
14	Program Penyuluhan Pertanian	72.001.803,00	70.164.600,00	97,45
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	72.001.803,00	70.164.600,00	97,45
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	72.001.803,00	70.164.600,00	97,45
15	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	991.750.722,00	987.202.000,00	99,54
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	991.750.722,00	987.202.000,00	99,54
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	991.750.722,00	987.202.000,00	99,54
16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	830.725.000,00	548.459.880,00	66,02
	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	830.725.000,00	548.459.880,00	66,02
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	830.725.000,00	548.459.880,00	66,02
	Jumlah	34.650.837.995,00	31.800.328.376,00	91,77



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER SKPD
Sampai Dengan 31 Desember 2023

Lampiran IV

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (kurang)	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.148.314.298,00	124.902.085.653,00	(16.246.228.645,00)	88,49	114.393.141.446,00
2	Dinas Kesehatan	87.335.673.200,30	82.584.552.711,00	(4.751.120.489,30)	94,56	136.854.206.672,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	24.440.953.260,50	21.343.328.038,00	(3.097.625.222,50)	87,33	12.249.693.961,00
4	PKM Sangkub	1.731.154.266,00	1.415.021.387,00	(316.132.879,00)	81,74	1.178.023.950,00
5	PKM Bintauna	2.101.215.869,00	1.736.825.404,00	(364.390.465,00)	82,66	1.383.227.067,00
6	PKM Bohabak	1.405.762.441,00	1.168.407.804,00	(237.354.637,00)	83,12	926.193.825,00
7	PKM Bolangitang	1.894.782.817,30	1.560.586.165,00	(334.196.652,30)	82,36	1.526.428.244,00
8	PKM Boroko	2.201.986.752,00	1.859.973.114,00	(342.013.638,00)	84,47	1.567.215.874,00
9	PKM Buko	1.821.126.814,60	1.552.425.865,00	(268.700.949,60)	85,25	1.219.700.630,00
10	PKM Tuntung	1.093.707.342,30	880.854.343,00	(212.852.999,30)	80,54	833.843.762,00
11	PKM Bintauna Pantai	1.188.139.621,00	975.416.374,00	(212.723.247,00)	82,10	888.158.504,00
12	PKM Ollot	1.386.731.652,00	1.276.408.974,00	(110.322.678,00)	92,04	1.019.573.071,00
13	PKM Mokoditek	1.071.009.694,00	842.768.223,00	(228.241.471,00)	78,69	832.634.870,20
14	PKM Sangtombolang	847.759.418,00	583.536.307,00	(264.223.111,00)	68,83	571.514.627,00
15	TFC	217.971.014,00	212.300.994,00	(5.670.020,00)	97,40	153.685.070,00
16	Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	598.959.863,10	591.813.437,00	(7.146.426,10)	98,81	432.557.979,00
17	PKM Biontong	1.079.363.612,00	872.570.227,00	(206.793.385,00)	80,84	720.954.603,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.135.977.762,00	61.116.655.835,00	(1.019.321.927,00)	98,36	65.571.123.184,00
19	Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan	6.249.225.073,00	6.022.915.288,00	(226.309.785,00)	96,38	5.044.799.415,00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	4.270.766.009,00	4.207.082.393,00	(63.683.616,00)	98,51	3.806.661.149,00
21	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.097.532.408,00	6.837.959.319,00	(259.573.089,00)	96,34	1.710.536.781,00
22	Dinas Sosial	4.147.134.830,00	3.958.244.972,00	(188.889.858,00)	95,45	4.168.151.320,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.906.467.682,00	2.759.786.151,00	(146.681.531,00)	94,95	2.732.245.872,00
24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.424.557.033,00	2.269.060.397,00	(155.496.636,00)	93,59	2.337.305.098,00
25	Dinas Ketahanan Pangan	2.846.784.436,00	2.692.685.186,00	(154.099.250,00)	94,59	2.604.874.789,00
26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.827.219.301,00	5.568.315.512,00	(258.903.789,00)	95,56	5.431.696.227,00
27	Dinas Administrasi Kependudukan Dan Catatan sipil	3.234.478.672,00	3.133.875.484,00	(100.603.188,00)	96,89	3.023.082.477,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.875.867.616,00	3.784.797.299,00	(91.070.317,00)	97,65	2.898.603.060,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA	9.055.406.482,00	8.372.833.510,00	(682.572.972,00)	92,46	8.351.221.592,00
30	Dinas Perhubungan	3.228.815.694,00	3.190.428.816,00	(38.386.878,00)	98,81	3.756.202.432,00
31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.350.501.590,00	4.241.423.963,00	(109.077.627,00)	97,49	4.842.379.921,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.483.154.263,00	3.356.494.625,00	(126.659.638,00)	96,36	3.101.874.685,45

No.	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (kurang)	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.050.018.017,00	3.956.614.752,00	(93.403.265,00)	97,69	4.633.458.732,00
34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.315.867.976,00	2.219.517.876,00	(96.350.100,00)	95,84	2.078.929.702,00
35	Dinas Kelautan Dan Perikanan	5.172.644.991,00	4.435.916.676,00	(736.728.315,00)	85,76	4.237.310.383,00
36	Dinas Pariwisata	3.900.469.516,00	3.780.278.149,00	(120.191.367,00)	96,92	3.287.228.554,00
37	Dinas Pertanian	25.039.761.960,00	22.174.936.678,00	(2.864.825.282,00)	88,56	13.318.918.285,00
38	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	4.297.888.042,00	4.095.438.788,00	(202.449.254,00)	95,29	4.961.624.501,00
39	Sekretariat Daerah	23.163.011.634,00	22.369.412.205,00	(793.599.429,00)	96,57	22.710.896.046,00
40	Bagian Umum Dan Perlengkapan	7.066.353.323,00	6.969.731.441,00	(96.621.882,00)	98,63	6.213.321.412,00
41	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	734.363.099,00	673.804.288,00	(60.558.811,00)	91,75	563.352.819,00
42	Bagian Administrasi dan Pembangunan	402.106.734,00	378.943.600,00	(23.163.134,00)	94,24	260.556.580,00
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.060.680.928,00	1.026.992.566,00	(33.688.362,00)	96,82	906.130.878,00
44	Bagian Hukum	849.248.973,00	790.644.076,00	(58.604.897,00)	93,10	932.033.038,00
45	Bagian Pemerintahan	1.209.060.963,00	1.196.989.263,00	(12.071.700,00)	99,00	1.468.439.330,00
46	Bagian Bina Kesejahteraan Sosial	4.164.760.474,00	4.081.501.408,00	(83.259.066,00)	98,00	4.552.198.166,00
47	Bagian Organisasi	593.663.902,00	570.617.196,00	(23.046.706,00)	96,12	825.198.880,00
48	Bagian Pengadaan Barang Dan jasa	970.552.147,00	955.991.639,00	(14.560.508,00)	98,50	1.151.313.517,00
49	Sekretariat DPRD	26.659.604.454,00	26.045.789.462,00	(613.814.992,00)	97,70	25.048.787.713,00
50	Kecamatan Sangkub	2.376.647.371,00	2.357.531.282,00	(19.116.089,00)	99,20	2.536.048.025,00
51	Kecamatan Bintauna	3.870.627.954,00	3.740.173.597,00	(130.454.357,00)	96,63	3.885.504.678,00
52	Kecamatan Bolangitang Timur	2.145.244.270,00	2.111.815.181,00	(33.429.089,00)	98,44	2.027.873.660,00
53	Kecamatan Bolangitang Barat	1.597.455.020,00	1.587.489.254,00	(9.965.766,00)	99,38	1.614.721.883,00
54	Kecamatan Kaidipang	1.259.467.660,00	1.247.944.584,00	(11.523.076,00)	99,09	1.583.339.263,00
55	Kecamatan Pinogaluman	2.198.815.094,00	2.166.648.226,00	(32.166.868,00)	98,54	2.323.353.278,00
56	Inspektorat Daerah	6.192.167.136,00	5.969.536.997,00	(222.630.139,00)	96,40	5.590.572.654,00
57	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	6.511.788.188,00	6.292.949.582,00	(218.838.606,00)	96,64	6.637.947.501,00
58	Badan Pengelola Keuangan Daerah	133.835.069.171,00	131.416.381.176,00	(2.418.687.995,00)	98,19	126.170.692.723,00
59	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.831.327.164,00	7.182.536.805,00	(648.790.359,00)	91,72	6.101.409.117,00
	Jumlah	676.167.166.947,10	635.667.560.517,00	(40.499.606.430,10)	94,01	651.752.673.475,65



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BARANG
Sampai Dengan 31 Desember 2023

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
I	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sebesar Rp2,745,674,519,-.			
1	Pramuka	Boroko Kec. Kaidipang	49.999.519,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Tim Penggerak PKK	Boroko Kec. Kaidipang	450.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	TK Al-hidayah Duini	Duini Kec. Pinogaluman	12.600.000	Dinas Pendidikan
4	TK Al-ikhlas	Dalapuli Barat Kec. Pinogaluman	11.400.000	Dinas Pendidikan
5	TK Al-khairaat	Buko Kec. Pinogaluman	60.000.000	Dinas Pendidikan
6	TK Al-khairaat	Buko Kec. Pinogaluman	10.800.000	Dinas Pendidikan
7	TK Al-muttaqin	Batu Bantayo Kec. Pinogaluman	12.000.000	Dinas Pendidikan
8	TK Kartina Dalapuli	Dalapuli Kec. Pinogaluman	7.800.000	Dinas Pendidikan
9	TK Kasih Ibu	Kayogu Kec. Pinogaluman	10.800.000	Dinas Pendidikan
10	TK Mawar Tontulow	Tontulow Kec. Pinogaluman	14.256.000	Dinas Pendidikan
11	TK Merpati	Tombulung Kec. Pinogaluman	10.200.000	Dinas Pendidikan
12	TK Nurul Yaqin Dengi	Dengi Kec. Pinogaluman	9.000.000	Dinas Pendidikan
13	TK Sabihil Huda	Tontulow Utara Kec. Pinogaluman	8.400.000	Dinas Pendidikan
14	TK Siti Hawa Buko	Buko Kec. Pinogaluman	4.800.000	Dinas Pendidikan
15	TK Al-Muhajirin	Busato Kec. Pinogaluman	10.200.000	Dinas Pendidikan
16	TK Tunas Harapan	Batutajam Kec. Pinogaluman	11.400.000	Dinas Pendidikan
17	KB Al-Ikhlās	Dalapuli Barat Kec. Pinogaluman	12.000.000	Dinas Pendidikan
18	KB Al-Muhajirin	Busato Kec. Pinogaluman	15.600.000	Dinas Pendidikan
19	KB Al-Muttaqin	Batu Bantayo Kec. Pinogaluman	7.800.000	Dinas Pendidikan
20	KB Al-Zikra	Buko Selatan Kec. Pinogaluman	15.000.000	Dinas Pendidikan
21	KB Al-Hidayah	Duini Kec. Pinogaluman	9.000.000	Dinas Pendidikan
22	KB An-Nur	Tombolang Timur Kec. Pinogaluman	12.000.000	Dinas Pendidikan
23	KB Dahlia	Dalapuli Timur Kec. Pinogaluman	9.000.000	Dinas Pendidikan
24	KB Kartina	Dalapuli Kec. Pinogaluman	11.400.000	Dinas Pendidikan
25	KB Kasih Ibu	Kayogu Kec. Pinogaluman	13.800.000	Dinas Pendidikan
26	KB Merpati Tombulung	Tombulung Kec. Pinogaluman	9.600.000	Dinas Pendidikan
27	KB Nurul Huda	Tontulow Kec. Pinogaluman	18.414.000	Dinas Pendidikan
28	KB Nurul Yaqin	Dengi Kec. Pinogaluman	8.400.000	Dinas Pendidikan
29	KB Sabihil Huda	Tontulow Utara Kec. Pinogaluman	13.800.000	Dinas Pendidikan
30	KB Siti Hawa	Buko Utara Kec. Pinogaluman	6.000.000	Dinas Pendidikan
31	KB Sumber Harapan	Batu Tajam Kec. Pinogaluman	8.122.000	Dinas Pendidikan
32	Paud Terpadu Darunnajah	Tuntung Kec. Pinogaluman	22.200.000	Dinas Pendidikan
33	Paud terpadu harapan kita	Komus I Kec. Pinogaluman	8.400.000	Dinas Pendidikan

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
34	Paud Terpadu Qurataayun	Tuntung Timur Kec. Pinogaluman	25.200.000	Dinas Pendidikan
35	Paud Terpadu Mekar	Buko Utara Kec. Pinogaluman	16.800.000	Dinas Pendidikan
36	PAUD Terpadu Sumber Kasih	Sidupa Kec. Pinogaluman	10.432.000	Dinas Pendidikan
37	SPS TPQ Al-Husna	Dalapuli Timur Kec. Pinogaluman	10.800.000	Dinas Pendidikan
38	KB Al-khairaat	Buko Kec. Pinogaluman	13.200.000	Dinas Pendidikan
39	TK Beringin Bigo	Bigo Kec. Kaidipang	9.000.000,00	Dinas Pendidikan
40	TK Kamagi	Boroko Kec. Kaidipang	34.200.000,00	Dinas Pendidikan
41	TK Kartini Kuala	Kuala Kec. Kaidipang	12.000.000,00	Dinas Pendidikan
42	TK Lagada	Kuala Utara Kec. Kaidipang	18.600.000,00	Dinas Pendidikan
43	TK Perintis	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	15.600.000,00	Dinas Pendidikan
44	TK Soligir Pontak	Pontak Kec. Kaidipang	8.400.000,00	Dinas Pendidikan
45	TK Swadaya	Komus II Kec. Kaidipang	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
46	TK Terpadu Waladun Sholeh	Boroko Utara Kec. Kaidipang	43.200.000,00	Dinas Pendidikan
47	TK Terpadu Waladun Sholeh	Boroko Utara Kec. Kaidipang	30.000.000,00	Dinas Pendidikan
48	TK Tunas Harapan	Inomunga Kec. Kaidipang	7.800.000,00	Dinas Pendidikan
49	KB Al-Haq	Kuala Kec. Kaidipang	13.200.000,00	Dinas Pendidikan
50	KB Cahaya	Bigo Selatan Kec. Kaidipang	18.600.000,00	Dinas Pendidikan
51	KB Cempaka	Soligir Kec. Kaidipang	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
52	KB Lagada Kecil	Kuala Utara Kec. Kaidipang	14.400.000,00	Dinas Pendidikan
53	KB Mototabiana	Boroko Utara Kec. Kaidipang	22.200.000,00	Dinas Pendidikan
54	KB Kasih ibu	Solo Kec. Kaidipang	8.400.000,00	Dinas Pendidikan
55	KB Anggrek	Bigo Kec. Kaidipang	9.600.000,00	Dinas Pendidikan
56	PAUD Terpadu Budi Mania	Boroko Kec. Kaidipang	28.800.000,00	Dinas Pendidikan
57	KB Dewi Sartika	Pontak Kec. Kaidipang	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
58	KB Junior	Boroko Kec. Kaidipang	7.153.000,00	Dinas Pendidikan
59	KB Siti Khadidjah	Boroko Kec. Kaidipang	14.608.000,00	Dinas Pendidikan
60	KB Pertiwi	Gihang Kec. Kaidipang	8.400.000,00	Dinas Pendidikan
61	TK Al-Khairaat Jambusarang	Jambusarang Kec. Bolangitang Barat	20.400.000,00	Dinas Pendidikan
62	TK Al'quraan Ollot I	Ollot I Kec. Bolangitang Barat	6.501.000,00	Dinas Pendidikan
63	TK Baturapa Langi	Langi Kec. Bolangitang Barat	4.728.000,00	Dinas Pendidikan
64	TK Beringin Bolangitang	Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	16.200.000,00	Dinas Pendidikan
65	TK Dotinggola Sonuo	Sonuo Kec. Bolangitang Barat	8.400.000,00	Dinas Pendidikan
66	TK Maligugu Tomuagu	Tomuagu Kec. Bolangitang Barat	10.800.000,00	Dinas Pendidikan
67	TK Mokapog Ollot	Ollot Kec. Bolangitang Barat	10.800.000,00	Dinas Pendidikan
68	TK tanjung pinang	Tote Kec. Bolangitang Barat	11.400.000,00	Dinas Pendidikan
69	TK Baru Mekar	Keimanga Kec. Bolangitang Barat	8.886.000,00	Dinas Pendidikan
70	KB Anna goyo	Ollot II Kec. Bolangitang Barat	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
71	KB anugerah indah	Sonuo Kec. Bolangitang Barat	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
72	KB baru mekar	Keimanga Kec. Bolangitang Barat	11.400.000,00	Dinas Pendidikan
73	KB cempaka	Tote Kec. Bolangitang Barat	11.400.000,00	Dinas Pendidikan
74	KB cinta kasih bunda	Ollot II Kec. Bolangitang Barat	12.600.000,00	Dinas Pendidikan
75	KB gembira	Sonuo Kec. Bolangitang Barat	9.000.000,00	Dinas Pendidikan
76	KB Kasih Bunda	Wakat Kec. Bolangitang Barat	12.000.000,00	Dinas Pendidikan

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
77	KB bukit baturapa	Langi Kec. Bolangitang Barat	12.600.000,00	Dinas Pendidikan
78	KB Lumba-lumba	Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	18.600.000,00	Dinas Pendidikan
79	KB Permata Hati	Ollot Kec. Bolangitang Barat	18.000.000,00	Dinas Pendidikan
80	KB Anggrek Iyok	Iyok Kec. Bolangitang Barat	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
81	KB Impian	Ollot II Kec. Bolangitang Barat	14.400.000,00	Dinas Pendidikan
82	KB Kasih Ibu	Paku Kec. Bolangitang Barat	11.820.000,00	Dinas Pendidikan
83	KB Mekar Indah	Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat	21.000.000,00	Dinas Pendidikan
84	KB Mutiara Bunda	Jambusarang Kec. Bolangitang Barat	14.400.000,00	Dinas Pendidikan
85	KB Salsyabila	Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	13.200.000,00	Dinas Pendidikan
86	KB Fajar Lestari	Tanjung Buaya Kec. Bolangitang Barat	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
87	KB Teratai Putih	Talaga Tomuagu Kec. Bolangitang Barat	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
88	KB Mawar	Talaga Tomuagu Kec. Bolangitang Barat	14.702.000,00	Dinas Pendidikan
89	KB Flamboyam	Talaga Kec. Bolangitang Barat	12.600.000,00	Dinas Pendidikan
90	SPS TPQ Ar-rahman	Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat	8.316.000,00	Dinas Pendidikan
91	TK mawar	Biontong Kec. Bolangitang Timur	13.200.000,00	Dinas Pendidikan
92	TK Melati	Bohabak Kec. Bolangitang Timur	6.600.000,00	Dinas Pendidikan
93	TK Sangato	Nunuka Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
94	TK al-hijrah	Saleo I Kec. Bolangitang Timur	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
95	TK Alkhairaat	Lipubogu Kec. Bolangitang Timur	6.600.000,00	Dinas Pendidikan
96	TK tunas harapan	Binjeita I Kec. Bolangitang Timur	24.000.000,00	Dinas Pendidikan
97	TK Agape	Mokoditek Kec. Bolangitang Timur	6.600.000,00	Dinas Pendidikan
98	PAUD Terpadu Glory	Binjeita II Kec. Bolangitang Timur	6.600.000,00	Dinas Pendidikan
99	KB Dewi Sartika	Saleo I Kec. Bolangitang Timur	15.600.000,00	Dinas Pendidikan
100	KB Kasih Bunda	Mokoditek Kec. Bolangitang Timur	6.600.000,00	Dinas Pendidikan
101	Paud Terpadu Jabal Nur	Nagara Kec. Bolangitang Timur	10.800.000,00	Dinas Pendidikan
102	KB Lestari	Lipubogu Kec. Bolangitang Timur	16.800.000,00	Dinas Pendidikan
103	KB Suka Maju	Tanjung Labuo Kec. Bolangitang Timur	9.000.000,00	Dinas Pendidikan
104	KB Theodora	BinjeitaKec. Bolangitang Timur	7.800.000,00	Dinas Pendidikan
105	KB Impian	Biontong Kec. Bolangitang Timur	5.400.000,00	Dinas Pendidikan
106	KB Mekar	Binuanga Kec. Bolangitang Timur	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
107	KB Tunas Bangsa	Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	13.200.000,00	Dinas Pendidikan
108	KB Berlian	Biontong Kec. Bolangitang Timur	16.200.000,00	Dinas Pendidikan
109	KB Harapan Bunda	Nunuka Kec. Bolangitang Timur	7.800.000,00	Dinas Pendidikan
110	KB Kasih Ibu	Binjeita I Kec. Bolangitang Timur	16.200.000,00	Dinas Pendidikan
111	KB Mutiara Bangsa	Binuni Kec. Bolangitang Timur	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
112	KB Iloponu	Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	16.800.000,00	Dinas Pendidikan
113	KB Mawar	Kec. Bolangitang Timur	1.500.000,00	Dinas Pendidikan

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
114	KB Idaman	Bohabak IV Kec. Bolangitang Timur	13.200.000,00	Dinas Pendidikan
115	TK Kasih Bunda	Voaa Kec. Bintauna	6.600.000,00	Dinas Pendidikan
116	TK Dewi Sartika Bunia	Bunia Kec. Bintauna	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
117	TK Kartini	Talaga Kec. Bintauna	3.600.000,00	Dinas Pendidikan
118	KB Mustika Ibu	Talaga Kec. Bintauna	11.400.000,00	Dinas Pendidikan
119	KB Dahlia	Minanga Kec. Bintauna	10.800.000,00	Dinas Pendidikan
120	KB Anggrek	Batulintik Kec. Bintauna	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
121	KB Kasih Bunda	Voaa Kec. Bintauna	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
122	KB Tunas Harapan	Bunia Kec. Bintauna	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
123	KB Nurjannah	Bunong Kec. Bintauna	6.553.000,00	Dinas Pendidikan
124	KB Flamboyan	Bintauna Pantai Kec. Bintauna	10.155.000,00	Dinas Pendidikan
125	Paud Terpadu Madinatul Ilmi	Padang Barat Kec. Bintauna	7.800.000,00	Dinas Pendidikan
126	Paud Terpadu Melati	Kopi Kec. Bintauna	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
127	Paud Terpadu Ade Irma	Bintauna Kec. Bintauna	15.600.000,00	Dinas Pendidikan
128	Paud Terpadu Alqur'an Alkhairaat	Minanga Kec. Bintauna	7.200.000,00	Dinas Pendidikan
129	Paud Terpadu Kamboja	Pimpi Kec. Bintauna	8.400.000,00	Dinas Pendidikan
130	Paud Terpadu Monompia	Huntutuk Kec. Bintauna	5.953.000,00	Dinas Pendidikan
131	Paud Terpadu Mososandova	Kuhanga Kec. Bintauna	18.000.000,00	Dinas Pendidikan
132	Paud Terpadu Pniel	Mome Kec. Bintauna	3.692.000,00	Dinas Pendidikan
133	PKBM Makahengkeng	Kopi Kec. Bintauna	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
134	Paud Terpadu Teratai Vahuta	Vahuta Kec. Bintauna	6.000.000,00	Dinas Pendidikan
135	TK Kartini Sangkub I	Sangkub I Kec. Sangkub	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
136	TK Anggrek Tombolango	Tombolango Kec. Sangkub	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
137	TK Busisingo	Busisingo Kec. Sangkub	7.200.000,00	Dinas Pendidikan
138	KB Anggrek Tombolango	Tombolango Kec. Sangkub	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
139	KB Mardhatillah	Sangkub IV Kec. Sangkub	12.600.000,00	Dinas Pendidikan
140	KB Mawar	Busisingo Kec. Sangkub	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
141	KB Mutiara Ibu	Sangkub I Kec. Sangkub	15.600.000,00	Dinas Pendidikan
142	Paud Terpadu Akasia	Busisingo Utara Kec. Sangkub	10.200.000,00	Dinas Pendidikan
143	Paud Terpadu Kenanga	Sidodadi Kec. Sangkub	11.400.000,00	Dinas Pendidikan
144	Paud Terpadu Melati	Sangkub III Kec. Sangkub	13.800.000,00	Dinas Pendidikan
145	Paud Terpadu Ceria	Mokusato Kec. Sangkub	4.524.000,00	Dinas Pendidikan
146	Paud Terpadu Mutiara	Sompiro Kec. Sangkub	7.200.000,00	Dinas Pendidikan
147	Paud Terpadu Sengkanaung	Sang Tombolang Kec. Sangkub	16.800.000,00	Dinas Pendidikan
148	KB Siti Hawa	Buko Utara Kec. Pinogaluman	24.000.000,00	Dinas Pendidikan
149	TK Siti Hawa	Buko Utara Kec. Pinogaluman	9.000.000,00	Dinas Pendidikan
150	TK Islam Terpadu Waladun Sholeh	Boroko Kec. Kaidipang	9.000.000,00	Dinas Pendidikan
151	PAUD Terpadu Budi Mania	Boroko Kec. Kaidipang	42.000.000,00	Dinas Pendidikan
152	Tk Alkhairat Jambusarang	Jambusarang Kec. Bolangitang Barat	18.000.000,00	Dinas Pendidikan

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
153	TK Alkhairat Lipubogu	Lipubogu Kec. Bolangitang Timur	18.000.000,00	Dinas Pendidikan
154	PAUD Terpadu Alquran Alkhairat	Minanga Kec. Bintauna	18.000.000,00	Dinas Pendidikan
155	KB Anak Bangsa	Minanga Kec. Bintauna	33.000.000,00	Dinas Pendidikan
156	PKBM Makahengkeng	Bintauna Kec. Bintauna	60.000.000,00	Dinas Pendidikan
157	Taman Baca Masyarakat (TBM) Merdeka	Kopi Kec Bintauna	7.500.000,00	Dinas Pendidikan
158	Taman Baca Masyarakat (TBM) Cerdas	Buko kec.Pinogaluman	7.500.000,00	Dinas Pendidikan
159	Taman Baca Masyarakat (TBM) Omanga	Bintauna Kec Bintauna	7.500.000,00	Dinas Pendidikan
160	Taman Baca Masyarakat (TBM) Inomasa	Bintauna Kec Bintauna	15.000.000,00	Dinas Pendidikan
161	SD Advent Bohabak 3	Bohabak III Kec. Bolangitang Timur	50.490.000,00	Dinas Pendidikan
162	SD Kristen sumbah	Biontong II Kec. Bolangitang Timur	33.660.000,00	Dinas Pendidikan
163	SD Islam Terpadu Waladun Sholeh	Boroko Kec. Kaidipang	82.170.000,00	Dinas Pendidikan
164	PKBM Makahengkeng	Bintauna Kec. Bintauna	65.400.000,00	Dinas Pendidikan
165	Khania Adzqya Ratu Talibo	SMPN 2 Bolaang Mongondow Utara	2.500.000,00	Dinas Pendidikan
166	Zahira Althafunisa Yasri	SMPN 2 Bolaang Mongondow Utara	1.500.000,00	Dinas Pendidikan
167	An Aisyah	SMPN 6 Bolaang Mongondow Utara	900.000,00	Dinas Pendidikan
168	Putri Nayla Diko	SDN 6 Pinogaluman	2.000.000,00	Dinas Pendidikan
169	Firmansyah Abjul	SDN 1 Kaidipang	1.000.000,00	Dinas Pendidikan
170	Muhamad Alfatih Syaban	SDN 7 Kaidipang	800.000,00	Dinas Pendidikan
Jumlah			2.820.434.519,00	
II	Bantuan Hibah Uang Kepada badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sebesar Rp1,772,400,000,-			
1	Pasantren Kidupa	Boroko Kec. Kaidipang	250.000.000,00	Bagian Kesra
2	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)	Boroko Kec. Kaidipang	275.000.000,00	Bagian Kesra
3	FKUB	Boroko Kec. Kaidipang	50.000.000,00	Bagian Kesra
4	BTM Adzikra Buko Selatan	Buko Selatan Kec. Pinogaluman	100.000.000,00	Bagian Kesra
5	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Boroko Kec. Kaidipang	40.000.000,00	Bagian Kesra
6	BTM Al Fattah	Boroko Kec. Kaidipang	25.000.000,00	Bagian Kesra
7	Masjid Al-Muhajirin Busato	Busato Kec. Kaidipang	25.000.000,00	Bagian Kesra
8	BTM Hidayatullah Desa Binuni	Binuni Kec. Bolangitang Timur	25.000.000,00	Bagian Kesra
9	BTM Masjid Al-Hijrah Desa Sonuo	Sonuo Kec. Bolangitang Barat	25.000.000,00	Bagian Kesra
10	Masjdi Nurul Inan Talaga Tomuagu	Talaga Tomoagu Kec. Bolangitang Barat	25.000.000,00	Bagian Kesra
11	Majelis Ulama Indonesia Kab. Bolaang Mongondow Utara	Boroko Kec. Kaidipang	25.000.000,00	Bagian Kesra
12	Wanita Islam Alk-Khairaat (WIA)	Boroko Kec. Kaidipang	50.000.000,00	Bagian Kesra
13	Nahdlatul Ulama Cabang Kab. Bolaang Mongondow Utara	Boroko Kec. Kaidipang	30.000.000,00	Bagian Kesra
14	Muhammadiyah Kab. Bolmut	Boroko Kec. Kaidipang	30.000.000,00	Bagian Kesra

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
15	GMIBM Betania Batutajam	Batu Tajam Kec. Pinogaluman	25.000.000,00	Bagian Kesra
16	GMIBM Imanuel Biontong	Biontong Kec. Bolangitang Timur	10.000.000,00	Bagian Kesra
17	PHBI	Boroko Kec. Kaidipang	100.000.000,00	Bagian Kesra
18	BTM Al-Hasanah Pimpi	Pimpi Kec. Bintauna	50.000.000,00	Bagian Kesra
19	BTM Masjid Ar-Raudhatul Jannah	Bunong Kec. Bintauna	25.000.000,00	Bagian Kesra
20	BTM An Nur		25.000.000,00	Bagian Kesra
21	BTM Masjid Nurul Haq	Sangkub III Kec. Sangkub	25.000.000,00	Bagian Kesra
22	Panti Asuhan Fathul Khairaat		30.000.000,00	Bagian Kesra
23	BTM At Taqwa Desa Bolangitang	Desa Tombulang Kec. Pinogaluman	25.000.000,00	Bagian Kesra
24	Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bolaang Mongondow Utara	Boroko Kec. Kaidipang	50.000.000,00	Bagian Kesra
25	BTM Nurul Yaqin Dengi	Dengi Kec. Pinogaluman	50.000.000,00	Bagian Kesra
26	BTM Nurul Amin	Monompia Kec. Sangkub	50.000.000,00	Bagian Kesra
27	BTM Baitturahim	Boroko Utara Kec. Kaidipang	50.000.000,00	Bagian Kesra
28	Gereja GMIBM Hermon	Komus II Kec. Kaidipang	25.000.000,00	Bagian Kesra
29	GPDI Imanuel Mokoditek I	Mokoditek Kec. Bolangitang Timur	25.000.000,00	Bagian Kesra
30	GMIBM Sumba Biontong	Biontong Kec. Bolangitang Timur	25.000.000,00	Bagian Kesra
31	Madrasah Aliyah Kaidipang	Boroko Kec. Kaidipang	25.000.000,00	Bagian Kesra
32	Ambarak F. Alamri	MDA Bintauna Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
33	Syafawt Al-Zamzai	MDA Bintauna Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
34	Rukmini Van Gobel	MDA Bintauna Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
35	Sry fatma H guhung	MDA Tuntung Kec. Pinogaluman	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
36	Rahmawati Guhung	MDA Tuntung Kec. Pinogaluman	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
37	Sarmin Tongka	MDA Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
38	Nurbaja Misalah	MDA Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
39	Elvi Dotinggulo	MDA Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
40	Lili Suryani Van Gobel	MDA Binuanga Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
41	Kartini Limonu	MDA Binuanga Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
42	Amina Kapiso	MDA Sonuo Kec. Bolangitang Barat	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
43	Naneng Durand	MDA Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
44	Yustin Supayo	MDA Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
45	Irma Badi	MDA Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
46	Damayanti Polinte	MDA Tote Kec. Bolangitang Barat	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
47	Olva Talibo	MDA Tote Kec. Bolangitang Barat	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
48	Hasna Machi	MDA Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
49	Marni Malil	MDA Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
50	Halipa Oliy,S.Ag	MDA Bohabak IV Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
51	Verawati Molamahu	MDA Bohabak IV Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
52	Amalin Sekei	MDA Bohabak IV Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
53	Zulfa Uadi	MDA Bohabak IV Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
54	Renti Napu	MDA Binjeita I Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan

Nomor	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
55	Sriwati Arbangka	MDA Binjeita I Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
56	Mapri Kapiso	MDA Binjeita Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
57	Herni Lantong	MDA Binjeita Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
58	Ihsan Kohongia	MDA Binjeita Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
59	Nurdian Hassan	MDA Sangkub Kec. Sangkub	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
60	Maryam Lakoro	MDA Sangkub Kec. Sangkub	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
61	Silvana Hassan	MDA Sangkub Kec. Sangkub	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
62	Yanti Lantong	MDA Minanga Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
63	Siti Nolva Tampil	MDA Minanga Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
64	Nurkholis Dg Mulisa	MDA Minanga Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
65	Hawaria Mardani	MDA Minanga Kec. Bintauna	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
66	Haina Bninjaanati	MDA Biontong Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
67	Ranti Makalungsenge	MDA Biontong Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
68	Umi Kalsum Sahante	MDA Biontong Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
69	Nur Aida Djauhari	MDA Biontong Kec. Bolangitang Timur	4.800.000,00	Dinas Pendidikan
Jumlah			1.772.400.000,00	
III	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia Rp25,000,000,-			
1	Pembayaran Dana Hibah Kepada Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Penjara 2023	Boroko Kec. Kaidipang	25.000.000,00	Kesbangpol
Jumlah			25.000.000,00	
IV	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebesar Rp627.222.528,-			
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Desa Boroko Kecamatan Kaidipang	123.462.144,00	Kesbangpol
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Desa Boroko Kecamatan Kaidipang	114.158.592,00	Kesbangpol
3	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang	81.561.600,00	Kesbangpol
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Desa Talaga Kecamatan Bolangitang Barat	60.397.056,00	Kesbangpol
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Desa Talaga Kecamatan Bolangitang Barat	51.922.944,00	Kesbangpol
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	Desa Boroko Kecamatan Kaidipang	45.646.848,00	Kesbangpol
7	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang	43.407.360,00	Kesbangpol
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang	43.200.000,00	Kesbangpol
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang	35.057.664,00	Kesbangpol
10	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat	28.408.320,00	Kesbangpol
Jumlah			627.222.528,00	
V	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp5,000,000,000,00.			
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Boroko Kec. Kaidipang	3.000.000.000,00	Kesbangpol
2	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	Boroko Kec. Kaidipang	2.000.000.000,00	Kesbangpol
Jumlah			5.000.000.000,00	
VI	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sebesar Rp2,746,388,134,00			
1	Belanja Hibah Barang	Boroko Kec. Kaidipang	2.746.388.134,00	Dinas Pendidikan
Jumlah			2.746.388.134,00	
T O T A L			12.991.445.181,00	



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Nama	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5
I	Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan kepada Individu Sebesar Rp345,000,000,-			
1	Kartini Tahir	Buko Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
2	Siti Rahma Deliana Lamalaka	Kuala Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
3	Rahmad Alfrianto Poha	Boroko Timur Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
4	Rangga Lahimade	Wakat Kec. Bolbar	2.500.000,00	Bagian Kesra
5	Hendrik Mokodompis	Solo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
6	Meisi Tegela	Kuala Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
7	Meifi Makalunsenge	Sangkub I Kec. Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
8	Novita Anggi Said	Boroko Timur Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
9	Asur Anuz	Inomunga Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
10	Miranti Oktaviani Manoppo	Ollot I Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
11	Djelantik Hinur	Pimpi Kec. Bintauna	2.500.000,00	Bagian Kesra
12	Anisa Gupa	Bolangitang I Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
13	Asri taya	Sonuo Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
14	Laranti Leingo	Talaga Tomoagu Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
15	Marjan Kupang	Sangkub I Kec. Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
16	Risna Gumohung	Inomunga Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
17	Milka Ewi Juliasari	Desa Sidodadi Kec. Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
18	Abd. Rahman Datunsoalng	Desa Sangkub IV Kec., Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
19	Silfa Buhohang	Desa Boroko Timur Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
20	Muh. Imam Afandy Syafrudin	Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur	2.500.000,00	Bagian Kesra
21	Siti Rauda Samuel	Desa Sangkub IV Kec., Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
22	Agdil Kadri Tobangen	Desa Bunong Kec. Bintauna	2.500.000,00	Bagian Kesra
23	Elsa Muslimawati Bardjanji	Desa Jambusarang Kec. Bolangitang Timur	2.500.000,00	Bagian Kesra
24	Guswitanti Abdulah	Desa Soligir Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
25	Suanti Pulegeti	Desa Kuala Utara Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
26	Fatnia Tonote	Desa Duini Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
27	Moh. Rifki Tegila	Desa Bunong Kec. Bintauna	2.500.000,00	Bagian Kesra
28	Nitrawati Bukoting	Desa Pontak Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
29	Indri Yani kakomole	Desa Komus I Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
30	Moh. Fajrin Wengkeng	Desa Kuala Utara Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
31	Oktafiani Makalalag	Desa Sangkub I Kec. Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
32	Rahwilin Van Gobel	Desa Sangkub IV Kec., Sangkub	2.500.000,00	Bagian Kesra
33	Nurhayati Laiya	Bolangitang I Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
34	Nurain Hente	Pontak Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
35	Krisdayanti Pelongan	Solo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
36	Mutmainah Abusamat	Buko Selatan Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
37	Farahdila Hudengo	Duini Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
38	Aan Reza Kairupan	Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	2.500.000,00	Bagian Kesra
39	Moh. Defri Lauma	Tomoagu Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
40	Shafa Tasya Kamila	Bigo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
41	Ferdiyanto Nani	Tote Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
42	Deivi Hulopango	Boroko Utara Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
43	Reina Lauma	Bigo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra

No.	Nama	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
44	Mayang Pontoh	Iyok Kec. Bolangitang barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
45	Nikma Lavenia Baba	Jambusarang Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
46	Amar gadafi Baba	Binjeita I Kec. Bolangitang timur	2.500.000,00	Bagian Kesra
47	Rifaldi Lasahari	Biontong Kec. Bolangitang Timur	2.500.000,00	Bagian Kesra
48	Moh. Syafir Van Gobel	Ollot II Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
49	Santria Umar	Solo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
50	Moh. Fikran Pangalima	Keimanga Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
51	Astin Tangahu	Desa Tuntung Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
52	Indar Talibo	Ollot I Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
53	Hidayat Rahman	Kuala Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
54	Nanda Aisyia Pontoh	Desa Bolangitang Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
55	Fahria Alamri	Desa talaga Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
56	Abdul Muzakir Van Gobel	Desa Sonuo Kec. Boangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
57	Adrianto Djaafar	Desa Saleo Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
58	Mohamad Dicky Gunawan Muntu	Desa Bigo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
59	Alni Nurfitia Manoppo	Desa Paku Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
60	Safira Sadiki	Desa Nagara Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
61	Rinda Gladisia Pontoh	Desa Boroko Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
62	Aprilia Kampe	Desa Langi Kec. Bolangitang Barat	2.500.000,00	Bagian Kesra
63	Ramdan Pontoh	Desa Pontak Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
64	Mohamad Rivaldi Harundja	Desa Bigo Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
65	Salsabilah Alya Ratus	Desa Buko Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
66	Mercy Nusi	Desa Tombulang Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
67	Darwin Maalumu	Desa Buko Selatan Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
68	Hidayat Lajulu	Desa Buko Utara Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
69	Indiyani Kaminang	Desa Buko Utara Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
70	Rahmawati Husain	Desa Buko Selatan Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
71	Fahmit Lahoma	Desa Buko Selatan Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
72	Santika Alhasni	Desa Tontulow Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
73	Fahrul Talaa	Desa Tombulang Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
74	Ogin Husa	Desa Tombulang Pantai Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
75	Sakina Talango	Desa Dalapuli Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
76	Fitria Mananghuang	Desa Komus II Kec. Pinogaluman	2.500.000,00	Bagian Kesra
77	Inda Cahyani Pontoh	Desa Binjeita Kec. Bolangitang Timur	2.500.000,00	Bagian Kesra
78	Nurul Alfia	Desa Kuala Kec. Kaidipang	2.500.000,00	Bagian Kesra
79	Ramjan Bonde	Tontulow Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
80	Muriani Gobel	Padango Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
81	Atira Latara	Tontulow Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
82	Nasir Kakatua	Tombulang Pantai Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
83	Yusuf Halamani	Batubantayo Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
84	Hamsa Malada	Tombulang Timur Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
85	Aco Tone	Duini Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
86	Rustam Djaba	Tombulang Pantai Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
87	Yulianti Buhang	Dengi Kec. Pinogaluman	5.000.000,00	Perindagkop
88	Sahrin Lamalaka	Kuala Kec. Kaidipang	5.000.000,00	Perindagkop
89	Murjon Blongkod	Komus Dua Timur Kec. Kaidipang	5.000.000,00	Perindagkop
90	Arif Malo	Inomunga Utara Kec. Kaidipang	5.000.000,00	Perindagkop
91	Musna Rumalele	Bolangitang II Kec. Bolangitang Barat	5.000.000,00	Perindagkop
92	Ferawati	Paku Kec. Bolangitang Barat	5.000.000,00	Perindagkop
93	Amina Dotinggulo	Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat	5.000.000,00	Perindagkop
94	Sunarto Bone/Hamna Ajuai	Paku Selatan Kec. Bolangitang Barat	5.000.000,00	Perindagkop

No.	Nama	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
95	Nurjana Pamili	Jambusarang Kec. Bolangitang Barat	5.000.000,00	Perindagkop
96	Ismail Djenaan	Sonuo Kec. Bolangitang Barat	5.000.000,00	Perindagkop
97	Isran Daapala	Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	5.000.000,00	Perindagkop
98	Gadri Misaalah	Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	5.000.000,00	Perindagkop
99	Mustapa Molamahu	Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	5.000.000,00	Perindagkop
100	Abdul Muis Buhang	Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	5.000.000,00	Perindagkop
101	Reynaldi Isman	Bunia Kec. Bintauna	5.000.000,00	Perindagkop
102	Majid Datunsolang	Padang Barat Kec. Bintauna	5.000.000,00	Perindagkop
103	Markus Belembele	Huntut Kec. Bintauna	5.000.000,00	Perindagkop
104	Pantas Lutia	Sangtombolang Kec. Sangkub	5.000.000,00	Perindagkop
105	Pilemon Tawera	Sangtombolang Kec. Sangkub	5.000.000,00	Perindagkop
106	Johanes Bakarbesi	Sangtombolang Kec. Sangkub	5.000.000,00	Perindagkop
107	Aning Mamonto	Sangkub II Kec. Sangkub	5.000.000,00	Perindagkop
108	Maabo Kobandaha	Sangkub II Kec. Sangkub	5.000.000,00	Perindagkop
Jumlah			345.000.000,00	
II	Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan kepada Kelompok Masyarakat Sebesar Rp3,262,536,000,00.			
1	Panitia Ritual Adat Mandi Safar	Desa Busato Kec. Pinogaluman	20.000.000,00	Bagian Kesra
2	Fatma Papuangan	Desa Tombolango Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
3	Samadi Malik	Desa Tombolango Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
4	Dekki Tinanda	Desa Apeng Sembeka Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
5	Aminula Datunsolang	Desa Busisingo Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
6	Pantas Lutia	Desa Sangtombolang Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
7	Johanis Bakarbesi	Desa Sangtombolang Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
8	Pilemon Tawera	Desa Sangtombolang Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
9	Yunus K Nua	Desa Sangkub III Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
10	Latip Atalap	Desa Sangkub III Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
11	Suleman Latif	Desa Sidodadi Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
12	Fien Warow Sumerar	Desa Suka Makmur Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
13	Dolpitor Mutahang	Desa Suka Makmur Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
14	Suparno	Desa Suka Makmur Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
15	Maabo Kobandaha	Desa Sangkub II Kec. Sangkub	68.000.000,00	Dinas Perumahan
16	Arim Muliling	Desa Batulintik Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
17	Ahmat Pansur	Desa Batulintik Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
18	Jefri Husain	Desa Kuhanga Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
19	Toni hasan	Desa Minanga Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
20	Majid Datunsoalng	Desa Padang Barat Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
21	Nasir Hinur	Desa Voa'a Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
22	Markus Belembele	Desa Huntut Kec. Bintauna	68.000.000,00	Dinas Perumahan
23	Harnolus Lanombuka	Desa Binjeita II Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
24	Alci Pontoh	Desa Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
25	Abdul Muis Buhang	Desa Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
26	Rifai Ternate	Desa Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
27	Mustafa Molamahu	Desa Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
28	Aswar	Desa Lipubogu Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
29	Ibrahim Saili	Desa Tanjung Labuo Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
30	Sulaiman Saili	Desa Tanjung Labuo Kec. Bolangitang Timur	68.000.000,00	Dinas Perumahan
31	Arifin Bano	Desa Paku Selatan Kec. Boalngitang Barat	68.000.000,00	Dinas Perumahan
32	Djeldi Labinjang	Desa Paku Kec. Boalngitang Barat	68.000.000,00	Dinas Perumahan
33	Ismail Djenaan	Desa Sonuo Kec. Boalngitang Barat	68.000.000,00	Dinas Perumahan
34	Arif Malo	Desa Inomunga Kec. Kaidipang	68.000.000,00	Dinas Perumahan

No.	Nama	Alamat Penerima	Jumlah	Ket.
35	Murjon Blongkot	Desa Komus II Timur Kec. Kaidipang	68.000.000,00	Dinas Perumahan
36	Sahrin Lamalaka	Desa Kuala Kec. Kaidipang	68.000.000,00	Dinas Perumahan
37	Hamsa Malada	Desa Tombulang Timur Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
38	Berci Salintiho	Desa Batu Tajam Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
39	Kartini Tahulending	Desa Batu Tajam Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
40	Aco Tone	Desa Duini Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
41	Anwar Sanggila	Desa Kayuogu Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
42	Filipus Mantemas	Desa Komus I Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
43	Fajri Laumpa	Desa Tuntung Timur Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
44	Amrin Mokodompis	Desa Komus I Kec. Pinogaluman	68.000.000,00	Dinas Perumahan
45	Aswar	Desa Lipubogu Kec. Bolangitang Timur	714.000,00	Dinas Perumahan
46	Alci Pontoh	Desa Bohabak I Kec. Bolangitang Timur	714.000,00	Dinas Perumahan
47	Mustafa Molamahu	Desa Bohabak II Kec. Bolangitang Timur	1.211.000,00	Dinas Perumahan
48	Suleman Latif	Desa Sidodadi Kec. Sangkub	714.000,00	Dinas Perumahan
49	Ibrahim Saili	Desa Tanjung Labuo Kec. Bolangitang Timur	714.000,00	Dinas Perumahan
50	Djeldi Labinjang	Desa Paku Kec. Boalngitang Barat	714.000,00	Dinas Perumahan
51	Sahrin Lamalaka	Desa Kuala Kec. Kaidipang	1.211.000,00	Dinas Perumahan
52	Arif Malo	Desa Inomunga Kec. Kaidipang	1.211.000,00	Dinas Perumahan
53	Jefri Husain	Desa Kuhanga Kec. Bintauna	1.211.000,00	Dinas Perumahan
54	Dekki Tinanda	Desa Apeng Sembeka Kec. Sangkub	1.211.000,00	Dinas Perumahan
55	Murjon Blongkot	Desa Komus II Timur Kec. Kaidipang	714.000,00	Dinas Perumahan
56	Arifin Bano	Desa Paku Selatan Kec. Boalngitang Barat	1.211.000,00	Dinas Perumahan
57	Dolpitor Mutahang	Desa Suka Makmur Kec. Sangkub	1.211.000,00	Dinas Perumahan
58	Suparno	Desa Suka Makmur Kec. Sangkub	714.000,00	Dinas Perumahan
59	Arif Muliling	Desa Batulintik Kec. Bintauna	1.211.000,00	Dinas Perumahan
60	Ahmat Pansur	Desa Batulintik Kec. Bintauna	1.211.000,00	Dinas Perumahan
61	Nasir Hinur	Desa Voa'a Kec. Bintauna	714.000,00	Dinas Perumahan
62	Majid Datunsolang	Desa Padang Barat Kec. Bintauna	714.000,00	Dinas Perumahan
63	Toni Hasan	Desa Minanga Kec. Bintauna	1.211.000,00	Dinas Perumahan
64	Kelompok Tani Posigayanga	Desa Bohabak III Kec. Bolangitang Timur	60.000.000,00	Dinas Pertanian
65	Kelompok Tani Gendator	Desa Langi Kec. Bolangitang Barat	60.000.000,00	Dinas Pertanian
66	Kelompok Tani Mandiri	Desa Pimpi Kec. Bintauna	60.000.000,00	Dinas Pertanian
67	Kelompok Tani Lencana Merah	Desa Sangkub I Kec. Sangkub	60.000.000,00	Dinas Pertanian
68	Kelompok Tani Mekar Jaya	Desa Batutajam Kec. Pinogaluman	60.000.000,00	Dinas Pertanian
Jumlah			3.262.536.000,00	
Total			3.607.536.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDPOW UTARA
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DESA PER SUMBER DANA TAHUN 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Desa	Pagu Desa	Realisasi Penerimaan Per Sumber Anggaran Tahun 2023					Jumlah Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Tahun 2023	
			Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH)	Bantuan Kabupaten Kepada Desa (PBK)		Pendapatan Lain-lain (DLL)
I	Kecamatan Sangkub								
1	Sangkub I	1.135.203.733,00	758.195.000,00	370.350.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	4.113.407,00	1.138.015.744,00
2	Busisingo	1.056.535.931,00	708.184.000,00	342.860.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.158.529,00	1.055.792.010,00
3	Sangtombolang	1.117.934.733,00	703.136.000,00	408.140.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	410.328,00	1.114.941.038,00
4	Tombolango	1.080.877.985,00	693.845.000,00	368.440.000,00	0,00	12.085.746,00	0,00	843.644,00	1.075.214.390,00
5	Pangkusa	1.063.079.000,00	712.289.000,00	341.840.000,00	9.000.000,00	3.589.481,00	0,00	12.274.957,00	1.078.993.438,00
6	Sangkub II	1.116.691.254,00	709.677.000,00	366.180.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	36.136.607,00	1.115.583.088,00
7	Sidodadi	1.080.532.733,00	756.464.000,00	317.410.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	4.019.181,00	1.083.250.518,00
8	Sampiro	1.116.497.000,00	781.337.000,00	330.160.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	885.979,00	1.115.972.460,00
9	Sangkub III	1.030.042.733,00	683.824.000,00	339.560.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	4.155.541,00	1.032.896.878,00
10	Busisingo Utara	932.780.000,00	583.790.000,00	342.990.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.559.441,00	933.696.778,00
11	Apeng Sembeka	1.419.802.553,00	1.099.122.000,00	315.130.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	567.391,00	1.418.074.101,00
12	Suka Makmur	941.807.000,00	594.767.000,00	341.490.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	904.295,00	940.750.776,00
13	Sangkub Timur	1.011.695.733,00	665.387.000,00	342.500.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	954.643,00	1.012.431.124,00
14	Monompia	952.260.553,00	607.220.000,00	339.490.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	1.445.090,00	951.409.800,00
15	Mokusato	925.164.000,00	607.334.000,00	315.130.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	450.862,00	926.169.572,00
16	Sangkub IV	1.097.920.037,00	734.196.000,00	359.130.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.157.525,00	1.098.073.006,00
	Jumlah	17.078.824.978,00	11.398.767.000,00	5.540.800.000,00	9.000.000,00	71.660.301,00	0,00	71.037.420,00	17.091.264.721,00
II	Kecamatan Bintauna								
1	Huntuk	1.206.826.254,00	845.092.000,00	356.150.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	332.850,00	1.205.164.331,00
2	Mome	1.116.995.733,00	768.737.000,00	341.600.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	315.132,00	1.114.241.613,00
3	Kuhanga	1.093.640.733,00	716.712.000,00	370.270.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.084.332,00	1.093.423.669,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Realisasi Penerimaan Per Sumber Anggaran Tahun 2023						Jumlah Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Tahun 2023
			Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH)	Bantuan Kabupaten Kepada Desa (PBK)	Pendapatan Lain-lain (DLL)	
4	Padang	1.022.999.733,00	650.631.000,00	365.710.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	176.995,00	1.021.875.332,00
5	Pimpi	1.045.960.733,00	696.782.000,00	340.520.000,00	2.000.000,00	5.357.337,00	0,00	1.013.028,00	1.045.672.365,00
6	Bunia	1.053.134.733,00	677.586.000,00	368.890.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	497.874,00	1.052.331.211,00
7	Talaga Bintauna	1.020.686.733,00	636.088.000,00	368.440.000,00	0,00	3.589.481,00	9.500.000,00	485.224,00	1.018.102.705,00
8	Batulintik	1.233.079.667,00	696.085.000,00	369.800.000,00	2.030.000,00	5.357.337,00	0,00	1.159.744,00	1.074.432.081,00
9	Bintauna Pantai	1.080.673.667,00	703.629.000,00	361.350.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	493.152,00	1.069.061.633,00
10	Minanga	1.081.390.254,00	731.126.000,00	344.680.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	402.609,00	1.079.798.090,00
11	Kopi	1.110.440.733,00	753.873.000,00	343.000.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	7.874.450,00	1.110.104.787,00
12	Voa'a	1.197.374.882,00	825.190.000,00	366.600.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	409.982,00	1.195.789.463,00
13	Bunong	1.195.651.733,00	819.733.000,00	369.260.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.007.131,00	1.195.357.468,00
14	Padang Barat	1.320.604.733,00	930.886.000,00	383.060.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.541.580,00	1.320.844.917,00
15	Vahuta	1.047.030.733,00	699.272.000,00	341.100.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.073.229,00	1.046.802.566,00
Jumlah		16.826.491.054,00	11.151.422.000,00	5.390.430.000,00	4.030.000,00	69.752.919,00	9.500.000,00	17.867.312,00	16.643.002.231,00
III	Kecamatan Bolangitang Timur								
1	Mokoditek	1.082.988.221,00	674.798.000,00	403.870.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	715.494,00	1.082.972.975,00
2	Nunuka	1.061.972.000,00	691.512.000,00	363.810.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	841.431,00	1.061.520.768,00
3	Saleo	1.224.096.733,00	849.418.000,00	368.020.000,00	10.000.000,00	5.357.337,00	0,00	1.395.996,00	1.234.191.333,00
4	Bohabak I	1.120.668.789,00	692.306.000,00	418.830.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	3.149.676,00	1.119.643.013,00
5	Bohabak II	1.340.457.000,00	970.467.000,00	363.490.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	895.861,00	1.338.442.342,00
6	Binjeita	1.060.843.733,00	663.645.000,00	393.390.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.337.141,00	1.063.729.478,00
7	Biontong	1.203.555.000,00	811.526.000,00	386.580.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	696.130,00	1.202.391.611,00
8	Biontong I	1.394.646.000,00	975.796.000,00	412.350.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.082.988,00	1.394.586.325,00
9	Biontong II	1.243.650.254,00	898.576.000,00	339.490.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	891.469,00	1.242.212.179,00
10	Binuanga	1.362.495.230,00	975.898.000,00	362.850.000,00	16.450.000,00	5.357.337,00	0,00	1.330.452,00	1.361.885.789,00
11	Bohabak III	1.236.128.254,00	857.824.000,00	365.620.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	8.381.842,00	1.235.415.323,00
12	Bohabak IV	1.488.407.000,00	1.067.357.000,00	414.050.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	5.115.841,00	1.491.880.178,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Realisasi Penerimaan Per Sumber Anggaran Tahun 2023						Jumlah Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Tahun 2023
			Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH)	Bantuan Kabupaten Kepada Desa (PBK)	Pendapatan Lain-lain (DLL)	
13	Binjeita I	1.087.810.254,00	689.556.000,00	391.170.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	972.734,00	1.085.288.215,00
14	Binjeita II	1.028.015.481,00	660.246.000,00	364.180.000,00	1.128.712,50	3.589.481,00	0,00	1.316.296,00	1.030.460.489,50
15	Mokoditek I	1.104.581.000,00	691.451.000,00	402.630.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	785.299,00	1.098.455.780,00
16	Lipu Bogu	1.042.526.000,00	671.156.000,00	363.870.000,00	2.500.000,00	3.589.481,00	0,00	665.115,00	1.041.780.596,00
17	Binuni	1.015.226.000,00	646.186.000,00	364.040.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	857.665,00	1.014.338.375,00
18	Tanjung Labou	1.079.295.000,00	711.205.000,00	363.090.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	772.659,00	1.078.322.369,00
19	Nagara	1.011.641.000,00	650.536.000,00	362.850.000,00	1.105.000,00	3.589.481,00	0,00	756.975,00	1.018.837.456,00
20	Saleo I	1.108.374.733,00	720.006.000,00	381.710.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	924.632,00	1.107.997.969,00
Jumlah		23.297.377.682,00	15.569.465.000,00	7.585.890.000,00	31.183.712,50	84.928.155,00	0,00	32.885.696,00	23.304.352.563,50
IV	Kecamatan Bolangitang Barat								
1	Paku	1.114.841.254,00	768.337.000,00	340.920.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	1.269.380,00	1.113.781.090,00
2	Ollot	1.063.566.733,00	715.788.000,00	341.120.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.707.280,00	1.063.972.617,00
3	Sonuo	1.170.389.733,00	752.261.000,00	411.470.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.452.895,00	1.170.541.232,00
4	Jambusarang	1.047.403.733,00	672.675.000,00	368.070.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.428.682,00	1.047.531.019,00
5	Talaga Tomoagu	1.160.941.733,00	813.253.000,00	341.030.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.440.492,00	1.161.080.829,00
6	Bolangitang	977.238.637,00	630.549.000,00	340.190.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.534.806,00	975.863.287,00
7	Langi	1.031.057.733,00	670.489.000,00	353.910.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.611.711,00	1.029.600.192,00
8	Iyok	1.369.125.154,00	1.021.943.000,00	341.597.900,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.570.387,00	1.370.468.624,00
9	Tote	982.002.000,00	638.162.000,00	338.340.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.668.878,00	981.760.359,00
10	Wakat	1.020.589.733,00	649.011.000,00	364.920.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.218.338,00	1.018.738.819,00
11	Ollot I	1.041.298.733,00	694.540.000,00	340.100.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.463.998,00	1.041.461.335,00
12	Ollot II	1.314.206.964,00	919.244.000,00	389.870.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	1.425.602,00	1.313.794.312,00
13	Bolangitang I	1.147.345.000,00	750.651.000,00	366.750.000,00	0,00	12.085.746,00	14.250.000,00	1.461.584,00	1.145.198.330,00
14	Bolangitang II	1.291.389.254,00	931.890.000,00	341.090.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.071.756,00	1.277.641.237,00
15	Talaga	1.043.120.000,00	694.180.000,00	341.940.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	981.529,00	1.040.691.010,00
16	Tanjung Buaya	957.085.000,00	615.095.000,00	336.990.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	878.641,00	956.553.122,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Realisasi Penerimaan Per Sumber Anggaran Tahun 2023						Jumlah Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Tahun 2023
			Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH)	Bantuan Kabupaten Kepada Desa (PBK)	Pendapatan Lain-lain (DLL)	
17	Keimanga	1.066.808.733,00	718.010.000,00	342.140.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.397.355,00	1.065.136.836,00
18	Paku Selatan	1.130.041.733,00	763.683.000,00	359.700.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.588.262,00	1.130.328.599,00
Jumlah		19.928.451.860,00	13.419.761.000,00	6.360.147.900,00	0,00	84.812.373,00	14.250.000,00	25.171.576,00	19.904.142.849,00
V	Kecamatan kaidipang								
1	Solo	1.100.613.464,00	744.865.000,00	349.620.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	881.346,00	1.098.955.827,00
2	Boroko	1.223.213.985,00	822.401.000,00	382.220.000,00	0,00	12.085.746,00	0,00	1.354.832,00	1.218.061.578,00
3	Bigo	1.129.163.000,00	787.283.000,00	341.880.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.287.139,00	1.135.807.476,00
4	Kuala	1.287.467.733,00	938.409.000,00	342.400.000,00	0,00	12.085.746,00	0,00	857.600,00	1.293.752.346,00
5	Pontak	1.013.180.728,00	667.522.000,00	339.000.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.356.292,00	1.011.467.773,00
6	Inomunga	1.112.491.000,00	774.781.000,00	337.710.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.287.762,00	1.119.136.099,00
7	Komus II	968.936.254,00	629.862.000,00	333.490.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	333.998,00	966.940.708,00
8	Boroko Timur	1.257.971.667,00	891.307.000,00	350.970.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.131.976,00	1.248.766.313,00
9	Kuala Utara	1.088.921.129,00	737.417.000,00	347.150.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	5.718.704,00	1.095.643.041,00
10	Gihang	1.072.788.254,00	705.024.000,00	362.180.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.338.464,00	1.072.131.945,00
11	Boroko Utara	1.129.975.000,00	786.785.000,00	338.690.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	2.041.452,00	1.131.105.933,00
12	Bigo Selatan	1.080.914.000,00	710.634.000,00	355.280.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	1.530.181,00	1.072.801.518,00
13	Soligir	1.013.594.000,00	686.204.000,00	327.390.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.178.340,00	1.018.361.821,00
14	Inomunga Utara	979.170.000,00	638.470.000,00	326.130.000,00	9.120.000,00	3.254.710,00	0,00	1.171.172,00	978.145.882,00
15	Komus II Timur	1.283.933.000,00	882.272.000,00	324.130.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	58.683.336,00	1.268.340.046,00
Jumlah		16.742.333.214,00	11.403.236.000,00	5.158.240.000,00	9.120.000,00	78.669.712,00	0,00	80.152.594,00	16.729.418.306,00
VI	Kecamatan Pinogaluman								
1	Komus I	1.206.922.000,00	887.792.000,00	313.630.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.145.956,00	1.206.157.437,00
2	Tuntung	1.254.165.254,00	897.991.000,00	353.440.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.497.304,00	1.256.517.785,00
3	Batutajam	971.644.710,00	630.400.000,00	337.990.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	1.449.323,00	973.094.033,00
4	Dalapuli	1.037.749.452,00	673.549.000,00	352.990.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.274.178,00	1.031.402.659,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Realisasi Penerimaan Per Sumber Anggaran Tahun 2023						Jumlah Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Tahun 2023
			Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH)	Bantuan Kabupaten Kepada Desa (PBK)	Pendapatan Lain-lain (DLL)	
5	Buko	1.025.514.000,00	650.324.000,00	367.420.000,00	0,00	5.357.337,00	0,00	2.668.607,00	1.025.769.944,00
6	Dengi	926.981.000,00	588.991.000,00	337.990.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.609.193,00	932.179.674,00
7	Tombulang	982.113.254,00	637.939.000,00	338.590.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	557.588,00	980.676.069,00
8	Tontulow	1.251.787.337,00	886.230.000,00	355.450.000,00	4.750.000,00	5.357.337,00	0,00	1.455.140,00	1.253.242.477,00
9	Kayuogu	999.395.254,00	680.121.000,00	313.690.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	1.014.819,00	998.415.300,00
10	Tanjung Sidupa	1.244.630.511,00	899.352.000,00	338.990.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	292.735,00	1.241.889.445,00
11	Buko Selatan	1.102.545.254,00	782.241.000,00	314.720.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	958.622,00	1.101.509.103,00
12	Busato	1.200.080.254,00	854.006.000,00	340.490.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	947.727,00	1.199.033.208,00
13	Batu Bantayo	1.261.356.254,00	941.062.000,00	314.710.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	2.524.453,00	1.261.885.934,00
14	Padango	943.504.054,00	621.411.000,00	313.858.800,00	2.650.000,00	3.589.481,00	0,00	897.571,00	942.406.852,00
15	Tontulow Utara	1.008.271.000,00	638.401.000,00	354.370.000,00	7.308.000,00	3.589.481,00	0,00	891.596,00	1.004.560.077,00
16	Dalapuli Timur	1.042.130.733,00	679.572.000,00	353.340.000,00	2.560.000,00	3.589.481,00	0,00	2.281.596,00	1.041.343.077,00
17	Dalapuli Barat	1.041.576.294,00	674.010.000,00	353.810.000,00	8.172.040,00	3.589.481,00	0,00	1.411.204,00	1.040.992.725,00
18	Buko Utara	1.016.301.000,00	658.311.000,00	352.990.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	563.632,00	1.015.119.342,00
19	Tombulang Timur	917.337.718,00	549.582.000,00	352.990.000,00	2.000.000,00	3.589.481,00	0,00	4.245.542,00	912.407.023,00
20	Tombulang Pantai	1.092.741.254,00	746.742.000,00	328.630.000,00	0,00	3.589.481,00	11.875.000,00	676.655,00	1.091.513.136,00
21	Tuntung Timur	994.786.254,00	658.872.000,00	330.330.000,00	0,00	3.254.710,00	0,00	1.469.262,00	993.925.972,00
22	Duini	1.120.109.964,00	747.027.000,00	352.990.000,00	0,00	3.589.481,00	0,00	797.721,00	1.104.404.202,00
Jumlah		23.641.642.805,00	15.983.926.000,00	7.473.408.800,00	27.440.040,00	81.165.210,00	11.875.000,00	30.630.424,00	23.608.445.474,00
Jumlah Total		117.515.121.593,00	78.926.577.000,00	37.508.916.700,00	80.773.752,50	470.988.670,00	35.625.000,00	257.745.022,00	117.280.626.144,50

Cat.

PAD Terdiri dari :

1. Penerimaan Pembagian Laba BUMDES,
2. Penerimaan Hasil Usaha Desa
3. Penerimaan Hasil Aset Desa
4. Penerimaan Hasil Swadaya Desa
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

1. Pendapatan Bunga Bank

No	Nama Desa	Pagu Desa	Realisasi Penerimaan Per Sumber Anggaran Tahun 2023					Jumlah Realisasi Penerimaan Anggaran Desa Tahun 2023
			Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (PBH)	Bantuan Kabupaten Kepada Desa (PBK)	

2. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah



**LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Nama Desa	Pagu Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
I	Kecamatan Sangkub										
1	Sangkub I	1.138.015.744,00	27.354.449,00	398.339.554,00	411.983.100,00	77.595.000,00	161.660.500,00	79.200.000,00	0,00	1.128.778.154,00	36.592.039,00
2	Busisingo	1.055.792.010,00	3.923.944,00	359.357.156,00	447.702.500,00	88.980.000,00	85.197.980,00	72.000.000,00	0,00	1.053.237.636,00	6.478.318,00
3	Sangtombolang	1.114.941.038,00	102.308.846,00	439.426.037,00	340.002.920,00	84.200.000,00	143.104.000,00	108.000.000,00	0,00	1.114.732.957,00	102.516.927,00
4	Tombolango	1.075.214.390,00	12.782.913,00	405.379.000,00	528.181.750,00	65.255.000,00	-	79.200.000,00	0,00	1.078.015.750,00	9.981.553,00
5	Pangkusa	1.078.993.438,00	81.210.851,00	387.928.000,00	579.220.456,00	69.000.000,00	12.680.000,00	72.000.000,00	0,00	1.120.828.456,00	39.375.833,00
6	Sangkub II	1.115.583.088,00	139.052.867,00	397.808.000,00	423.929.000,00	73.350.000,00	136.900.000,00	72.000.000,00	0,00	1.103.987.000,00	150.648.955,00
7	Sidodadi	1.083.250.518,00	49.893.822,00	349.080.378,00	573.454.991,00	96.183.201,00	11.752.000,00	79.200.000,00	0,00	1.109.670.570,00	23.473.770,00
8	Sampiro	1.115.972.460,00	7.121.746,00	355.055.000,00	630.007.000,00	53.550.000,00	11.400.000,00	68.400.000,00	0,00	1.118.412.000,00	4.682.206,00
9	Sangkub III	1.032.896.878,00	8.997.512,00	371.823.906,00	340.754.750,00	48.082.357,00	158.245.700,00	115.200.000,00	0,00	1.034.106.713,00	7.787.677,00
10	Busisingo Utara	933.696.778,00	9.613.563,00	377.543.000,00	307.949.500,00	61.160.000,00	129.852.000,00	61.200.000,00	0,00	937.704.500,00	5.605.841,00
11	Apeng Sembeka	1.418.074.101,00	2.659.378,00	317.231.337,00	433.899.500,00	54.121.000,00	367.385.000,00	241.200.000,00	0,00	1.413.836.837,00	6.896.642,00
12	Suka Makmur	940.750.776,00	16.872.645,00	378.094.050,00	335.008.990,00	51.000.000,00	120.000.000,00	61.200.000,00	0,00	945.303.040,00	12.320.381,00
13	Sangkub Timur	1.012.431.124,00	17.635.690,00	369.396.399,00	317.928.926,00	66.000.000,00	157.476.475,00	82.800.000,00	0,00	993.601.800,00	36.465.014,00
14	Monompia	951.409.800,00	6.774.534,00	353.646.100,00	310.854.500,00	67.427.500,00	137.999.400,00	72.000.000,00	0,00	941.927.500,00	16.256.834,00
15	Mokusato	926.169.572,00	14.129.989,00	351.155.300,00	352.883.500,00	48.100.000,00	120.675.000,00	61.200.000,00	0,00	934.013.800,00	6.285.761,00
16	Sangkub IV	1.098.073.006,00	19.920.204,00	377.662.980,00	395.101.000,00	80.684.500,00	151.335.000,00	75.600.000,00	0,00	1.080.383.480,00	37.609.730,00
	Jumlah	17.091.264.721,00	520.252.953,00	5.988.926.197,00	6.728.862.383,00	1.084.688.558,00	1.905.663.055,00	1.400.400.000,00	0,00	17.108.540.193,00	502.977.481,00
II	Kecamatan Bintauna										
1	Huntuk	1.205.164.331,00	5.544.668,00	393.042.349,00	290.310.500,00	45.000.000,00	300.795.000,00	176.400.000,00	0,00	1.205.547.849,00	5.161.150,00
2	Mome	1.114.241.613,00	9.659.688,00	375.151.000,00	383.579.000,00	43.800.000,00	120.220.000,00	190.800.000,00	0,00	1.113.550.000,00	10.351.301,00
3	Kuhanga	1.093.423.669,00	5.670.688,00	388.805.000,00	263.423.877,00	82.970.000,00	187.977.400,00	144.000.000,00	0,00	1.067.176.277,00	31.918.080,00
4	Padang	1.021.875.332,00	4.841.218,00	403.393.508,00	267.496.000,00	46.350.000,00	149.966.000,00	151.200.000,00	0,00	1.018.405.508,00	8.311.042,00
5	Pimpi	1.045.672.365,00	5.213.216,00	366.145.577,00	269.330.956,00	83.672.500,00	141.300.000,00	172.800.000,00	0,00	1.033.249.033,00	17.636.548,00
6	Bunia	1.052.331.211,00	5.286.063,00	387.796.260,00	330.201.000,00	89.170.000,00	135.680.000,00	111.600.000,00	0,00	1.054.447.260,00	3.170.014,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
7	Talaga Bintauna	1.018.102.705,00	13.442.394,00	388.328.146,00	227.606.760,00	83.850.000,00	208.517.600,00	108.000.000,00	0,00	1.016.302.506,00	15.242.593,00
8	Batulintik	1.074.432.081,00	26.593.668,00	397.120.590,00	309.755.350,00	77.150.000,00	151.255.000,00	147.000.000,00	0,00	1.082.280.940,00	18.744.809,00
9	Bintauna Pantai	1.069.061.633,00	16.561.275,00	398.812.000,00	338.836.250,00	65.050.000,00	156.183.880,00	126.000.000,00	0,00	1.084.882.130,00	740.778,00
10	Minanga	1.079.798.090,00	47.561.272,00	387.002.229,00	401.478.000,00	77.469.000,00	146.225.200,00	108.000.000,00	0,00	1.120.174.429,00	7.184.933,00
11	Kopi	1.110.104.787,00	45.014.343,00	372.971.500,00	112.168.500,00	403.880.000,00	159.029.000,00	90.000.000,00	0,00	1.138.049.000,00	17.070.130,00
12	Voa'a	1.195.789.463,00	5.165.151,00	386.257.000,00	218.854.500,00	72.208.644,00	341.830.000,00	172.800.000,00	0,00	1.191.950.144,00	9.004.470,00
13	Bunong	1.195.357.468,00	24.773.955,00	399.033.037,00	207.366.000,00	84.730.763,00	345.848.060,00	172.800.000,00	0,00	1.209.777.860,00	10.353.563,00
14	Padang Barat	1.320.844.917,00	14.979.114,00	416.112.283,00	441.450.550,00	59.250.000,00	186.200.000,00	187.200.000,00	0,00	1.290.212.833,00	45.611.198,00
15	Vahuta	1.046.802.566,00	4.114.126,00	379.195.637,00	308.399.250,00	50.400.000,00	144.000.000,00	140.400.000,00	0,00	1.022.394.887,00	28.521.805,00
Jumlah		16.643.002.231,00	234.420.839,00	5.839.166.116,00	4.370.256.493,00	1.364.950.907,00	2.875.027.140,00	2.199.000.000,00	0,00	16.648.400.656,00	229.022.414,00
III	Kecamatan Bolangitang Timur										
1	Mokoditek	1.082.972.975,00	2.962.894,00	428.989.710,00	292.332.400,00	59.600.000,00	182.259.600,00	118.800.000,00	0,00	1.081.981.710,00	3.954.159,00
2	Nunuka	1.061.520.768,00	7.405.054,00	411.063.373,00	363.881.951,00	105.050.270,00	70.650.000,00	90.000.000,00	0,00	1.040.645.594,00	28.280.228,00
3	Saleo	1.234.191.333,00	18.796.832,00	334.117.082,00	725.918.570,00	78.411.500,00	0,00	75.600.000,00	0,00	1.214.047.152,00	38.941.013,00
4	Bohabak I	1.119.643.013,00	31.293.916,00	465.421.980,00	265.710.595,00	65.726.700,00	138.737.700,00	172.800.000,00	0,00	1.108.396.975,00	42.539.954,00
5	Bohabak II	1.338.442.342,00	12.057.081,00	412.343.000,00	563.644.000,00	54.510.000,00	214.000.000,00	97.200.000,00	0,00	1.341.697.000,00	8.802.423,00
6	Binjeita	1.063.729.478,00	41.869.710,00	432.146.393,00	329.884.050,00	72.600.000,00	132.740.000,00	108.000.000,00	0,00	1.075.370.443,00	30.228.745,00
7	Biontong	1.202.391.611,00	7.345.841,00	449.577.471,00	250.731.370,00	78.066.000,00	322.506.000,00	104.400.000,00	0,00	1.205.280.841,00	4.456.611,00
8	Biontong I	1.394.586.325,00	36.343.218,00	447.082.000,00	458.479.250,00	87.455.000,00	178.262.500,00	208.800.000,00	0,00	1.380.078.750,00	50.850.793,00
9	Biontong II	1.242.212.179,00	26.225.847,00	405.260.800,00	534.243.178,00	44.350.000,00	179.710.000,00	90.000.000,00	0,00	1.253.563.978,00	14.874.048,00
10	Binuanga	1.361.885.789,00	14.142.770,00	417.414.517,00	616.146.470,00	69.379.200,00	58.500.000,00	208.800.000,00	0,00	1.370.240.187,00	5.788.372,00
11	Bohabak III	1.235.415.323,00	19.412.654,00	417.750.000,00	331.700.000,00	64.886.000,00	258.120.000,00	180.000.000,00	0,00	1.252.456.000,00	2.371.977,00
12	Bohabak IV	1.491.880.178,00	17.688.185,00	458.004.363,00	457.867.406,00	198.946.000,00	247.135.400,00	140.400.000,00	0,00	1.502.353.169,00	7.215.194,00
13	Binjeita I	1.085.288.215,00	2.817.281,00	428.369.061,00	322.562.200,00	124.444.000,00	79.000.000,00	75.600.000,00	50.000.000,00	1.079.975.261,00	8.130.235,00
14	Binjeita II	1.030.460.489,00	21.005.638,00	408.317.475,00	370.492.500,00	59.859.000,00	141.355.120,00	68.400.000,00	0,00	1.048.424.095,00	3.042.032,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
15	Mokoditek I	1.098.455.780,00	14.741.239,00	433.563.000,00	429.975.100,00	49.200.000,00	85.000.000,00	72.000.000,00	30.000.000,00	1.099.738.100,00	13.458.919,00
16	Lipu Bogu	1.041.780.596,00	5.708.790,00	388.200.790,00	349.189.625,00	51.900.000,00	172.125.562,00	68.400.000,00	0,00	1.029.815.977,00	17.673.409,00
17	Binuni	1.014.338.375,00	2.285.006,00	401.114.841,00	350.715.049,00	48.499.509,00	141.900.000,00	72.000.000,00	0,00	1.014.229.399,00	2.393.982,00
18	Tanjung Labou	1.078.322.369,00	14.013.408,00	391.003.757,00	404.790.000,00	66.815.000,00	100.000.000,00	118.800.000,00	0,00	1.081.408.757,00	10.927.020,00
19	Nagara	1.018.837.456,00	7.814.497,00	364.426.080,00	450.053.817,00	120.184.000,00	9.000.000,00	68.400.000,00	0,00	1.012.063.897,00	14.588.056,00
20	Saleo I	1.107.997.969,00	6.469.895,00	411.970.270,00	367.278.500,00	73.900.000,00	143.800.000,00	97.200.000,00	0,00	1.094.148.770,00	20.319.094,00
Jumlah		23.304.352.563,00	310.399.756,00	8.306.135.963,00	8.235.596.031,00	1.573.782.179,00	2.854.801.882,00	2.235.600.000,00	80.000.000,00	23.285.916.055,00	328.836.264,00
IV	Kecamatan Bolangitang Barat										
1	Paku	1.113.781.090,00	17.400.146,00	398.604.500,00	379.606.890,00	67.685.000,00	157.120.000,00	122.400.000,00	0,00	1.125.416.390,00	5.764.846,00
2	Ollot	1.063.972.617,00	49.833.060,00	368.423.710,00	406.779.000,00	51.600.000,00	131.797.500,00	108.000.000,00	0,00	1.066.600.210,00	47.205.467,00
3	Sonuo	1.170.541.232,00	24.153.155,00	431.534.600,00	258.855.650,00	102.450.000,00	182.060.500,00	187.200.000,00	0,00	1.162.100.750,00	32.593.637,00
4	Jambusarang	1.047.531.019,00	33.035.404,00	415.818.241,00	348.434.900,00	70.500.000,00	134.535.000,00	100.800.000,00	0,00	1.070.088.141,00	10.478.282,00
5	Talaga Tomoagu	1.161.080.829,00	29.089.482,00	357.339.000,00	336.175.000,00	55.100.000,00	243.262.000,00	169.200.000,00	0,00	1.161.076.000,00	29.094.311,00
6	Bolangitang	975.863.287,00	34.463.892,00	372.370.796,00	265.635.800,00	56.100.000,00	125.791.500,00	154.800.000,00	0,00	974.698.096,00	35.629.083,00
7	Langi	1.029.600.192,00	19.420.335,00	386.187.125,00	281.357.987,00	54.800.000,00	141.585.300,00	165.600.000,00	0,00	1.029.530.412,00	19.490.115,00
8	Iyok	1.370.468.624,00	9.787.498,00	383.480.875,00	486.188.900,00	54.100.000,00	230.148.260,00	223.200.000,00	0,00	1.377.118.035,00	3.138.087,00
9	Tote	981.760.359,00	13.284.582,00	381.477.800,00	403.257.600,00	36.600.000,00	0,00	158.400.000,00	0,00	979.735.400,00	15.309.541,00
10	Wakat	1.018.738.819,00	49.555.162,00	381.824.092,00	186.175.500,00	90.456.000,00	300.157.220,00	68.400.000,00	0,00	1.027.012.812,00	41.281.169,00
11	Ollot I	1.041.461.335,00	28.024.613,00	363.289.000,00	300.224.000,00	48.600.000,00	152.086.800,00	172.800.000,00	0,00	1.036.999.800,00	32.486.148,00
12	Ollot II	1.313.794.312,00	29.085.192,00	412.963.373,00	550.660.937,00	67.053.228,00	185.745.200,00	93.600.000,00	0,00	1.310.022.738,00	32.856.766,00
13	Bolangitang I	1.145.198.330,00	44.139.795,00	418.339.593,00	399.439.000,00	84.294.000,00	138.135.000,00	79.200.000,00	0,00	1.119.407.593,00	69.930.532,00
14	Bolangitang II	1.277.641.237,00	25.409.158,00	367.125.946,00	410.097.785,00	57.583.940,00	200.831.090,00	230.400.000,00	0,00	1.266.038.761,00	37.011.634,00
15	Talaga	1.040.691.010,00	51.784.402,00	375.317.914,00	293.414.000,00	57.600.000,00	142.646.000,00	172.800.000,00	0,00	1.041.777.914,00	50.697.498,00
16	Tanjung Buaya	956.553.122,00	16.330.446,00	361.582.042,00	264.954.400,00	51.700.000,00	131.147.500,00	151.200.000,00	0,00	960.583.942,00	12.299.626,00
17	Keimanga	1.065.136.836,00	23.736.217,00	376.371.655,00	407.407.700,00	45.150.000,00	143.602.000,00	108.000.000,00	0,00	1.080.531.355,00	8.341.698,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
18	Paku Selatan	1.130.328.599,00	49.855.743,00	391.679.300,00	427.937.000,00	78.591.500,00	67.714.000,00	190.800.000,00	0,00	1.156.721.800,00	23.462.542,00
Jumlah		19.904.142.849,00	548.388.282,00	6.943.729.562,00	6.406.602.049,00	1.129.963.668,00	2.808.364.870,00	2.656.800.000,00	0,00	19.945.460.149,00	507.070.982,00
VI	Kecamatan Kaidipang										
1	Solo	1.098.955.827,00	5.294.427,00	373.326.617,00	204.180.500,00	207.668.550,00	148.973.000,00	151.200.000,00	0,00	1.085.348.667,00	18.901.587,00
2	Boroko	1.218.061.578,00	42.196.943,00	433.033.952,00	326.893.500,00	126.408.200,00	172.480.000,00	172.800.000,00	11.594.620,00	1.243.210.272,00	17.048.249,00
3	Bigo	1.135.807.476,00	16.156.938,00	370.461.707,00	342.624.263,00	96.000.000,00	169.715.600,00	165.500.000,00	0,00	1.144.301.570,00	7.662.844,00
4	Kuala	1.293.752.346,00	10.173.596,00	374.335.446,00	472.542.059,00	85.800.000,00	253.858.880,00	97.200.000,00	0,00	1.283.736.385,00	20.189.557,00
5	Pontak	1.011.467.773,00	49.311.899,00	384.619.927,00	370.411.320,00	64.051.200,00	135.852.400,00	79.200.000,00	0,00	1.034.134.847,00	26.644.825,00
6	Inomunga	1.119.136.099,00	48.355.360,00	372.418.000,00	424.360.300,00	61.800.000,00	128.496.000,00	170.619.000,00	0,00	1.157.693.300,00	9.798.159,00
7	Komus II	966.940.708,00	3.715.253,00	355.590.000,00	363.653.400,00	51.658.868,00	126.000.000,00	64.800.000,00	0,00	961.702.268,00	8.953.693,00
8	Boroko Timur	1.248.766.313,00	63.624.120,00	418.244.096,00	269.307.000,00	113.200.000,00	301.369.600,00	93.600.000,00	105.000.000,00	1.300.720.696,00	11.669.737,00
9	Kuala Utara	1.095.643.041,00	49.720.231,00	379.612.236,00	342.022.696,00	79.720.000,00	205.900.000,00	108.000.000,00	0,00	1.115.254.932,00	30.108.340,00
10	Gihang	1.072.131.945,00	49.956.489,00	395.659.690,00	389.348.755,00	74.400.000,00	164.880.000,00	82.800.000,00	0,00	1.107.088.445,00	14.999.989,00
11	Boroko Utara	1.131.105.933,00	49.725.965,00	366.842.261,00	412.000.000,00	65.000.000,00	166.961.000,00	86.400.000,00	0,00	1.097.203.261,00	83.628.637,00
12	Bigo Selatan	1.072.801.518,00	38.392.870,00	402.811.000,00	287.560.045,00	84.100.000,00	152.837.000,00	176.400.000,00	0,00	1.103.708.045,00	7.486.343,00
13	Soligir	1.018.361.821,00	13.191.071,00	362.420.400,00	359.577.350,00	61.500.000,00	154.050.000,00	82.800.000,00	0,00	1.020.347.750,00	11.205.142,00
14	Inomunga Utara	978.145.882,00	24.345.539,00	331.759.400,00	308.365.545,00	54.653.150,00	137.724.000,00	82.800.000,00	40.800.000,00	956.102.095,00	46.389.326,00
15	Komus II Timur	1.268.340.046,00	2.736.861,00	375.584.386,00	480.521.800,00	59.023.450,00	240.210.000,00	114.300.000,00	0,00	1.269.639.636,00	1.437.271,00
Jumlah		16.729.418.306,00	466.897.562,00	5.696.719.118,00	5.353.368.533,00	1.284.983.418,00	2.659.307.480,00	1.728.419.000,00	157.394.620,00	16.880.192.169,00	316.123.699,00
VI	Kecamatan Pinogaluman										
1	Komus I	1.206.157.437,00	2.333.657,00	335.477.718,00	562.227.560,00	40.200.000,00	177.545.000,00	90.000.000,00	0,00	1.205.450.278,00	3.040.816,00
2	Tuntung	1.256.517.785,00	8.013.532,00	383.469.911,00	402.691.750,00	51.600.000,00	193.545.000,00	223.200.000,00	0,00	1.254.506.661,00	10.024.656,00
3	Batutajam	973.094.033,00	13.180.452,00	362.995.340,00	382.526.062,00	48.000.000,00	71.600.000,00	104.400.000,00	0,00	969.521.402,00	16.753.083,00
4	Dalapuli	1.031.402.659,00	29.508.693,00	404.911.800,00	385.608.996,00	52.900.000,00	135.000.000,00	68.400.000,00	0,00	1.046.820.796,00	14.090.556,00
5	Buko	1.025.769.944,00	44.267.329,00	414.292.000,00	257.223.500,00	97.807.000,00	131.100.000,00	144.000.000,00	0,00	1.044.422.500,00	25.614.773,00

No	Nama Desa	Pagu Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
6	Dengi	932.179.674,00	35.776.544,00	366.538.949,00	263.155.200,00	60.151.600,00	131.345.000,00	118.800.000,00	0,00	939.990.749,00	27.965.469,00
7	Tombulung	980.676.069,00	2.558.517,00	404.521.659,00	329.742.760,00	72.100.000,00	109.295.800,00	64.800.000,00	0,00	980.460.219,00	2.774.367,00
8	Tontulow	1.253.242.477,00	23.771.070,00	387.441.810,00	480.727.465,00	82.800.000,00	206.130.000,00	90.000.000,00	0,00	1.247.099.275,00	29.914.272,00
9	Kayuogu	998.415.300,00	15.670.228,00	382.762.742,00	317.216.000,00	89.001.000,00	137.000.000,00	82.800.000,00	0,00	1.008.779.742,00	5.305.786,00
10	Tanjung Sidupa	1.241.889.445,00	6.474.320,00	336.054.880,00	277.047.900,00	224.173.300,00	237.497.735,00	136.800.000,00	0,00	1.211.573.815,00	36.789.950,00
11	Buko Selatan	1.101.509.103,00	14.621.699,00	359.510.000,00	351.740.710,00	78.931.215,00	247.414.000,00	72.000.000,00	0,00	1.109.595.925,00	6.534.877,00
12	Busato	1.199.033.208,00	28.826.163,00	384.624.630,00	544.218.000,00	62.250.000,00	145.200.000,00	79.200.000,00	0,00	1.215.492.630,00	12.366.741,00
13	Batu Bantayo	1.261.885.934,00	18.277.031,00	370.988.460,00	311.812.000,00	202.370.000,00	245.954.940,00	126.000.000,00	0,00	1.257.125.400,00	23.037.565,00
14	Padango	942.406.852,00	15.526.316,00	381.338.821,00	300.909.500,00	53.808.000,00	123.463.200,00	86.400.000,00	0,00	945.919.521,00	12.013.647,00
15	Tontulow Utara	1.004.560.077,00	5.187.513,00	384.262.562,00	330.177.000,00	59.601.600,00	148.625.000,00	71.700.000,00	0,00	994.366.162,00	15.381.428,00
16	Dalapuli Timur	1.041.343.077,00	9.061.731,00	378.718.543,00	455.819.190,00	49.417.600,00	78.600.000,00	68.400.000,00	0,00	1.030.955.333,00	19.449.475,00
17	Dalapuli Barat	1.040.992.725,00	44.608.728,00	409.704.592,00	336.776.500,00	57.950.000,00	167.297.000,00	68.400.000,00	22.500.000,00	1.062.628.092,00	22.973.361,00
18	Buko Utara	1.015.119.342,00	9.884.427,00	407.353.000,00	261.876.250,00	95.400.000,00	129.112.000,00	126.000.000,00	0,00	1.019.741.250,00	5.262.519,00
19	Tombulung Timur	912.407.023,00	35.992.094,00	410.911.749,00	213.845.704,00	77.655.000,00	91.210.000,00	118.800.000,00	0,00	912.422.453,00	35.976.664,00
20	Tombulung Pantai	1.091.513.136,00	23.067.100,00	357.237.700,00	343.275.364,00	103.855.000,00	180.750.000,00	121.500.000,00	0,00	1.106.618.064,00	7.962.172,00
21	Tuntung Timur	993.925.972,00	62.469.015,00	378.635.540,00	304.756.000,00	50.000.000,00	131.800.000,00	162.000.000,00	0,00	1.027.191.540,00	29.203.447,00
22	Duini	1.104.404.202,00	4.436.052,00	399.346.568,00	454.165.663,82	49.900.000,00	123.679.962,18	68.400.000,00	0,00	1.095.492.194,00	13.348.060,00
	Jumlah	23.608.445.474,00	453.512.211,00	8.401.098.974,00	7.867.539.074,82	1.759.871.315,00	3.343.164.637,18	2.292.000.000,00	22.500.000,00	23.686.174.001,00	375.783.684,00
	Jumlah Total	117.280.626.144,00	2.533.871.603,00	41.175.775.930,00	38.962.224.563,82	8.198.240.045,00	16.446.329.064,18	12.512.219.000,00	259.894.620,00	117.554.683.223,00	2.259.814.524,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	BLT Desa Triwulan I	BLT Desa Triwulan II	BLT Desa Triwulan III	BLT Desa Triwulan IV	Dana Desa Reguler Thp I 40' %	Dana Desa Reguler Thp. II 40' %	Dana Desa Reguler Thp III 20' %	Dana Desa Tambahan	Realisasi Dana Desa 2023
Sangkub	1 Sangkub I	758.195.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	227.458.500,00	227.458.500,00	224.078.000,00	0,00	758.195.000,00
	2 Busisingo	708.184.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	212.455.200,00	212.455.200,00	211.273.600,00	0,00	708.184.000,00
	3 Sangtombolang	703.136.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	210.940.800,00	210.940.800,00	173.254.400,00	0,00	703.136.000,00
	4 Tombolango	693.845.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	208.153.500,00	208.153.500,00	198.338.000,00	0,00	693.845.000,00
	5 Pangkusa	712.289.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	213.686.700,00	213.686.700,00	212.915.600,00	0,00	712.289.000,00
	6 Sangkub II	709.677.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	212.903.100,00	212.903.100,00	211.870.800,00	0,00	709.677.000,00
	7 Sidodadi	756.464.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	226.939.200,00	226.939.200,00	223.385.600,00	0,00	756.464.000,00
	8 Sampiro	781.337.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	195.999.600,00	195.999.600,00	192.932.800,00	128.005.000,00	781.337.000,00
	9 Sangkub III	683.824.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	205.147.200,00	205.147.200,00	158.329.600,00	0,00	683.824.000,00
	10 Busisingo Utara	583.790.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	175.137.000,00	175.137.000,00	172.316.000,00	0,00	583.790.000,00
	11 Apeng Sembeka	1.099.122.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	60.300.000,00	291.335.100,00	291.335.100,00	147.246.800,00	128.005.000,00	1.099.122.000,00
	12 Suka Makmur	594.767.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	178.430.100,00	178.430.100,00	176.706.800,00	0,00	594.767.000,00
	13 Sangkub Timur	665.387.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	199.616.100,00	199.616.100,00	183.354.800,00	0,00	665.387.000,00
	14 Monompia	607.220.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	182.166.000,00	182.166.000,00	170.888.000,00	0,00	607.220.000,00
	15 Mokusato	607.334.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	182.200.200,00	182.200.200,00	181.733.600,00	0,00	607.334.000,00
	16 Sangkub IV	734.196.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	220.258.800,00	220.258.800,00	218.078.400,00	0,00	734.196.000,00
Jumlah		11.398.767.000,00	350.100.000,00	350.100.000,00	350.100.000,00	350.100.000,00	3.342.827.100,00	3.342.827.100,00	3.056.702.800,00	256.010.000,00	11.398.767.000,00
Bintauna	1 Huntuk	845.092.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	215.126.100,00	215.126.100,00	110.434.800,00	128.005.000,00	845.092.000,00
	2 Mome	768.737.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	230.621.100,00	230.621.100,00	116.694.800,00	0,00	768.737.000,00
	3 Kuhanga	716.712.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	215.013.600,00	215.013.600,00	142.684.800,00	0,00	716.712.000,00
	4 Padang	650.631.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	195.189.300,00	195.189.300,00	109.052.400,00	0,00	650.631.000,00
	5 Pimpi	696.782.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	209.034.600,00	209.034.600,00	105.912.800,00	0,00	696.782.000,00
	6 Bunia	677.586.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	27.900.000,00	203.275.800,00	203.275.800,00	159.434.400,00	0,00	677.586.000,00

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	BLT Desa Triwulan I	BLT Desa Triwulan II	BLT Desa Triwulan III	BLT Desa Triwulan IV	Dana Desa Reguler Thp I 40' %	Dana Desa Reguler Thp. II 40' %	Dana Desa Reguler Thp III 20' %	Dana Desa Tambahan	Realisasi Dana Desa 2023
	7 Talaga Bintauna	636.088.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	190.826.400,00	190.826.400,00	146.435.200,00	0,00	636.088.000,00
	8 Batulintik	696.085.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	208.825.500,00	208.825.500,00	130.834.000,00	0,00	696.085.000,00
	9 Bintauna Pantai	703.629.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	211.088.700,00	211.088.700,00	155.451.600,00	0,00	703.629.000,00
	10 Minanga	731.126.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	219.337.800,00	219.337.800,00	184.450.400,00	0,00	731.126.000,00
	11 Kopi	753.873.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	226.161.900,00	226.161.900,00	211.549.200,00	0,00	753.873.000,00
	12 Voa'a	825.190.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	209.155.500,00	209.155.500,00	106.074.000,00	128.005.000,00	825.190.000,00
	13 Bunong	819.733.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	207.518.400,00	207.518.400,00	103.891.200,00	128.005.000,00	819.733.000,00
	14 Padang Barat	930.886.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	279.265.800,00	279.265.800,00	185.154.400,00	0,00	930.886.000,00
	15 Vahuta	699.272.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	209.781.600,00	209.781.600,00	139.308.800,00	0,00	699.272.000,00
Jumlah		11.151.422.000,00	549.900.000,00	549.900.000,00	549.900.000,00	549.900.000,00	3.230.222.100,00	3.230.222.100,00	2.107.362.800,00	384.015.000,00	11.151.422.000,00
Bolangitang Timur	1 Mokoditek	674.798.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	202.439.400,00	202.439.400,00	151.119.200,00	0,00	674.798.000,00
	2 Numuka	691.512.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	207.453.600,00	207.453.600,00	186.604.800,00	0,00	691.512.000,00
	3 Saleo	849.418.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	216.423.900,00	216.423.900,00	212.965.200,00	128.005.000,00	849.418.000,00
	4 Bohabak I	692.306.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	207.691.800,00	207.691.800,00	104.122.400,00	0,00	692.306.000,00
	5 Bohabak II	970.467.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	291.140.100,00	291.140.100,00	290.986.800,00	0,00	970.467.000,00
	6 Binjeita	663.645.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	199.093.500,00	199.093.500,00	157.458.000,00	0,00	663.645.000,00
	7 Biontong	811.526.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	205.056.300,00	205.056.300,00	169.008.400,00	128.005.000,00	811.526.000,00
	8 Biontong I	975.796.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	254.337.300,00	254.337.300,00	130.316.400,00	128.005.000,00	975.796.000,00
	9 Biontong II	898.576.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	269.572.800,00	269.572.800,00	269.430.400,00	0,00	898.576.000,00
	10 Binuanga	975.898.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	254.367.900,00	254.367.900,00	130.357.200,00	128.005.000,00	975.898.000,00
	11 Bohabak III	857.824.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	218.945.700,00	218.945.700,00	111.927.600,00	128.005.000,00	857.824.000,00
	12 Bohabak IV	1.067.357.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	281.805.600,00	281.805.600,00	235.340.800,00	128.005.000,00	1.067.357.000,00
	13 Binjeita I	689.556.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	206.866.800,00	206.866.800,00	200.222.400,00	0,00	689.556.000,00
	14 Binjeita II	660.246.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	198.073.800,00	198.073.800,00	195.698.400,00	0,00	660.246.000,00
	15 Mokoditek I	691.451.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	207.435.300,00	207.435.300,00	204.580.400,00	0,00	691.451.000,00
	16 Lipu Bogu	671.156.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	201.346.800,00	201.346.800,00	200.062.400,00	0,00	671.156.000,00

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	BLT Desa Triwulan I	BLT Desa Triwulan II	BLT Desa Triwulan III	BLT Desa Triwulan IV	Dana Desa Reguler Thp I 40' %	Dana Desa Reguler Thp. II 40' %	Dana Desa Reguler Thp III 20' %	Dana Desa Tambahan	Realisasi Dana Desa 2023
	17 Binuni	646.186.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	193.855.800,00	193.855.800,00	186.474.400,00	0,00	646.186.000,00
	18 Tanjung Labuo	711.205.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	213.361.500,00	213.361.500,00	165.682.000,00	0,00	711.205.000,00
	19 Nagara	650.536.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	195.160.800,00	195.160.800,00	191.814.400,00	0,00	650.536.000,00
	20 Saleo I	720.006.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	216.001.800,00	216.001.800,00	190.802.400,00	0,00	720.006.000,00
Jumlah		15.569.465.000,00	558.900.000,00	558.900.000,00	558.900.000,00	558.900.000,00	4.440.430.500,00	4.440.430.500,00	3.684.974.000,00	768.030.000,00	15.569.465.000,00
Bolangitang Barat	1 Paku	768.337.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	230.501.100,00	230.501.100,00	184.934.800,00	0,00	768.337.000,00
	2 Ollot	715.788.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	214.736.400,00	214.736.400,00	178.315.200,00	0,00	715.788.000,00
	3 Sonuo	752.261.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	225.678.300,00	225.678.300,00	113.704.400,00	0,00	752.261.000,00
	4 Jambusarang	672.675.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	201.802.500,00	201.802.500,00	168.270.000,00	0,00	672.675.000,00
	5 Talaga Tomoagu	813.253.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	205.574.400,00	205.574.400,00	202.099.200,00	128.005.000,00	813.253.000,00
	6 Bolangitang	630.549.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	189.164.700,00	189.164.700,00	97.419.600,00	0,00	630.549.000,00
	7 Langi	670.489.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	201.146.700,00	201.146.700,00	102.595.600,00	0,00	670.489.000,00
	8 Iyok	1.021.943.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	268.181.400,00	268.181.400,00	134.375.200,00	128.005.000,00	1.021.943.000,00
	9 Tote	638.162.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	191.448.600,00	191.448.600,00	96.864.800,00	0,00	638.162.000,00
	10 Wakat	649.011.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	194.703.300,00	194.703.300,00	191.204.400,00	0,00	649.011.000,00
	11 Ollot I	694.540.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	208.362.000,00	208.362.000,00	105.016.000,00	0,00	694.540.000,00
	12 Ollot II	919.244.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	275.773.200,00	275.773.200,00	274.097.600,00	0,00	919.244.000,00
	13 Bolangitang I	750.651.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	186.793.800,00	186.793.800,00	169.858.400,00	128.005.000,00	750.651.000,00
	14 Bolangitang II	931.890.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	279.567.000,00	279.567.000,00	142.356.000,00	0,00	931.890.000,00
	15 Talaga Bolangitang Barat	694.180.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	208.254.000,00	208.254.000,00	104.872.000,00	0,00	694.180.000,00
	16 Tanjung Buaya	615.095.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	184.528.500,00	184.528.500,00	94.838.000,00	0,00	615.095.000,00
	17 Keimanga	718.010.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	215.403.000,00	215.403.000,00	179.204.000,00	0,00	718.010.000,00
	18 Paku Selatan	763.683.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	47.700.000,00	229.104.900,00	229.104.900,00	114.673.200,00	0,00	763.683.000,00
Jumlah		13.419.761.000,00	639.900.000,00	639.900.000,00	639.900.000,00	639.900.000,00	3.910.723.800,00	3.910.723.800,00	2.654.698.400,00	384.015.000,00	13.419.761.000,00
Kaidipang	1 Solo	744.865.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00	223.459.500,00	223.459.500,00	146.746.000,00	0,00	744.865.000,00
	2 Boroko	822.401.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	208.318.800,00	208.318.800,00	104.958.400,00	128.005.000,00	822.401.000,00

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	BLT Desa Triwulan I	BLT Desa Triwulan II	BLT Desa Triwulan III	BLT Desa Triwulan IV	Dana Desa Reguler Thp I 40' %	Dana Desa Reguler Thp. II 40' %	Dana Desa Reguler Thp III 20' %	Dana Desa Tambahan	Realisasi Dana Desa 2023
	3 Bigo	787.283.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	197.783.400,00	197.783.400,00	101.711.200,00	128.005.000,00	787.283.000,00
	4 Kuala	938.409.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	281.522.700,00	281.522.700,00	278.163.600,00	0,00	938.409.000,00
	5 Pontak	667.522.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	200.256.600,00	200.256.600,00	187.808.800,00	0,00	667.522.000,00
	6 Inomunga	774.781.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	194.032.800,00	194.032.800,00	100.310.400,00	128.005.000,00	774.781.000,00
	7 Komus II	629.862.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	188.958.600,00	188.958.600,00	187.144.800,00	0,00	629.862.000,00
	8 Boroko Timur	891.307.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	228.990.600,00	228.990.600,00	211.720.800,00	128.005.000,00	891.307.000,00
	9 Kuala Utara	737.417.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	221.225.100,00	221.225.100,00	186.966.800,00	0,00	737.417.000,00
	10 Gihang	705.024.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	211.507.200,00	211.507.200,00	199.209.600,00	0,00	705.024.000,00
	11 Boroko Utara	786.785.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	197.634.000,00	197.634.000,00	177.112.000,00	128.005.000,00	786.785.000,00
	12 Bigo Selatan	710.634.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	44.100.000,00	213.190.200,00	213.190.200,00	107.853.600,00	0,00	710.634.000,00
	13 Soligir	686.204.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	205.861.200,00	205.861.200,00	191.681.600,00	0,00	686.204.000,00
	14 Inomunga Utara	638.470.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	191.541.000,00	191.541.000,00	172.588.000,00	0,00	638.470.000,00
	15 Komus II Timur	882.272.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	264.681.600,00	264.681.600,00	262.908.800,00	0,00	882.272.000,00
	Jumlah	11.403.236.000,00	422.100.000,00	422.100.000,00	422.100.000,00	422.100.000,00	3.228.963.300,00	3.228.963.300,00	2.616.884.400,00	640.025.000,00	11.403.236.000,00
Pinogaluman	1 Komus I	887.792.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	266.337.600,00	266.337.600,00	265.116.800,00	0,00	887.792.000,00
	2 Tuntung	897.991.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	269.397.300,00	269.397.300,00	135.996.400,00	0,00	897.991.000,00
	3 Batutajam	630.400.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	189.120.000,00	189.120.000,00	147.760.000,00	0,00	630.400.000,00
	4 Dalapuli	673.549.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	202.064.700,00	202.064.700,00	201.019.600,00	0,00	673.549.000,00
	5 Buko	650.324.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	195.097.200,00	195.097.200,00	116.129.600,00	0,00	650.324.000,00
	6 Dengi	588.991.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	176.697.300,00	176.697.300,00	116.796.400,00	0,00	588.991.000,00
	7 Tombulang	637.939.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	191.381.700,00	191.381.700,00	190.375.600,00	0,00	637.939.000,00
	8 Tontulow	886.230.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	265.869.000,00	265.869.000,00	264.492.000,00	0,00	886.230.000,00
	9 Kayuogu	680.121.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	204.036.300,00	204.036.300,00	189.248.400,00	0,00	680.121.000,00
	10 Tanjung Sidupa	899.352.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	269.805.600,00	269.805.600,00	222.940.800,00	0,00	899.352.000,00
	11 Buko Selatan	782.241.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	196.270.800,00	196.270.800,00	189.694.400,00	128.005.000,00	782.241.000,00
	12 Busato	854.006.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	217.800.300,00	217.800.300,00	211.200.400,00	128.005.000,00	854.006.000,00

Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	BLT Desa Triwulan I	BLT Desa Triwulan II	BLT Desa Triwulan III	BLT Desa Triwulan IV	Dana Desa Reguler Thp I 40' %	Dana Desa Reguler Thp. II 40' %	Dana Desa Reguler Thp III 20' %	Dana Desa Tambahan	Realisasi Dana Desa 2023
	13 Batu Bantayo	941.062.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	282.318.600,00	282.318.600,00	250.424.800,00	0,00	941.062.000,00
	14 Padango	621.411.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	186.423.300,00	186.423.300,00	162.164.400,00	0,00	621.411.000,00
	15 Tontulow Utara	638.401.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	191.520.300,00	191.520.300,00	183.360.400,00	0,00	638.401.000,00
	16 Dalapuli Timur	679.572.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	203.871.600,00	203.871.600,00	203.428.800,00	0,00	679.572.000,00
	17 Dalapuli Barat	674.010.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	202.203.000,00	202.203.000,00	201.204.000,00	0,00	674.010.000,00
	18 Buko Utara	658.311.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	197.493.300,00	197.493.300,00	137.324.400,00	0,00	658.311.000,00
	19 Tombulang Timur	549.582.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	164.874.600,00	164.874.600,00	101.032.800,00	0,00	549.582.000,00
	20 Tombulang Pantai	746.742.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	185.621.100,00	185.621.100,00	125.094.800,00	128.005.000,00	746.742.000,00
	21 Tuntung Timur	658.872.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	197.661.600,00	197.661.600,00	101.548.800,00	0,00	658.872.000,00
	22 Duini	747.027.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	185.706.600,00	185.706.600,00	179.208.800,00	128.005.000,00	747.027.000,00
	Jumlah	15.983.926.000,00	573.300.000,00	573.300.000,00	573.300.000,00	573.300.000,00	4.641.571.800,00	4.641.571.800,00	3.895.562.400,00	512.020.000,00	15.983.926.000,00
	Jumlah Total	78.926.577.000,00	3.094.200.000,00	3.094.200.000,00	3.094.200.000,00	3.094.200.000,00	22.794.738.600,00	22.794.738.600,00	18.016.184.800,00	2.944.115.000,00	78.926.577.000,00



LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
I	Kecamatan Sangkub										
1	Sangkub I	758.195.000,00	12.534.200,00	25.979.750,00	411.983.100,00	76.300.000,00	161.660.500,00	79.200.000,00	0,00	755.123.350,00	15.605.850,00
2	Busisingo	708.184.000,00	1.640.116,00	16.630.400,00	447.702.500,00	82.980.000,00	85.197.980,00	72.000.000,00	0,00	704.510.880,00	5.313.236,00
3	Sangtombolang	703.136.000,00	74.332.353,00	32.500.000,00	340.002.920,00	67.824.080,00	143.104.000,00	108.000.000,00	0,00	691.431.000,00	86.037.353,00
4	Tombolango	693.845.000,00	1.716.609,00	20.720.000,00	528.181.750,00	65.255.000,00	0,00	79.200.000,00	0,00	693.356.750,00	2.204.859,00
5	Pangkusa	712.289.000,00	59.958.282,00	29.286.000,00	579.220.456,00	60.000.000,00	12.680.000,00	72.000.000,00	0,00	753.186.456,00	19.060.826,00
6	Sangkub II	709.677.000,00	42.154.516,00	16.320.000,00	405.035.000,00	73.350.000,00	136.900.000,00	72.000.000,00	0,00	703.605.000,00	48.226.516,00
7	Sidodadi	756.464.000,00	23.111.661,00	22.689.920,00	562.283.391,00	96.183.201,00	11.752.000,00	79.200.000,00	0,00	772.108.512,00	7.467.149,00
8	Sampiro	781.337.000,00	2.701.000,00	19.550.000,00	630.007.000,00	53.550.000,00	11.400.000,00	68.400.000,00	0,00	782.907.000,00	1.131.000,00
9	Sangkub III	683.824.000,00	331.707,00	18.960.000,00	340.754.750,00	48.082.357,00	158.245.700,00	115.200.000,00	0,00	681.242.807,00	2.912.900,00
10	Busisingo Utara	583.790.000,00	1.229.168,00	21.410.000,00	307.949.500,00	61.160.000,00	129.852.000,00	61.200.000,00	0,00	581.571.500,00	3.447.668,00
11	Apeng Sembeka	1.099.122.000,00	358.100,00	12.150.000,00	420.309.500,00	54.121.000,00	367.385.000,00	241.200.000,00	0,00	1.095.165.500,00	4.314.600,00
12	Suka Makmur	594.767.000,00	419.850,00	24.098.450,00	335.008.990,00	51.000.000,00	120.000.000,00	61.200.000,00	0,00	591.307.440,00	3.879.410,00
13	Sangkub Timur	665.387.000,00	9.644.166,00	20.486.610,00	317.928.926,00	66.000.000,00	157.476.475,00	82.800.000,00	0,00	644.692.011,00	30.339.155,00
14	Monompia	607.220.000,00	1.800.183,00	18.216.600,00	310.854.500,00	67.427.500,00	137.999.400,00	72.000.000,00	0,00	606.498.000,00	2.522.183,00
15	Mokusato	607.334.000,00	1.086.517,00	22.746.000,00	352.883.500,00	48.100.000,00	120.675.000,00	61.200.000,00	0,00	605.604.500,00	2.816.017,00
16	Sangkub IV	734.196.000,00	0,00	16.945.380,00	395.101.000,00	80.684.500,00	151.335.000,00	75.600.000,00	0,00	719.665.880,00	14.530.120,00
	Jumlah	11.398.767.000,00	233.018.428,00	338.689.110,00	6.685.206.783,00	1.052.017.638,00	1.905.663.055,00	1.400.400.000,00	0,00	11.381.976.586,00	249.808.842,00
II	Kecamatan Bintauna										
1	Huntuk	845.092.000,00	200.080,00	28.365.000,00	290.310.500,00	45.000.000,00	300.795.000,00	176.400.000,00	0,00	840.870.500,00	4.421.580,00
2	Mome	768.737.000,00	400.000,00	27.500.000,00	383.579.000,00	39.280.000,00	120.220.000,00	190.800.000,00	0,00	761.379.000,00	7.758.000,00
3	Kuhanga	716.712.000,00	550.000,00	23.900.000,00	263.423.877,00	77.400.000,00	187.977.400,00	144.000.000,00	0,00	696.701.277,00	20.560.723,00
4	Padang	650.631.000,00	0,00	28.964.000,00	267.496.000,00	46.350.000,00	149.966.000,00	151.200.000,00	0,00	643.976.000,00	6.655.000,00
5	Pimpi	696.782.000,00	1.417.706,00	24.189.800,00	269.330.956,00	78.172.500,00	141.300.000,00	172.800.000,00	0,00	685.793.256,00	12.406.450,00
6	Bunia	677.586.000,00	1.748.000,00	19.752.000,00	330.201.000,00	79.800.000,00	135.680.000,00	111.600.000,00	0,00	677.033.000,00	2.301.000,00

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
7	Talaga Bintauna	636.088.000,00	1.368.664,00	14.248.000,00	227.606.760,00	69.600.000,00	208.517.600,00	108.000.000,00	0,00	627.972.360,00	9.484.304,00
8	Batulintik	696.085.000,00	8.113.596,00	21.806.550,00	309.755.350,00	71.400.000,00	151.255.000,00	147.000.000,00	0,00	701.216.900,00	2.981.696,00
9	Bintauna Pantai	703.629.000,00	1.050.000,00	21.024.000,00	338.836.250,00	62.400.000,00	156.183.880,00	126.000.000,00	0,00	704.444.130,00	234.870,00
10	Minanga	731.126.000,00	22.183.593,00	29.671.780,00	401.478.000,00	65.400.000,00	146.225.200,00	108.000.000,00	0,00	750.774.980,00	2.534.613,00
11	Kopi	753.873.000,00	15.689.175,00	9.339.000,00	112.168.500,00	383.980.000,00	159.029.000,00	90.000.000,00	0,00	754.516.500,00	15.045.675,00
12	Voa'a	825.190.000,00	452.500,00	18.461.000,00	218.854.500,00	72.208.644,00	341.830.000,00	172.800.000,00	0,00	824.154.144,00	1.488.356,00
13	Bunong	819.733.000,00	1.966.500,00	20.500.000,00	207.366.000,00	72.000.000,00	345.848.060,00	172.800.000,00	0,00	818.514.060,00	3.185.440,00
14	Padang Barat	930.886.000,00	5.479.300,00	26.394.750,00	441.450.550,00	59.250.000,00	186.200.000,00	187.200.000,00	0,00	900.495.300,00	35.870.000,00
15	Vahuta	699.272.000,00	460.000,00	30.060.750,00	308.399.250,00	50.400.000,00	144.000.000,00	140.400.000,00	0,00	673.260.000,00	26.472.000,00
Jumlah		11.151.422.000,00	61.079.114,00	344.176.630,00	4.370.256.493,00	1.272.641.144,00	2.875.027.140,00	2.199.000.000,00	0,00	11.061.101.407,00	151.399.707,00
III	Kecamatan Bolangitang Timur										
1	Mokoditek	674.798.000,00	58.295,00	19.475.000,00	292.332.400,00	59.600.000,00	182.259.600,00	118.800.000,00	0,00	672.467.000,00	2.389.295,00
2	Nunuka	691.512.000,00	3.721.951,00	46.078.373,00	363.881.951,00	105.050.270,00	70.650.000,00	90.000.000,00	0,00	675.660.594,00	19.573.357,00
3	Saleo	849.418.000,00	6.131.307,00	22.777.700,00	671.783.870,00	68.988.000,00	0,00	75.600.000,00	0,00	839.149.570,00	16.399.737,00
4	Bohabak I	692.306.000,00	4.050.000,00	49.640.880,00	265.710.595,00	56.000.000,00	138.737.700,00	172.800.000,00	0,00	682.889.175,00	13.466.825,00
5	Bohabak II	970.467.000,00	5.265.733,00	48.920.000,00	559.614.000,00	51.000.000,00	214.000.000,00	97.200.000,00	0,00	970.734.000,00	4.998.733,00
6	Binjeita	663.645.000,00	16.155.000,00	28.295.150,00	329.884.050,00	72.600.000,00	132.740.000,00	108.000.000,00	0,00	671.519.200,00	8.280.800,00
7	Biontong	811.526.000,00	0,00	56.438.630,00	250.731.370,00	74.550.000,00	322.506.000,00	104.400.000,00	0,00	808.626.000,00	2.900.000,00
8	Biontong I	975.796.000,00	95.000,00	24.902.000,00	458.479.250,00	87.455.000,00	178.262.500,00	208.800.000,00	0,00	957.898.750,00	17.992.250,00
9	Biontong II	898.576.000,00	9.782.578,00	50.121.000,00	534.243.178,00	44.350.000,00	179.710.000,00	90.000.000,00	0,00	898.424.178,00	9.934.400,00
10	Binuanga	975.898.000,00	2.463.926,00	50.486.000,00	616.146.470,00	42.600.000,00	58.500.000,00	208.800.000,00	0,00	976.532.470,00	1.829.456,00
11	Bohabak III	857.824.000,00	611.562,00	29.982.000,00	331.700.000,00	57.600.000,00	258.120.000,00	180.000.000,00	0,00	857.402.000,00	1.033.562,00
12	Bohabak IV	1.067.357.000,00	758.182,00	33.457.160,00	457.867.406,00	188.736.000,00	247.135.400,00	140.400.000,00	0,00	1.067.595.966,00	519.216,00
13	Binjeita I	689.556.000,00	32.573,00	40.601.700,00	322.562.200,00	118.344.000,00	79.000.000,00	75.600.000,00	50.000.000,00	686.107.900,00	3.480.673,00
14	Binjeita II	660.246.000,00	2.400.000,00	23.498.000,00	369.313.500,00	59.859.000,00	141.355.120,00	68.400.000,00	0,00	662.425.620,00	220.380,00
15	Mokoditek I	691.451.000,00	3.420.000,00	20.243.000,00	429.975.100,00	49.200.000,00	85.000.000,00	72.000.000,00	30.000.000,00	686.418.100,00	8.452.900,00
16	Lipu Bogu	671.156.000,00	626.000,00	17.573.000,00	349.189.625,00	49.500.000,00	172.125.562,00	68.400.000,00	0,00	656.788.187,00	14.993.813,00
17	Binuni	646.186.000,00	114.629,00	36.966.800,00	350.715.049,00	43.500.000,00	141.900.000,00	72.000.000,00	0,00	645.081.849,00	1.218.780,00
18	Tanjung Labou	711.205.000,00	4.800.200,00	32.396.957,00	404.790.000,00	54.000.000,00	100.000.000,00	118.800.000,00	0,00	709.986.957,00	6.018.243,00

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
19	Nagara	650.536.000,00	1.632.000,00	19.516.080,00	435.471.320,00	119.079.000,00	9.000.000,00	68.400.000,00	0,00	651.466.400,00	701.600,00
20	Saleo I	720.006.000,00	150.000,00	34.559.200,00	367.278.500,00	72.000.000,00	143.800.000,00	97.200.000,00	0,00	714.837.700,00	5.318.300,00
Jumlah		15.569.465.000,00	62.268.936,00	685.928.630,00	8.161.669.834,00	1.474.011.270,00	2.854.801.882,00	2.235.600.000,00	80.000.000,00	15.492.011.616,00	139.722.320,00
IV	Kecamatan Bolangitang Barat										
1	Paku	768.337.000,00	5.217.500,00	43.618.000,00	379.606.890,00	67.685.000,00	157.120.000,00	122.400.000,00	0,00	770.429.890,00	3.124.610,00
2	Ollot	715.788.000,00	20.046.600,00	19.423.710,00	398.879.000,00	51.000.000,00	131.797.500,00	108.000.000,00	0,00	709.100.210,00	26.734.390,00
3	Sonuo	752.261.000,00	14.985.808,00	27.610.900,00	256.155.650,00	99.600.000,00	182.060.500,00	187.200.000,00	0,00	752.627.050,00	14.619.758,00
4	Jambusarang	672.675.000,00	4.430.000,00	16.533.500,00	348.434.900,00	69.600.000,00	134.535.000,00	100.800.000,00	0,00	669.903.400,00	7.201.600,00
5	Talaga Tomoagu	813.253.000,00	12.886.500,00	18.318.000,00	332.925.000,00	51.600.000,00	243.262.000,00	169.200.000,00	0,00	815.305.000,00	10.834.500,00
6	Bolangitang	630.549.000,00	16.511.550,00	26.428.000,00	265.635.800,00	45.600.000,00	125.791.500,00	154.800.000,00	0,00	618.255.300,00	28.805.250,00
7	Langi	670.489.000,00	10.525.000,00	28.182.670,00	278.811.780,00	54.800.000,00	141.585.300,00	165.600.000,00	0,00	668.979.750,00	12.034.250,00
8	Iyok	1.021.943.000,00	0,00	26.818.140,00	486.188.900,00	54.100.000,00	230.148.260,00	223.200.000,00	0,00	1.020.455.300,00	1.487.700,00
9	Tote	638.162.000,00	1.707.185,00	29.519.400,00	403.257.600,00	36.600.000,00	0,00	158.400.000,00	0,00	627.777.000,00	12.092.185,00
10	Wakat	649.011.000,00	37.015.800,00	19.012.000,00	186.175.500,00	85.102.000,00	300.157.220,00	68.400.000,00	0,00	658.846.720,00	27.180.080,00
11	Ollot I	694.540.000,00	4.061.313,00	11.550.000,00	300.224.000,00	48.600.000,00	152.086.800,00	172.800.000,00	0,00	685.260.800,00	13.340.513,00
12	Ollot II	919.244.000,00	2.500.000,00	19.991.400,00	550.660.937,00	58.200.000,00	185.745.200,00	93.600.000,00	0,00	908.197.537,00	13.546.463,00
13	Bolangitang I	750.651.000,00	17.859.163,00	15.063.400,00	399.439.000,00	78.000.000,00	138.135.000,00	79.200.000,00	0,00	709.837.400,00	58.672.763,00
14	Bolangitang II	931.890.000,00	16.787.650,00	21.022.000,00	410.097.785,00	57.174.110,00	200.831.090,00	230.400.000,00	0,00	919.524.985,00	29.152.665,00
15	Talaga	694.180.000,00	31.171.068,00	20.825.400,00	293.414.000,00	57.600.000,00	142.646.000,00	172.800.000,00	0,00	687.285.400,00	38.065.668,00
16	Tanjung Buaya	615.095.000,00	6.123.500,00	14.866.850,00	264.954.400,00	51.600.000,00	131.147.500,00	151.200.000,00	0,00	613.768.750,00	7.449.750,00
17	Keimanga	718.010.000,00	8.940.000,00	20.995.957,00	407.407.700,00	42.600.000,00	143.602.000,00	108.000.000,00	0,00	722.605.657,00	4.344.343,00
18	Paku Selatan	763.683.000,00	25.566.050,00	21.330.500,00	427.937.000,00	72.350.000,00	67.714.000,00	190.800.000,00	0,00	780.131.500,00	9.117.550,00
Jumlah		13.419.761.000,00	236.334.687,00	401.109.827,00	6.390.205.842,00	1.081.811.110,00	2.808.364.870,00	2.656.800.000,00	0,00	13.338.291.649,00	317.804.038,00
V	Kecamatan Kaidipang										
1	Solo	744.865.000,00	228.000,00	18.767.300,00	204.180.500,00	207.168.550,00	148.973.000,00	151.200.000,00	0,00	730.289.350,00	14.803.650,00
2	Boroko	822.401.000,00	20.445.000,00	36.710.900,00	326.893.500,00	112.028.200,00	172.480.000,00	172.800.000,00	11.594.620,00	832.507.220,00	10.338.780,00
3	Bigo	787.283.000,00	4.604.130,00	19.558.707,00	342.624.263,00	94.000.000,00	169.715.600,00	165.500.000,00	0,00	791.398.570,00	488.560,00
4	Kuala	938.409.000,00	480.000,00	25.215.670,00	472.542.059,00	85.800.000,00	253.858.880,00	97.200.000,00	0,00	934.616.609,00	4.272.391,00

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
5	Pontak	667.522.000,00	25.880.800,00	28.836.000,00	370.411.320,00	62.951.200,00	135.852.400,00	79.200.000,00	0,00	677.250.920,00	16.151.880,00
6	Inomunga	774.781.000,00	25.937.500,00	18.830.000,00	424.360.300,00	55.800.000,00	128.496.000,00	170.619.000,00	0,00	798.105.300,00	2.613.200,00
7	Komus II	629.862.000,00	0,00	18.850.000,00	363.653.400,00	51.600.000,00	126.000.000,00	64.800.000,00	0,00	624.903.400,00	4.958.600,00
8	Boroko Timur	891.307.000,00	32.417.600,00	38.629.000,00	269.307.000,00	113.200.000,00	301.369.600,00	93.600.000,00	105.000.000,00	921.105.600,00	2.619.000,00
9	Kuala Utara	737.417.000,00	32.351.350,00	20.847.600,00	342.022.696,00	72.600.000,00	205.900.000,00	108.000.000,00	0,00	749.370.296,00	20.398.054,00
10	Gihang	705.024.000,00	40.365.000,00	20.794.120,00	389.348.755,00	74.400.000,00	164.880.000,00	82.800.000,00	0,00	732.222.875,00	13.166.125,00
11	Boroko Utara	786.785.000,00	32.001.092,00	17.600.000,00	412.000.000,00	63.650.000,00	166.961.000,00	86.400.000,00	0,00	746.611.000,00	72.175.092,00
12	Bigo Selatan	710.634.000,00	12.440.982,00	21.276.000,00	287.560.045,00	84.100.000,00	152.837.000,00	176.400.000,00	0,00	722.173.045,00	901.937,00
13	Soligir	686.204.000,00	3.187.441,00	27.283.000,00	359.577.350,00	61.500.000,00	154.050.000,00	82.800.000,00	0,00	685.210.350,00	4.181.091,00
14	Inomunga Utara	638.470.000,00	10.622.545,00	15.588.400,00	299.219.995,00	54.653.150,00	137.724.000,00	82.800.000,00	40.800.000,00	630.785.545,00	18.307.000,00
15	Komus II Timur	882.272.000,00	644.849,00	26.468.000,00	480.521.800,00	45.558.450,00	240.210.000,00	90.000.000,00	0,00	882.758.250,00	158.599,00
Jumlah		11.403.236.000,00	241.606.289,00	355.254.697,00	5.344.222.983,00	1.239.009.550,00	2.659.307.480,00	1.704.119.000,00	157.394.620,00	11.459.308.330,00	185.533.959,00
VI	Kecamatan Pinogaluman										
1	Komus I	887.792.000,00	123.000,00	16.133.000,00	562.227.560,00	40.200.000,00	177.545.000,00	90.000.000,00	0,00	886.105.560,00	1.809.440,00
2	Tuntung	897.991.000,00	5.181.405,00	27.900.009,00	402.691.750,00	51.600.000,00	193.545.000,00	223.200.000,00	0,00	898.936.759,00	4.235.646,00
3	Batutajam	630.400.000,00	1.027.000,00	18.312.000,00	382.526.062,00	48.000.000,00	71.600.000,00	104.400.000,00	0,00	624.838.062,00	6.588.938,00
4	Dalapuli	673.549.000,00	25.059.350,00	45.265.400,00	385.608.996,00	52.900.000,00	135.000.000,00	68.400.000,00	0,00	687.174.396,00	11.433.954,00
5	Buko	650.324.000,00	16.954.089,00	19.174.500,00	257.223.500,00	97.807.000,00	131.100.000,00	144.000.000,00	0,00	649.305.000,00	17.973.089,00
6	Dengi	588.991.000,00	3.331.860,00	15.050.000,00	261.755.200,00	59.601.600,00	131.345.000,00	118.800.000,00	0,00	586.551.800,00	5.771.060,00
7	Tombulang	637.939.000,00	412.750,00	63.196.420,00	329.742.760,00	69.600.000,00	109.295.800,00	64.800.000,00	0,00	636.634.980,00	1.716.770,00
8	Tontulow	886.230.000,00	7.502.920,00	17.778.000,00	480.727.465,00	82.800.000,00	206.130.000,00	90.000.000,00	0,00	877.435.465,00	16.297.455,00
9	Kayuogu	680.121.000,00	8.914.000,00	64.028.400,00	317.216.000,00	85.501.000,00	137.000.000,00	82.800.000,00	0,00	686.545.400,00	2.489.600,00
10	Tanjung Sidupa	899.352.000,00	0,00	14.580.560,00	277.047.900,00	218.573.300,00	237.497.735,00	136.800.000,00	0,00	884.499.495,00	14.852.505,00
11	Buko Selatan	782.241.000,00	6.490.484,00	46.000.000,00	348.151.229,00	70.800.000,00	247.414.000,00	72.000.000,00	0,00	784.365.229,00	4.366.255,00
12	Busato	854.006.000,00	7.080.435,00	22.149.430,00	544.218.000,00	60.600.000,00	145.200.000,00	79.200.000,00	0,00	851.367.430,00	9.719.005,00
13	Batu Bantayo	941.062.000,00	7.660.000,00	48.931.860,00	311.812.000,00	202.370.000,00	245.954.940,00	126.000.000,00	0,00	935.068.800,00	13.653.200,00
14	Padango	621.411.000,00	4.928.184,00	56.104.280,00	300.909.500,00	53.808.000,00	123.463.200,00	86.400.000,00	0,00	620.684.980,00	5.654.204,00
15	Tontulow Utara	638.401.000,00	190.200,00	16.830.000,00	329.577.000,00	59.601.600,00	148.625.000,00	71.700.000,00	0,00	626.333.600,00	12.257.600,00
16	Dalapuli Timur	679.572.000,00	2.722.410,00	20.034.000,00	455.819.190,00	49.417.600,00	78.600.000,00	68.400.000,00	0,00	672.270.790,00	10.023.620,00

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Penerimaan Pembiayaan	Realisasi					Pengeluaran Pembiayaan	Total Realisasi	Silpa Tahun 2023
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Desa			
17	Dalapuli Barat	674.010.000,00	24.277.005,00	31.658.000,00	336.776.500,00	53.150.000,00	167.297.000,00	68.400.000,00	22.500.000,00	679.781.500,00	18.505.505,00
18	Buko Utara	658.311.000,00	5.626.000,00	47.213.000,00	261.876.250,00	95.400.000,00	129.112.000,00	126.000.000,00	0,00	659.601.250,00	4.335.750,00
19	Tombulang Timur	549.582.000,00	6.905.646,00	52.168.400,00	213.845.704,00	68.976.000,00	91.210.000,00	118.800.000,00	0,00	545.000.104,00	11.487.542,00
20	Tombulang Pantai	746.742.000,00	12.106.643,00	20.010.000,00	343.275.364,00	87.070.000,00	180.750.000,00	121.500.000,00	0,00	752.605.364,00	6.243.279,00
21	Tuntung Timur	658.872.000,00	22.430.284,00	17.364.400,00	304.756.000,00	50.000.000,00	131.800.000,00	162.000.000,00	0,00	665.920.400,00	15.381.884,00
22	Duini	747.027.000,00	1.259.795,00	43.941.660,00	450.790.663,00	49.900.000,00	123.679.963,00	68.400.000,00	0,00	736.712.286,00	11.574.509,00
Jumlah		15.983.926.000,00	170.183.460,00	723.823.319,00	7.858.574.593,00	1.707.676.100,00	3.343.164.638,00	2.292.000.000,00	22.500.000,00	15.947.738.650,00	206.370.810,00
Jumlah Total		78.926.577.000,00	1.004.490.914,00	2.848.982.213,00	38.810.136.528,00	7.827.166.812,00	16.446.329.065,00	12.487.919.000,00	259.894.620,00	78.680.428.238,00	1.250.639.676,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DSAFTAR PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I DAN II TAHUN 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 100 %	Pagu ADD 60' %	Pagu ADD Pilsang	Pagu ADD 40' %	Realisasi ADD Tahap I 60' %	Pagu ADD Pilsang	Realisasi ADD Tahap II 40' %	Realisasi ADD Tahap I dan II
Kecamatan Sangkub	1 Sangkub I	370.350.000,00	220.500.000,00	0,00	149.850.000,00	220.500.000,00	0,00	149.850.000,00	370.350.000,00
	2 Busisingo	342.860.000,00	204.006.000,00	0,00	138.854.000,00	204.006.000,00	0,00	138.854.000,00	342.860.000,00
	3 Sangtombolang	408.140.000,00	234.174.000,00	15.000.000,00	158.966.000,00	234.174.000,00	15.000.000,00	158.966.000,00	408.140.000,00
	4 Tombolango	368.440.000,00	219.354.000,00	0,00	149.086.000,00	219.354.000,00	0,00	149.086.000,00	368.440.000,00
	5 Pangkusa	341.840.000,00	203.394.000,00	0,00	138.446.000,00	203.394.000,00	0,00	138.446.000,00	341.840.000,00
	6 Sangkub II	366.180.000,00	217.998.000,00	0,00	148.182.000,00	217.998.000,00	0,00	148.182.000,00	366.180.000,00
	7 Sidodadi	317.410.000,00	188.736.000,00	0,00	128.674.000,00	188.736.000,00	0,00	128.674.000,00	317.410.000,00
	8 Sampiro	330.160.000,00	187.386.000,00	15.000.000,00	127.774.000,00	187.386.000,00	15.000.000,00	127.774.000,00	330.160.000,00
	9 Sangkub III	339.560.000,00	202.026.000,00	0,00	137.534.000,00	202.026.000,00	0,00	137.534.000,00	339.560.000,00
	10 Busisingo Utara	342.990.000,00	204.084.000,00	0,00	138.906.000,00	204.084.000,00	0,00	138.906.000,00	342.990.000,00
	11 Apeng Sembeka	315.130.000,00	187.368.000,00	0,00	127.762.000,00	187.368.000,00	0,00	127.762.000,00	315.130.000,00
	12 Suka Makmur	341.490.000,00	203.184.000,00	0,00	138.306.000,00	203.184.000,00	0,00	138.306.000,00	341.490.000,00
	13 Sangkub Timur	342.500.000,00	203.790.000,00	0,00	138.710.000,00	203.790.000,00	0,00	138.710.000,00	342.500.000,00
	14 Monompia	339.490.000,00	201.984.000,00	0,00	137.506.000,00	201.984.000,00	0,00	137.506.000,00	339.490.000,00
	15 Mokusato	315.130.000,00	187.368.000,00	0,00	127.762.000,00	187.368.000,00	0,00	127.762.000,00	315.130.000,00
	16 Sangkub IV	359.130.000,00	204.768.000,00	15.000.000,00	139.362.000,00	204.768.000,00	15.000.000,00	139.362.000,00	359.130.000,00
Jumlah		5.540.800.000	3.270.120.000	45.000.000	2.225.680.000	3.270.120.000	45.000.000	2.225.680.000	5.540.800.000
Kecamatan Bintauna	1 Huntuk	356.150.000,00	202.980.000,00	15.000.000,00	138.170.000,00	202.980.000,00	15.000.000,00	138.170.000,00	356.150.000,00
	2 Mome	341.600.000,00	203.250.000,00	0,00	138.350.000,00	203.250.000,00	0,00	138.350.000,00	341.600.000,00
	3 Kuhanga	370.270.000,00	220.452.000,00	0,00	149.818.000,00	220.452.000,00	0,00	149.818.000,00	370.270.000,00
	4 Padang	365.710.000,00	217.716.000,00	0,00	147.994.000,00	217.716.000,00	0,00	147.994.000,00	365.710.000,00
	5 Pimpi	340.520.000,00	202.602.000,00	0,00	137.918.000,00	202.602.000,00	0,00	137.918.000,00	340.520.000,00
	6 Bunia	368.890.000,00	219.624.000,00	0,00	149.266.000,00	219.624.000,00	0,00	149.266.000,00	368.890.000,00
	7 Talaga Bintauna	368.440.000,00	219.354.000,00	0,00	149.086.000,00	219.354.000,00	0,00	149.086.000,00	368.440.000,00
	8 Batulintik	369.800.000,00	220.170.000,00	0,00	149.630.000,00	220.170.000,00	0,00	149.630.000,00	369.800.000,00
	9 Bintauna Pantai	361.350.000,00	206.100.000,00	15.000.000,00	140.250.000,00	206.100.000,00	15.000.000,00	140.250.000,00	361.350.000,00
	10 Minanga	344.680.000,00	205.098.000,00	0,00	139.582.000,00	205.098.000,00	0,00	139.582.000,00	344.680.000,00
	11 Kopi	343.000.000,00	204.090.000,00	0,00	138.910.000,00	204.090.000,00	0,00	138.910.000,00	343.000.000,00
	12 Voa'a	366.600.000,00	218.250.000,00	0,00	148.350.000,00	218.250.000,00	0,00	148.350.000,00	366.600.000,00
	13 Bunong	369.260.000,00	219.846.000,00	0,00	149.414.000,00	219.846.000,00	0,00	149.414.000,00	369.260.000,00
	14 Padang Barat	383.060.000,00	219.126.000,00	15.000.000,00	148.934.000,00	219.126.000,00	15.000.000,00	148.934.000,00	383.060.000,00
	15 Vahuta	341.100.000,00	202.950.000,00	0,00	138.150.000,00	202.950.000,00	0,00	138.150.000,00	341.100.000,00
Jumlah		5.390.430.000	3.181.608.000	45.000.000	2.163.822.000	3.181.608.000	45.000.000	2.163.822.000	5.390.430.000
Kecamatan Bolangitang Timur	1 Mokoditek	403.870.000,00	231.612.000,00	15.000.000,00	157.258.000,00	231.612.000,00	15.000.000,00	157.258.000,00	403.870.000,00
	2 Nunuka	363.810.000,00	216.576.000,00	0,00	147.234.000,00	216.576.000,00	0,00	147.234.000,00	363.810.000,00
	3 Saleo	368.020.000,00	219.102.000,00	0,00	148.918.000,00	219.102.000,00	0,00	148.918.000,00	368.020.000,00
	4 Bohabak I	418.830.000,00	249.588.000,00	0,00	169.242.000,00	249.588.000,00	0,00	169.242.000,00	418.830.000,00
	5 Bohabak II	363.490.000,00	216.384.000,00	0,00	147.106.000,00	216.384.000,00	0,00	147.106.000,00	363.490.000,00
	6 Binjeita	393.390.000,00	234.324.000,00	0,00	159.066.000,00	234.324.000,00	0,00	159.066.000,00	393.390.000,00
	7 Biontong	386.580.000,00	221.238.000,00	15.000.000,00	150.342.000,00	221.238.000,00	15.000.000,00	150.342.000,00	386.580.000,00
	8 Biontong I	412.350.000,00	236.700.000,00	15.000.000,00	160.650.000,00	236.700.000,00	15.000.000,00	160.650.000,00	412.350.000,00
	9 Biontong II	339.490.000,00	201.984.000,00	0,00	137.506.000,00	201.984.000,00	0,00	137.506.000,00	339.490.000,00
	10 Binuanga	362.850.000,00	216.000.000,00	0,00	146.850.000,00	216.000.000,00	0,00	146.850.000,00	362.850.000,00
	11 Bohabak III	365.620.000,00	217.662.000,00	0,00	147.958.000,00	217.662.000,00	0,00	147.958.000,00	365.620.000,00
	12 Bohabak IV	414.050.000,00	246.720.000,00	0,00	167.330.000,00	246.720.000,00	0,00	167.330.000,00	414.050.000,00
	13 Binjeita I	391.170.000,00	232.992.000,00	0,00	158.178.000,00	232.992.000,00	0,00	158.178.000,00	391.170.000,00

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 100 %	Pagu ADD 60' %	Pagu ADD Pilsang	Pagu ADD 40' %	Realisasi ADD Tahap I 60' %	Pagu ADD Pilsang	Realisasi ADD Tahap II 40' %	Realisasi ADD Tahap I dan II
	14 Binjeita II	364.180.000,00	216.798.000,00	0,00	147.382.000,00	216.798.000,00	0,00	147.382.000,00	364.180.000,00
	15 Mokoditek I	402.630.000,00	230.868.000,00	15.000.000,00	156.762.000,00	230.868.000,00	15.000.000,00	156.762.000,00	402.630.000,00
	16 Lipu Bogu	363.870.000,00	216.612.000,00	0,00	147.258.000,00	216.612.000,00	0,00	147.258.000,00	363.870.000,00
	17 Binuni	364.040.000,00	216.714.000,00	0,00	147.326.000,00	216.714.000,00	0,00	147.326.000,00	364.040.000,00
	18 Tanjung Labuo	363.090.000,00	216.144.000,00	0,00	146.946.000,00	216.144.000,00	0,00	146.946.000,00	363.090.000,00
	19 Nagara	362.850.000,00	216.000.000,00	0,00	146.850.000,00	216.000.000,00	0,00	146.850.000,00	362.850.000,00
	20 Saleo I	381.710.000,00	218.316.000,00	15.000.000,00	148.394.000,00	218.316.000,00	15.000.000,00	148.394.000,00	381.710.000,00
Jumlah		7.585.890.000	4.472.334.000	75.000.000	3.038.556.000	4.472.334.000	75.000.000	3.038.556.000	7.585.890.000
Kecamatan Bolangitang Barat	1 Paku	340.920.000,00	202.842.000,00	0,00	138.078.000,00	202.842.000,00	0,00	138.078.000,00	340.920.000,00
	2 Ollot	341.120.000,00	202.962.000,00	0,00	138.158.000,00	202.962.000,00	0,00	138.158.000,00	341.120.000,00
	3 Sonuo	411.470.000,00	236.172.000,00	15.000.000,00	160.298.000,00	236.172.000,00	15.000.000,00	160.298.000,00	411.470.000,00
	4 Jambusarang	368.070.000,00	219.132.000,00	0,00	148.938.000,00	219.132.000,00	0,00	148.938.000,00	368.070.000,00
	5 Talaga Tomoagu	341.030.000,00	202.908.000,00	0,00	138.122.000,00	202.908.000,00	0,00	138.122.000,00	341.030.000,00
	6 Bolangitang	340.190.000,00	202.404.000,00	0,00	137.786.000,00	202.404.000,00	0,00	137.786.000,00	340.190.000,00
	7 Langi	353.910.000,00	201.636.000,00	15.000.000,00	137.274.000,00	201.636.000,00	15.000.000,00	137.274.000,00	353.910.000,00
	8 Iyok	341.597.900,00	203.248.740,00	0,00	138.349.160,00	203.248.740,00	0,00	138.349.160,00	341.597.900,00
	9 Tote	338.340.000,00	201.294.000,00	0,00	137.046.000,00	201.294.000,00	0,00	137.046.000,00	338.340.000,00
	10 Wakat	364.920.000,00	217.242.000,00	0,00	147.678.000,00	217.242.000,00	0,00	147.678.000,00	364.920.000,00
	11 Ollot I	340.100.000,00	202.350.000,00	0,00	137.750.000,00	202.350.000,00	0,00	137.750.000,00	340.100.000,00
	12 Ollot II	389.870.000,00	232.212.000,00	0,00	157.658.000,00	232.212.000,00	0,00	157.658.000,00	389.870.000,00
	13 Bolangitang I	366.750.000,00	218.340.000,00	0,00	148.410.000,00	218.340.000,00	0,00	148.410.000,00	366.750.000,00
	14 Bolangitang II	341.090.000,00	202.944.000,00	0,00	138.146.000,00	202.944.000,00	0,00	138.146.000,00	341.090.000,00
	15 Talaga Bolangitang Barat	341.940.000,00	203.454.000,00	0,00	138.486.000,00	203.454.000,00	0,00	138.486.000,00	341.940.000,00
	16 Tanjung Buaya	336.990.000,00	200.484.000,00	0,00	136.506.000,00	200.484.000,00	0,00	136.506.000,00	336.990.000,00
	17 Keimanga	342.140.000,00	203.574.000,00	0,00	138.566.000,00	203.574.000,00	0,00	138.566.000,00	342.140.000,00
	18 Paku Selatan	359.700.000,00	205.110.000,00	15.000.000,00	139.590.000,00	205.110.000,00	15.000.000,00	139.590.000,00	359.700.000,00
Jumlah		6.360.147.900	3.758.308.740	45.000.000	2.556.839.160	3.758.308.740	45.000.000	2.556.839.160	6.360.147.900
Kecamatan Kaidipang	1 Solo	349.620.000,00	199.062.000,00	15.000.000,00	135.558.000,00	199.062.000,00	15.000.000,00	135.558.000,00	349.620.000,00
	2 Boroko	382.220.000,00	227.622.000,00	0,00	154.598.000,00	227.622.000,00	0,00	154.598.000,00	382.220.000,00
	3 Bigo	341.880.000,00	203.418.000,00	0,00	138.462.000,00	203.418.000,00	0,00	138.462.000,00	341.880.000,00
	4 Kuala	342.400.000,00	203.730.000,00	0,00	138.670.000,00	203.730.000,00	0,00	138.670.000,00	342.400.000,00
	5 Pontak	339.000.000,00	201.690.000,00	0,00	137.310.000,00	201.690.000,00	0,00	137.310.000,00	339.000.000,00
	6 Inomunga	337.710.000,00	200.916.000,00	0,00	136.794.000,00	200.916.000,00	0,00	136.794.000,00	337.710.000,00
	7 Komus II	333.490.000,00	198.384.000,00	0,00	135.106.000,00	198.384.000,00	0,00	135.106.000,00	333.490.000,00
	8 Boroko Timur	350.970.000,00	208.872.000,00	0,00	142.098.000,00	208.872.000,00	0,00	142.098.000,00	350.970.000,00
	9 Kuala Utara	347.150.000,00	206.580.000,00	0,00	140.570.000,00	206.580.000,00	0,00	140.570.000,00	347.150.000,00
	10 Gihang	362.180.000,00	215.598.000,00	0,00	146.582.000,00	215.598.000,00	0,00	146.582.000,00	362.180.000,00
	11 Boroko Utara	338.690.000,00	201.504.000,00	0,00	137.186.000,00	201.504.000,00	0,00	137.186.000,00	338.690.000,00
	12 Bigo Selatan	355.280.000,00	202.458.000,00	15.000.000,00	137.822.000,00	202.458.000,00	15.000.000,00	137.822.000,00	355.280.000,00
	13 Soligir	327.390.000,00	185.724.000,00	15.000.000,00	126.666.000,00	185.724.000,00	15.000.000,00	126.666.000,00	327.390.000,00
	14 Inomunga Utara	326.130.000,00	184.968.000,00	15.000.000,00	126.162.000,00	184.968.000,00	15.000.000,00	126.162.000,00	326.130.000,00
	15 Komus II Timur	324.130.000,00	183.768.000,00	15.000.000,00	125.362.000,00	183.768.000,00	15.000.000,00	125.362.000,00	324.130.000,00
Jumlah		5.158.240.000	3.024.294.000	75.000.000	2.058.946.000	3.024.294.000	75.000.000	2.058.946.000	5.158.240.000
Kecamatan Pinogaluman	1 Komus I	313.630.000,00	186.468.000,00	0,00	127.162.000,00	186.468.000,00	0,00	127.162.000,00	313.630.000,00
	2 Tuntung	353.440.000,00	201.354.000,00	15.000.000,00	137.086.000,00	201.354.000,00	15.000.000,00	137.086.000,00	353.440.000,00
	3 Batutajam	337.990.000,00	201.084.000,00	0,00	136.906.000,00	201.084.000,00	0,00	136.906.000,00	337.990.000,00
	4 Dalapuli	352.990.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	352.990.000,00
	5 Buko	367.420.000,00	218.742.000,00	0,00	148.678.000,00	218.742.000,00	0,00	148.678.000,00	367.420.000,00
	6 Dengi	337.990.000,00	201.084.000,00	0,00	136.906.000,00	201.084.000,00	0,00	136.906.000,00	337.990.000,00

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD 100 %	Pagu ADD 60' %	Pagu ADD Pilsang	Pagu ADD 40' %	Realisasi ADD Tahap I 60' %	Pagu ADD Pilsang	Realisasi ADD Tahap II 40' %	Realisasi ADD Tahap I dan II
	7 Tombulang	338.590.000,00	201.444.000,00	0,00	137.146.000,00	201.444.000,00	0,00	137.146.000,00	338.590.000
	8 Tontulow	355.450.000,00	202.560.000,00	15.000.000,00	137.890.000,00	202.560.000,00	15.000.000,00	137.890.000,00	355.450.000
	9 Kayuogu	313.690.000,00	186.504.000,00	0,00	127.186.000,00	186.504.000,00	0,00	127.186.000,00	313.690.000
	10 Tanjung Sidupa	338.990.000,00	201.684.000,00	0,00	137.306.000,00	201.684.000,00	0,00	137.306.000,00	338.990.000
	11 Buko Selatan	314.720.000,00	187.122.000,00	0,00	127.598.000,00	187.122.000,00	0,00	127.598.000,00	314.720.000
	12 Busato	340.490.000,00	202.584.000,00	0,00	137.906.000,00	202.584.000,00	0,00	137.906.000,00	340.490.000
	13 Batu Bantayo	314.710.000,00	187.116.000,00	0,00	127.594.000,00	187.116.000,00	0,00	127.594.000,00	314.710.000
	14 Padango	313.858.800,00	186.468.000,00	0,00	127.390.800,00	186.468.000,00	0,00	127.390.800,00	313.858.800
	15 Tontulow Utara	354.370.000,00	201.912.000,00	15.000.000,00	137.458.000,00	201.912.000,00	15.000.000,00	137.458.000,00	354.370.000
	16 Dalapuli Timur	353.340.000,00	201.294.000,00	15.000.000,00	137.046.000,00	201.294.000,00	15.000.000,00	137.046.000,00	353.340.000
	17 Dalapuli Barat	353.810.000,00	201.576.000,00	15.000.000,00	137.234.000,00	201.576.000,00	15.000.000,00	137.234.000,00	353.810.000
	18 Buko Utara	352.990.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	352.990.000
	19 Tombulang Timur	352.990.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	352.990.000
	20 Tombulang Pantai	328.630.000,00	186.468.000,00	15.000.000,00	127.162.000,00	186.468.000,00	15.000.000,00	127.162.000,00	328.630.000
	21 Tuntung Timur	330.330.000,00	187.488.000,00	15.000.000,00	127.842.000,00	187.488.000,00	15.000.000,00	127.842.000,00	330.330.000
	22 Duini	352.990.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	201.084.000,00	15.000.000,00	136.906.000,00	352.990.000
	Jumlah	7.473.408.800,00	4.347.288.000,00	165.000.000,00	2.961.120.800,00	4.347.288.000,00	165.000.000,00	2.961.120.800,00	7.473.408.800,00
	Jumlah Total	37.508.916.700,00	22.053.952.740,00	450.000.000,00	15.004.963.960,00	22.053.952.740,00	450.000.000,00	15.004.963.960,00	37.508.916.700,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI DANA BOP PAUD TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tk Negeri Flamboyan (Bintauna)	0,00	20.400.000,00	0,00	18.150.000,00	2.250.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
2	Tk Negeri Tanjung Buaya (Bolangitang Barat)	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
3	Tk Negeri Pembina (Kaidipang)	0,00	27.000.000,00	0,00	14.590.000,00	12.410.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
4	Tk Negeri Pugu-Pugu (Bolangitang Barat)	0,00	14.400.000,00	0,00	13.650.000,00	750.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
5	Tk Dahlia (Pinogaluman)	0,00	12.000.000,00	0,00	9.600.000,00	2.400.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
6	Tk Negeri Terpadu Al Multazam	0,00	46.200.000,00	0,00	42.960.000,00	3.240.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00
7	Tk An Nur Pinogaluman	0,00	42.000.000,00	0,00	39.520.000,00	2.480.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
8	Tk Negeri Al Zikra (Pinogaluman)	0,00	16.200.000,00	0,00	13.500.000,00	2.700.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
9	Tk Negeri Mustika Srikandi (Pinogaluman)	0,00	14.400.000,00	0,00	13.900.000,00	500.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
10	Tk Negeri Beringin Jaya (Bolangitang Timur)	0,00	13.800.000,00	0,00	13.350.000,00	450.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
11	Tk Negeri Tuwo Kona (Bolangitang Timur)	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
12	Tk Negeri Anggrek (Bolangitang Timur)	0,00	13.800.000,00	0,00	11.560.000,00	2.240.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
13	Tk Negeri Mardhatillah (Sangkub)	0,00	11.400.000,00	0,00	10.400.000,00	1.000.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00
14	Tk Negeri Terpadu Pertiwi (Sangkub)	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
15	Tk Negeri Perintis (Bolangitang Barat)	0,00	6.600.000,00	0,00	5.925.000,00	675.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
16	Tk Negeri Berlian (Bolangitang Barat)	0,00	28.200.000,00	0,00	25.100.000,00	3.100.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00
17	Tk Negeri Citra Lestari (Bolangitang Timur)	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00
18	Tk Negeri Flamboyan (Bolangitang Timur)	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
19	Tk Negeri Bersehati (Bolangitang Timur)	0,00	19.800.000,00	0,00	18.300.000,00	1.500.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
20	Tk Negeri Terpadu Budi Luhur (Sangkub)	0,00	16.200.000,00	0,00	13.700.000,00	2.500.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
21	Tk Terpadu Delima (Sangkub)	4.314.000,00	7.086.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
22	Tk Negeri Terpadu Permata Bunda (Sangkub)	0,00	18.600.000,00	0,00	17.762.500,00	837.500,00	18.600.000,00	0,00	0,00
23	Tk Inagolang (Bolangitang Barat)	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00
24	Tk Negeri Satap Boroko	0,00	9.000.000,00	0,00	7.691.000,00	1.309.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
25	Tk Pelangi	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
26	Tk Negeri Satap Bunong	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
27	Skb Bintauna	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Jumlah		4.314.000,00	394.956.000,00	0,00	354.428.500,00	40.341.500,00	394.770.000,00	0,00	4.500.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI DANA BOP KESETARAAN TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)						
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Belanja Hibah	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SPNF-SKB Bolangitang	0,00	219.000.000,00	0,00	269.875.000,00	23.175.000,00	0,00	293.050.000,00	0,00	0,00
2	SKB Kaidipang	0,00	181.600.000,00	0,00	244.625.000,00	12.300.000,00	0,00	256.925.000,00	0,00	0,00
3	SPNF SKB Bintauna	0,00	276.000.000,00	0,00	169.300.000,00	31.375.000,00	0,00	200.675.000,00	0,00	0,00
4	SKB Pinogaluman	0,00	280.200.000,00	0,00	195.825.000,00	10.325.000,00	0,00	206.150.000,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	956.800.000,00	0,00	879.625.000,00	77.175.000,00	0,00	956.800.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
REKAPITULASI BELANJA HIBAH BOSP TAHUN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	
				Belanja	Sisa
1	2	3	4	5	6
1	SD IT Waladun Sholeh	0,00	82.170.000,00	82.170.000,00	0,00
2	SD Advent Bohabak	0,00	50.490.000,00	50.490.000,00	0,00
3	SD Kristen XII Sumba	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00
4	KB Flamboyan	0,00	10.155.000,00	10.155.000,00	0,00
5	SPS TPQ Al-Husna	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
6	KB AL-Muhajirin	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
7	KB Impian	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
8	TK Baturapa Langi	0,00	4.728.000,00	4.728.000,00	0,00
9	KB Mutiara Bunda	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
10	PAUD Terpadu Qurataayun	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
11	PAUD Terpadu Teratai Vahuta	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
12	TK Beringin Bigo	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
13	KB Sumber Harapan	0,00	8.122.000,00	8.122.000,00	0,00
14	TK Lagada	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
15	KB Fajar Lestari	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
16	KB Mutiara Bangsa	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
17	TK Siti Hawa Buko	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
18	PAUD KB Angrek Tombolango	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
19	KB Siti Khadijah	0,00	14.608.000,00	14.608.000,00	0,00
20	KB Mawar	0,00	14.702.000,00	14.702.000,00	0,00
21	TK Sabilil Huda Tontulow Utara	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
22	KB Al-Khairaat	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
23	TK Tunas Harapan Binjeita I	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
24	TK Kartina Dalapuli	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
25	TK Al-Khairaat Jambusarang	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
26	PAUD Terpadu Monompia	0,00	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00
27	PAUD Terpadu Mososandova	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
28	KB Kasih Ibu	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
29	KB Idaman	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
30	TK Mokapoq Ollot	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
31	TK AL-Muttaqin	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
32	KB Harapan Bunda	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
33	PAUD Terpadu Glory	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
34	KB Nurul Huda	0,00	18.414.000,00	18.414.000,00	0,00
35	PAUD Terpadu Cendana	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
36	KB Bukit Baturapa	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
37	KB Teratai Putih	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
38	TK Kartini Talaga	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
39	KB Flamboyan	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
40	KB Anugerah Indah	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
41	KB Al-Zikra	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
42	PAUD Terpadu Mekar	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
43	PAUD Terpadu Pniel	0,00	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00

1	Nama Sekolah	Saldo Awal	(Rp)	Belanja	Sisa
1	2	3	4	5	6
44	TK Melati	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
45	TK Soligir Pontak	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
46	KB Mekar	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
47	PAUD Terpadu Mutiara	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
48	KB Angrek Iyok	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
49	TK Tanjung Pinang	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
50	PAUD Terpadu Darudjannah	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
51	KB Baru Mekar	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
52	TK Nurul Yaqin Dengi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
53	KB Kartina	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
54	PAUD KB Mardhatillah	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
55	KB Dahlia	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
56	KB Angrek	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
57	PAUD Pertiwi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
58	KB Berlian	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
59	KB Al Ikhlas	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
60	TK Mawar Tontulow	0,00	14.256.000,00	14.256.000,00	0,00
61	KB Permata Hati	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
62	TK Beringin Bolangitang	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
63	KB Kasih Bunda	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
64	PAUD Terpadu Kamboja	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
65	KB Lestari	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
66	KB Lagada Kecil	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
67	KB Sabilil Huda	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
68	KB Gembira	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
69	TK Al-Khairaat	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
70	TK Al'Quran Ollot	0,00	6.501.000,00	6.501.000,00	0,00
71	TK Baru Mekar	0,00	8.886.000,00	8.886.000,00	0,00
72	PAUD Terpadu Sengkanaung	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
73	TK Islam Terpadu Waladun Sholeh	0,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
74	PAUD Terpadu Akasia	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
75	PAUD Terpadu AdeIrma	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
76	SPS TPQ Ar Rahman	0,00	8.316.000,00	8.316.000,00	0,00
77	KB Impian	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
78	TK Dotinggulo Sonuo	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
79	KB Kasih Ibu	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
80	KB Kasih Bunda	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
81	TK Agape Mokoditek	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
82	PAUD Terpadu Madinatul Ilmi	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
83	PAUD Terpadu Harapan Kita	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
84	TK Kartini Sangkub I	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
85	TK Kamagi	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
86	KB Lumba-Lumba	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
87	KB Tunas Bangsa	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
88	TK Perintis	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
89	KB Mototabiana	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
90	KB Siti Hawa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
91	TK Swadaya	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
92	KB PAUD Iloponu	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
93	PAUD Terpadu Melati	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00

1	2	3	(Rp)	Belanja	Sisa
1	2	3	4	5	6
94	TK AL-Khairaat	0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00
95	KB Kasih Bunda	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
96	PAUD Kasih Ibu	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
97	PAUD KB Mutiara Ibu	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
98	KB Nurjannah	0,00	6.553.000,00	6.553.000,00	0,00
99	KB Dahlia	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
100	KB Dewi Sartika	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
101	TK Anggrek Tombolango	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
102	PAUD Terpadu Sumber Kasih	0,00	10.432.000,00	10.432.000,00	0,00
103	TK Buisisnggo	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
104	KB Al-Haq	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
105	PAUD KB Anggrek	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
106	KB Cahaya	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
107	TK Sangato Nunuka	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
108	TK Dewi Sartika Bunia	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
109	KB Theodora	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
110	TK Maligugu Tomoagu	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
111	TK AL-Muhajirin Busato	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
112	PAUD Terpadu Ceria	0,00	4.524.000,00	4.524.000,00	0,00
113	PAUD KB Mawar	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
114	KB Tunas Harapan	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
115	KB An-Nur	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
116	KB Al-Muttaqin	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
117	KB Cempaka	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
118	KB Cinta Kasih Bunda	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
119	KB Alhidayah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
120	KB Anna	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
121	PAUD KB Dewi Sartika	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
122	KB Merpati Tombulang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
123	KB Nurul Yaqin	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
124	PAUD Terpadu Jabalnur	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
125	TK AL-Hijrah	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
126	PKBM Makahengkeng	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
127	PAUD Terpadu Kenanga	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
128	KB Cempaka	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
129	PAUD KB Budi Mania	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
130	TK Kasih Bunda	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
131	PAUD Terpadu Melati	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
132	PAUD Terpadu Alqur'an Alkhairaat	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
133	TK Mawar Biontong	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
134	TK Tunas Harapan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
135	KB Kasih Ibu	0,00	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00
136	TK AL-Ikhlash	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
137	TK Merpati	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
138	TK Kartini Kuala	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
139	KB Mustika Ibu	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
140	KB Salsyabila	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
141	KB Sukamaju	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
142	KB Mekar Indah	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
143	TK Tunas Harapan	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
144	TK AL-Hudayah Duini	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
145	PAUD KB Junior	0,00	6.853.000,00	6.853.000,00	0,00
146	TK Kasih Ibu	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
147	PKBM Makahengkeng	0,00	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00
Jumlah		0,00	2.042.935.000,00	2.042.935.000,00	0,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	SD Negeri 1 Pinogaluman (SD Negeri 1 Buko)	0,00	118.800.000,00	0,00	67.258.000,00	51.542.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	
2	SD Negeri 2 Pinogaluman (SD Negeri 1 Tuntung)	0,00	102.462.300,00	0,00	50.511.100,00	51.951.200,00	102.462.300,00	0,00	0,00	
3	SD Negeri 3 Pinogaluman (SD Negeri 1 Tontulow)	0,00	55.440.000,00	0,00	38.649.000,00	16.791.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00	
4	SD Negeri 4 Pinogaluman (SD Negeri Komus I)	114.500,00	73.595.500,00	0,00	27.650.900,00	46.059.100,00	73.710.000,00	0,00	0,00	
5	SD Negeri 5 Pinogaluman (SD Negeri Kayuogou)	3.829.500,00	77.350.500,00	0,00	46.535.000,00	33.960.000,00	80.495.000,00	0,00	685.000,00	
6	SD Negeri 6 Pinogaluman (SD Negeri 1 Dalapuli)	0,00	58.410.000,00	0,00	40.603.000,00	17.807.000,00	58.410.000,00	0,00	0,00	
7	SD Negeri 7 Pinogaluman (SD Negeri 1 Batutajami)	0,00	28.710.000,00	0,00	19.205.000,00	9.505.000,00	28.710.000,00	0,00	0,00	
8	SD Negeri 8 Pinogaluman (SD Negeri 1 Tombulang)	0,00	116.820.000,00	0,00	67.536.200,00	42.495.000,00	110.031.200,00	0,00	6.788.800,00	
9	SD Negeri 9 Pinogaluman (SD Negeri 1 Batubantayo)	0,00	72.000.000,00	0,00	52.456.000,00	19.544.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
10	SD Negeri 10 Pinogaluman (SD Negeri 2 Tontulow)	0,00	90.540.000,00	0,00	50.653.000,00	39.887.000,00	90.540.000,00	0,00	0,00	
11	SD Negeri 11 Pinogaluman (SD Negeri 1 Busato)	65.000,00	87.839.811,00	0,00	69.807.811,00	18.032.000,00	87.839.811,00	0,00	65.000,00	
12	SD Negeri 12 Pinogaluman (SD Negeri 2 Tombulang)	0,00	61.380.000,00	0,00	37.165.500,00	24.214.500,00	61.380.000,00	0,00	0,00	
13	SD Negeri 13 Pinogaluman (SD Negeri 1 Tanjung Sidupa)	0,00	106.730.000,00	0,00	36.124.000,00	70.606.000,00	106.730.000,00	0,00	0,00	

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
14	SD Negeri 14 Pinogaluman (SD Negeri 2 Dalapuli)	0,00	74.250.000,00	0,00	44.877.000,00	29.373.000,00	74.250.000,00	0,00	0,00
15	SD Negeri 15 Pinogaluman (SD Negeri 1 Dengi)	0,00	33.660.000,00	0,00	23.610.000,00	10.050.000,00	33.660.000,00	0,00	0,00
16	SD Negeri 16 Pinogaluman (SD Negeri 1 Tuntung Timur)	0,00	49.500.000,00	0,00	32.861.000,00	16.639.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
17	SD Negeri 1 Kaidipang (SD Negeri 1 Boroko Timur)	97.683,00	161.002.317,00	0,00	103.015.500,00	58.084.500,00	161.100.000,00	0,00	0,00
18	SD Negeri 2 Kaidipang (SD Negeri 2 Boroko Timur)	474,00	131.399.526,00	0,00	103.216.798,00	28.007.000,00	131.223.798,00	0,00	176.202,00
19	SD Negeri 3 Kaidipang (SD Negeri 1 Kuala)	0,00	66.060.000,00	0,00	59.066.500,00	6.993.000,00	66.059.500,00	0,00	500,00
20	SD Negeri 4 Kaidipang (SD Negeri 3 Boroko Timur)	2.500,00	71.280.000,00	0,00	52.469.000,00	18.811.000,00	71.280.000,00	0,00	2.500,00
21	SD Negeri 5 Kaidipang (SD Negeri 1 Bigo)	0,00	128.700.000,00	0,00	63.391.000,00	64.894.000,00	128.285.000,00	0,00	415.000,00
22	SD Negeri 6 Kaidipang (SD Negeri 1 Inomunga)	19.198,00	55.420.802,00	0,00	48.008.769,00	6.360.600,00	54.369.369,00	0,00	1.070.631,00
23	SD Negeri 7 Kaidipang (SD Negeri 2 Bigo)	2.235.900,00	110.624.100,00	0,00	92.608.820,00	18.255.500,00	110.864.320,00	0,00	1.995.680,00
24	SD Negeri 8 Kaidipang (SD Negeri 1 Kuala Utara)	0,00	138.060.000,00	0,00	79.338.185,00	57.299.313,00	136.637.498,00	0,00	1.422.502,00
25	SD Negeri 9 Kaidipang (SD Negeri 2 Kuala)	0,00	77.220.000,00	0,00	63.240.500,00	13.967.500,00	77.208.000,00	0,00	12.000,00
26	SD Negeri 10 Kaidipang (SD Negeri 1 Sokoputa)	2.000,00	28.708.000,00	0,00	25.512.000,00	2.855.000,00	28.367.000,00	0,00	343.000,00
27	SD Negeri 11 Kaidipang (SD Negeri 1 Pontak)	15.397,00	81.164.603,00	0,00	58.806.000,00	21.774.000,00	80.580.000,00	0,00	600.000,00
28	SD Negeri 12 Kaidipang (SD Negeri 2 Inomunga)	0,00	48.510.000,00	0,00	38.336.000,00	10.174.000,00	48.510.000,00	0,00	0,00
29	SD Negeri 13 Kaidipang (SD Negeri 1 Boroko)	1.070.000,00	144.530.199,00	0,00	84.278.566,00	59.973.500,00	144.252.066,00	0,00	1.348.133,00
30	SD Negeri 14 Kaidipang (SD Negeri 1 Komus II)	0,00	72.270.000,00	0,00	57.222.464,00	12.257.000,00	69.479.464,00	0,00	2.790.536,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
31	SD Negeri 15 Kaidipang (SD Negeri 2 Pontak)	0,00	61.380.000,00	0,00	51.686.500,00	8.910.000,00	60.596.500,00	0,00	783.500,00
32	SD Negeri 16 Kaidipang (SD Negeri 1 Boroko Utara)	0,00	58.410.000,00	0,00	48.017.000,00	10.393.000,00	58.410.000,00	0,00	0,00
33	SD Negeri 1 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Iyok)	0,00	94.050.000,00	0,00	70.863.290,00	22.011.000,00	92.874.290,00	0,00	1.175.710,00
34	SD Negeri 2 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Ollot)	0,00	44.550.000,00	0,00	29.159.000,00	15.391.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00
35	SD Negeri 3 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Paku)	56.000,00	64.294.000,00	0,00	31.395.000,00	32.955.000,00	64.350.000,00	0,00	0,00
36	SD Negeri 4 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Bolangitang)	4.400,00	158.125.600,00	0,00	121.613.928,00	36.094.000,00	157.707.928,00	0,00	422.072,00
37	SD Negeri 5 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Sonuo)	0,00	100.710.000,00	0,00	76.468.900,00	24.241.100,00	100.710.000,00	0,00	0,00
38	SD Negeri 6 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Tote)	0,00	62.370.000,00	0,00	41.980.000,00	20.390.000,00	62.370.000,00	0,00	0,00
39	SD Negeri 7 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Talaga Tomoagu)	0,00	90.090.000,00	0,00	85.285.000,00	4.805.000,00	90.090.000,00	0,00	0,00
40	SD Negeri 8 Bolangitang Barat (SD Negeri 2 Bolangitang)	0,00	92.070.000,00	0,00	77.245.000,00	14.825.000,00	92.070.000,00	0,00	0,00
41	SD Negeri 9 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Jambusarang)	0,00	94.050.000,00	0,00	79.810.000,00	14.240.000,00	94.050.000,00	0,00	0,00
42	SD Negeri 10 Bolangitang Barat (SD Negeri 2 Ollot)	0,00	76.950.000,00	0,00	67.590.000,00	9.360.000,00	76.950.000,00	0,00	0,00
43	SD Negeri 11 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Wakat)	0,00	115.560.000,00	0,00	86.750.000,00	28.210.000,00	114.960.000,00	0,00	600.000,00
44	SD Negeri 12 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Langi)	0,00	63.360.000,00	0,00	48.470.000,00	14.890.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00
45	SD Negeri 13 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Talaga)	0,00	122.490.000,00	0,00	84.400.000,00	37.230.000,00	121.630.000,00	0,00	860.000,00
46	SD Negeri 14 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Ollot II)	0,00	90.090.000,00	0,00	73.983.000,00	16.107.000,00	90.090.000,00	0,00	0,00
47	SD Negeri 15 Bolangitang Barat (SD Negeri 2 Sonuo)	0,00	104.940.000,00	0,00	59.657.000,00	25.165.000,00	84.822.000,00	0,00	20.118.000,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
48	SD Negerii 16 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Goyo)	0,00	26.730.000,00	0,00	21.680.000,00	4.900.000,00	26.580.000,00	0,00	150.000,00
49	SD Negeri 17 Bolangitang Barat (SD Negeri 1 Bolangitang I)	0,00	67.320.000,00	0,00	58.180.100,00	9.139.900,00	67.320.000,00	0,00	0,00
50	SD Negeri 1 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Biontong)	0,00	129.690.000,00	0,00	86.005.000,00	39.594.500,00	125.599.500,00	0,00	4.090.500,00
51	SD Negeri 2 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Mokoditek)	0,00	168.030.000,00	0,00	98.713.508,00	67.487.800,00	166.201.308,00	0,00	1.828.692,00
52	SD Negeri 3 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Saleo)	0,00	108.900.000,00	0,00	61.898.800,00	47.001.200,00	108.900.000,00	0,00	0,00
53	SD Negeri 4 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Binjeita)	0,00	86.130.000,00	0,00	71.690.000,00	14.440.000,00	86.130.000,00	0,00	0,00
54	SD Negeri 5 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Bohabak I)	0,00	78.210.000,00	0,00	51.063.000,00	24.822.000,00	75.885.000,00	0,00	2.325.000,00
55	SD Negeri 6 Bolangitang Timur (SD Negeri 2 Biontong)	0,00	149.490.000,00	0,00	110.461.500,00	38.243.500,00	148.705.000,00	0,00	785.000,00
56	SD Negeri 7 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Nunuka)	0,00	91.530.000,00	0,00	50.048.780,00	41.481.220,00	91.530.000,00	0,00	0,00
57	SD Negeri 8 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Bohabak IV)	50,00	96.030.000,00	0,00	62.818.000,00	30.082.000,00	92.900.000,00	0,00	3.130.050,00
58	SD Negeri 9 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Bohabak II)	0,00	88.110.000,00	0,00	37.095.000,00	48.910.000,00	86.005.000,00	0,00	2.105.000,00
59	SD Negeri 10 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Binjeita II)	0,00	59.400.000,00	0,00	40.771.000,00	18.629.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00
60	SD Negeri 11 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Binuanga)	0,00	59.400.000,00	0,00	36.634.000,00	22.766.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00
61	SD Negeri 12 Bolangitang Timur (SD Negeri 2 Saleo)	0,00	95.040.000,00	0,00	63.706.000,00	28.624.500,00	92.330.500,00	0,00	2.709.500,00
62	SD Negeri 13 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Binjeita I)	0,00	68.310.000,00	0,00	64.879.000,00	3.366.000,00	68.245.000,00	0,00	65.000,00
63	SD Negeri 14 Bolangitang Timur (SD Negeri 1 Biontong I)	0,00	92.070.000,00	0,00	74.813.200,00	16.656.800,00	91.470.000,00	0,00	600.000,00
64	SD Negeri 1 Bintauna (SD Negeri 1 Bintauna)	0,00	81.180.000,00	0,00	47.273.000,00	33.907.000,00	81.180.000,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
65	SD Negeri 2 Bintauna (SD Negeri 1 Kuhanga)	10.302.500,00	94.050.000,00	0,00	46.518.000,00	57.754.000,00	104.272.000,00	0,00	80.500,00
66	SD Negeri 3 Bintauna (SD Negeri 1 Padang)	0,00	60.390.000,00	0,00	47.063.500,00	13.326.500,00	60.390.000,00	0,00	0,00
67	SD Negeri 4 Bintauna (SD Negeri 1 Bintauna Pantai)	0,00	131.670.000,00	0,00	99.679.000,00	31.991.000,00	131.670.000,00	0,00	0,00
68	SD Negeri 5 Bintauna (SD Negeri 1 Mome)	0,00	59.400.000,00	0,00	33.200.000,00	26.200.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00
69	SD Negeri 6 Bintauna (SD Negeri 1 Batulintik)	0,00	43.560.000,00	0,00	36.947.000,00	6.613.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00
70	SD Negeri 7 Bintauna (SD Negeri 1 Talaga)	0,00	55.440.000,00	0,00	27.643.000,00	27.797.000,00	55.440.000,00	0,00	0,00
71	SD Negeri 8 Bintauna (SD Negeri 1 Bunia)	0,00	82.170.000,00	0,00	48.997.000,00	33.173.000,00	82.170.000,00	0,00	0,00
72	SD Negeri 9 Bintauna (SD Negeri 1 Pimpi)	0,00	105.930.000,00	0,00	54.169.000,00	51.761.000,00	105.930.000,00	0,00	0,00
73	SD Negeri 10 Bintauna (SD Negeri 1 Minanga)	20.100,00	96.009.900,00	0,00	57.076.270,00	38.181.930,00	95.258.200,00	0,00	771.800,00
74	SD Negeri 11 Bintauna (SD Negeri 1 Huntuk)	0,00	100.440.000,00	0,00	53.350.300,00	47.089.700,00	100.440.000,00	0,00	0,00
75	SD Negeri 12 Bintauna (SD Negeri 2 Batulintik)	0,00	78.210.000,00	0,00	54.635.000,00	23.575.000,00	78.210.000,00	0,00	0,00
76	SD Negeri 13 Bintauna (SD Negeri 1 Bunong)	0,00	81.180.000,00	0,00	49.437.000,00	31.743.000,00	81.180.000,00	0,00	0,00
77	SD Negeri 14 Bintauna (SD Negeri 1 Voa'a)	0,00	51.480.000,00	0,00	38.550.000,00	12.930.000,00	51.480.000,00	0,00	0,00
78	SD Negeri 15 Bintauna (SD Negeri 1 Kopi)	0,00	97.020.000,00	0,00	70.482.000,00	26.538.000,00	97.020.000,00	0,00	0,00
79	SD Negeri 16 Bintauna (SD Negeri 1 Padang Barat)	0,00	77.220.000,00	0,00	48.455.000,00	28.765.000,00	77.220.000,00	0,00	0,00
80	SD Negeri 1 Sangkub (SD Negeri 1 Sangkub I)	0,00	90.090.000,00	0,00	55.028.000,00	35.062.000,00	90.090.000,00	0,00	0,00
81	SD Negeri 2 Sangkub (SD Negeri 1 Sangkub II)	0,00	138.600.000,00	0,00	112.905.000,00	25.695.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
82	SD Negeri 3 Sangkub (SD Negeri 1 Busisingo)	123,00	72.270.000,00	0,00	65.528.000,00	4.298.000,00	69.826.000,00	0,00	2.444.123,00
83	SD Negeri 4 Sangkub (SD Negeri 1 Tombolango)	0,00	101.970.000,00	0,00	60.951.200,00	36.052.000,00	97.003.200,00	0,00	4.966.800,00
84	SD Negeri 5 Sangkub (SD Negeri 1 Sangkub I)	0,00	136.620.000,00	0,00	99.615.250,00	37.004.750,00	136.620.000,00	0,00	0,00
85	SD Negeri 6 Sangkub (SD Negeri 1 Sampiro)	0,00	47.520.000,00	0,00	44.727.000,00	2.793.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00
86	SD Negeri 7 Sangkub (SD Negeri 1 Pangkusa)	2.540.000,00	85.570.000,00	0,00	62.775.000,00	25.335.000,00	88.110.000,00	0,00	0,00
87	SD Negeri 8 Sangkub (SD Negeri 1 Sidodadi)	0,00	72.000.000,00	0,00	55.545.000,00	16.455.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00
88	SD Negeri 9 Sangkub (SD Negeri 1 Sangtombolang)	0,00	138.600.000,00	0,00	106.734.000,00	31.866.000,00	138.600.000,00	0,00	0,00
89	SD Negeri 10 Sangkub (SD Negeri 1 Busisingo Utara)	2.286.650,00	59.093.350,00	0,00	38.410.000,00	22.570.000,00	60.980.000,00	0,00	400.000,00
90	SMP Negeri 1 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 1 Kaidipang)	53.024,00	354.124.770,00	0,00	266.838.404,00	70.864.000,00	337.702.404,00	0,00	16.475.390,00
91	SMP Negeri 2 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 1 Bolangitang Barat)	0,00	400.980.000,00	0,00	307.267.500,00	93.712.500,00	400.980.000,00	0,00	0,00
92	SMP Negeri 3 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 1 Bintauna)	9.946.242,00	424.243.758,00	0,00	277.163.933,00	154.575.500,00	431.739.433,00	0,00	2.450.567,00
93	SMP Negeri 4 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 1 Pinogaluman)	0,00	311.750.000,00	0,00	176.718.000,00	135.032.000,00	311.750.000,00	0,00	0,00
94	SMP Negeri 5 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 1 Bolangitang Timur)	0,00	317.340.000,00	0,00	254.901.750,00	62.135.250,00	317.037.000,00	0,00	303.000,00
95	SMP Negeri 6 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 1 Sangkub)	0,00	268.140.000,00	0,00	142.522.700,00	125.617.300,00	268.140.000,00	0,00	0,00
96	SMP Negeri 7 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 2 Bintauna)	0,00	200.490.000,00	0,00	134.302.500,00	66.187.500,00	200.490.000,00	0,00	0,00
97	SMP Negeri 8 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 2 Bolangitang Timur)	0,00	209.100.000,00	0,00	138.410.700,00	70.689.300,00	209.100.000,00	0,00	0,00

No	Nama Sekolah	Saldo awal	Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)					
				Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Jumlah Belanja	Pajak 2022 Yang disetor 2023	Sisa
98	SMP Negeri 9 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 2 Pinogaluman)	1.268.200,00	180.810.000,00	0,00	137.695.000,00	37.285.000,00	174.980.000,00	0,00	7.098.200,00
99	SMP Negeri 10 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 2 Bolangitang Barat)	800,00	138.989.200,00	0,00	105.193.000,00	33.797.000,00	138.990.000,00	0,00	0,00
100	SMP Negeri 11 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 3 Bolangitang Barat)	919.000,00	104.191.000,00	0,00	93.440.000,00	11.370.000,00	104.810.000,00	0,00	300.000,00
101	SMP Negeri 12 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 2 Kaidipang)	27.500,00	86.072.500,00	0,00	61.158.750,00	23.944.750,00	85.103.500,00	0,00	996.500,00
102	SMP Negeri 13 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 3 Kaidipang)	106.763,00	63.855.476,00	0,00	55.680.500,00	6.463.000,00	62.143.500,00	0,00	1.818.739,00
103	SMP Negeri 14 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri 3 Bolangitang Timur)	353.100,00	83.486.900,00	0,00	59.615.000,00	23.975.000,00	83.590.000,00	0,00	250.000,00
104	SMP Negeri Satap 15 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri Satap Tontulow)	16.400,00	126.673.600,00	0,00	86.246.500,00	40.443.500,00	126.690.000,00	0,00	0,00
105	SMP Negeri Satap 16 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri Satap Tanjung Sidupa)	0,00	23.370.000,00	0,00	17.850.000,00	5.520.000,00	23.370.000,00	0,00	0,00
106	SMP Negeri Satap 17 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri Satap Huntuk)	0,00	28.290.000,00	0,00	20.640.000,00	7.650.000,00	28.290.000,00	0,00	0,00
107	SMP Negeri Satap 18 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri Satap Pangkusa)	0,00	89.120.000,00	0,00	64.815.000,00	23.505.000,00	88.320.000,00	0,00	800.000,00
108	SMP Negeri Satap 19 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri Satap Sangtombolang)	1.000,00	114.950.000,00	0,00	83.280.000,00	31.670.000,00	114.950.000,00	0,00	1.000,00
109	SMP Negeri Satap 20 Bolaang Mongondow Utara (SMP Negeri Satap Goyo)	0,00	20.910.000,00	0,00	20.630.000,00	280.000,00	20.910.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	35.354.004,00	11.264.887.712,00	0,00	7.797.153.876,00	3.404.467.713,00	11.201.621.589,00	0,00	98.620.127,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR POTENSI TAGIHAN RETRIBUSI
Sampai Dengan 31 Desember 2023

Lampiran X

No.	STRD	Wajib Retribusi		Kode SITE	Nama SITE	Alamat		Piutang Retribusi	Ket.
		Sebelum	Sesudah			Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengendalian Menarah Telekomunikasi									
1	002/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel	Tower Bersama Group	KTG243	TBG Soligir	Desa Soligir	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2021
2	005/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel	PT. Telkomsel	KTG038	Mokoditek	Desa Mokoditek	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2021
3	011/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel	PT. Telkomsel	ISM008	Atingola	Desa Tombulang	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2021
4	012/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel Indonesia	PT. Telkomsel Indonesia			Desa Inomunga	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2021
5	013/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Inomunga	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2021
6	014/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Bohabak IV	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2021
7	015/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Boroko Timur	Kec. Sangkub	1.110.000,00	Tahun 2021
8	016/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Tombulang	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2021
9	017/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG190	TBG Barko	Desa Boroko Timur	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2021
10	018/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Paku	Kec. Bolangitang Barat	1.110.000,00	Tahun 2021
11	019/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG262	TBG Polek Bolangitang	Desa Bolangitang	Kec. Bolangitang Barat	1.110.000,00	Tahun 2021
12	020/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG119	TBG Saleo	Desa Saleo	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2021
13	021/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG114	TBG Binjeita Bolaang	Desa Binjeita I	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2021
14	022/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG107	TBG Telaga Bintauna	Desa Talaga / Kopi	Kec. Bintauna	1.110.000,00	Tahun 2021
15	023/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Batulintik	Kec. Bintauna	1.110.000,00	Tahun 2021
16	024/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Tontulow	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2021
17	025/STRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Dengi	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2021
18	031/STRD/BPKD-BMU/2022	AXIATA	Protelindo	3623	Sangkub	Desa Sangkub II	Kec. Sangkub	1.110.000,00	Tahun 2021
19	032/STRD/BPKD-BMU/2022	AXIATA	Tower Bersama Group	234A342	Tuntung Bolmong	Desa Tontulow	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2021
20	002/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel	Tower Bersama Group	KTG243	TBG Soligir	Desa Soligir	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2022

No.	STRD	Wajib Retribusi		Kode SITE	Nama SITE	Alamat		Piutang Retribusi	Ket.
		Sebelum	Sesudah			Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	005/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel	PT. Telkomsel	KTG038	Mokoditek	Desa Mokoditek	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2022
22	011/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel	PT. Telkomsel	ISM008	Atingola	Desa Tombulang Timur	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2022
23	012/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Telkomsel Indonesia	PT. Telkomsel Indonesia			Desa Inomunga	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2022
24	013/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Inomunga	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2022
25	014/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Bohabak IV	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2022
26	015/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Sangkub Timur	Kec. Sangkub	1.110.000,00	Tahun 2022
27	016/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Indosat	PT. CMI			Desa Tombulang	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2022
28	017/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG190	TBG Barko	Desa Boroko Timur	Kec. Kaidipang	1.110.000,00	Tahun 2022
29	018/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Paku	Kec. Bolangitang Barat	1.110.000,00	Tahun 2022
30	019/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG262	TBG Polsek Bolangitang	Desa Bolangitang	Kec. Bolangitang Barat	1.110.000,00	Tahun 2022
31	020/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG119	TBG Saleo	Desa Saleo	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2022
32	021/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG114	TBG Binjeita Bolaang	Desa Binjeita I	Kec. Bolangitang Timur	1.110.000,00	Tahun 2022
33	022/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group	KTG107	TBG Telaga Bintauna	Desa Talaga / Kopi	Kec. Bintauna	1.110.000,00	Tahun 2022
34	023/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Batulintik	Kec. Bintauna	1.110.000,00	Tahun 2022
35	024/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Tontulow	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2022
36	025/SKRD/BPKD-BMU/2022	PT. Tower Bersama Group	Tower Bersama Group			Desa Dengi	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2022
31	031/SKRD/BPKD-BMU/2022	Axiata	Protelindo	3623	Sangkub	Desa Sangkub II	Kec. Sangkub	1.110.000,00	Tahun 2022
32	032/SKRD/BPKD-BMU/2022	Axiata	Tower Bersama Group	234A342	Tuntung Bolmong	Desa Tontulow	Kec. Pinogaluman	1.110.000,00	Tahun 2022
Jumlah								42.180.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG
Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo	Umur Piutang				Jumlah
			≤ 1 Tahun	1 s.d < 2 Tahun	2 s.d < 5 Tahun	> 5 Tahun	
			0,00%	10,00%	50,00%	100,00%	
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Piutang Pajak	1.189.266.999,00	0,00	52.850.678,40	42.664.380,00	211.754.847,00	307.269.905,40
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	285.041.082,00	215.785.284,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	456.606.994,00	52.893.526,00	106.629.861,00	85.328.760,00	211.754.847,00	
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan		0,00	10.662.986,10	42.664.380,00	211.754.847,00	265.082.213,10
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	416.288.000,00	3.990.000,00	412.298.000,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		0,00	41.229.800,00	0,00	0,00	41.229.800,00
4	Piutang Pajak Relame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	31.330.923,00	21.752.000,00	9.578.923,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Pajak Relame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	957.892,30	0,00	0,00	957.892,30
No.	Uraian	Saldo	Umur Piutang				Jumlah
			≤ 3 Bulan	2 s.d < 6 Bulan	6 Bulan s.d < 1 Tahun	> 1 Tahun	
			0,00%	10,00%	50,00%	100,00%	
II	Piutang Retribusi	42.180.000,00	0,00	0,00	0,00	42.180.000,00	42.180.000,00
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	42.180.000,00	0,00	0,00	0,00	42.180.000,00	

No.	Uraian	Saldo	Umur Piutang				Jumlah
			≤ 1 Tahun	1 s.d < 2 Tahun	2 s.d < 5 Tahun	> 5 Tahun	
			0,00%	10,00%	50,00%	100,00%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Pnyisihan Piutang TGR kepada pegawai bukan bendahara/pejabat lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	52.850.678,40	42.664.380,00	253.934.847,00	348.492.013,10
	Total	10.914.543.286,99	0,00	52.850.678,40	42.664.380,00	253.934.847,00	349.449.905,40



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINCIAN PIUTANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
1	170 /PAJAK/VIII/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	878.000,00	
2	224 /PAJAK/IX/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	411.000,00	
3	225 /PAJAK/IX/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	297.000,00	
	283 /PAJAK/X/2021	CV. Citra Fafa		484.000,00	
4	103 /PAJAK/VI/2021	CV. Bintang Utama Perkasa	2021	99.000,00	
5	122 /PAJAK/VII/2021	CV. Bintang Utama Perkasa	2021	28.000,00	
6	111 /PAJAK/VI/2021	CV. Fidja Perkasa	2021	10.000,00	
7	161 /PAJAK/VIII/2021	CV. Fidja Perkasa	2021	19.000,00	
8	171 /PAJAK/VIII/2021	CV. Fidja Perkasa	2021	71.000,00	
9	182 /PAJAK/VIII/2021	CV. Fidja Perkasa	2021	199.000,00	
10	215 /PAJAK/IX/2021	CV. Fidja Perkasa	2021	49.000,00	
11	117 /PAJAK/VI/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	770.000,00	
12	131 /PAJAK/VII/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	14.000,00	
13	143 /PAJAK/VII/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	417.000,00	
14	151 /PAJAK/VII/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	28.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
15	371 /PAJAK/XI/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	127.000,00	
16	404 /PAJAK/XII/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	68.000,00	
17	460 /PAJAK/XII/2021	CV. Triad Jaya Mandiri	2021	419.000,00	
18	118 /PAJAK/VI/2021	CV. Farrel	2021	103.000,00	
19	119 /PAJAK/VI/2021	CV. Farrel	2021	38.000,00	
20	132 /PAJAK/VII/2021	CV. Farrel	2021	83.000,00	
21	193 /PAJAK/VIII/2021	CV. Farrel	2021	35.000,00	
22	294 /PAJAK/X/2021	CV. Farrel	2021	388.000,00	
23	318 /PAJAK/XI/2021	CV. Farrel	2021	58.000,00	
24	321 /PAJAK/XI/2021	CV. Farrel	2021	49.000,00	
25	395 /PAJAK/XII/2021	CV. Farrel	2021	5.000,00	
26	121 /PAJAK/VII/2021	CV. Ramiz Rajawali Persada	2021	25.000,00	
27	257 /PAJAK/IX/2021	CV. Ramiz Rajawali Persada	2021	55.000,00	
28	285 /PAJAK/X/2021	CV. Ramiz Rajawali Persada	2021	99.000,00	
29	433 /PAJAK/XII/2021	CV. Ramiz Rajawali Persada	2021	180.000,00	
30	447 /PAJAK/XII/2021	CV. Ramiz Rajawali Persada	2021	5.000,00	
31	134 /PAJAK/VII/2021	CV. Rifki Karya	2021	822.000,00	
32	288 /PAJAK/X/2021	CV. Rifki Karya	2021	83.000,00	
33	362 /PAJAK/XI/2021	CV. Rifki Karya	2021	2.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
34	374 /PAJAK/XI/2021	CV. Rifki Karya	2021	234.000,00	
35	385 /PAJAK/XII/2021	CV. Rifki Karya	2021	64.000,00	
36	397 /PAJAK/XII/2021	CV. Rifki Karya	2021	38.000,00	
37	139 /PAJAK/VII/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	1.000,00	
38	169 /PAJAK/VIII/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	91.000,00	
39	192 /PAJAK/VIII/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	66.000,00	
40	245 /PAJAK/IX/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	281.000,00	
41	250 /PAJAK/IX/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	73.000,00	
42	283 /PAJAK/X/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	322.000,00	
43	375 /PAJAK/XI/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	21.000,00	
44	380 /PAJAK/XII/2021	CV. Citra Fafa Berlian	2021	4.000,00	
45	144 /PAJAK/VII/2021	CV. Ayuhulalo	2021	56.000,00	
46	149 /PAJAK/VII/2021	CV. Barangga Jaya	2021	47.000,00	
47	172 /PAJAK/VIII/2021	CV. Barangga Jaya	2021	710.000,00	
48	190 /PAJAK/VIII/2021	CV. Barangga Jaya	2021	269.000,00	
49	220 /PAJAK/IX/2021	CV. Barangga Jaya	2021	631.000,00	
50	252 /PAJAK/IX/2021	CV. Barangga Jaya	2021	86.000,00	
51	267 /PAJAK/X/2021	CV. Barangga Jaya	2021	86.000,00	
52	273 /PAJAK/X/2021	CV. Barangga Jaya	2021	99.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
53	284 /PAJAK/X/2021	CV. Barangga Jaya	2021	243.000,00	
54	372 /PAJAK/XI/2021	CV. Barangga Jaya	2021	576.000,00	
55	384 /PAJAK/XII/2021	CV. Barangga Jaya	2021	829.000,00	
56	150 /PAJAK/VII/2021	CV. Rara Pertiwi	2021	100.000,00	
57	417 /PAJAK/XII/2021	CV. Rara Pertiwi	2021	1.406.000,00	
58	166 /PAJAK/VIII/2021	CV. Amanah	2021	8.000,00	
59	233 /PAJAK/IX/2021	CV. Amanah	2021	20.000,00	
60	412 /PAJAK/XII/2021	CV. Amanah	2021	146.000,00	
61	414 /PAJAK/XII/2021	CV. Amanah	2021	57.000,00	
62	419 /PAJAK/XII/2021	CV. Amanah	2021	80.000,00	
63	167 /PAJAK/VIII/2021	CV. Armac Pio-Piohu	2021	103.000,00	
64	316 /PAJAK/XI/2021	CV. Armac Pio-Piohu	2021	258.000,00	
65	170 /PAJAK/VIII/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	277.000,00	
66	205 /PAJAK/VIII/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	616.000,00	
67	223 /PAJAK/IX/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	317.000,00	
68	224 /PAJAK/IX/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	105.000,00	
69	225 /PAJAK/IX/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	76.000,00	
70	278 /PAJAK/X/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	564.000,00	
71	364 /PAJAK/XI/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	80.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
72	376 /PAJAK/XI/2021	CV. Rizky Putri Syahputra	2021	83.000,00	
73	173 /PAJAK/VIII/2021	CV. Yustika	2021	468.000,00	
74	299 /PAJAK/X/2021	CV. Yustika	2021	57.000,00	
75	308 /PAJAK/XI/2021	CV. Yustika	2021	695.000,00	
76	175 /PAJAK/VIII/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	74.000,00	
77	176 /PAJAK/VIII/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	54.000,00	
78	194 /PAJAK/VIII/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	18.000,00	
79	287 /PAJAK/X/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	500.000,00	
80	290 /PAJAK/X/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	8.000,00	
81	291 /PAJAK/X/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	27.000,00	
82	411 /PAJAK/XII/2021	CV. Zjovan Mandiri Star	2021	3.000,00	
83	177 /PAJAK/VIII/2021	CV. Oginawa	2021	112.000,00	
84	226 /PAJAK/IX/2021	CV. Oginawa	2021	44.000,00	
85	178 /PAJAK/VIII/2021	CV. Alvirgi Putra Mandiri	2021	145.000,00	
86	195 /PAJAK/VIII/2021	CV. Alvirgi Putra Mandiri	2021	88.000,00	
87	216 /PAJAK/IX/2021	CV. Alvirgi Putra Mandiri	2021	2.000,00	
88	279 /PAJAK/X/2021	CV. Alvirgi Putra Mandiri	2021	398.000,00	
89	297 /PAJAK/X/2021	CV. Alvirgi Putra Mandiri	2021	16.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
90	445 /PAJAK/XII/2021	CV. Alvirgi Putra Mandiri	2021	132.000,00	Selisih Pajak dari Temuan Audit Tahun 2021
91	179 /PAJAK/VIII/2021	CV. Mitra Struktur	2021	45.000,00	
92	183 /PAJAK/VIII/2021	CV. Padat Aksi Niaga	2021	0,00	
93	197 /PAJAK/VIII/2021	CV. Padat Aksi Niaga	2021	254.000,00	
94	347 /PAJAK/XI/2021	CV. Padat Aksi Niaga	2021	47.000,00	
95	352 /PAJAK/XI/2021	CV. Padat Aksi Niaga	2021	466.000,00	
96	410 /PAJAK/XII/2021	CV. Padat Aksi Niaga	2021	20.000,00	
97	191 /PAJAK/VIII/2021	CV. Bintang Dua	2021	70.000,00	
98	301 /PAJAK/X/2021	CV. Bintang Dua	2021	12.000,00	
99	361 /PAJAK/XI/2021	CV. Bintang Dua	2021	5.000,00	
100	363 /PAJAK/XI/2021	CV. Bintang Dua	2021	9.000,00	
101	196 /PAJAK/VIII/2021	CV. Karya Toheahu Perkasa	2021	7.000,00	
102	206 /PAJAK/VIII/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	216.000,00	
103	211 /PAJAK/VIII/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	161.000,00	
104	227 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	53.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
105	228 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	14.000,00	
106	230 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	44.000,00	
107	231 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	43.000,00	
108	232 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	194.000,00	
109	247 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	94.000,00	
110	253 /PAJAK/IX/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	79.000,00	
111	272 /PAJAK/X/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	34.000,00	
112	302 /PAJAK/X/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	34.000,00	
113	434 /PAJAK/XII/2021	CV. Sumber Pratama Abadi	2021	24.000,00	
114	219 /PAJAK/IX/2021	CV. Amira	2021	1.000,00	
115	323 /PAJAK/XI/2021	CV. Amira	2021	440.000,00	
116	221 /PAJAK/IX/2021	CV. Cahaya Timur Jaya	2021	96.000,00	
117	365 /PAJAK/XI/2021	CV. Cahaya Timur Jaya	2021	57.000,00	
118	402 /PAJAK/XII/2021	CV. Cahaya Timur Jaya	2021	57.000,00	
119	242 /PAJAK/IX/2021	CV. Padi Jaya Utama	2021	89.000,00	
120	243 /PAJAK/IX/2021	CV. Padi Jaya Utama	2021	26.000,00	
121	450 /PAJAK/XII/2021	CV. Padi Jaya Utama	2021	342.000,00	
122	249 /PAJAK/IX/2021	CV. Timur Samudera	2021	58.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
123	251 /PAJAK/IX/2021	CV. Timur Samudera	2021	109.000,00	
124	368 /PAJAK/XI/2021	CV. Timur Samudera	2021	4.000,00	
125	420 /PAJAK/XII/2021	CV. Timur Samudera	2021	606.000,00	
126	459 /PAJAK/XII/2021	CV. Timur Samudera	2021	159.000,00	
127	258 /PAJAK/IX/2021	CV. Fadil Karya Pratama	2021	193.000,00	
128	438 /PAJAK/XII/2021	CV. Fadil Karya Pratama	2021	504.000,00	
129	268 /PAJAK/X/2021	CV. Khenfi	2021	1.969.000,00	
130	275 /PAJAK/X/2021	CV. Bongkil Indah	2021	45.000,00	
131	357 /PAJAK/XI/2021	CV. Bongkil Indah	2021	34.000,00	
132	405 /PAJAK/XII/2021	CV. Bongkil Indah	2021	45.000,00	
133	282 /PAJAK/X/2021	CV. Trimas	2021	189.000,00	
134	286 /PAJAK/X/2021	CV. Anugrah Rafa Mandiri	2021	57.000,00	
135	351 /PAJAK/XI/2021	CV. Anugrah Rafa Mandiri	2021	128.000,00	
136	289 /PAJAK/X/2021	CV. Global Utama Konstruksi	2021	218.000,00	
137	303 /PAJAK/X/2021	CV. Global Utama Konstruksi	2021	146.000,00	
138	377 /PAJAK/XI/2021	CV. Global Utama Konstruksi	2021	221.000,00	
139	442 /PAJAK/XII/2021	CV. Global Utama Konstruksi	2021	144.000,00	
140	444 /PAJAK/XII/2021	CV. Global Utama Konstruksi	2021	639.000,00	
141	292 /PAJAK/X/2021	CV. Arszy	2021	2.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
142	407 /PAJAK/XII/2021	CV. Arszy	2021	148.000,00	
143	293 /PAJAK/X/2021	CV. Namlea Mania	2021	4.000,00	
144	319 /PAJAK/XI/2021	CV. Namlea Mania	2021	2.675.000,00	
145	296 /PAJAK/X/2021	CV. Olami Ngami	2021	49.000,00	
146	348 /PAJAK/XI/2021	CV. Olami Ngami	2021	19.000,00	
147	349 /PAJAK/XI/2021	CV. Olami Ngami	2021	19.000,00	
148	298 /PAJAK/X/2021	CV. Pogopita Indah	2021	5.000,00	
149	373 /PAJAK/XI/2021	CV. Pogopita Indah	2021	35.000,00	
150	409 /PAJAK/XII/2021	CV. Pogopita Indah	2021	49.000,00	
151	458 /PAJAK/XII/2021	CV. Pogopita Indah	2021	3.000,00	
152	300 /PAJAK/X/2021	CV. Prima Sakti Livina	2021	128.000,00	
153	416 /PAJAK/XII/2021	CV. Prima Sakti Livina	2021	57.000,00	
154	304 /PAJAK/X/2021	CV. Jeyin Nur Abadi	2021	21.000,00	
155	307 /PAJAK/XI/2021	CV. Jimass Karya	2021	726.000,00	
156	317 /PAJAK/XI/2021	CV. Jimass Karya	2021	54.000,00	
157	320 /PAJAK/XI/2021	CV. Mustika Mandiri	2021	1.448.000,00	
158	457 /PAJAK/XII/2021	CV. Mustika Mandiri	2021	317.000,00	
159	322 /PAJAK/XI/2021	CV. Fatika	2021	5.000,00	
160	329 /PAJAK/XI/2021	CV. Ellant Nusantara Raya	2021	4.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
161	330 /PAJAK/XI/2021	CV. Ellant Nusantara Raya	2021	6.000,00	
162	403 /PAJAK/XII/2021	CV. Ellant Nusantara Raya	2021	420.000,00	
163	339 /PAJAK/XI/2021	CV. Gayung Sakti	2021	49.000,00	
164	344 /PAJAK/XI/2021	CV. Fenny Teknik Mandiri	2021	8.000,00	
165	443 /PAJAK/XII/2021	CV. Fenny Teknik Mandiri	2021	68.000,00	
166	452 /PAJAK/XII/2021	CV. Fenny Teknik Mandiri	2021	115.000,00	
167	350 /PAJAK/XI/2021	CV. 55 Konstruksi	2021	161.000,00	
168	355 /PAJAK/XI/2021	CV. Fathirabizar	2021	580.000,00	
169	356 /PAJAK/XI/2021	CV. Zovanda	2021	30.000,00	
170	359 /PAJAK/XI/2021	CV. Teratai Jaya Perkasa	2021	38.000,00	
171	379 /PAJAK/XI/2021	CV. Misfallah Karya	2021	185.000,00	
172	396 /PAJAK/XII/2021	PT. Lia Membangun Persada	2021	27.047.000,00	
173	398 /PAJAK/XII/2021	CV. Berlian Jaya Sejahtera	2021	38.000,00	
174	418 /PAJAK/XII/2021	CV. Berlian Jaya Sejahtera	2021	184.000,00	
175	421 /PAJAK/XII/2021	CV. Berlian Jaya Sejahtera	2021	118.000,00	
176	399 /PAJAK/XII/2021	CV. Timur Jaya Sejahtera	2021	1.000,00	
177	401 /PAJAK/XII/2021	CV. Dua Saudara	2021	144.000,00	
178	408 /PAJAK/XII/2021	CV. Citra Abadi Karya	2021	24.000,00	
179	422 /PAJAK/XII/2021	CV. Wally	2021	109.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
180	426 /PAJAK/XII/2021	PT. Gerbang Nusantara Berkarya	2021	24.025.000,00	
181	427 /PAJAK/XII/2021	CV. Jibob	2021	874.000,00	
182	428 /PAJAK/XII/2021	CV. Berkat Anugerah Bersama	2021	6.131.000,00	
183	429 /PAJAK/XII/2021	CV. Berkat Anugerah Bersama	2021	11.882.000,00	
184	430 /PAJAK/XII/2021	CV. Inspirasi Media	2021	5.531.000,00	
185	431 /PAJAK/XII/2021	CV. Inspirasi Media	2021	5.311.000,00	
186	432 /PAJAK/XII/2021	CV. Inspirasi Media	2021	6.288.000,00	
187	435 /PAJAK/XII/2021	CV. Asrindo Putra Mandiri	2021	1.770.000,00	
188	436 /PAJAK/XII/2021	PT. Takabeya Teknik Konstruksi	2021	916.000,00	
189	446 /PAJAK/XII/2021	CV. Sion Terang Abadi	2021	639.000,00	
190	448 /PAJAK/XII/2021	CV. Karya Mandiri Perkasa	2021	5.548.000,00	
191	449 /PAJAK/XII/2021	PT. Global Cipta Pekasa	2021	15.859.000,00	
192	464 /PAJAK/XII/2021	PT. Global Cipta Pekasa	2021	1.890.000,00	
193	470 /PAJAK/XII/2021	PT. Global Cipta Pekasa	2021	35.177.000,00	
194	451 /PAJAK/XII/2021	PT. Trikarsa Utama Lestari	2021	1.125.000,00	
195	453 /PAJAK/XII/2021	CV. Indoshovic	2021	63.000,00	
196	456 /PAJAK/XII/2021	CV. Putri Diana	2021	209.000,00	

No.	Nomor Penetapan	Wajib Pajak	Tahun Penetapan	Nilai Piutang	Keterangan
197	465 /PAJAK/XII/2021	CV. Dwi Karsa Utama	2021	523.000,00	
198	466 /PAJAK/XII/2021	CV. Ayi All	2021	200.000,00	
199	467 /PAJAK/XII/2021	CV. Madina Multikreasi	2021	385.000,00	
200	468 /PAJAK/XII/2021	CV. Multi Karya Utama	2021	10.041.000,00	
201	472 /PAJAK/XII/2021	CV. Multi Karya Utama	2021	4.093.000,00	
202	469 /PAJAK/XII/2021	CV. Bhakti Megah Mulia	2021	5.050.000,00	
203	471 /PAJAK/XII/2021	CV. Bhakti Megah Mulia	2021	3.752.000,00	
204	5 /SPTPD/II/2022	CV. Luwok Jaya Perkasa	2022	188.318.000,00	Selisih Pajak dari Temuan Audit Tahun 2022
205	5 /PAJAK/II/2022	CV. Luwok Jaya Perkasa	2022	14.722.000,00	
206	32 /MBLB/IV/2023	CV. KARYA BAKTI	2023	3.467.000,00	
207	33 /MBLB/IV/2023	CV. BERKAT TRINITAS	2023	523.000,00	
J u m l a h				416.288.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jenis	Nilai
1	2	3	4
A.	Persediaan obat-obatan		
1	UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Obat dan Bahan Medis	3.325.554.128,69
2	Puskesmas Buku	Obat dan Bahan Medis	234.837.428,79
3	Puskesmas Tuntung	Obat dan Bahan Medis	60.315.837,99
4	Puskesmas Boroko	Obat dan Bahan Medis	956.904.864,51
5	Puskesmas Bolangitang	Obat dan Bahan Medis	180.594.897,06
6	Puskesmas Ollot	Obat dan Bahan Medis	121.994.451,08
7	Puskesmas Mokoditek	Obat dan Bahan Medis	71.921.353,46
8	Puskesmas Bohabak	Obat dan Bahan Medis	89.940.580,41
9	Puskesmas Biontong	Obat dan Bahan Medis	54.606.961,79
10	Puskesmas Bintauna	Obat dan Bahan Medis	171.916.962,42
11	Puskesmas Bintauna Pantai	Obat dan Bahan Medis	110.319.280,03
12	Puskesmas Sangkub	Obat dan Bahan Medis	167.141.236,88
13	Puskesmas Sangtombolang	Obat dan Bahan Medis	157.047.988,52
14	UPTD Therapeutic Fedding center	Obat dan Bahan Medis	4.536.000,00
15	RSUD	Obat dan Bahan Medis	1.523.417.214,05
Jumlah			7.231.049.185,68
B.	Persediaan alat/bahan untuk kegiatan operasional		
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	ATK	50.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	ATK	14.046.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kertas Cover	195.000,00
6	Dinas Perhubungan	Kertas Cover	937.500,00
	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	Kertas Cover	65.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Perabot Kantor	589.244,00
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bahan Lainnya	4.195.800,00
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	Bahan Cetak	700.000,00
9	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Bahan Cetak	41.000.000,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Bahan Cetak	603.500,00
14	Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)	Bahan Cetak-Karcis	6.610.800,00
15	Dinas Pariwisata	Bahan Cetak-Karcis	1.703.520,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	Bahan Cetak-Karcis	5.201.840,00
18	Dinas Perhubungan	Bahan Cetak-Karcis	2.430.680,00
20	PKM Sangkub	Bahan Cetak-Karcis	27.160,00
21	PKM Bintauna	Bahan Cetak-Karcis	18.480,00
22	PKM Bohabak	Bahan Cetak-Karcis	71.400,00
23	PKM Bolangitang	Bahan Cetak-Karcis	15.960,00
24	PKM Boroko	Bahan Cetak-Karcis	371.000,00
25	PKM Buku	Bahan Cetak-Karcis	10.080,00
26	PKM Tuntung	Bahan Cetak-Karcis	28.000,00
27	PKM Bintauna Pantai	Bahan Cetak-Karcis	54.040,00
28	PKM Ollot	Bahan Cetak-Karcis	70.840,00
29	PKM Mokoditek	Bahan Cetak-Karcis	187.320,00
30	PKM Sang	Bahan Cetak-Karcis	56.280,00
31	PKM Biontong	Bahan Cetak-Karcis	45.080,00
Jumlah			79.284.524,00

No.	Uraian	Jenis	Nilai
1	2	3	4
C	Persediaan Bahan Lainnya		
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Natura	41.314.762,00
2	Dinas Sosial	Natura	13.068.600,00
3	Dinas Pertanian	Bahan Kimia	61.687.634,00
4	DLHK	Barang pemeliharaan Taman Keydupa	53.823.700,00
Jumlah			169.894.696,00
D	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		
1	Dinas Ketahanan Pangan	Bahan Makanan	187.034.000,00
3	TFC	Susu	29.003.540,00
Jumlah			216.037.540,00
E	Persediaan untuk diserahkan kepada pihak ketiga/lainnya		
1	Dinas Perumahan	Drainase	50.173.300,00
2	Dinas Perumahan	Paving jalan Masuk Perumahan	2.640.700,00
3	PUPR	SPAM	425.831.500,00
4	PUPR	Gedung serba guna kejaksaan	199.941.000,00
5	PUPR	Tugu/Prasasti diserahkan ke Pemerintah Desa Bolangitang	38.707.500,00
6	Dinas Pendidikan	Hibah ke Sekolah Swasta -TK Ollot	59.900.000,00
7	Kantor Camat Bintauna	Hibah ke Pemerintah Desa Banguan Gedung Tempat Olahraga	149.907.999,00
Jumlah			927.101.999,00
Total			8.623.367.944,68



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR ASET TETAP - TANAH
Per 31 Desember 2023

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023								Per 31 Desember 2023	
			Bertambah				Berkurang					
			Belanja Modal	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	Reklasifikasi	Penghapusan	Koreksi	Mutasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Sekretariat Dewan	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000.000,00
2	Bagian Umum dan Perlengkapan	9.570.940.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.929.500	8.315.010.510,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.590.853.744,00	0,00	0,00	0,00	1.255.929.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.846.783.244,00
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	637.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.320.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	Dinas Kesehatan	2.992.049.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992.049.043,00
7	RSUD Pratama Bintauna	2.339.902.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.902.500,00
8	Dinas Pendidikan	16.246.516.899,00	0,00	1.015.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261.516.899,00
9	Dinas Sosial	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.070.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00
14	Dinas Pertanian	658.589.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.616,00	0,00	0,00	651.641.440,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	209.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.376.000,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	104.320.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.320.280,00
17	Dinas Perdagangan	3.348.909.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.909.170,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9.425.281.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.301.950,00	0,00	0,00	8.792.979.590,00
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
23	Dinas Pariwisata	134.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.846.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	41.338.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.338.040,00
29	Kantor Camat Kaidipang	459.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.058.000,00
30	Kantor Camat Pinogaluman	86.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.832.000,00
31	Kantor Camat Bolangitang Barat	114.601.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.601.380,00
32	Kantor Camat Bolangitang Timur	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000.000,00
33	Kantor Camat Bintauna	229.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.050.000,00
35	Kantor Camat Sangkub	60.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.545.000,00
	Jumlah	58.214.598.662,00	0,00	1.015.000.000,00	0,00	1.255.929.500,00	0,00	639.249.566,00	0,00	1.255.929.500,00	0,00	58.590.349.096,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
Per 31 Desember 2023

Lampiran XIII.2

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023							Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah				Berkurang			
			Belanja Modal	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sekretariat Dewan	12.972.017.505,91	286.790.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.898.400,00	0,00	10.932.909.805,91
2	Sekretaris Daerah	3.725.619.100,00	121.855.800,00	0,00	0,00	78.588.000,00	0,00	566.835.500,00	78.588.000,00	3.280.639.400,00
3	Bagian Pemerintahan	463.709.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.665.062,00	0,00	397.044.400,00
4	Bagian Hukum	665.928.550,00	58.963.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.730.400,00	0,00	549.161.350,00
5	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam	469.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.758.000,00	0,00	412.979.000,00
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	333.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.571.000,00	0,00	267.994.000,00
7	Bagian Umum dan Perlengkapan	32.194.498.363,00	613.852.950,00	0,00	0,00	1.823.045.000,00	0,00	2.787.288.125,00	1.823.045.000,00	30.021.063.188,00
8	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1.838.001.052,00	161.127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.616.057,00	0,00	1.654.512.595,00
9	Bagian Organisasi	546.142.000,00	24.531.000,00	0,00	0,00	174.000.000,00	0,00	87.597.400,00	174.000.000,00	483.075.600,00
10	Bagian Barang dan Jasa	871.550.200,00	110.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.378.500,00	0,00	928.221.700,00
11	Bagian Administrasi Pembangunan	133.587.500,00	26.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	160.477.500,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.065.560.794,00	148.717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.988.044,00	0,00	898.290.050,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.594.706.710,00	1.121.970.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.987.740,00	0,00	5.004.689.280,00
14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.115.975.200,00	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.120.500,00	0,00	1.028.754.700,00
15	Dinas Perhubungan	6.107.621.538,25	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	6.117.721.538,25
16	Dinas Kesehatan	30.108.905.269,00	2.646.533.858	0,00	2.407.000.000,00	7.398.001.286,00	0,00	4.010.952.508,00	7.398.001.286,00	31.151.486.619,00
17	Puskesmas Boroko	7.493.102.371,00	54.745.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.108.743,00	0,00	6.893.739.507,00
18	Puskesmas Buko	5.488.840.953,00	26.673.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.089.928,00	0,00	5.131.424.083,00
19	Puskesmas Bolangitang	7.346.654.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.654.412,00
20	Puskesmas Bohabak	5.091.021.743,00	0,00	0,00	554.666.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.688.410,00
21	Puskesmas Bintauna	6.582.774.383,00	25.236.400,00	0,00	-	0,00	0,00	2.466.918.890,20	0,00	4.141.091.892,80
22	Puskesmas Sangkub	5.992.036.237,50	1.285.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	331.733.042,50	0,00	5.669.588.195,00
23	Puskesmas Bintauna Pantai	2.964.395.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.652.250,00	0,00	2.841.743.474,00
24	Puskesmas Sang	4.428.619.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.056.500,00	0,00	4.150.562.924,00
25	Puskesmas Ollot	2.446.686.176,00	43.567.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.288.007,00	0,00	2.235.965.676,00
26	puskesmas mokoditek	2.791.235.393,00	18.034.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.745.738,00	0,00	2.541.524.239,00

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023							Saldo Per 31 Des 2023	
			Bertambah				Berkurang				
			Belanja Modal	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi		
27	UPTD TFC	156.052.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.998.500,00	0,00	111.054.280,00
28	Puskesmas Tuntung	4.298.411.684,00	18.846.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.488,00	0,00	4.315.080.656,00
29	uptd instalasi farmasi	1.369.064.217,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.914.311,00	0,00	1.288.149.906,00
30	Rumah Sakit Umum Daerah	70.702.333.254,00	1.663.899.620,00	0,00	1.099.000.000,00	0,00	0,00	0,00	929.066.056,00	0,00	72.536.166.818,00
31	puskesmas Biontong	1.979.447.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.447.636,00
32	RSUD Pratama Bintauna	14.995.792.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565.966,00	0,00	14.972.226.124,00
33	Dinas Pendidikan	61.680.973.327,89	3.772.961.999,00	755.463.802,00	416.300.000,00	155.425.000,00	4.730.000,00	1.647.258.643,14	155.425.000,00		64.973.710.485,75
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.117.318.410,00	24.183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.405.000,00	0,00	901.096.410,00
35	Dinas Sosial	1.591.815.530,00	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.496.000,00	0,00	1.458.519.530,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.367.185.408,00	161.623.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.620.908,00	0,00	1.334.188.400,00
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.438.309.626,00	602.254.100,00	0,00	174.500.000,00	331.980.000,00	0,00	0,00	975.267.168,00	331.980.000,00	6.239.796.558,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	836.365.090,00	55.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.883.880,00	0,00	648.956.210,00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.737.372.437,00	178.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.495.500,00	0,00	1.872.035.937,00
40	Dinas Pertanian	5.274.842.657,00	1.380.974.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.324.950,00	0,00	6.427.492.507,00
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.993.253.700,00	270.807.500,00	0,00	0,00	385.000.000,00	0,00	0,00	707.437.000,00	385.000.000,00	2.556.624.200,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	625.705.650,00	42.300.000,00	0,00	22.866.000,00	0,00	0,00	0,00	70.047.500,00	0,00	620.824.150,00
43	Dinas Perdagangan	2.949.716.300,00	122.854.500,00	0,00	20.639.500,00	0,00	0,00	0,00	94.636.500,00	0,00	2.998.573.800,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5.629.274.251,00	149.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.880.705,00	0,00	5.164.488.546,00
45	Inspektorat Daerah	2.652.794.485,00	95.429.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.818.583,00	0,00	2.312.405.897,00
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.626.876.502,00	243.001.200,00	0,00	0,00	67.197.000,00	0,00	0,00	296.190.500,00	67.197.000,00	3.573.687.202,00
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.292.738,00	97.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.940.200,00	0,00	906.192.538,00
48	Dinas Lingkungan Hidup	3.053.642.263,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.860.230,00	0,00	2.918.482.033,00
49	Dinas Pariwisata	1.583.521.900,00	110.262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.996.750,00	0,00	1.529.787.550,00
50	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.733.636.500,00	15.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.954.500,00	0,00	2.465.622.000,00
51	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	574.637.684,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.843.000,00	0,00	523.494.684,00
52	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.258.699.900,00	78.516.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.113.400,00	0,00	1.869.103.038,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1.919.188.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.081.500,00	0,00	1.848.107.247,00
54	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian	1.378.340.990,00	127.510.000,00	0,00	0,00	154.900.000,00	0,00	0,00	200.283.150,00	154.900.000,00	1.305.567.840,00
55	Kantor Camat Kaidipang	719.022.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.166.420,00	0,00	622.856.275,00
56	Kantor Camat Pinogaluman	671.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.495.500,00	0,00	634.020.500,00
57	Kantor Camat Bolangitang Barat	737.968.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.645.380,00	0,00	615.323.270,00
58	Kantor Camat Bolangitang Timur	1.083.979.060,00	26.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.385.000,00	0,00	1.073.204.060,00
59	Kantor Camat Bintauna	829.373.800,00	54.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.020.100,00	0,00	782.933.700,00
60	Kelurahan Bintauna	208.942.575,00	37.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.319.000,00	0,00	223.508.575,00
61	Kantor Camat Sangkub	692.750.490,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.544.500,00	0,00	578.805.990,00
Jumlah		359.300.911.087,55	14.969.035.158,00	755.463.802,00	4.702.972.167,00	10.568.136.286,00	4.730.000,00	25.655.114.122,84	10.568.136.286,00		354.068.538.091,71

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023							Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah				Berkurang			
			Belanja Modal	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	
32	RSUD Pratama Bintauna	0,00	0,00	37.094.710.853,24	0,00	13.038.816.457,00	0,00	4.078.002.250,24	0,00	46.055.525.060,00
33	Dinas Pendidikan	174.622.420.651,25	14.280.687.711,00	71.334.835,00	3.859.496.455,00	0,00	751.871.908,00	401.134.857,00	0,00	191.680.932.887,25
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.054.807.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.807.300,00
35	Dinas Sosial	2.263.486.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.486.387,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.864.424.386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.424.386,55
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.290.909.485,00	176.428.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467.338.021,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.848.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.891.000,00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.910.551.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.551.387,00
40	Dinas Pertanian	12.905.021.523,00	3.596.312.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.650.000,00	0,00	16.322.683.554,00
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.745.615.950,00	45.054.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.670.850,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	3.639.296.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.296.031,00
43	Dinas Perdagangan	37.853.275.045,00	158.501.450,00	19.965.000,00	0,00	0,00	0,00	16.026.550,00	0,00	38.015.714.945,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	7.936.010.905,00	205.438.000,00	0,00	179.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321.435.905,00
45	Inspektorat Daerah	4.738.436.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738.436.642,00
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.900.615.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.615.653,00
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.311.313.736,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	6.326.313.736,00
49	Dinas Pariwisata	7.125.211.284,00	129.603.280,00	24.882.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279.696.879,00
50	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2.274.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.585.000,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	2.831.071.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.071.250,00
54	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian	2.166.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.902.000,00
55	Kantor Camat Kaidipang	3.226.997.710,45	0,00	0,00	199.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.843.710,45
56	Kantor Camat Pinogaluman	1.130.392.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.392.999,00
57	Kantor Camat Bolangitang Barat	2.340.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.258.000,00
58	Kantor Camat Bolangitang Timur	2.008.733.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.733.901,00
59	Kantor Camat Bintauna	2.091.198.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.907.999,00	0,00	1.941.290.299,00
60	Kelurahan Bintauna	825.005.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.005.999,00
61	Kantor Camat Sangkub	3.000.478.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.478.981,00
Jumlah		584.961.231.011,18	40.198.872.110,00	37.551.956.003,24	4.442.203.018,87	17.897.162.698,50	4.154.084.908,00	6.770.894.305,24	18.047.178.698,50	656.079.266.930,05

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023							Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah				Berkurang			
			Belanja Modal	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495.000,00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dinas Pertanian	404.474.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.474.260,00
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	528.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.253.000,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
43	Dinas Perdagangan	346.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.008.000,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	207.729.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.729.975,00
45	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.510.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.450.000,00
48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.302.614.537,00	168.789.350,00	31.000.000,00	8.883.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511.287.537,00
49	Dinas Pariwisata	1.043.183.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.183.867,00
50	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
51	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
54	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian	56.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700.000,00
55	Kantor Camat Kaidipang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Kantor Camat Pinogaluman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kantor Camat Bolangitang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Kantor Camat Bolangitang Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Kantor Camat Bintauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Kelurahan Bintauna	0,00	51.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875.000,00
61	Kantor Camat Sangkub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.082.618.843.069,52	48.314.091.184,00	22.659.074.412,28	159.830.090,00	0,00	0,00	3.106.347.860,28	0,00	1.150.645.490.895,52

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023							Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah				Berkurang			
			Belanja Modal	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	Reklasifikasi	Koreksi	Mutasi	
51	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	970.627.085,00	9.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.553.085,00
54	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kantor Camat Kaidipang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Kantor Camat Pinogaluman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kantor Camat Bolangitang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Kantor Camat Bolangitang Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Kantor Camat Bintauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Kelurahan Bintauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kantor Camat Sangkub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		46.602.234.612,09	2.928.085.179,00	281.166.082,50	404.951.614,00	0,00	395.922.900,00	1.132.371.161,50	1178228450,00	47.509.914.976,09

32	RSUD Pratama Bintauna	37.094.710.853,24	0,00	0,00	0,00	37.094.710.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Pendidikan	22.735.700,00	0,00	21.408.106,00	0,00	44.143.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dinas Kelautan dan Perikanan	94.750.000,00	0,00	0,00	0,00	94.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dinas Perdagangan	49.915.000,00	0,00	0,00	0,00	49.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dinas Pariwisata	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kantor Camat Kaidipang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Kantor Camat Pinogaluman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Kantor Camat Bolangitang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Kantor Camat Bolangitang Timur	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Kantor Camat Bintauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Kelurahan Bintauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kantor Camat Sangkub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		63.619.444.625,02	0,00	3.263.300.106,00	150.098.000,00	38.241.623.159,24	0,00	0,00	22.673.742.112,28	0,00	383860200,00	276.436.082,50	6.224.901.577,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD DAN AMORTISASI
Sampai Dengan 31 Desember 2023

No	SKPD	Nama Barang	Merk/TypeE	Bahan	Bulan	Tahun	Harga Pereolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat Bulan	Masa Manfaat Yang diLalui	Amortisasi Per Bulan	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Nilai Buku Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bagian Umum dan Perlengkapan	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Aset Tetap/Berupa CD Instal WS XP2	Campuran	12	2009	15.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	15.000.000,00	0,00
		Peralatan Mini Komputer Lain-lain	SIM-PJ VR. 01 / Vista dan Windows 7 (32 & 64 BIT) Memory 256 MB	Program	7	2009	15.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	15.000.000,00	0,00
		Peralatan Mini Komputer Lain-lain			4	2012	20.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	20.000.000,00	0,00
2	Hubungan Masyarakat	Software			9	2009	70.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	70.000.000,00	0,00
3	Bagian Organisasi	perangkat lunak sistem operasi	Aplikasi Absensi	Software	2	2017	27.940.000,00	5	60	60	0,02	0,00	27.940.000,00	0,00
		perangkat lunak sistem operasi	Jaringan instalasi dan training Operator	Software	2	2017	3.740.000,00	5	60	60	0,02	0,00	3.740.000,00	0,00
		Software	Aplikasi	Software	5	2021	75.000.000,00	5	60	32	0,02	15.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00
4	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	perangkat lunak sistem operasi	Aplikasi E-tentatif	Software	4	2021	59.900.000,00	10	60	33	0,02	11.980.000,00	32.945.000,00	26.955.000,00
5	Tapem	perangkat lunak sistem operasi		Software	3	2020	74.580.000,00	5	60	46	0,02	14.916.000,00	57.178.000,00	17.402.000,00
		perangkat lunak sistem operasi		Software	12	2020	99.825.000,00	5	60	37	0,02	19.965.000,00	61.558.750,00	38.266.250,00
		perangkat lunak sistem operasi		Software	12	2020	45.000.000,00	5	60	37	0,02	9.000.000,00	27.750.000,00	17.250.000,00
6	Bagian Hukum	perangkat lunak sistem operasi		Software	5	2020	99.440.000,00	5	60	44	0,02	19.888.000,00	72.922.666,67	26.517.333,33
7	Bagian Kesra	Sistem Aplikasi Hibah dan Bantuan Sosial	Aplikasi SIABAS	software	4	2023	74.869.500,00	5	60	9	0,02	11.230.425,00	11.230.425,00	63.639.075,00
8	Dinas Perhubungan	Peralatan Jaringan Lain-lain	SIMPJ / Aplikasi	software	10	2013	15.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	15.000.000,00	0,00
		perangkat lunak sistem operasi	Website	software	6	2014	49.500.000,00	5	60	60	0,02	0,00	49.500.000,00	0,00
		perangkat lunak sistem operasi	software	software	1	2014	49.500.000,00	5	60	60	0,02	0,00	49.500.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Software Online Web Base	Software	3	2021	99.880.000,00	5	60	34	0,02	19.976.000,00	56.598.666,67	43.281.333,33
9	BPKPD	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Pajak Multimedia / Software	Software	11	2013	187.250.000,00	5	60	60	0,02	0,00	187.250.000,00	0,00
		Peralatan Jaringan Lain-lain	Website DPPKAD / Aplikasi	Software	6	2014	49.550.000,00	5	60	60	0,02	0,00	49.550.000,00	0,00
		Server	PPB / Aplikasi	Software	6	2015	119.564.000,00	5	60	60	0,02	0,00	119.564.000,00	0,00
		Peralatan Jaringan Lain-lain	Aplikasi PFK / Software	Software	12	2015	10.950.000,00	5	60	60	0,02	0,00	10.950.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi SIKAD OM	Software	12	2017	34.902.000,00	5	60	60	0,02	0,00	34.902.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi SIBAPER	Software	12	2017	39.900.000,00	5	60	60	0,02	0,00	39.900.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi e-TTP	Software	4	2020	49.885.000,00	5	60	45	0,02	9.977.000,00	37.413.750,00	12.471.250,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi e-hibah	Software	9	2020	57.500.000,00	5	60	40	0,02	11.500.000,00	38.333.333,33	19.166.666,67
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi Ledger tanah	Software	12	2020	49.720.000,00	5	60	37	0,02	9.944.000,00	30.660.666,67	19.059.333,33
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi Pemutakhiran Data PBB-P2	Software	10	2021	54.945.000,00	5	60	27	0,02	10.989.000,00	24.725.250,00	30.219.750,00

No	SKPD	Nama Barang	Merk/TypeE	Bahan	Bulan	Tahun	Harga Pereolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat Bulan	Masa Manfaat Yang diLalui	Amortisasi Per Bulan	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Nilai Buku Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi SABAR	Software	11	2022	74.925.000,00	5	60	14	0,02	14.985.000,00	17.482.500,00	57.442.500,00
							1.623.265.500,00	0,00	0,00	0,00	0,47	179.350.425,00	1.216.595.008,33	406.670.491,67
10	Dinas Pekerjaan Umum	Perangkat Lunak sistem Operasi	website	Software	12	2014	49.550.000,00	5	60	60	0,02	0,00	49.550.000,00	0,00
		DED Drainase Ibu kota Kabupaten Tahap II	Perencanaan		9	2009	86.121.200,00	5	60	60	0,02	0,00	86.121.200,00	0,00
		DED Drainase Kecamatan Bolangitang barat	Perencanaan Master Plan		12	2009	440.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	440.000.000,00	0,00
		DED Drainase IKK Bolangitang Timur	Perencanaan Master Plan		12	2011	280.250.000,00	5	60	60	0,02	0,00	280.250.000,00	0,00
		Hasil Kajian	Perencanaan, Masterplan Irigasi		12	2014	367.290.014,00	5	60	60	0,02	0,00	367.290.014,00	0,00
		Hasil Kajian	Perencanaan, dokumentasi, Perencanaan		12	2014	139.600.000,00	5	60	60	0,02	0,00	139.600.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi		Software	5	2020	99.957.000,00	5	60	44	0,02	19.991.400,00	73.301.800,00	26.655.200,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi Mobile Decision Suport Systm	Software	10	2021	149.875.000,00	5	60	27	0,02	29.975.000,00	67.443.750,00	82.431.250,00
		Hasil Kajian	Penyusunan Dokumen Leger Jalan		12	2023	290.985.350,00	5	60	1	0,02	4.849.755,83	4.849.755,83	286.135.594,17
		Hasil Kajian	Penyusunan Dokumen Leger Jalan		12	2023	357.878.550,00	5	60	1	0,02	5.964.642,50	5.964.642,50	351.913.907,50
		Hasil Kajian	Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jalan dan Jembatan		12	2023	145.504.350,00	5	60	1	0,02	2.425.072,50	2.425.072,50	143.079.277,50
11	Dinas Pendidikan	Perangkat Lunak sistem Operasi	software mesin absensi	Software	3	2017	30.800.000,00	5	60	60	0,02	0,00	30.800.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Bitdefender Antivirus Plus	Program	7	2017	3.256.000,00	5	60	60	0,02	0,00	3.256.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Microsof Windows Server 2016	Program	7	2017	3.724.500,00	5	60	60	0,02	0,00	3.724.500,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Microsof Windows Server 2016	Program	7	2017	2.625.000,00	5	60	60	0,02	0,00	2.625.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Bitdefender Antivirus Plus	Program	7	2017	19.800.000,00	5	60	60	0,02	0,00	19.800.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Bitdefender Antivirus Plus	Program	7	2017	3.256.000,00	5	60	60	0,02	0,00	3.256.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Bitdefender Antivirus Plus	Program	7	2017	3.724.500,00	5	60	60	0,02	0,00	3.724.500,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Bitdefender Antivirus Plus	Program	7	2017	2.625.000,00	5	60	60	0,02	0,00	2.625.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Bitdefender Antivirus Plus	Program	7	2017	19.800.000,00	5	60	60	0,02	0,00	19.800.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	PC Client	Program	6	2018	17.295.000,00	5	60	60	0,02	1.441.250,00	17.295.000,00	0,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi "Si Pintar"	Software	12	2019	99.770.000,00	5	60	49	0,02	19.954.000,00	81.445.416,00	18.324.584,00
	SMP Negeri 1 Bolangitang Barat	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	3	2019	2.500.000,00	5	60	58	0,02	500.000,00	2.416.666,67	83.333,33
	SMPN 2 Kaidipang	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00
	SMPN 2 Pinogaluman	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00
	SMP Satu Atap Tontulow	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00
	SMPN 2 Bolangitang Timur	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00
	SMPN 2 Bintauna	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00
	SMP Satu Atap Tanjung Sidupa	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00

No	SKPD	Nama Barang	Merk/TypeE	Bahan	Bulan	Tahun	Harga Pereolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat Bulan	Masa Manfaat Yang diLalui	Amortisasi Per Bulan	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Nilai Buku Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SMPN 3 Bolangitang Timur	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	8	2019	36.062.400,00	5	60	53	0,02	7.212.480,00	31.855.120,00	4.207.280,00
	SMPN 3 Bolangitang Barat	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi USBN	Software	11	2020	23.652.600,00	5	60	38	0,02	4.730.520,00	14.979.980,00	8.672.620,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi		Software	12	2021	5.210.000,00	5	60	25	0,02	1.042.000,00	2.170.833,33	3.039.166,67
12	Dinas PMD	Perangkat Lunak sistem Operasi	software mesin absensi	Software	6	2017	31.570.000,00	5	60	60	0,02	0,00	31.570.000,00	0,00
13	Dinas Dukcapil	Perangkat Lunak sistem Operasi	software mesin absensi	Software	6	2017	27.940.000,00	5	60	60	0,02	0,00	27.940.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi PIAK	Software	10	2017	33.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	33.000.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi PIAK	Software	9	2020	89.900.000,00	5	60	40	0,02	17.980.000,00	59.933.333,33	29.966.666,67
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi Antrian Digital	Software	11	2022	15.976.400,00	5	60	14	0,02	3.195.280,00	3.727.826,67	12.248.573,33
14	Dinas Pertanian	Perangkat Lunak sistem Operasi	software mesin absensi	Software	4	2017	27.951.000,00	5	60	60	0,02	0,00	27.951.000,00	0,00
		Kajian	Dokumen Kajian Lahan Perpetanian Pangan		12	2023	175.000.000,00	5	60	1	0,02	2.916.666,67	2.916.666,67	172.083.333,33
15	Inspektorat Daerah	Perangkat Lunak sistem Operasi	software mesin absensi	Software	3	2017	27.940.000,00	5	60	60	0,02	0,00	27.940.000,00	0,00
16	Bapelitbang	Perangkat Lunak sistem Operasi	Website	Software	8	2016	19.400.000,00	5	60	60	0,02	0,00	19.400.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	software mesin absensi	Software	4	2017	27.951.000,00	5	60	60	0,02	0,00	27.951.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi Online Web	Software	10	2021	99.825.000,00	5	60	27	0,02	19.965.000,00	44.921.250,00	54.903.750,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Aplikasi NTP	Software	11	2023	49.894.000,00	5	60	2	0,02	1.663.133,33	1.663.133,33	48.230.866,67
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan	Software	12	2023	124.875.000,00	5	60	1	0,02	2.081.250,00	2.081.250,00	122.793.750,00
17	Dinas Pariwisata	Perangkat Lunak sistem Operasi	Website	Software	3	2016	28.704.000,00	5	60	60	0,02	0,00	28.704.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Website	Software	4	2019	22.770.000,00	5	60	57	0,02	4.554.000,00	21.631.500,00	1.138.500,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi TIK Pariwisata	Software	8	2020	90.000.000,00	5	60	41	0,02	18.000.000,00	61.500.000,00	28.500.000,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Aplikasi Daster Ibu	Software	11	2021	29.696.700,00	5	60	26	0,02	5.939.340,00	12.868.570,00	16.828.130,00
18	BKPSDM	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software	Software	4	2009	10.000.000,00	5	60	60	0,02	0,00	10.000.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Sistem Sidik Jari		1	2015	47.300.000,00	5	60	60	0,02	0,00	47.300.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	SIMPEK		1	2015	149.469.000,00	5	60	60	0,02	0,00	149.469.000,00	0,00
		Perangkat Lunak sistem Operasi	Jaringan Aplikasi Software	Software	2	2020	25.000.000,00	5	60	47	0,02	5.000.000,00	19.583.333,33	5.416.666,67
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi E-Kinerja dan SM-ASN	Software	12	2021	59.850.000,00	5	60	25	0,02	11.970.000,00	24.937.500,00	34.912.500,00
19	BPBD	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	2	2018	29.975.000,00	5	60	60	0,02	499.583,33	29.975.000,00	0,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	5	2018	25.850.000,00	5	60	60	0,02	1.723.333,33	25.850.000,00	0,00
21	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	6	2018	30.800.000,00	5	60	60	0,02	2.566.666,67	30.800.000,00	0,00
		Sistem Informasi Petugas Kebersihan (SIGARIS)	Software SIGARIS	Software	3	2023	99.789.000,00	5	60	10	0,02	16.631.500,00	16.631.500,00	83.157.500,00

No	SKPD	Nama Barang	Merk/TypeE	Bahan	Bulan	Tahun	Harga Pereolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat Bulan	Masa Manfaat Yang diLalui	Amortisasi Per Bulan	Beban Amortisasi Tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	Nilai Buku Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPP dan PA	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	6	2018	29.975.000,00	5	60	60	0,02	2.497.916,67	29.975.000,00	0,00
23	Dinas PM PTSP	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	7	2018	29.975.000,00	5	60	60	0,02	2.997.500,00	29.975.000,00	0,00
24	Dinas Pemuda Olahraga	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	3	2018	29.975.000,00	5	60	60	0,02	999.166,67	29.975.000,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	12	2018	9.872.000,00	5	60	60	0,02	1.809.866,67	9.872.000,00	0,00
26	Kantor Kesbangpol	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	3	2018	29.975.000,00	5	60	60	0,02	999.166,67	29.975.000,00	0,00
27	Satpol PP	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	2	2018	29.975.000,00	5	60	60	0,02	499.583,33	29.975.000,00	0,00
28	Dinas Kesehatan	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Pencatatan dan Pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan berbasis IT (Inovasi)	Software	12	2019	29.975.000,00	5	60	49	0,02	5.995.000,00	24.479.583,33	5.495.416,67
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi penilaian kinerja puskesmas program IT (inovasi)	Software	4	2020	37.345.000,00	5	60	45	0,02	7.469.000,00	28.008.750,00	9.336.250,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi SIDIA	Software	12	2020	99.825.000,00	5	60	37	0,02	19.965.000,00	61.558.750,00	38.266.250,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi		Software	5	2022	74.925.000,00	5	60	20	0,02	14.985.000,00	24.975.000,00	49.950.000,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi		Software	11	2022	99.789.000,00	5	60	14	0,02	19.957.800,00	23.284.100,00	76.504.900,00
		Perangkat Lunak Sistem Operasi	Pengerolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Pemotensi Bencana	Software	11	2023	74.814.000,00	5	60	2	0,02	2.493.800,00	2.493.800,00	72.320.200,00
29	UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Perangkat Lunak sistem Operasi	Software Mesin Absensi	Software	11	2018	25.690.500,00	5	60	60	0,02	4.281.750,00	25.690.500,00	0,00
30	PKM Boroko		Software Puskesmas	Software	12	2019	20.000.000,00	5	60	49	0,02	4.000.000,00	16.333.333,33	3.666.666,67
31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Perangkat Lunak Sistem Operasi	software mesin absensi	Software	5	2019	21.900.000,00	5	60	56	0,02	4.380.000,00	20.440.000,00	1.460.000,00
			Software Aplikasi DSS	Software	12	2019	50.000.000,00	5	60	49	0,02	10.000.000,00	40.833.333,33	9.166.666,67
32	Kec.Pinogaluman	Perangkat Lunak Sistem Operasi		Software	6	2020	10.929.000,00	5	60	43	0,02	2.185.800,00	7.832.450,00	3.096.550,00
33	Dinas Perumahan	Perangkat Lunak Sistem Operasi	software mesin absensi	Software	12	2020	15.000.000,00	5	60	37	0,02	3.000.000,00	9.250.000,00	5.750.000,00
34	PKM Bohabak	Jarinan Aplikasi	software mesin absensi	Software	2	2020	11.400.000,00	5	60	47	0,02	2.280.000,00	8.930.000,00	2.470.000,00
36	PKM Buko	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi Absensi	Software	3	2020	5.500.000,00	5	60	46	0,02	1.100.000,00	4.216.666,67	1.283.333,33
37	PKM Bintauna	Perangkat Lunak Sistem Operasi	Aplikasi Absensi	Software	3	2020	11.490.000,00	5	60	46	0,02	2.298.000,00	8.809.000,00	2.681.000,00
Jumlah							5.046.242.464,00					370.241.104,17	3.204.829.100,84	1.841.413.363,16
Total							6.669.507.964,00					549.591.529,17	4.421.424.109,17	2.248.083.854,83



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
MUTASI ASET TIDAK BERWUJUD
Per 31 Desember 2023

Lampiran XIII.7b

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023 Tak Berwujud	Mutasi Tahun 2023		Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah	Berkurang	
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	291.619.000,00	0,00	0,00	291.619.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.975.000,00	0,00	0,00	29.975.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	729.091.000,00	0,00	0,00	729.091.000,00
4	Bagian Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagian Bina kesejahteraan Sosial	0,00	74.869.500,00	0,00	74.869.500,00
6	Bagian Ekonomi dan SDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	129.900.000,00		0,00	129.900.000,00
8	Bagian Hukum	99.440.000,00	0,00	0,00	99.440.000,00
9	Bagian Organisasi	106.680.000,00	0,00	0,00	106.680.000,00
10	Bagian Tata Pemerintahan	219.405.000,00	0,00	0,00	219.405.000,00
11	Bagian Umum dan Perlengkapan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
12	Bapelitbang	147.176.000,00	174.769.000,00	0,00	321.945.000,00
13	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	166.816.400,00	0,00	0,00	166.816.400,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas komunikasi, Informasi dan Persandian	71.900.000,00	0,00	0,00	71.900.000,00
16	Dinas Kesehatan	341.859.000,00	74.814.000,00	0,00	416.673.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	25.850.000,00	0,00	0,00	25.850.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	30.800.000,00	99.789.000,00	0,00	130.589.000,00
19	Dinas Pariwisata	171.170.700,00	0,00	0,00	171.170.700,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.407.011.464,00	0,00	0,00	2.407.011.464,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.570.000,00	0,00	0,00	31.570.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	29.975.000,00	0,00	0,00	29.975.000,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.975.000,00	0,00	0,00	29.975.000,00
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	490.475.400,00	0,00	0,00	490.475.400,00
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29.975.000,00	0,00	0,00	29.975.000,00
26	Dinas Perhubungan	213.880.000,00	0,00	0,00	213.880.000,00
27	Dinas Perikanan dan Kelautan	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Pertanian	27.951.000,00	175.000.000,00	0,00	202.951.000,00
29	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
30	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Inspektorat Daerah	27.940.000,00	0,00	0,00	27.940.000,00
33	Kantor Camat Bintauna	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kantor Camat BolangItang Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kantor Camat Bolang Itang Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kantor Camat Kaidipang	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kantor Camat Pinogaluman	10.929.000,00	0,00	0,00	10.929.000,00
38	Kantor Camat Sangkub	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kantor Kesbang Pol	29.975.000,00	0,00	0,00	29.975.000,00
40	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	29.975.000,00	0,00	0,00	29.975.000,00
41	Puskesmas Bintauna	11.490.000,00	0,00	0,00	11.490.000,00

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023 Tak Berwujud	Mutasi Tahun 2023		Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah	Berkurang	
42	Puskesmas Bohabak	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
43	Puskesmas Bolangitang	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Puskesmas Boroko	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
45	Puskesmas Buko	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
46	Puskesmas Sang	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Puskesmas Sangkub	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sekretariat DPRD	9.872.000,00	0,00	0,00	9.872.000,00
50	UPTD Instalasi Farmasi	25.690.500,00	0,00	0,00	25.690.500,00
Jumlah		6.070.266.464,00	599.241.500,00	0,00	6.669.507.964,00

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DAFTAR ASET RUSAK BERAT/HILANG

Per 31 Desember 2023

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023					Saldo Per 31 Des 2023
			Bertambah			Berkurang	Total	
			Rusak Berat	Koreksi /Temuan BPK (Audited)				
			Aset Lain-lain	Unaudited	Aset Rusak Berat	Hilang		
1	Sekretariat DPRD	127.023.359,71	2.324.055.800,00	0,00	0,00	2.451.079.159,71	2.221.679.159,71	229.400.000,00
2	Sekretariat Daerah	56.850.000,00	566.835.500,00	0,00	0,00	623.685.500,00	623.685.500,00	0,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Pemerintahan	0,00	66.665.062,00	0,00	0,00	66.665.062,00	66.665.062,00	0,00
5	Bagian Hukum	0,00	175.730.400,00	0,00	0,00	175.730.400,00	175.730.400,00	0,00
6	Bagian Ekonomi dan SDA	0,00	56.758.000,00	0,00	0,00	56.758.000,00	56.758.000,00	0,00
7	Bagian Bina kesejahteraan Sosial	0,00	65.571.000,00	0,00	0,00	65.571.000,00	65.571.000,00	0,00
8	Bagian Umum dan Perlengkapan	1.288.211.899,00	2.652.756.125,00	0,00	0,00	3.940.968.024,00	2.804.308.123,00	1.136.659.901,00
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	51.706.375,00	344.616.057,00	0,00	0,00	396.322.432,00	396.322.432,00	0,00
10	Bagian Organisasi	0,00	87.597.400,00	0,00	0,00	87.597.400,00	87.597.400,00	0,00
11	Bagian Barang dan Jasa	0,00	53.378.500,00	0,00	0,00	53.378.500,00	53.378.500,00	0,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	520.000,00	262.930.044,00	0,00	26.529.000,00	289.979.044,00	263.450.044,00	26.529.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.210.117.901,00	711.987.740,00	705.500.600,00	0,00	7.627.606.241,00	711.987.740,00	6.915.618.501,00
14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	122.120.500,00	0,00	0,00	122.120.500,00	122.120.500,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	109.550.000,00	0,00	88.241.000,00	0,00	197.791.000,00	0,00	197.791.000,00
16	Dinas Kesehatan	249.260.632,00	3.665.937.508,00	0,00	0,00	3.915.198.140,00	3.915.198.140,00	0,00
17	Puskesmas Ollot	0,00	231.137.500,00	0,00	0,00	231.137.500,00	231.137.500,00	0,00
18	Puskesmas Mokoditek	0,00	258.561.154,00	0,00	0,00	258.561.154,00	258.561.154,00	0,00
19	UPTD TFC	0,00	44.998.500,00	0,00	0,00	44.998.500,00	44.998.500,00	0,00
20	Puskesmas Tuntung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UPTD Instalasi Farmasi	5.280.000,00	80.914.311,00	0,00	0,00	86.194.311,00	86.194.311,00	0,00
22	RSUD Talaga	0,00	929.066.056,00	0,00	0,00	929.066.056,00	929.066.056,00	0,00

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023				Saldo Per 31 Des 2023	
			Bertambah		Berkurang			
			Rusak Berat	Koreksi / Temuan BPK (Audited)				
23	Puskesmas Bontong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	RSU Pratama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Puskesmas Boroko	311.551.703,00	645.146.000,00	0,00	0,00	956.697.703,00	956.697.700,00	3,00
26	Puskesmas Buko	4,00	372.381.870,00	0,00	0,00	372.381.874,00	372.381.870,00	4,00
27	Puskesmas Bolangitang	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
28	Puskesmas Bohabak	110.170.001,00	0,00	0,00	0,00	110.170.001,00	107.353.000,00	2.817.001,00
29	Puskesmas Bintauna	117.511.002,00	2.463.473.863,00	0,00	0,00	2.580.984.865,00	2.572.240.863,00	8.744.002,00
30	Puskesmas Sangkub	36.771.345,50	323.733.042,50	0,00	0,00	360.504.388,00	360.504.385,00	3,00
31	Puskesmas Bintauna Pantai	0,00	122.652.250,00	0,00	0,00	122.652.250,00	122.652.250,00	0,00
32	Puskesmas Sang	85.690.000,00	278.056.500,00	0,00	0,00	363.746.500,00	363.746.500,00	0,00
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	133.586.552,74	206.663.457,14	44.143.806,00	7.700.000,00	392.093.815,88	316.214.010	75.879.806,00
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	240.405.000,00	0,00	0,00	240.405.000,00	240.405.000,00	0,00
35	Dinas Sosial	201.487.000,00	184.496.000,00	0,00	0,00	385.983.000,00	193.483.000,00	192.500.000,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.200.000,00	194.620.908,00	0,00	0,00	209.820.908,00	194.620.908,00	15.200.000,00
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205.445.714,00	975.267.168,00	0,00	0,00	1.180.712.882,00	1.165.567.168,00	15.145.714,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	242.883.880,00	0,00	0,00	242.883.880,00	242.883.880,00	0,00
39	Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	272.013.842,00	43.495.500,00	0,00	0,00	315.509.342,00	152.793.342,00	162.716.000,00
40	Dinas Pertanian	190.506.000,00	83.331.200,00	0,00	0,00	273.837.200,00	171.837.200,00	102.000.000,00
41	Dinas Perikanan	194.078.000,00	707.437.000,00	94.750.000,00	0,00	996.265.000,00	335.417.000,00	660.848.000,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	2.496.000,00	70.047.500,00	0,00	0,00	72.543.500,00	72.543.500,00	0,00
43	Dinas Perdagangan	0,00	94.636.500,00	29.950.000,00	0,00	124.586.500,00	94.636.500,00	29.950.000,00
44	Badan Pengelola Keuangan Daerah	126.616.800,00	613.880.705,00	0,00	0,00	740.497.505,00	652.497.505,00	88.000.000,00
45	Inspektorat	0,00	435.818.583,00	0,00	0,00	435.818.583,00	435.818.583,00	0,00
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	45.426.800,00	296.190.500,00	0,00	0,00	341.617.300,00	329.042.300,00	12.575.000,00
47	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	11.500.000,00	191.940.200,00	0,00	0,00	203.440.200,00	203.440.200,00	0,00

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi Tahun 2023				Saldo Per 31 Des 2023	
			Bertambah			Berkurang		
			Rusak Berat	Koreksi /Temuan BPK (Audited)	Total			
48	Dinas Lingkungan Hidup	99.388.300,00	155.860.230,00	0,00	0,00	255.248.530,00	255.248.530,00	0,00
49	Dinas Pariwisata	748.000,00	163.996.750,00	36.750.000,00	0,00	201.494.750,00	164.744.750,00	36.750.000,00
50	Kantor Pol PP	17.448.000,00	283.954.500,00	0,00	0,00	301.402.500,00	286.567.500,00	14.835.000,00
51	Kantor Kesbang Pol	0,00	58.843.000,00	0,00	0,00	58.843.000,00	58.843.000,00	0,00
52	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	0,00	468.113.400,00	0,00	0,00	468.113.400,00	468.113.400,00	0,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah	0,00	71.081.500,00	0,00	0,00	71.081.500,00	71.081.500,00	0,00
54	Dinas komunikasi, Informasi dan Persandian	0,00	200.283.150,00	0,00	0,00	200.283.150,00	200.283.150,00	0,00
55	Kantor Camat Kaidipang	349.100.101,00	96.166.420,00	0,00	0,00	445.266.521,00	96.166.420,00	349.100.101,00
56	Kantor Camat Pinogaluman	9.097.036,00	37.495.500,00	0,00	0,00	46.592.536,00	37.495.500,00	9.097.036,00
57	Kantor Camat BolangItang Barat	1,00	122.645.380,00	0,00	0,00	122.645.381,00	122.645.380,00	1,00
58	Kantor Camat Bolang Itang Timur	11.985.000,00	37.385.000,00	34.900.000,00	0,00	84.270.000,00	49.370.000,00	34.900.000,00
59	Kantor Camat Bintauna	10.018.001,00	101.020.100,00	0,00	0,00	111.038.101,00	82.395.100	28.643.001,00
60	Kelurahan Bintauna	0,00	22.379.000,00	0,00	0,00	22.379.000,00	22.379.000,00	0,00
61	Kantor Camat Sangkub	17.426.000,00	136.544.500,00	0,00	0,00	153.970.500,00	143.952.500,00	10.018.000,00
	Jumlah	10.673.781.371,95	23.443.943.213,64	1.034.235.406,00	34.229.000,00	35.186.188.991,59	24.830.471.915,59	10.355.717.076,00



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR BARANG EKSTRAKOMPTABEL
Per 31 Desember 2023

Lampiran XIII.9

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi tahun 2022		Saldo Per 31 Desember 2023
			Bertambah	Berkurang	
1	Sekretariat Dewan	128.325.650,00	0,00	0,00	128.325.650,00
2	Sekretaris Daerah	84.276.800,00	0,00	0,00	84.276.800,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	-
4	Bagian Pemerintahan	4.760.000,00	0,00	1.220.000,00	3.540.000,00
5	Bagian Hukum	3.996.000,00	0,00	0,00	3.996.000,00
6	Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Bagian Umum dan Perlengkapan	293.358.052,00	134.532.000,00	0,00	427.890.052,00
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bagian Organisasi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
11	Bagian Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.096.000,00	0,00	0,00	3.096.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	671.103.419,00	0,00	137.832.000,00	533.271.419,00
14	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	376.974.796,00	0,00	0,00	376.974.796,00
16	Dinas Kesehatan	624.168.482,00	11.655.000,00	222.680.480,00	413.143.002,00
17	Puskesmas Ollot	145.913.989,00	0,00	11.066.000,00	134.847.989,00
18	Puskesmas Mokoditek	94.116.220,00	0,00	6.997.910,00	87.118.310,00
19	UPTD TFC	5.175.250,00	0,00	740.000,00	4.435.250,00
20	Puskesmas Tuntung	159.021.650,00	0,00	0,00	159.021.650,00
21	Uptd Instalasi Farmasi	77.483.254,00	0,00	0,00	77.483.254,00
22	Rumah Sakit Umum Daerah	372.408.441,12	0,00	0,00	372.408.441,12
23	Puskesmas Bontong	37.504.500,00	0,00	0,00	37.504.500,00
24	RSUD Pratama Bintauna	4.207.200,00	0,00	0,00	4.207.200,00
25	Puskesmas Boroko	251.868.285,00	0,00	35.565.000,00	216.303.285,00
26	Puskesmas Buko	181.323.066,00	0,00	41.810.726,00	139.512.340,00
27	Puskesmas Bolangitang	200.932.751,00	0,00	0,00	200.932.751,00
28	Puskesmas Bohabak	120.700.313,50	0,00	15.570.000,00	105.130.313,50
29	Puskesmas Bintauna	267.231.585,00	0,00	116.820.680,00	150.410.905,00
30	Puskesmas Sangkub	174.598.728,00	8.000.000,00	6.703.612,00	175.895.116,00
31	Puskesmas Bintauna Pantai	82.787.870,00	0,00	16.462.600,00	66.325.270,00
32	Puskesmas Sang	53.397.740,00	0,00	27.447.000,00	25.950.740,00
33	Dinas Pendidikan	5.057.577.282,27	442.489.854,00	0,00	5.500.067.136,27
34	Dinas Pemuda dan Olahraga	57.883.500,00	0,00	0,00	57.883.500,00
35	Dinas Sosial	92.463.210,00	0,00	0,00	92.463.210,00
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.090.000,00	0,00	0,00	33.090.000,00

No	Satuan Kerja Pengguna Barang	Saldo Awal 1 Januari 2023	Mutasi tahun 2022		Saldo Per 31 Desember 2023
			Bertambah	Berkurang	
37	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	261.566.096,00	0,00	1.089.000,00	260.477.096,00
38	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.091.460,00	0,00	16.091.460,00	0,00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.170.241,00	0,00	497.173,00	33.673.068,00
40	Dinas Pertanian	163.769.200,00	134.865.000,00	0,00	298.634.200,00
41	Dinas Perikanan	23.417.000,00	0,00	2.200.000,00	21.217.000,00
42	Dinas Ketahanan Pangan	77.658.000,00	0,00	0,00	77.658.000,00
43	Dinas Perdagangan	13.596.600,00	0,00	0,00	13.596.600,00
44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	68.267.500,00	0,00	0,00	68.267.500,00
45	Inspektorat Daerah	28.747.000,00	0,00	8.085.000,00	20.662.000,00
46	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	13.910.050,00	0,00	12.669.250,00	1.240.800,00
47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.173.170,00	0,00	0,00	1.173.170,00
48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	203.734.887,00	0,00	2.458.210,00	201.276.677,00
49	Dinas Pariwisata	773.210.148,00	0,00	0,00	773.210.148,00
50	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	517.500,00	0,00	0,00	517.500,00
52	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	20.526.000,00	0,00	0,00	20.526.000,00
53	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	15.424.000,00	0,00	0,00	15.424.000,00
54	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian	6.256.000,00	0,00	250.000,00	6.006.000,00
55	Kantor Camat Kaidipang	164.336.000,00	0,00	0,00	164.336.000,00
56	Kantor Camat Pinogaluman	23.984.800,00	0,00	0,00	23.984.800,00
57	Kantor Camat Bolangitang Barat	46.898.450,00	0,00	0,00	46.898.450,00
58	Kantor Camat Bolangitang Timur	4.012.000,00	0,00	0,00	4.012.000,00
59	Kantor Camat Bintauna	67.601.751,00	0,00	8.651.750,00	58.950.001,00
60	Kelurahan Bintauna	48.990.000,00	940.000,00	0,00	0,00
61	Kantor Camat Sangkub	47.446.000,00	0,00	0,00	47.446.000,00
Jumlah		11.788.047.886,89	732.481.854,00	692.907.851,00	11.777.691.889,89



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DAFTAR HUTANG
Sampai Dengan 31 Desember 2023

No.	SKPD	Rekanan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik s.d 31 Des 2023	Realisasi Keuangan s.d 31 Des 2023	% Keuangan S.d 31 Des 2023	Sisa Pembayaran / Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9=5-7
Tahun 2015								
Dinas Pertanian								
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Paket I Desa Biontong (Sabongo)	CV. Aldzy Riy	522/SPK/DPPK/BMU/73/IX/2015	178.000.000,00	100%	169.100.000,00	95,00%	8.900.000,00
2	Pembangunan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Paket II Desa Binuni	CV. Putra Taylor	522/SPK/DPPK/BMU/89/IX/2015	178.000.000,00	100%	169.100.000,00	95,00%	8.900.000,00
3	Pembangunan jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Paket XXII Desa Tomuagu	CV. Gema Karya	522/SPK/DPPK/BMU/109/IX/2015	178.000.000,00	100%	151.300.000,00	85,00%	26.700.000,00
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Paket IX Kelurahan Bintauna	CV. Sinar Limunga	522/SPK/DPPK/BMU/70/IX/2015	194.389.000,00	100%	184.669.550,00	95,00%	9.719.450,00
5	Pembangunan Jaringan Irigasi air Permukaan (JIAP) Paket I Desa Biontong	CV. Alvirgi Putra	522/SPK/DPPK/BMU/153/IX/2015	168.700.000,00	100%	160.265.000,00	95,00%	8.435.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)								
1	Pembangunan jalan Perkebunan Binjeita	CV. Rian Prima Jaya	600/DPU/44/Kontrak-BM/x/2015	451.777.000,00	100%	429.188.150,00	95,00%	22.588.850,00
2	Pembangunan Talud Jalan Mome	CV. Vhanga Jaya	600/584.Z24/DPU/SPK-BM/PL/X/2015	181.945.000,00	100%	172.847.750,00	95,00%	9.097.250,00
3	Pembangunan Drainase Desa Ombile	CV. Putri Ayu	600/583.219/DPU/SPK-CK/PL/X/2015	184.926.000,00	100%	175.679.700,00	95,00%	9.246.300,00
4	Pembangunan Jalan Arah Pantai Desa Bunong	CV. Fadillah Jaya	600/584.Z37/DPU/SPK-BM/PL/X/2015	179.955.000,00	100%	170.957.250,00	95,00%	8.997.750,00
5	Pembangunan jaringan Air Bersih Desa Dengi	CV. Jaya Zahra Abadi	600/584.Z30/DPU/SPK-CK/PL/X/2015	94.962.000,00	100%	90.213.900,00	95,00%	4.748.100,00
6	Pembangunan MCK Desa Buko	CV. Bintang Dua	600/584.Z39/DPU/SPK-CK/PL/X/2015	74.955.000,00	100%	71.207.250,00	95,00%	3.747.750,00
Jumlah tahun 2015								121.080.450,00
Tahun 2016								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)								
1.	Penataan Halaman Kantor	CV. Bumi Bigo Perkasa	600/38/DPU/SPK-CK/PL/V/2016	199.900.000,00	100%	189.905.000,00	95,00%	9.995.000,00
2	Pembangunan Jembatan Mome	CV. Sinar Karya Monica	600/DPU/54/KONTRAK-BM/IX/2016	293.801.000,00	100%	279.110.950,00	95,00%	14.690.050,00
3	Pembangunan Rumah Pengasapan Kopra	CV. Amira	522/029/SPK-KONSTRUKSI/DPPK/BMU/VI/ 2016	24.900.000,00	100%	23.655.000,00	95,00%	1.245.000,00
4	Pembangunan Tempat Pematangan Hewan	CV. Dwi Putra Sentosa	522/019/SPK-KONSTRUKSI/DPPK/ BMU/VI/2016	89.950.000,00	100%	85.452.500,00	95,00%	4.497.500,00
Kantor Camat Pinogaluman								
1.	Pembangunan Pagar Kantor Camat Pinogaluman	CV. Eka Utama Karya	600/278/C.06-PGLM/VIII/2016	239.843.000,00	100%	227.850.850,00	95,00%	11.992.150,00
Jumlah Tahun 2016								42.419.700,00

No.	SKPD	Rekanan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik s.d 31 Des 2023	Realisasi Keuangan s.d 31 Des 2023	% Keuangan S.d 31 Des 2023	Sisa Pembayaran / Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9=5-7
Tahun 2018								
Dinas Pariwisata								
1.	Pekerjaan Pembangunan Jalur Pejalan Kaki	CV. Cipta Tinelotama / Noldy Tuu	556/160/SPK/DISPAR/BMU/VII/2018	436.179.000,00	100%	414.370.050,00	95,00%	21.808.950,00
Jumlah Tahun 2018								21.808.950,00
Tahun 2020								
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)								
1	Pekerjaan pembangunan selasar rumah sakit	CV. Uga Jaya Pertiwi	001/KONTRAK/RSUD-BMU/223/X/2020	284.622.180,33	100%	270.391.071,00	95,00%	14.231.109,00
Jumlah Tahun 2020								14.231.109,00
Tahun 2021								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Pekerjaan Pembangunan Saluran Pembuang Desa Paku Selatan 2021 (DAU) (PUPR)	Fadil Karya Pratama	600/47/52.a/DPUPR-BMU/SPK-CK/PL/IV/2021	149.882.800,00	100%	142.388.660,00	95,00%	7.494.140,00
2	Pengawasan Rekonstruksi/ Peningkatan Jalan Area RSUD Kab. Bolaang Mongondow Utara 2021 (PUPR)	Duta Anugerah Konsultan	600/176/DPUPR-BMU/SPK-BM/PL/IX/2021	220.660.000,00	100%	220.660.000,00	95,00%	-
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)								
1	Pengadaan instalasi Listrik RSUD	Amira, Amirullah	001/RSUD-BMU/SPK/011/II/2021	176.487.000,00	100%	167.487.000,00	95,00%	9.000.000,00
Jumlah Tahun 2021								16.494.140,00
Tahun 2022								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)								
1	Pembangunan Jembatan Nunuka (Lanjutan) 2022	CV Media Karya	600/140/DPUPR/BMU/KONTRAK-BM/VIII/2022	Rp 1.900.000.000	100%	Rp 1.805.000.000	95,00%	95.000.000,00
Dinas Kesehatan								
1	Rehabilitasi Sedang Puskesmas Bintauna	CV Farrel	001/SPK/DINKES-BMU/268/XII/2022	100.081.000,00	100%	95.076.950,00	95,00%	5.004.050,00
2	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Pratama	PT. Tri Patra Konsultan	001/SPK/DINKES-BMU/ 165 /V/2022	894.549.000,00	100%	670.911.750,00	75,00%	223.637.250,00
Dinas Perumahan								
1	Paving jalan masuk perumahan	CV Farrel	663/70/DPKPP-BMU/SPK/PL/XI/2022	Rp 52.814.000	100%	Rp 50.173.300	95,00%	2.640.700,00
Jumlah Tahun 2022								326.282.000,00
Tahun 2023								
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)								

No.	SKPD	Rekanan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik s.d 31 Des 2023	Realisasi Keuangan s.d 31 Des 2023	% Keuangan S.d 31 Des 2023	Sisa Pembayaran / Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9=5-7
1	Pembangunan Plat Duicker Ruas Jalan Boroko-Bigo Selatan-Kuala Utara-Jambusarang	Cv. Mustika Mandiri	600 / 123 / DPUPR-BMU / SPK-BM / PL / X / 2023	Rp 155.657.000,00	100%	Rp 147.874.150,00	95,00%	7.782.850,00
2	Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan Pontak - Soligir	CV.Media Karya	600 / 188 / DPUTR-BMU / SPK-BMU / PL / XI / 2023	Rp 124.926.000,00	100%	Rp 118.679.700,00	95,00%	6.246.300,00
3	Pembangunan Plat Duicker Dalapuli Barat	CV. Fazri Mandiri	600 / 158 / DPUTR-BMU / SPK-BM / PL / XI / 2023	Rp 82.715.000,00	100%	Rp 78.579.250,00	95,00%	4.135.750,00
4	Pembangunan Talud Jalan Baturapa Desa Talaga Tomoagu	CV. Mustika Mandiri	600 / 191 / DPUTR-BMU / SPK-BM / PL / XI / 2023	Rp 149.841.000,00	100%	Rp 142.348.950,00	95,00%	7.492.050,00
5	Perkerasan Jalan Perkebunan Bongkalao Wakat	CV. Amira	600 / 161 / DPUTR-BMU / SPK-BM / PL / XI / 2023	Rp 199.886.000,00	100%	Rp 189.891.700,00	95,00%	9.994.300,00
6	Pembangunan Saluran Tepi Jalan Desa Buko	CV. Fazri Mandiri	600 / 155 / DPUTR-BMU / SPK-BM / PL XI / 2023	Rp 199.950.000,00	100%	Rp 189.952.500,00	95,00%	9.997.500,00
7	Pembangunan Saluran Tepi Jalan Ruas Madihutu - Pinagut	CV. Bongkil Indah	600 / 197 / DPUTR-BMU / SPK-BM / PL / XI / 2023	Rp 199.841.000,00	100%	Rp 189.848.950,00	95,00%	9.992.050,00
8	Perluasan Spam Jaringan Perpipaan Desa Saleo I	CV. Toekang Keloe	600 / 127 / DPUTR-BMU / SPK-CK / PL / XI / 2023	Rp 119.925.000,00	100%	Rp 113.928.749,00	95,00%	5.996.251,00
9	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Biontong II	CV. Bongkil Indah	600 / 104 / DPUTR-BMU / SPK-CK / PL / IX / 2023	Rp 35.314.500,00	100%	Rp 33.548.776,00	95,00%	1.765.724,00
10	Pembangunan Tangki Septic Individual Desa Wakat	CV. Rajawali Putra	600 / 87 / DPUPR-BMU / SPK-CK / PL / IX / 2023	Rp 199.836.000,00	100%	Rp 189.844.200,00	95,00%	9.991.800,00
11	Galian Saluran Pembuang Dengi	CV. Citra Fafa Berlian	600 / 102 / DPUTR-BMU / SPK-CK / PL / IX / 2023	Rp 149.894.800,00	100%	Rp 142.400.060,00	95,00%	7.494.740,00
12	Pembangunan Jalan Paving Pemukiman Buko Selatan	CV. Utara Persada	600 / 111 / DPUTR-BMU / SPK-CK / PL / X / 2023	Rp 149.950.000,00	100%	Rp 142.452.500,00	95,00%	7.497.500,00
13	Pembangunan Gedung Serbaguna Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara	CV. Frekaindo Perkasa	600 / 200 / DPUTR-BMU / SPK-CK / PL / XI / 2023	Rp 199.941.000,00	100%	Rp 189.943.950,00	95,00%	9.997.050,00
14	Pemeliharaan Alun-alun Lapangan Kembar Boroko	CV. Dwifara	600 / 94 / DPUTR-BMU / SPK-CK / PL / IX / 2023	Rp 69.936.000,00	100%	Rp 66.439.199,00	95,00%	3.496.801,00
15	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bigo	CV. Mustika Mandiri	600 / 28 / DPUPR / BMU / KONTRAK-SDA / V / 2023	Rp 1.401.087.300,00	100%	Rp 1.331.032.935,00	95,00%	70.054.365,00
16	DED Bina Marga	CV. Eljireh Abadi	600 / 92 / DPUPR / BMU / KONTRAK-BM / IX / 2023	Rp 215.473.200,00	100%	Rp 129.283.920,00	60,00%	86.189.280,00
Dinas Pendidikan								
1	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 1 Biontong	CV Sungai Randangan	420/485/KONTRAK/DIKBUD/BMU/IX/2023 9/21/2023	239.720.700,00	100%	227.734.665,00	95,00%	11.986.035,00
2	Pembangunan Pekerjaan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 1 Dalapuli	CV Sang Abdi	420/240.11/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 18 Juli 2023	242.501.200,00	100%	230.376.140,00	95,00%	12.125.060,00
3	Pekerjaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Beserta Perabotnya SDN 1 Dalapuli	CV Sang Abdi	420/252/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 18 Juli 2023	132.250.000,00	100%	125.637.500,00	95,00%	6.612.500,00
4	Pembangunan Pekerjaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Beserta Perabotnya SDN 1 Bohabak 2	CV Toekang Keloe	420/251/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 18 Juli 2023	132.366.945,00	100%	125.748.598,00	95,00%	6.618.347,00

No.	SKPD	Rekanan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik s.d 31 Des 2023	Realisasi Keuangan s.d 31 Des 2023	% Keuangan S.d 31 Des 2023	Sisa Pembayaran / Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9=5-7
5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Beserta Perabotnya SDN 2 Tombulung	CV Jidilfa Inti Global	420/253/SPK/DIKBUD/BMU/VII/2023 18 Juli 2023	132.182.074,00	100%	125.572.971,00	95,00%	6.609.103,00
6	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Bolangitang	CV Evlogia Jaya	420/240.9/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/20, 18 Juli 2023	254.843.700,00	100%	242.101.515,00	95,00%	12.742.185,00
7	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Busisingo	CV Faeyza Karya Konstruksi	420/240.5.A/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	243.672.300,00	100%	231.488.685,00	95,00%	12.183.615,00
8	Pembangunan Pekerjaan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Dalapuli	CV Karya Arikon	420/240.1/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	236.985.600,00	100%	165.889.920,00	70,00%	71.095.680,00
9	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 BOHABAK 2	CV Padat Aksi Niaga	420/240.4/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023,18 Juli 2023	249.325.200,00	100%	236.858.940,00	95,00%	12.466.260,00
10	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Kuhanga	CV Padat Aksi Niaga	420/240.6/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023 18 Juli 2023	249.113.200,00	100%	236.657.540,00	95,00%	12.455.660,00
11	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SDN 1 Biontong	CV Citra Fafa Berlian	420/240.7/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	251.244.600,00	100%	238.682.370,00	95,00%	12.562.230,00
12	Pembangunan Toilet/Jamban Beserta Sanitasinya SDN 1 DALAPULI	CV Jidilfa Inti Global	420/259/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	153.924.255,00	100%	146.228.042,00	95,00%	7.696.213,00
13	Pembangunan Toilet/ Jamban Beserta Sanitasinya SDN 1 Biontong	CV Naghita Konstruks	420/260/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	154.550.000,00	100%	146.822.500,00	95,00%	7.727.500,00
14	Pembangunan Toilet/Jamban Beserta Sanitasinya SDN 1 Kuhanga	CV Padat Aksi Niaga	420/261/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023	154.505.584,00	100%	146.780.305,00	95,00%	7.725.279,00
15	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMPN 3 Bolangitang Timur Beserta Perabotnya	CV Padat Karya Perkasa	420/240.13/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	293.135.900,00	100%	278.479.105,00	95,00%	14.656.795,00
16	Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 1 Bolangitang Barat	CV Citra Fafa Berlian	420/240.16/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	619.954.800,00	100%	588.957.060,00	95,00%	30.997.740,00
17	Pembangunan Pekerjaan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya SMPN 2 Pinogaluman	CV Dian Utara	420/240.19/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	253.039.400,00	100%	240.387.430,00	95,00%	12.651.970,00
18	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD TERPADU AL Multazam	CV Toekang Keloe	420/245/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	164.703.520,00	100%	156.468.344,00	95,00%	8.235.176,00
19	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD Terpadu Budi Luhur	CV Padat Karya Perkasa	420/243/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	82.729.576,00	100%	78.593.097,00	95,00%	4.136.479,00
20	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Terpadu Budi Luhur	CV Padat Aksi Niaga	420/258/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 14 Juli 2023	134.450.381,00	100%	127.727.862,00	95,00%	6.722.519,00
21	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PAUD Terpadu AL Multazam	CV Padat Aksi Niaga	420/257/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	134.225.207,00	100%	127.513.947,00	95,00%	6.711.260,00
22	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah PAUD Terpadu Qurataayun	CV Tuodan Jaya Abadi	420/247/SPK/DIKBUD/BMU/VII/2023,18 Juli 2023	134.491.755,00	100%	73.970.465,00	55,00%	60.521.290,00
23	Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Kayuogou	CV Zovanda	420/446/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	190.663.770,00	100%	181.130.582,00	95,00%	9.533.188,00
24	Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Bolangitang 1	CV Zovanda	420/437/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	190.652.670,00	100%	181.120.037,00	95,00%	9.532.633,00
25	Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Biontong 1	CV Zovanda	420/431/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	190.677.900,00	100%	181.144.005,00	95,00%	9.533.895,00
26	Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 1 Pimpi	CV Dua permata biru	420/430/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	79.195.713,00	100%	75.235.928,00	95,00%	3.959.785,00
27	Pembangunan Pagar SDN 1 Biontong	CV Bongkil Indah	420/431/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	136.208.700,00	100%	129.398.265,00	95,00%	6.810.435,00
28	Pembangunan Pagar SDN 2 Tombulung	CV Khenfi	420/442/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	136.171.302,00	100%	129.362.737,00	95,00%	6.808.565,00

No.	SKPD	Rekanan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik s.d 31 Des 2023	Realisasi Keuangan s.d 31 Des 2023	% Keuangan S.d 31 Des 2023	Sisa Pembayaran / Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9=5-7
29	Pembangunan Pagar SDN 1 Binjeita 1	CV Dua Permata Biru	420/463/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	79.238.700,00	100%	75.276.765,00	95,00%	3.961.935,00
30	Pembangunan Pagar SDN 1 Busisingo Utara	CV Padat Karya Perkasa	420/426/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	190.676.021,00	100%	181.142.220,00	95,00%	9.533.801,00
31	Pembangunan Pagar SDN 1 Binjeita 2	CV Jidilfa Inti Global	420/500/KONTRAK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	323.012.000,00	100%	306.861.400,00	95,00%	16.150.600,00
32	Pembangunan Pagar SDN 1 Sangkub 2	CV Faeyza Karya Konstruksi	420/425/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 15 September 2023	190.700.000,00	100%	181.165.000,00	95,00%	9.535.000,00
33	Pemasangan Paving Block Halaman SDN 1 Binjeita	CV Dua Permata Biru	420/342/SPK/DIKBUD/BMU/VIII/2023, 15 September 2023	82.202.219,00	100%	78.092.108,00	95,00%	4.110.111,00
34	Rehabilitasi Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	CV Padat Karya Perkasa	420/512/SPK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 29 Sweptember 2023	75.089.300,00	100%	71.334.835,00	95,00%	3.754.465,00
35	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDK XII Sumba	CV Bintang Dua	420/515/KONTRAK/DIKBUD/BMU/X/2023, 2 Oktober 2023	286.357.000,00	100%	272.039.150,00	95,00%	14.317.850,00
36	Pembangunan Ruang Kelas Baru MTs Fathul Khairat Paku Selatan	CV Citra Fafa Berlian	420/503/KONTRAK/DIKBUD/BMU/IX/2023, 5 Oktober 2023	683.909.000,00	100%	649.713.550,00	95,00%	34.195.450,00
37	Pekerjaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang PAUD TERPADU Qurataayun	CV Toekang Keloe	420/248/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VII/2023, 18 Juli 2023	164.751.949,00	100%	156.514.352,00	95,00%	8.237.597,00
38	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar SD/MI	CV Mitra Nusa Consulindo	420/160.A/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023, 26 Juni 2023	374.294.407,55	100%	336.997.980,00	90,04%	37.296.427,55
39	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar SMP/MT.s	CV Mitra Nusa Consulindo	420/160.B/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023, 26 Juni 2023	98.498.528,30	100%	88.560.000,00	89,91%	9.938.528,30
40	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pagar SPNF/SKB	CV Mitra Nusa Consulindo	420/160.C/KONTRAK/DIKBUD/BMU/VI/2023, 26 Juni 2023	49.249.264,15	100%	44.280.000,00	89,91%	4.969.264,15
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)								
1	Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah	CV Khenfi	001/RSUD-BMU/KONTRAK/046/VII/2023, 31 Juli 2023	3.263.000.000,00	98,60%	Rp 3.067.220.000,00	94,00%	150.098.000,00
2	Pengadaan Mobil Unit Transfusi Darah	PT Bayu Fas Merapi	001/RSUD-BMU/KONTRAK/E.P/044/VII/2023, 17 Juli 2023	1.099.000.000,00	100%	0,00	0%	1.099.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
1	Pengaman Tebing Sungai Desa Bigo Selatan	CV. Metch Construction	660/DLH-BMU/SPK/PL/03/XII/2023, 19 Des. 2023	152.968.000,00	100%	Rp 145.319.600,00	95%	7.648.400,00
2	Pembangunan sumur resapan Desa Bigo	CV. Metch Construction	660/DLH-BMU/SPK/PL/04/XII/2023, 19 Des. 2023	24.705.000,00	100%	Rp 23.469.750,00	95%	1.235.250,00
Dinas Kesehatan								
1	Rehabilitasi Pustu Solo/Sokoputa	CV. Ulul Albab	001/SPK/DINKES-BMU/407/IX/2023	146.254.690,00	100%	138.941.955,50	95%	7.312.734,50
2	Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan	CV. Jidilfa Inti Global	001/SPK/DINKES-BMU/459/IX/2023	99.183.273,00	100%	94.224.109,35	95%	4.959.163,65
3	Rehabilitasi Puskesmas Bintauna	CV. Dwinanta Putra Pratama	001/SPK/DINKES-BMU/401/IX/2023	146.244.155,00	100%	138.931.947,25	95%	7.312.207,75
4	Pengawasan Pembangunan Pagar Puskesmas	CV. Bintang Prima Consultant	001/SPK/DINKES-BMU/456.A/XII/2023	3.435.000,00	100%	0,00	0%	3.435.000,00
5	Rehabilitasi Puskesmas Biontong	CV. Perwira	001/SPK/DINKES-BMU/398/IX/2023	146.280.071,00	100%	138.966.067,45	95%	7.314.003,55
6	Pengawasan Pembangunan Gedung Sementara Obat Expire IFK	CV. Bintang Prima Consultant	001/SPK/DINKES-BMU/453/IX/2023	3.435.000,00	100%	0,00	0%	3.435.000,00
7	Rehabilitasi Pagar Puskesmas Busato	CV. Padat Aksi Niaga	001/SPK/DINKES-BMU/462/I/2023	98.906.907,00	100%	93.961.562,00	95%	4.945.345,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian								
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						28.528.184,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						3.432.371,00

No.	SKPD	Rekanan	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik s.d 31 Des 2023	Realisasi Keuangan s.d 31 Des 2023	% Keuangan S.d 31 Des 2023	Sisa Pembayaran / Pemeliharaan
1	2	3	4	5	6	7	8 (%)	9=5-7
Jumlah Tahun 2023								2.134.198.396,45
Total Utang s.d 31 Desember 2023								2.676.514.745,45



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN ASET SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (SCRAP)TAHUN 2023

No.	Nama OPD	Jenis Barang	Harga Jual (Rp)	Ket.
1	Puskesmas Bintauna	Campuran 1 paket	1.000.000,00	SK No. 203Tahun 2023
2	Kecamatan Bolangitang Timur	Campuran 1 paket	200.000,00	SK No. 203Tahun 2023
3	Bagian Barang dan Jasa Setda	Campuran 1 paket	350.000,00	SK No. 203Tahun 2023
4	Kecamatan Kaidipang	Campuran 1 paket	200.000,00	SK No. 204Tahun 2023
5	Dinas Ketahanan Pangan	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 204Tahun 2023
6	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Campuran 1 paket	650.000,00	SK No. 204Tahun 2023
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Campuran 1 paket	200.000,00	SK No. 204Tahun 2023
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Campuran 1 paket	200.000,00	SK No. 204Tahun 2023
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Campuran 1 paket	400.000,00	SK No. 204Tahun 2023
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Campuran 1 paket	250.000,00	SK No. 204Tahun 2023
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Campuran 1 paket	700.000,00	SK No. 204Tahun 2023
12	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Campuran 1 paket	150.000,00	SK No. 204Tahun 2023
13	Dinas Sosial	Campuran 1 paket	300.000,00	SK No. 204Tahun 2023
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Campuran 1 paket	600.000,00	SK No. 204Tahun 2023
15	Dinas Pariwisata	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 204Tahun 2023
16	Bagian Hukum	Campuran 1 paket	650.000,00	SK No. 204Tahun 2023
17	Kecamatan Sangkub	Campuran 1 paket	230.000,00	SK No. 204Tahun 2023
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Campuran 1 paket	250.000,00	SK No. 204Tahun 2023
19	Puskesmas Ollot	Campuran 1 paket	200.000,00	SK No. 204Tahun 2023
20	Puskesmas Sang	Campuran 1 paket	400.000,00	SK No. 204Tahun 2023
21	Bagian Tata Pemerintahan	Campuran 1 paket	150.000,00	SK No. 204Tahun 2023
22	UPTD TFC	Campuran 1 paket	300.000,00	SK No. 204Tahun 2023
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Campuran 1 paket	200.000,00	SK No. 204Tahun 2023
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Campuran 1 paket	800.000,00	SK No. 204Tahun 2023
25	Inspektorat Daerah	Campuran 1 paket	450.000,00	SK No. 204Tahun 2023
26	Bagian Humas	Campuran 1 paket	300.000,00	SK No. 204Tahun 2023
27	Kantor Camat Pinogaluman	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 204Tahun 2023
28	Kecamatan Bolangitang Barat	Campuran 1 paket	230.000,00	SK No. 204Tahun 2023
29	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Campuran 1 paket	300.000,00	SK No. 204Tahun 2023
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Campuran 1 paket	250.000,00	SK No. 204Tahun 2023
31	Puskesmas Bintauna Pantai	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 204Tahun 2023
32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Campuran 1 paket	600.000,00	SK No. 204Tahun 2023
33	Dinas Pemuda dan Olahraga	Campuran 1 paket	250.000,00	SK No. 204Tahun 2023
34	Sekretariat Dewan	Campuran 1 paket	750.000,00	SK No. 464Tahun 2023
35	Sekretariat Daerah	Campuran 1 paket	710.000,00	SK No. 464Tahun 2023
36	Bagian Pemerintahan	Campuran 1 paket	155.000,00	SK No. 464Tahun 2023
37	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Campuran 1 paket	150.000,00	SK No. 464Tahun 2023

No.	Nama OPD	Jenis Barang	Harga Jual (Rp)	Ket.
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Campuran 1 paket	150.000,00	SK No. 464Tahun 2023
39	Bagian Umum	Campuran 1 paket	800.000,00	SK No. 464Tahun 2023
40	Bagian Protokol Pimpinan	Campuran 1 paket	350.000,00	SK No. 464Tahun 2023
41	Bagian Organisasi	Campuran 1 paket	153.000,00	SK No. 464Tahun 2023
42	Bagian Hukum	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 464Tahun 2023
43	Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	Campuran 1 paket	152.000,00	SK No. 464Tahun 2023
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Campuran 1 paket	750.000,00	SK No. 464Tahun 2023
45	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Campuran 1 paket	700.000,00	SK No. 464Tahun 2023
46	Dinas Sosial	Campuran 1 paket	125.000,00	SK No. 464Tahun 2023
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Campuran 1 paket	250.000,00	SK No. 464Tahun 2023
48	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Campuran 1 paket	110.000,00	SK No. 464Tahun 2023
49	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Campuran 1 paket	310.000,00	SK No. 464Tahun 2023
50	Dinas Pertanian	Campuran 1 paket	175.000,00	SK No. 464Tahun 2023
51	Dinas Perikanan dan Kelautan	Campuran 1 paket	220.000,00	SK No. 464Tahun 2023
52	Dinas Ketahanan Pangan	Campuran 1 paket	260.000,00	SK No. 464Tahun 2023
53	Dinas Perdagangan	Campuran 1 paket	120.000,00	SK No. 464Tahun 2023
54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Campuran 1 paket	410.000,00	SK No. 464Tahun 2023
55	Inspektorat Daerah	Campuran 1 paket	315.000,00	SK No. 464Tahun 2023
56	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Campuran 1 paket	225.000,00	SK No. 464Tahun 2023
57	Dinas Kesehatan	Campuran 1 paket	950.000,00	SK No. 465 Tahun 2023
58	Puskesmas Buko	Campuran 1 paket	700.000,00	SK No. 465 Tahun 2023
59	Puskesmas Bohabak	Campuran 1 paket	360.000,00	SK No. 465 Tahun 2023
60	Puskesmas Bintauna	Campuran 1 paket	800.000,00	SK No. 465 Tahun 2023
61	Puskesmas Boroko	Campuran 1 paket	803.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
62	Puskesmas Sangkub	Campuran 1 paket	700.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
63	Puskesmas Bintauna Pantai	Campuran 1 paket	390.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
64	Puskesmas Sang	Campuran 1 paket	305.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
65	Puskesmas Ollot	Campuran 1 paket	410.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
66	Puskesmas Mokoditek	Campuran 1 paket	430.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
67	Rumah Sakit Umum Daerah	Campuran 1 paket	430.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
68	UPTD Farmasi	Campuran 1 paket	510.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
69	Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Campuran 1 paket	215.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
70	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Campuran 1 paket	715.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
71	Dinas Pariwisata	Campuran 1 paket	225.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
72	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Campuran 1 paket	310.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
73	Kantor Politik dan Kesatuan Bangsa	Campuran 1 paket	700.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
74	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Campuran 1 paket	350.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
75	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Campuran 1 paket	150.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
76	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Campuran 1 paket	800.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
77	Kantor Camat Bolangitang Barat	Campuran 1 paket	320.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
78	Kantor Camat Bolangitang Timur	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
79	Kantor Camat Bintauna	Campuran 1 paket	315.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
80	Kelurahan Bintauna	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
81	Kecamatan Kaidipang	Campuran 1 paket	210.000,00	SK No. 466 Tahun 2023
82	UPTD Therapeutic Feeding Centre	Campuran 1 paket	100.000,00	SK No. 466 Tahun 2023

No.	Nama OPD	Jenis Barang	Harga Jual (Rp)	Ket.
		Jumlah	29.998.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

No.	Nama Barang	Merk	Nomor Polisi	Harga Jual (Rp)	Ket.
1	Station Wagon	Toyota/Fortuner 2,5 G A/T	DB 1010 H/DB 7 H	15.204.800,00	SK No. 144Tahun 2023
2	Station Wagon	Toyota/Fortuner 2.5 G A/T	DB 1011 H/DB 8 H	19.812.200,00	SK No. 144Tahun 2023
3	Station Wagon	Toyota / Avanza	DB 48 H	900.000,00	SK No. 203Tahun 2023
4	Sepeda Motor	KTM / APPTM100-AR	DB 5594 H	100.000,00	SK No. 203Tahun 2023
5	Sepeda Motor	KTM / APPTM100-AR	DB 5595 H	50.000,00	SK No. 203Tahun 2023
6	Sepeda Motor	KTM / APPTM100-AR	DB 5596 H	75.000,00	SK No. 203Tahun 2023
7	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	DB 5513 H	100.000,00	SK No. 203Tahun 2023
8	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter MX	DB 5583 H	100.000,00	SK No. 203Tahun 2023
9	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	DB 5701 H	200.000,00	SK No. 203Tahun 2023
10	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Mitsubishi/ Colt Diesel Sparta	DB 7000 H	58.787.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
11	Station Wagon	Toyota / Avanza G. 1.3 New/F601 RM-GMMFJJ	DB 22 H	35.000.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
12	Sedan	Toyota / Camry 2,5 V A/T	DB 1 H	200.001.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
13	Station Wagon	Mitsubishi/ Outlander Sport 2.0 L PX-E (4X2) AT Assy	DB 25 H	165.000.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
14	Station Wagon	New Nissan X-TRAIL / Minor Change 2.0 M/T	DB 13 H	7.999.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
15	Station Wagon	Ford Escape/XLT / Ford Escape/XLT	DB 2525 H	7.897.899,00	SK No. 324 Tahun 2023
16	Station Wagon	FORD / Ford New Everest	DB 10 H	22.300.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
17	Station Wagon	Suzuki/ Grand Vitara	DB 3003 H	7.999.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
18	Sepeda Motor	Honda Revo/Solo R2	DB 5904 H	2.500.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
19	Sepeda Motor	Honda Revo / NF11B2D1 M/T	DB 5013 HA	4.105.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
20	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter Z	DB 5786 H	3.502.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
21	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter MX	DB 5788 H	3.001.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
22	Sepeda Motor	Yamaha / New Jupiter Z	DB 5799 H	2.900.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
23	Sepeda Motor	Yamaha / vega 5D9	DB 5696 H	1.550.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
24	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R 4D7	DB 5523 H	2.275.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
25	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter MX 2S6	DB 5741 H	1.800.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
26	Sepeda Motor	Honda / NC11B3C A/T	DB 5877 H	4.233.333,00	SK No. 324 Tahun 2023
27	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter Z-CW	DB 5883 H	4.009.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
28	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter MX	DB 5710 H	2.050.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
29	Sepeda Motor	Yamaha/Jupiter Z-CW	DB 5804 H	2.700.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
30	Sepeda Motor	Yamaha / Vega Z RD	DB 5712 H	1.846.890,00	SK No. 324 Tahun 2023
31	Sepeda Motor	Yamaha / Vega ZR	DB 5028 HA	3.289.990,00	SK No. 324 Tahun 2023
32	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro	DB 2306 H	3.110.909,00	SK No. 324 Tahun 2023
33	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro	DB 2305 H	4.222.222,00	SK No. 324 Tahun 2023
34	Sepeda Motor	Yamaha / MIO GT	DB 2161 H	5.666.666,00	SK No. 324 Tahun 2023
35	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter MX	DB 5585 H	4.609.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
36	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	DB 5574 H	1.895.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
37	Sepeda Motor	Yamaha / Scorpio	DB 5700 H	4.100.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
38	Sepeda Motor	Yamaha / Scorpio	DB 5699 H	4.516.900,00	SK No. 324 Tahun 2023
39	Sepeda Motor	Yamaha / 5D9 (VEGA-ZR)	DB 5871 H	1.986.759,00	SK No. 324 Tahun 2023
40	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5795 H	2.700.000,00	SK No. 324 Tahun 2023

No.	Nama Barang	Merk	Nomor Polisi	Harga Jual (Rp)	Ket.
41	Sepeda Motor	Yupiter / 2S6 Yupiter MX	DB 5905 H	1.800.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
42	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5039 HA	2.500.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
43	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5041 HA	2.200.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
44	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5042 HA	2.200.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
45	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5043 HA	2.100.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
46	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5044 HA	2.400.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
47	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5045 HA	2.000.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
48	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5050 HA	2.199.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
49	Sepeda Motor	Suzuki / FL 125 SCDI	DB 5051 HA	1.896.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
50	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5720 H	4.000.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
51	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5714 H	2.000.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
52	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5719 H	1.650.099,00	SK No. 324 Tahun 2023
53	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5726 H	3.000.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
54	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5728 H	3.000.099,00	SK No. 324 Tahun 2023
55	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5734 H	1.679.999,00	SK No. 324 Tahun 2023
56	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5735 H	3.654.000,00	SK No. 324 Tahun 2023
57	Sepeda Motor	Yamaha / 2BJ	DB 2119 H	3.377.777,00	SK No. 324 Tahun 2023
58	Sepeda Motor	Yamaha / Xeon RC	DB 2246 H	2.800.009,00	SK No. 324 Tahun 2023
59	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter MX CW	DB 2332 H	4.232.323,00	SK No. 324 Tahun 2023
60	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter J	DB 5787 H	4.259.890,00	SK No. 425Tahun 2023
61	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	DB 5867 H	2.876.000,00	SK No. 425Tahun 2023
62	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	DB 5695 H	2.968.000,00	SK No. 425Tahun 2023
63	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MX	DB 5897 H	1.901.000,00	SK No. 425Tahun 2023
64	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z	DB 5898 H	2.602.000,00	SK No. 425Tahun 2023
65	Sepeda Motor	Yamaha / 2S6 (Jupiter MX)	DB 5692 H	3.000.009,00	SK No. 425Tahun 2023
66	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	DB 5708 H	2.964.005,00	SK No. 425Tahun 2023
67	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter Z RD	DB 5713 H	2.689.009,00	SK No. 425Tahun 2023
68	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MX	DB 5582 H	1.750.008,00	SK No. 425Tahun 2023
69	Sepeda Motor	Yamaha / Yupiter MX	DB 5584 H	1.985.009,00	SK No. 425Tahun 2023
70	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	DB 5705 H	3.135.000,00	SK No. 425Tahun 2023
Jumlah				692.927.872,00	